



Terakreditasi SINTA Peringkat 3
No : 21/E/KPT/2018

Vol 20 No 1 April 2021
ISSN 1412 - 6451
E-ISSN 2528 - 0430

Jurnal

Penelitian Kesejahteraan Sosial

Peran Dinas Sosial Kota Surabaya dalam Mendukung Program Pelayanan Kesehatan Bagi Lansia
The Role of the Surabaya City Social Service in Supporting Health Service Programs for the Elderly
(Rukmini, Oktarina, dan Astridya Paramita)

Strategi Masyarakat Miskin dalam Menghadapi Kerawanan Pangan di Desa Trimurti,
Kabupaten Bantul
Strategy of the Poor Villagers in Coping Food Insecurity in Trimurti Village, Bantul Regency
(Haris Nur Ashar dan Janianton Damanik)

Efek dari *Conditional Cash Transfer* pada Konsumsi dari *Temptation Goods*:
Bukti dari Program Keluarga Harapan di Indonesia
*The Effect of Conditional Cash Transfer on Temptation Goods Consumption:
Evidence from Program Keluarga Harapan in Indonesia*
(Bonar Partungkoan Simanjuntak dan Assoc. Prof. Yusuke Jinnai)

Pemberdayaan Sosial dalam Penanggulangan Kemiskinan:
Studi Peran Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Rumbai Jaya,
Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau
*Social Empowerment in Poverty Alleviation
Study on the Institutional Role of Village-Owned Enterprises in Rumbai Jaya Village,
Indragiri Hilir Regency, Riau Province*
(Muammar Alkadafi)

Literasi Wisata Lamalera dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat
di Lembata, Nusa Tenggara Timur
*Tourism Literacy of Lamalera in an Effort to Improve Community Welfare
in Lembata, East Nusa Tenggara*
(Marselus Robot dan Lasarus Jehamat)

Mengatasi Hambatan Tanpa Suara: Studi Eksploratif terhadap *Adversity Intelligence*
pada Individu Tuli
Coping the Obstacles in Silence: The Explorative Study of Adversity Intelligence of Deaf People
(Ristyane)

Penanganan Dampak Sosial dan Ekonomi Akibat Pandemi Covid 19
melalui Pendekatan Kewirausahaan Sosial
Studi: Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah (UKM)
*Handling Social and Economic Impact of Pandemic Covid 19
through Social Entrepreneurship Approach
Study: Empowerment of Small and Medium Enterprise (SME)*
(Aryan Torrido)

Pola Asuh Orang Tua pada Remaja Pelaku Klitih di D.I. Yogyakarta
Parent Patterns of Klitih Teenager in Yogyakarta
(Ahmad Riyadi, Hadi Suyono, dan Elli Nur Hayati)

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan
Pelayanan Kesejahteraan Sosial
(B2P3KS)

Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial

VOL 20 No 1 April 2021 : 1 - 102

Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial	VOL 20	No 1	Hal 1 - 102	Yogyakarta April 2021	ISSN 1412-6451 E-ISSN 2528-0430
---	-----------	---------	----------------	--------------------------	------------------------------------

Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial
Terakreditasi SINTA Peringkat 3 No : 21/E/KPT/2018
Volume 20 No 1 April 2021 ISSN 1412-6451, E-ISSN 2528-0430

Terbit tiga kali setahun pada bulan April, Agustus, dan Desember

diterbitkan

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan
Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS) Yogyakarta
(SK Kuasa Pengguna Anggaran B2P3KS Yogyakarta Nomor: 11 Tahun 2020)
Keputusan Kepala Bidang Dokumentasi PDII LIPI No. 12.360/JI.3.02/SK.ISSN/2001
PDII LIPI SK. No. 0005.25280430/JI.3/SK.ISSN/2016

Visi

Penelitian sebagai landasan ilmiah pembangunan kesejahteraan sosial

Misi

Sosialisasi hasil penelitian dan pengembangan kesejahteraan sosial
Apresiasi kerjasama antarlembaga dan komunitas ilmiah
Kontribusi bagi pengembangan ilmu kesejahteraan sosial

Penanggung Jawab: Kepala B2P3KS Yogyakarta

Mitra Bestari

Prof. Dr. Ir. Husein Avicenna Akil, M.Sc (Science, Technology and Innovation Policy,
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia)
Prof. Dr. Phil Janianton Damanik, M.Si (Pembangunan Sosial, Universitas Gadjah Mada)
Prof. Dr. Bambang Shergi Laksmono, M.Sc (Kesejahteraan Sosial, Universitas Indonesia)
Prof. Dr. Bagong Suyanto Drs., M.Si (Sosiologi, Universitas Airlangga)
Prof. Dr. Achmad Nurmandi, M.Sc (Kebijakan Publik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta)
Drs. Latiful Khuluq, M.A., BSW, Ph.D. (Kesejahteraan Sosial, UIN Sunan Kalijaga)
Dr. Harmona Daulay, S.Sos, M.Si (Sosiologi, Universitas Sumatera Utara)
Dwi Harsono, MPA, MA, Ph.D. (Evaluasi Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta)

Redaktur / Editor in Chief

Dr. Istiana Hermawati, M.Sos (Kesejahteraan Sosial) B2P3KS

Dewan Redaksi / Editor

Dra. Elly Kuntjorowati, M.Si (Kesejahteraan Sosial) B2P3KS
Dra. Chatarina Rusmiyati, M.Si (Kesejahteraan Sosial) B2P3KS
Dr. Soetji Andari, M.Si (Kesejahteraan Sosial) B2P3KS
Dra. Trilaksmi Udiati (Kesejahteraan Sosial) B2P3KS
Dra. Sri Yuni Murtiwiidayanti (Kesejahteraan Sosial) B2P3KS
Dr. Astri Hanjarwati, M.A. (Kesejahteraan Sosial) B2P3KS

Desain Grafis / Layout Editor

Isneningtyas Yulianti, S.S., MA

Sekretariat

Dwi Astuti Andariyani, S.ST, MA
Dra. Sri Rahayu, M.Si

Jl. Kesejahteraan Sosial 1, Sonosewu, Yogyakarta
Tromol Pos 65 Kode Pos 55002, Telpon (0274) 377265 Fax. (0274) 373530
e-mail: jpkisy.yogyakarta@kemsos.go.id
portal web: <https://ejournal.kemsos.go.id/index.php?journal=jpks>

Percetakan:

Ash-Shaff

Isi di luar tanggung jawab percetakan

**Ketentuan Penulisan Naskah
Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial (JPKS)**

Materi dan jenis tulisan:

1. Miniaturisasi dari hasil penelitian.
2. Ulasan terhadap hasil penelitian untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan hasil implikasinya bagi perorangan, kelompok, dan masyarakat.
3. Hasil sampingan (by research) penelitian.

Topik dan Substansi Tulisan:

1. Bidang sosial, terutama bidang kesejahteraan sosial (misalnya: kemiskinan, kecacatan fisik dan mental, keterlantaran, ketunasosialan, ketunasusilaan, korban bencana, perencanaan dan pemberdayaan sosial, dan permasalahan lain yang berkaitan dengan orang dan masyarakat yang menghadapi keterbatasan sosial)
2. Deskripsi permasalahan sosial, meliputi pengungkapan fakta yang ada, prediksi permasalahan implikasinya bagi perorangan, kelompok, dan masyarakat dan konsep model dalam upaya pemecahan masalah kesejahteraan sosial berpijak pada hasil pengamatan intens dan penelitian.

Teknik Penyajian:

1. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik, benar, dan baku.
2. Proporsi penyajian; (a) Panjang judul tidak lebih dari dua baris ditulis dalam bahasa Indonesia dan Inggris (b) Abstrak ditulis dalam satu alinea, dalam bahasa Inggris dan Indonesia, bahasa Indonesia maksimal 250 kata, bahasa Inggris 150-200 kata, ditulis dalam besaran huruf (font) Times New Roman 10 lebih kecil dari besaran huruf batang tubuh (font Times New Roman 12) (c) kata kunci setelah abstrak ditulis minimal tiga kata, maksimal lima kata.
3. Penyajian tabel atau bagan alur (flowchart) tidak lebih 25% dari panjang tulisan. Tabel dibuat tanpa garis vertikal.
4. Pustaka Acuan yang digunakan paling lama lima tahun sejak dibuatnya artikel dan ditulis dalam font lebih kecil (Times New Roman 10) dari batang tubuh (Times New Roman 12). Pustaka acuan ditulis berdasarkan gaya penulisan APA (American Psychological Association) dengan pola: Nama Belakang Pengarang, Inisial (kecuali nama orang Indonesia), tahun penerbitan ditulis dalam kurung, Judul buku (Edisi jika edisinya lebih dari satu), tempat diterbitkan: Penerbit. Contoh: Norvig, Karen. (2013). An Introduction to Social Welfare. New York: Graw Hill.
5. Sistematika tulisan tersusun dalam: a. Judul (Indonesia dan Inggris); b. Nama penulis; c. Biodata penulis (nama lembaga, alamat lembaga dan Email); d. Abstrak (dalam bahasa Inggris dan Indonesia); e. Pendahuluan; f. Penggunaan Metode Penelitian; g. Hasil dan Pembahasan (ditulis dalam judul sesuai dengan topik dan lokasi penelitian); h. Penutup yang terdiri atas kesimpulan dan rekomendasi (apabila diperlukan); i. Pustaka Acuan.

Panjang Tulisan:

1. Antara 10 sampai dengan 25 halaman (2.500 s.d. 6.000 kata, tidak termasuk abstrak)
2. Diketik 1,5 spasi di atas kertas kuarto (A4)
3. Menggunakan tipe huruf (font) Times New Roman 14 untuk judul, Times New Roman 12 untuk batang tubuh tulisan, dan Times New Roman 10 untuk catatan kaki (foot note), sumber di bawah tabel, dan pustaka acuan.
4. Redaksi berhak mengubah naskah yang masuk untuk diterbitkan, tanpa mengubah esensi materi yang disampaikan, dan mengatur urutan pemuatan naskah menurut pertimbangan aktualitas serta kesesuaian naskah dengan misi penerbitan.
5. Naskah yang dimuat diberi imbalan, sedang yang tidak dapat dimuat dikirim kembali ke alamat penulis.

Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial
Volume 20 No 1 April 2021
ISSN 1412 - 6451
E-ISSN 2528-0430

Daftar Isi

1. Peran Dinas Sosial Kota Surabaya dalam Mendukung Program Pelayanan Kesehatan Bagi Lansia 1 - 12
The Role of the Surabaya City Social Service in Supporting Health Service Programs for the Elderly
Rukmini, Oktarina, dan Astridya Paramita
2. Strategi Masyarakat Miskin dalam Menghadapi Kerawanan Pangan di Desa Trimurti, Kabupaten Bantul 13 - 30
Strategy of the Poor Villagers in Coping Food Insecurity in Trimurti Village, Bantul Regency
Haris Nur Ashar dan Janianton Damanik
3. Efek dari *Conditional Cash Transfer* pada Konsumsi dari *Temptation Goods*: Bukti dari Program Keluarga Harapan di Indonesia 31 - 40
The Effect of Conditional Cash Transfer on Temptation Goods Consumption: Evidence from Program Keluarga Harapan in Indonesia
Bonar Partungkoan Simanjuntak dan Assoc. Prof. Yusuke Jinnai
4. Pemberdayaan Sosial dalam Penanggulangan Kemiskinan: Studi Peran Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Rumbai Jaya, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau 41 - 50
Social Empowerment in Poverty Alleviation Study on the Institutional Role of Village-Owned Enterprises in Rumbai Jaya Village, Indragiri Hilir Regency, Riau Province
Muammar Alkadafi
5. Literasi Wisata Lamalera dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Lembata, Nusa Tenggara Timur 51 - 62
Tourism Literacy of Lamalera in an Effort to Improve Community Welfare in Lembata, East Nusa Tenggara
Marselus Robot dan Lasarus Jehamat
6. Mengatasi Hambatan Tanpa Suara: Studi Eksploratif terhadap *Adversity Intelligence* pada Individu Tuli 63 - 76
Coping the Obstacles in Silence: The Explorative Study of Adversity Intelligence of Deaf People
Ristyane

7. Penanganan Dampak Sosial dan Ekonomi Akibat Pandemi Covid 19 melalui Pendekatan Kewirausahaan Sosial 77 - 90
Studi: Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah (UKM)
Handling Social and Economic Impact of Pandemic Covid 19 Through Social Entrepreneurship Approach
Study: Empowerment of Small and Medium Enterprise (SME)
Aryan Torrido
8. Pola Asuh Orang Tua pada Remaja Pelaku Klitih di D.I. Yogyakarta 91 - 102
Parent Patterns of Klitih Teenager in Yogyakarta
Ahmad Riyadi, Hadi Suyono, dan Elli Nur Hayati

EDITORIAL

Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Volume 20 No. 1 April 2021, hadir di tengah Pandemi Covid 19. Meskipun tak banyak artikel yang berisikan kajian mengenai pandemic covid 19, namun artikel yang terseleksi telah mampu mewakili kajian mengenai situasi sosial dan kajian mengenai kesejahteraan sosial masyarakat. Edisi kali ini dibuka dengan tulisan yang berjudul “Peran Dinas Sosial Kota Surabaya Dalam Mendukung Program Pelayanan Kesehatan Bagi Lansia” yang ditulis oleh Rukmini dkk. Tulisan ini menganalisis peran Dinas Sosial dalam mendukung program pelayanan kesehatan pada Lansia di Kota Surabaya. Tulisan kedua berjudul “Strategi Masyarakat Miskin dalam Menghadapi Kerawanan Pangan di Desa Trimurti, Kabupaten Bantul”, yang ditulis oleh Haris Nur Ashar. Tulisan ini menggambarkan situasi kerawanan pangan dan bagaimana strategi masyarakat desa trimurti menghadapinya. Selanjutnya, Tulisan ketiga berjudul “Efek dari *Conditional Cash Transfer* Pada Konsumsi dari *Temptation Goods*: Bukti dari Program Keluarga Harapan di Indonesia”, yang ditulis oleh Bonar Partungkoan Simanjuntak dan Assoc. Prof. Yusuke Jinnai. Tulisan tersebut meneliti efek dari penerapan Program Keluarga Harapan, sebuah program kebijakan CCT yang dirancang secara khusus di Indonesia, terhadap konsumsi dari beberapa macam *temptation goods*. Tulisan keempat ditulis oleh Muammar Alkadafi, berjudul “Pemberdayaan Sosial dalam Penanggulangan Kemiskinan: Studi Peran Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Rumbai Jaya, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau”. Tulisan ini ditujukan untuk mengetahui bentuk kegiatan dan kontribusi kelembagaan Bumdes dalam pemberdayaan masyarakat miskin. Tulisan kelima, ditulis oleh Marselus Robot, Lasarus Jehamat dengan judul “Literasi Wisata Lamalera dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Lembata, Nusa Tenggara Timur”. Tulisan ini berisi proses penangkapan ikan paus yang secara tradisional ternyata tidak hanya menggambarkan relasi sosial-spiritual masyarakat dengan laut, tetapi juga memiliki peran dan fungsi kesejahteraan. Untuk mencapai tujuan itu, literasi wisata Lamalera menulis pokok-pokok penting aspek pariwisata. Tulisan berikutnya ditulis oleh Ristiane dengan judul “Mengatasi Hambatan Tanpa Suara: Studi Eksploratif terhadap *Adversity Intelligence* pada Individu Tuli”. Tulisan ini menelusuri kemampuan individu dalam mengatasi hambatan yang muncul karena kondisi tuli tersebut, serta untuk mengetahui faktor apa saja yang dapat mendukung dan menghambat individu tuli dalam menjalani kegiatan sehari-hari. Tulisan ketujuh, merupakan karya Aryan Torrido yang menjadi satu-satunya tulisan dengan tema pandemi covid 19. Judul tulisan tersebut adalah “Penanganan Dampak Sosial dan Ekonomi Akibat Pandemi Covid 19 melalui Pendekatan Kewirausahaan Sosial Studi: Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah (UKM)”. Tulisan ini memberikan gambaran mengenai dampak sosial dan ekonomi pandemi Covid-19 dan memberikan alternatif strategi penanggulangan dengan pendekatan kewirausahaan sosial. Tulisan terakhir atau kedelapan berjudul “Pola Asuh Orang Tua pada Remaja Pelaku Klitih di D.I. Yogyakarta” yang ditulis oleh Ahmad Riyadi. Hasil kajian tulisan ini salah satunya menunjukkan pola asuh orang tua terhadap remaja pelaku klitih adalah pola asuh permisif, yang mana orang tua membiarkan, memanjakan, dan tidak mengawasi keseharian anak di rumah maupun sekolah, sehingga tidak mengetahui perkembangan mereka.

Dari Redaksi

Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial

ISSN 1412 - 6451
E-ISSN 2528 - 0430

Vol 20 No 1 April 2021

Kata Kunci bersumber dari artikel. Lembar abstrak ini boleh digandakan tanpa ijin dan biaya.
Keywords are based from articles. Abstract may be reproduced without permission and cost.

Rukmini¹, Oktarina¹ dan Astridya Paramita¹ (¹Puslitbang Humaniora dan Manajemen Kesehatan, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI)
Kinerja Peran Dinas Sosial Kota Surabaya dalam Mendukung Program Pelayanan Kesehatan Bagi Lansia

The Role of the Surabaya City Social Service in Supporting Health Service Programs for the Elderly

Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 20 No 1 April 2021, hal 1 - 12

The percentage of elderly population in Indonesia in five decades (1971-2017), has increased about twofold, namely 8.97 percent (23.4 million people). The number of elderly people in East Java is in the third rank of 12.16% in Indonesia, while in the City of Surabaya it reaches 227,527 people (7.90 percent). A special program for the elderly for their survival in order to stay healthy and productive is needed. This study aims to analyze the role of the Social Service in supporting health service programs for the elderly in the city of Surabaya. The method used is qualitative research with a case study approach. Data collection through in-depth interviews and focus group discussions. The results showed that the policies and regulations related to the welfare and health of the elderly were available and implemented through the social service program by the Surabaya City Social Service. The program is in the form of providing food, gymnastics, family building for the elderly, training or technical entrepreneurship guidance and UPTD Griya Wredha. The implementation of the program did not encounter any significant obstacles because the Mayor of Surabaya's commitment was very high, so that the City of Surabaya received the title as Senior Friendly City. The Social Service plays a very important role in supporting health services, both in collaboration with the Health Office,

Persentase penduduk lanjut usia di Indonesia dalam lima dekade (1971-2017), meningkat sekitar dua kali lipat yaitu 8,97 persen (23,4 juta jiwa). Jumlah Lansia di Jawa Timur menempati peringkat ketiga sebesar 12,16% di Indonesia, sedangkan di Kota Surabaya mencapai 227.527 jiwa (7,90 persen). Program khusus bagi Lansia untuk kelangsungan hidupnya agar tetap sehat dan produktif sangat dibutuhkan. Studi ini bertujuan untuk menganalisis peran Dinas Sosial dalam mendukung program pelayanan kesehatan pada Lansia di Kota Surabaya. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan *focus grup discussion*. Hasil penelitian menunjukkan perangkat kebijakan dan regulasi terkait kesejahteraan dan kesehatan Lansia telah tersedia dan diimplementasikan melalui program pelayanan sosial oleh Dinas Sosial Kota Surabaya. Program tersebut berupa pemberian permakanan, senam, bina keluarga lanjut usia, latihan atau bimbingan teknis kewirausahaan dan UPTD Griya Wredha. Pelaksanaan program tidak mendapatkan hambatan yang berarti karena komitmen Walikota Surabaya sangat tinggi, sehingga Kota Surabaya mendapatkan predikat sebagai Kota Ramah Lansia. Dinas Sosial sangat berperan dalam mendukung pelayanan bidang kesehatan,

Puskesmas, Posyandu for the Elderly and in cross-sector partnership activities through Elderly Friendly Cities. It takes commitment, partisanship and high concern as well as adequate funding support from the local government for the success of the welfare service program for the elderly, as shown by the City of Surabaya.

Keywords: Social Service, Policy, Elderly Health Service

baik dalam kegiatan kerjasama dengan Dinas Kesehatan, Puskesmas, Posyandu Lansia dan kegiatan kemitraan lintas sektor melalui Kota Ramah Lansia. Diperlukan komitmen, keberpihakan dan kepedulian yang tinggi serta dukungan alokasi dana yang memadai dari pemerintah daerah untuk keberhasilan program pelayanan kesejahteraan Lansia, seperti yang telah ditunjukkan oleh Kota Surabaya.

Kata Kunci: Dinas Sosial, Kebijakan, Kesehatan Lansia

Haris Nur Ashar dan Janianton Damanik (Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta)
Strategi Masyarakat Miskin Dalam Menghadapi Kerawanan Pangan di Desa Trimurti, Kabupaten Bantul

Strategy of the Poor Villagers in Coping Food Insecurity in Trimurti Village, Bantul Regency
Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 20 No 1 April 2021, hal 13 - 30

One of the goals of the SDGs is to end hunger, achieve food security, improve nutrition, and promote sustainable agriculture. However, until now this goal is far from ideal. The problem of food insecurity still occurs in both big cities and villages. One indicator is the food security subsystem which is not yet available. In this condition, the poor face two problems at once, namely food insecurity and family economic problems. This research focuses on the strategies applied by the poor in Trimurti Village in overcoming the existing food insecurity. The method used is qualitative so that a clear picture of the strategies of the poor in dealing with food insecurity can be obtained. The data was collected through in-depth interviews, observation, and documentation which were processed and tested for their validity using the triangulation method. The results showed that the strategy taken by the poor in dealing with food insecurity was to change their diet, change their work patterns, and go into debt, either foodstuffs or money.

Keywords: survival strategy, food insecurity, family food security strategy, Trimurti Village.

Salah satu tujuan dari SDGs adalah mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, meningkatkan gizi, dan mendorong pertanian yang berkelanjutan. Namun, hingga saat ini tujuan tersebut masih jauh dari ideal. Masalah kerawanan pangan masih terjadi baik di kota besar maupun di desa. Salah satu indikatornya adalah subsistem ketahanan pangan yang belum tersedia. Dalam kondisi seperti ini, masyarakat miskin menghadapi dua masalah sekaligus, yaitu rawan pangan dan masalah ekonomi keluarga. Penelitian ini menitikberatkan pada strategi yang diterapkan oleh masyarakat miskin di Desa Trimurti dalam mengatasi kerawanan pangan yang ada. Metode yang digunakan adalah kualitatif sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai strategi masyarakat miskin dalam menghadapi kerawanan pangan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi yang diolah dan diuji validitasnya dengan metode triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang diambil oleh masyarakat miskin dalam menghadapi kerawanan pangan adalah dengan mengubah pola makan, mengubah pola kerja, dan berhutang baik bahan makanan atau uang.

Kata kunci: strategi bertahan hidup, kerawanan pangan, strategi ketahanan pangan keluarga, Desa Trimurti.

Bonar Partungkoan Simanjuntak¹ dan Assoc. Prof. Yusuke Jinnai² (¹Departement of Economics, Faculty of Economics and Business, University of Indonesia, ²Graduate School of International Relations, Faculty of Professions, International University of Japan)
Efek dari *Conditional Cash Transfer* pada Konsumsi dari *Temptation Goods*: Bukti dari Program Keluarga Harapan di Indonesia
The Effect of Conditional Cash Transfer on Temptation Goods Consumption: Evidence From Program Keluarga Harapan in Indonesia
Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 20 No 1 April 2021, hal 31 - 40

Conditional Cash Transfer (CCT) has become a well-known policy utilized by governments in many countries to serve as a safety net for low income people. However, several previous studies found that the increase of income from CCT has a negative side effect, which is the increase of the total consumption of temptation goods. This study aims to examine the effect of the application of Program Keluarga Harapan, a specific CCT program which was devised in Indonesia, to the consumption of several kind of temptation goods. The data about the total value of CCT received by the poor and the total consumption of temptation goods were obtained from IFLS, a panel survey which is representative at the country level. This study utilizes the fixed effect model and finally are able to find that an increase of about 100,000 Indonesia rupiah will decrease the consumption of tobacco by 10.9 percent. This study contributes to the literature by estimating the rupiah value of CCT.

Keywords: Conditional Cash Transfer (CCT); temptation goods; Fixed Effect; Program Keluarga Harapan ; Indonesia

Conditional Cash Transfer (CCT) telah menjadi kebijakan populer yang digunakan oleh pemerintah di berbagai negara untuk digunakan sebagai jaring pengaman bagi penduduk berpenghasilan rendah. Akan tetapi, beberapa artikel sebelumnya telah menemukan bahwa peningkatan pendapatan yang berasal dari CCT memiliki efek samping yang negatif, yaitu peningkatan total konsumsi dari temptation goods. Artikel ini memiliki tujuan untuk meneliti efek dari penerapan Program Keluarga Harapan, sebuah program kebijakan CCT yang dirancang secara khusus di Indonesia, terhadap konsumsi dari beberapa macam temptation goods. Data yang berisikan jumlah nilai CCT yang diperoleh oleh penduduk miskin dan jumlah konsumsi dari beberapa macam temptation goods diperoleh dari IFLS, sebuah data survey panel yang dapat mewakili level negara. Artikel ini menggunakan model fixed effect dan pada akhirnya artikel ini berhasil menemukan bahwa untuk sebuah peningkatan sekitar 100,000 rupiah akan mengurangi total konsumsi dari tembakau sebesar 10.9 persen. Artikel ini berkontribusi terhadap literatur yang ada dengan melakukan estimasi pengaruh setiap nilai rupiah dari kebijakan CCT.

Kata Kunci: Conditional Cash Transfer (CCT); temptation goods; Fixed Effect; Program Keluarga Harapan ; Indonesia

Muammar Alkadafi dan Rusdi (Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau)

Pemberdayaan Sosial dalam Penanggulangan Kemiskinan

Studi Peran Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Rumbai Jaya, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau

Social Empowerment in Poverty Alleviation

Study on the Institutional Role of Village-Owned Enterprises in Rumbai Jaya Village, Indragiri Hilir Regency, Riau Province

Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 20 No 1 April 2021, hal 41 - 50

The Indragiri Hilir Regency Government has designated a business entity owned by the village of Lancang Kuning, Rumbai Jaya village as a successful village-owned enterprise, seen from the perspective of income and institutional assets. Village-owned enterprises Lancang Kuning has not played a role in empowering the poor. The research objective was to determine the form of Bumdes activities in empowering the poor, knowing the institutional contribution of Bumdes in community empowerment activities. This study used a qualitative method with a descriptive approach, data collection was carried out by means of observation, in-depth interviews and documentation, The determination of informants was carried out purposively, and the data were analyzed by data reduction, data display / presentation, and drawing conclusions. The result of the research shows that Lancang Kuning village-owned enterprises, Rumbai Jaya village, has been functioning and contributing to increasing community household businesses, creating jobs, increasing village people's income and village income. This study recommends that the village government and the management of village-owned enterprises are expected to optimize the management of village assets that have not been managed, the central and local governments need to conduct training in human resource development (HR) to Bumdes managers on an ongoing basis and the community related to social entrepreneurship. .

Keywords: *empowerment; social; institutional; Village Owned Enterprises; poor community.*

Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir menetapkan badan usaha milik Desa Lancang Kuning Desa Rumbai Jaya sebagai badan usaha milik desa (Bumdes) yang berhasil, dilihat dari sisi pendapatan dan aset kelembagaan. Badan usaha milik Desa Lancang Kuning belum berperan melakukan pemberdayaan masyarakat miskin. Tujuan penelitian ialah untuk mengetahui bentuk kegiatan dan kontribusi kelembagaan Bumdes dalam pemberdayaan masyarakat miskin. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi, penentuan informan dilakukan secara *purposive*, data dianalisis dengan reduksi data, *display*/penyajian data, dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian, badan usaha milik Desa Lancang Kuning Desa Rumbai Jaya telah berfungsi dan memberikan kontribusi meningkatkan usaha-usaha rumah tangga masyarakat, membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa. Penelitian ini merekomendasikan, pemerintahan desa dan pengelola badan usaha milik desa diharapkan dapat mengoptimalkan pengelolaan aset-aset desa yang belum terkelola, pemerintah pusat dan daerah perlu melakukan pelatihan pengembangan sumber daya manusia (SDM) kepada pengelola Bumdes secara terus menerus dan masyarakat terkait dengan kewirausahaan sosial.

Kata Kunci: *pemberdayaan; sosial; kelembagaan; Badan Usaha Milik Desa; masyarakat miskin.*

Marselus Robot¹, Lasarus Jehamat², dan Yohanes Fiser Keon³ (¹Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP Undana, ²Jurusan Sosiologi Fisip Undana, ³Jurusan Ilmu Politik Fisip Undana, Jalan Adisucipto, Penfui Kupang NTT)

Literasi Wisata Lamalera dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Lembata, Nusa Tenggara Timur

Tourism Literacy of Lamalera in an Effort to Improve Community Welfare in Lembata, East Nusa Tenggara

Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 20 No 1 April 2021, hal 51 - 62

Tourism literacy is motivated by the fact that tourism has only prioritized physical aspects. In fact, tourism is not only related to beautiful scenery. Tourism is related to the element of tourism depth. Therefore, culture-based tourism is important to research. As an international tourist destination, Lamalera is still considered mysterious. In fact, the traditional whaling process does not only illustrate the socio-spiritual relationship of society with the sea but also has a role and function of welfare. To achieve this goal, the tourism literacy of Lamalera writes the important points of the tourism aspect. This study was conducted in Lamalera using qualitative research methods. The data were collected using observation and interview techniques. The results showed that tourism literacy in improving welfare is very urgent. The people of Lamalera want people outside Lamalera to know and understand that Lamalera has tourism potential, cultural strength, and local virtues in the whaling process. In this connection, aspects of attractions, accessibility, amenities and accommodation are being built there. Cooperation of all parties is needed so that the community maintains tourism based on local wisdom.

Keywords: *Lamalera, whales, welfare, tourism*

Literasi wisata dilatarbelakangi oleh sebuah kenyataan bahwa pariwisata selama ini hanya mengedepankan aspek fisik lahiriah semata. Padahal, pariwisata tidak hanya berhubungan dengan pemandangan indah. Pariwisata berkaitan dengan unsur kedalaman wisata. Oleh karena itu, wisata berbasis budaya penting untuk diteliti. Sebagai sebuah destinasi wisata internasional, Lamalera masih dianggap misterius. Proses penangkapan ikan paus secara tradisional ternyata tidak hanya menggambarkan relasi sosial-spiritual masyarakat dengan laut tetapi juga memiliki peran dan fungsi kesejahteraan. Untuk mencapai tujuan itu, literasi wisata Lamalera menulis pokok-pokok penting aspek pariwisata. Kajian ini dilakukan di Lamalera menggunakan metode penelitian kualitatif. Data diambil menggunakan teknik observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan literasi wisata dalam peningkatan kesejahteraan sangat urgen. Masyarakat Lamalera menginginkan masyarakat di luar Lamalera mengetahui dan memahami bahwa Lamalera memiliki potensi wisata, kekuatan budaya, dan keutamaan lokal dalam melakukan proses penangkapan ikan paus. Berkaitan dengan itu, aspek-aspek atraksi, aksesibilitas, amenities, dan akomodasi sedang dibangun di sana. Kerja sama semua pihak dibutuhkan agar masyarakat tetap mempertahankan wisata berbasis kearifan lokal tersebut.

Kata kunci: *Lamalera, paus, kesejahteraan, pariwisata*

Riestyane¹, Retno Hanggarani Ninin², Ahmad Gimmy Prathama Siswadi³ (^{1,2,3}Program Studi Magister Psikologi Profesi, Fakultas Psikologi, Universitas Padjadjaran)

Mengatasi Hambatan Tanpa Suara: Studi Eksploratif terhadap *Adversity Intelligence* pada Individu Tuli

Coping the Obstacles in Silence: The Explorative Study of Adversity Intelligence of Deaf People

Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 20 No 1 April 2021, hal 63 - 76

Deaf people's difficulties, related to the ability to speak and capture audio information normally, raises several obstacles such as emotional instability and the way to communicate with hearing people. Some of them found it difficult, but some others have a good ability to overcome these obstacles, which is called adversity intelligence. This study aims to explore the ability of the deaf people to overcome the obstacles that arise due to the deaf condition, and also to find out what factors that may support and detain the Deaf people in carrying out their daily activities. This exploratory qualitative research involved respondents aged 18-40 years that are deaf since were born, using interview instruments and recorded documentation. The results of the descriptive analysis show that the main obstacle of Deaf people is not the physical problem itself, but rather to the economic factors and poor communication with others. Respondents responded this condition through efforts to find solutions (seeking job, communicating to others with the help of intermediaries or third persons) to increase the acceptance and resilience themselves. In addition to good adversity intelligence abilities, support system from the closest ones and the role of the government in facilitating the Deaf people's needs can be supporting factors that provide opportunities and positive impacts, while the limited access and difficulty understanding the lips of the hearing people are some of the inhibiting factors for the Deaf people. Further research is recommended to involve respondents with more variety of backgrounds, and also to communicate using sign language by researchers themselves.

Kesulitan individu Tuli terkait kemampuan berbicara dan menangkap informasi audio secara normal menimbulkan beberapa hambatan, seperti ketidakstabilan emosi, serta cara berkomunikasi dengan individu dengar (normal). Beberapa di antaranya mengalami kesulitan, namun beberapa lainnya memiliki kemampuan yang baik dalam mengatasi hambatan tersebut, dimana kemampuan ini disebut *adversity intelligence*. Penelitian ini bertujuan untuk menelusuri kemampuan individu Tuli dalam mengatasi hambatan yang muncul karena kondisi tuli tersebut, serta untuk mengetahui faktor apa saja yang dapat mendukung dan menghambat individu Tuli dalam menjalani kegiatan sehari-hari. Penelitian kualitatif eksploratif ini melibatkan responden berusia 18-40 tahun yang mengalami kondisi tuli sejak lahir, dengan menggunakan instrumen wawancara serta dokumentasi rekaman. Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa penghambat utama yang dialami individu Tuli bukanlah kondisi tuli secara fisik, melainkan faktor perekonomian serta komunikasi yang kurang lancar dengan orang lain. Responden menyikapi kondisi ini melalui upaya pencarian solusi (mencari pekerjaan, berkomunikasi dengan bantuan perantara atau orang ketiga) untuk meningkatkan penerimaan dan ketahanan diri sendiri. Selain kemampuan *adversity intelligence* yang baik, *support system* dapat menjadi pendukung berupa peluang dan dampak positif bagi individu Tuli, yaitu dari orang terdekat dan juga pemerintah yang turut berperan memfasilitasi kebutuhan individu Tuli di lingkungan masyarakat. Sementara itu, keterbatasan akses dan kesulitan memahami gerak bibir individu dengar merupakan beberapa faktor penghambat bagi individu

Key words : *adversity intelligence; Deaf; obstacles; exploratory.*

Tuli. Penelitian lebih lanjut direkomendasikan dapat melibatkan responden dengan latar belakang yang lebih variatif, serta melakukan komunikasi dengan menggunakan bahasa isyarat oleh peneliti langsung.

Kata kunci : *adversity intelligence; Tuli; hambatan; eksploratif.*

Aryan Torrido (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta)
Penanganan Dampak Sosial dan Ekonomi Akibat Pandemi Covid 19 melalui Pendekatan Kewirausahaan Sosial

Studi: Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah (UKM)

Handling Social and Economic Impact of Pandemic Covid 19 Through Social Entrepreneurship Approach

Study: Empowerment of Small and Medium Enterprise (SME)

Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 20 No 1 April 2021, hal 77 - 90

The Covid 19 pandemic that occurred in 2020 created a different economic crisis, the impact of the problems that were raised was more complex because it occurred in all countries at one time resolving the causes and impacts. This article seeks to provide an overview of the social and economic impacts of the Covid 19 pandemic and provide alternative coping strategies with a social entrepreneurship approach. The research method used is a literature review, conducting studies on writings related to the purpose of writing articles. As a result, the Covid 19 pandemic had a negative impact on worsening the economic condition of the State of Indonesia and increasing new poverty, but on the other hand there is a positive impact, namely the increase in the social piety of the Indonesian people and there are several businesses that made huge profits during the Covid 19 pandemic. So it is necessary to consider a coping strategy model that is can collaborate market, state, and aultrism which is offered in this article a coping model based on social entrepreneurship. This model recommends that large state-owned, private companies and all Indonesian Ministries play a role as social enterprises in maintaining the sustainability of their social programs.

Pandemi Covid 19 yang terjadi pada Tahun 2020 menciptakan krisis ekonomi berbeda pada semua negara, dan berdampak pada semua kategori usaha. Artikel ini berusaha memberikan gambaran mengenai dampak sosial dan ekonomi pandemi Covid-19 dan memberikan alternatif strategi penanggulangan dengan pendekatan kewirausahaan sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah *literature review*, dengan melakukan kajian terhadap tulisan-tulisan mengenai dampak pandemi dan kewirausahaan sosial, terdapat delapan artikel yang dianalisis. Hasilnya, pandemi Covid-19 memberikan dampak negatif memperburuk kondisi ekonomi Negara Indonesia dan meningkatkan kemiskinan baru, namun di sisi lain terdapat dampak positif yakni meningkatnya kesalehan sosial masyarakat Indonesia serta terdapat beberapa bisnis yang meraup keuntungan besar selama pandemi Covid-19. Perlu mempertimbangkan model strategi penanggulangan yang dapat mengkolaborasi pasar, negara, dan aultrisme atau kesalehan sosial yang ditawarkan dalam artikel ini sebuah model penanggulangan berbasis kewirausahaan sosial. Model ini merekomendasikan perusahaan besar milik negara, swasta, dan semua Kementerian Indonesia berperan sebagai *social enterprise*

Keywords: *impact; pandemic covid-19; social entrepreneurship*

dalam menjaga keberlanjutan program sosialnya.

Kata kunci: dampak; pandemi covid-19; kewirausahaan sosial

Ahmad Riyadi, Hadi Suyono, dan Elli Nur Hayati (Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta)

Implementasi Pola Asuh Orang Tua pada Remaja Pelaku *Klitih* di D.I. Yogyakarta

Parent Patterns of Klitih Teenager in Yogyakarta

Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 20 No 1 April 2021, hal 91 - 102

This study aims to determine the parenting styles of adolescents who perpetrated "klitih". This study uses a qualitative method with a phenomenological approach. The data collection technique used was in-depth interviews, and all interviews were recorded under the participant's consent. A semi structure interview guide was employed. The number of subjects who participated in this study were 8 subjects who were parents of the "klitih" perpetrators. Results of this study were analyzed using content analysis approach, and it was found that the parenting style were permissive indulgence and neglect. While the factors that influence that parenting style were low educational and socio-economic level, obtained through content analysis interpretation. The results showed that there were parenting styles for adolescent, permissive parenting; and 3) democratic parenting. There are four factors that influence parenting styles for adolescent adolescents, namely: 1) parental education; 2) environment; 3) economy; and 4) personality. This requires intense communication between the parents and the school, in this case counseling guidance teachers, community leaders, religious leaders, youth in the prevention of klitih behavior; and transformation parenting patterns from permissive to democratic.

Keywords: *teenager, child of the klitih, parenting styles*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola asuh orang tua pada remaja pelaku *klitih* dan faktor pendorong/penyebab pola asuh orang tua pada remaja pelaku *klitih*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur dan observasi tidak langsung. Subjek penelitian adalah delapan orang tua para remaja pelaku *klitih*. Analisis data mengacu pada model Miles dan Huberman, dimana data dikumpulkan, direduksi, ditampilkan, dan ditarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, pola asuh orang tua terhadap remaja pelaku *klitih* adalah pola asuh permisif, yang mana orang tua membiarkan, memanjakan, dan tidak mengawasi keseharian anak di rumah maupun sekolah, sehingga tidak mengetahui perkembangan mereka. Kedua, faktor pendorong/penyebab remaja melakukan *klitih* adalah pendidikan orang tua, lingkungan, ekonomi, dan kepribadian. Ini memerlukan komunikasi intens antara orang tua para remaja pelaku *klitih* dengan pihak sekolah, dalam hal ini guru bimbingan konseling, tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda setempat dalam pencegahan perilaku *klitih*, serta transformasi pola asuh dari permisif menjadi pola asuh demokratis.

Kata Kunci : remaja, pelaku *klitih*, pola asuh orang tua

Peran Dinas Sosial Kota Surabaya dalam Mendukung Program Pelayanan Kesehatan Bagi Lansia

The Role of the Surabaya City Social Service in Supporting Health Service Programs for the Elderly

Rukmini¹, Oktarina¹ dan Astridya Paramita¹

¹ Puslitbang Humaniora dan Manajemen Kesehatan, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan,
Kementrian Kesehatan RI, Jl. Percetakan Negara No. 29 Jakarta Indonesia 10560 Kotak Pos 4444 JKT 1400,
Telp (021) 4243314, Faksimili (021) 42871604

E-mail: imas_yatno@yahoo.co.id

Naskah diterima 17-4-2020 direvisi 18-3-2021 disetujui

Naskah diterima 17 April 2020, direvisi 18 Maret 2021, disetujui

Abstract

The percentage of elderly population in Indonesia in five decades (1971-2017), has increased about twofold, namely 8.97 percent (23.4 million people). The number of elderly people in East Java is in the third rank of 12.16% in Indonesia, while in the City of Surabaya it reaches 227,527 people (7.90 percent). A special program for the elderly for their survival in order to stay healthy and productive is needed. This study aims to analyze the role of the Social Service in supporting health service programs for the elderly in the city of Surabaya. The method used is qualitative research with a case study approach. Data collection through in-depth interviews and focus group discussions. The results showed that the policies and regulations related to the welfare and health of the elderly were available and implemented through the social service program by the Surabaya City Social Service. The program is in the form of providing food, gymnastics, family building for the elderly, training or technical entrepreneurship guidance and UPTD Griya Wredha. The implementation of the program did not encounter any significant obstacles because the Mayor of Surabaya's commitment was very high, so that the City of Surabaya received the title as Senior Friendly City. The Social Service plays a very important role in supporting health services, both in collaboration with the Health Office, Puskesmas, Posyandu for the Elderly and in cross-sector partnership activities through Elderly Friendly Cities. It takes commitment, partisanship and high concern as well as adequate funding support from the local government for the success of the welfare service program for the elderly, as shown by the City of Surabaya.

Keywords: Social Service, Policy, Elderly Health Service

Abstrak

Persentase penduduk lanjut usia di Indonesia dalam lima dekade (1971-2017), meningkat sekitar dua kali lipat yaitu 8,97 persen (23,4 juta jiwa). Jumlah Lansia di Jawa Timur menempati peringkat ketiga sebesar 12,16% di Indonesia, sedangkan di Kota Surabaya mencapai 227.527 jiwa (7,90 persen). Program khusus bagi Lansia untuk kelangsungan hidupnya agar tetap sehat dan produktif sangat dibutuhkan. Studi ini bertujuan untuk menganalisis peran Dinas Sosial dalam mendukung program pelayanan kesehatan pada Lansia di Kota Surabaya. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan *focus grup discussion*. Hasil penelitian menunjukkan perangkat kebijakan dan regulasi terkait kesejahteraan dan kesehatan Lansia telah tersedia dan diimplementasikan melalui program pelayanan sosial oleh Dinas Sosial Kota Surabaya. Program tersebut berupa pemberian permakanan, senam, bina keluarga lanjut usia, latihan atau bimbingan teknis kewirausahaan dan UPTD Griya Wredha. Pelaksanaan program tidak mendapatkan hambatan yang berarti karena komitmen Walikota Surabaya sangat tinggi, sehingga Kota Surabaya mendapatkan predikat sebagai Kota Ramah Lansia. Dinas Sosial sangat berperan dalam mendukung pelayanan bidang kesehatan, baik dalam kegiatan kerjasama dengan Dinas Kesehatan, Puskesmas, Posyandu Lansia dan kegiatan kemitraan lintas sektor melalui Kota Ramah Lansia. Diperlukan komitmen, keberpihakan dan kepedulian yang tinggi serta dukungan alokasi dana yang memadai dari pemerintah daerah untuk keberhasilan program pelayanan kesejahteraan Lansia, seperti yang telah ditunjukkan oleh Kota Surabaya.

Kata Kunci: Dinas Sosial, Kebijakan, Kesehatan Lansia

Pendahuluan

Keberhasilan pencapaian pembangunan nasional ditandai dengan perbaikan kualitas kesehatan masyarakat yang berdampak pada meningkatnya usia harapan hidup, tercermin dari semakin meningkatnya jumlah penduduk lanjut usia atau Lansia. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia Penduduk Lanjut Usia adalah penduduk berumur 60 tahun ke atas (Republik Indonesia, 1998).

Persentase penduduk Lansia di Indonesia meningkat sekitar dua kali lipat (1971-2017) yaitu 8,97 persen (23,4 juta), dimana Lansia perempuan (9,47%) lebih banyak dibandingkan Lansia laki-laki (8,48%). Pada tahun ini sudah ada lima provinsi yang memiliki struktur penduduk tua yang mana penduduk Lansianya sudah mencapai 10 persen yaitu DI Yogyakarta (13,90%), Jawa Tengah (12,46%), Jawa Timur (12,16%), Bali (10,79%) dan Sulawesi Barat (10,37%). Jumlah penduduk Lansia (lanjut usia) di Indonesia terus bertambah setiap tahun, hingga pertengahan tahun 2019, mencapai 25 juta jiwa atau lebih dari 9% jumlah penduduk Indonesia (BPS RI, 2018).

Jawa Timur mempunyai persentase penduduk Lansia di perkotaan sebesar 11,66 persen dan di perdesaan sebesar 13,50 persen. Proporsi penduduk Lansia terbesar berada di Kota Surabaya yaitu sebesar 7,90 persen dari total populasi 2.848.583 jiwa. Kondisi ini menjadikan Kota Surabaya masuk sebagai kota dengan kategori berpenduduk tua (BPS RI, 2018).

Peningkatan jumlah Lansia juga diikuti dengan Usia Harapan Hidup (UHH) yang juga meningkat (Amalia, Ni'mal, & Mury, 2014). Upaya peningkatan kualitas hidup Lansia perlu dipahami sebagai kebutuhan spesifik Lansia dengan memenuhi kebutuhan fisik, psikis dan kebutuhan sosial (Kiik, Sahar, & Permatasari, 2018). Untuk menangani permasalahan Lansia diperlukan tindakan nyata untuk meningkatkan kualitas hidup Lansia agar para Lansia tetap

sejahtera secara lahir maupun bathin. Untuk itu diperlukan kepedulian berbagai pihak, baik dari pemerintah, lembaga swasta, masyarakat dan dari keluarga Lansia sendiri.

Pemerintah Kota Surabaya bersama Dinas Sosial Kota Surabaya telah membuat kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup Lansia melalui beberapa program bagi Lansia sangat miskin dan terlantar, yang pelaksanaannya sesuai dengan Peraturan Walikota Surabaya. Dinas Sosial Kota Surabaya mempunyai bidang rehabilitasi sosial yang membawahi 2 seksi yaitu (1)seksi rehabilitasi tuna sosial anak dan Lansia; (2) Seksi rehabilitasi sosial daerah kumuh dan penyandang cacat. Selain itu Dinas social juga memiliki kebijakan dan regulasi terkait penyelenggaraan program Lansia yang menjadi acuan program Dinas Sosial Kota Surabaya. Pelaksanaan program pelayanan kesejahteraan sosial, Dinas Sosial bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Posyandu Lansia dalam mendukung pelayanan kesehatan bagi Lansia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengkaji peran Dinas Sosial Kota Surabaya dalam mendukung program pelayanan kesehatan bagi Lansia.

Penggunaan Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis peran Dinas Sosial dalam mendukung program pelayanan kesehatan pada Lansia. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dan *focus groups discussion*. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Surabaya dan Kepala Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial Anak dan Lansia serta staf, untuk memberikan informasi tentang program pelayanan dan perlindungan Lansia yang dilakukan oleh Dinas Sosial. Informan lainnya adalah Kepala Bidang Kesehatan

Masyarakat dan Kasi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat (KGM) Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dan Dinas Kesehatan Kota Surabaya untuk memberikan informasi tentang program pelayanan kesehatan pada Lansia yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan. Jumlah informan seluruhnya berjumlah 8 orang. Pengumpulan data dilakukan juga dengan telaah dokumen kebijakan dan regulasi terkait. Analisis data secara deskriptif untuk menggambarkan pelaksanaan program.

Hasil Dan Pembahasan

1. Kebijakan Program Lansia

Dinas Sosial Kota Surabaya dalam penyelenggaraan program Lansia, mempunyai seksi yang menangani tentang Lansia yaitu seksi rehabilitasi tuna sosial anak dan Lansia. Demikian pula telah ada kebijakan dan regulasi yang menjadi acuan, sebagai berikut :

- a. Peraturan Daerah Kota Surabaya No.3 tahun 2014 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, Pasal 5, menyatakan setiap Lansia memiliki hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan yang maha Esa. Untuk meningkatkan kesejahteraan Lansia berhak mendapatkan pelayanan keagamaan dan mental spiritual; pelayanan kesehatan; pelayanan pendidikan dan pelatihan; kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum; kemudahan dalam layanan bantuan hukum; perlindungan sosial; bantuan sosial. pada Pasal 7. Peningkatan kesejahteraan sosial Lansia menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah Daerah, keluarga dan masyarakat sesuai dengan kewenangan dan kapasitas masing-masing.
- b. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Bangunan, pada Pasal 27 menyampaikan kemudahan hubungan ke dan dari di dalam bangunan gedung meliputi tersedianya fasilitas dan aksesibilitas yang mudah, aman, dan nyaman bagi disabilitas dan Lansia

- c. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 9 Tahun 2015 tentang Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin yang Dibiayai APBD Kota Surabaya, sasaran dari peraturan walikota tersebut termasuk didalamnya lanjut usia miskin.
- d. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 58 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Perlengkapan Pemakaman Bagi Keluarga Miskin Kota Surabaya, sebagai sasaran peraturan walikota tersebut termasuk lanjut usia.
- e. Keputusan Walikota Surabaya No.188.45/226/436.1.2/2017 tentang Komisi Daerah Lanjut Usia Masa Jabatan Tahun 2017 -2019.
Dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial Lanjut usia di Kota Surabaya dan dalam rangka pelaksanaan ketentuan pusat, Pasal 2, ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 60 tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Komisi Daerah Lanjut Usia dan Pemberdayaan Masyarakat dalam penanganan lanjut usia di daerah dan Perda No. 3 tahun 2014 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, perlu dibentuk komisi daerah lanjut usia di Kota Surabaya dengan keputusan kepala daerah.
- f. Peraturan Walikota Surabaya No. 78 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Surabaya No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Makanan di Kota Surabaya.

Sebagai salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar berupa pangan bagi fakir miskin dan/atau terlantar di Kota Surabaya agar memperoleh kehidupan yang layak, telah ditetapkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Permakanan di Kota Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 17 Tahun 2017.

Sasaran kegiatan pemberian permakanan adalah penduduk daerah yang terdiri dari : a. penyandang disabilitas; b. Penyandang Penyakit Tertentu; c. lanjut usia; d. anak terlantar; dan/

atau e. anak yatim dan/atau piatu dari keluarga fakir miskin.

Pemberian permakanan khususnya kepada Lansia adalah Lansia miskin yang terlantar. Pemberian permakanan dijalankan oleh Dinas Sosial Kota Surabaya melalui Karang werda di setiap kelurahan yang dibentuk berdasarkan SK Kelurahan. Oleh karena itu diperlukan peraturan yang mendukung kegiatan tersebut yaitu :

1. SK pembentukan Karang Werda oleh Lurah.
2. Nota kesepahaman pengadaan makanan melalui swakelola antara Dinas Sosial Kota Surabaya dengan Karang Werda
3. Surat perjanjian kerjasama/kontrak antara Dinas Sosial dengan penanggung jawab kelompok masyarakat pelaksana swakelola karang werda.
4. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 4 Tahun 2013 tentang Organisasi UPTD Griya Werdha yang telah diganti oleh Peraturan Walikota Surabaya Nomor 84 Tahun 2016, yang menaungi pendirian UPTD Griya Werdha sebagai tempat rehabilitasi lanjut usia miskin dan/atau terlantar.

Perangkat kebijakan merupakan legalitas bagi pemangku kepentingan dalam menyusun strategi dan program kegiatan. Perangkat kebijakan juga memberikan kepastian hukum dan memperkuat komitmen antara penyelenggara, pelaksana, dan masyarakat dalam kegiatan pelayanan bagi masyarakat. Adanya Perda Nomor 3 Tahun 2014 tersebut menjadi langkah penting Kota Surabaya dalam upaya mewujudkan kesejahteraan dan kota ramah lanjut usia. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 17 Tahun 2017 merupakan kebijakan yang sudah ditetapkan sehingga menjadi pedoman pelaksanaan dan pengelolaan program permakanan guna mewujudkan tujuan sebagai upaya perlindungan dan jaminan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar berupa permakanan bagi lanjut usia bagi fakir miskin dan atau terlantar.

Undang-Undang Kesehatan No. 36 tahun 2009, pasal 138 disebutkan bahwa upaya pemeliharaan kesehatan Lansia ditujukan agar Lansia tetap sehat, produktif secara sosial dan ekonomis. Pemerintah wajib menjamin ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan memfasilitasi melalui upaya peningkatan kesejahteraan dengan pemberdayaan Lansia sehingga mampu berperan dalam pembangunan dengan memperhatikan fungsi, ketrampilan, usia dan kondisi fisik (Republik Indonesia, 2009). Kebijakan sebagai tindakan yang direkomendasikan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu terhadap kebijakan untuk mengatasi dan mencapai suatu tujuan atau merealisasikan sasaran dan maksud tertentu yang dijabarkan dalam program kegiatan (Suwitri, 2008). Studi menemukan bahwa dengan keberadaan berbagai kebijakan/regulasi, tersedianya kelompok/kelembagaan terkait Lansia dan komitmen kepala daerah yang tinggi menjadikan Kota Surabaya berpeluang besar untuk dapat menyandang predikat kota ramah Lansia (Vibriyanti, 2018).

2. Program Lansia di Dinas Sosial Kota Surabaya

Berdasarkan wawancara dengan informan diketahui bahwa program kesehatan telah terakomodir dalam program pelayanan sosial bagi Lansia yang telah dilaksanakan oleh Dinas sosial Kota Surabaya selama ini. Beberapa kegiatan program pelayanan sosial bagi Lansia yang telah dijalankan oleh Dinas Sosial di Kota Surabaya yaitu

- a. Program pemberian makanan pada Lansia
Program ini dijalankan oleh Walikota Surabaya berdasarkan SK Perwali sejak tahun 2012, merupakan program yang pertama kali di Indonesia untuk memberikan makanan pada Lansia miskin dan terlantar. Pemberian makanan berupa nasi kotak dengan mengantarkan pada pagi hari ke rumah Lansia, sebagai makanan tambahan,

diharapkan dapat membantu meringankan beban Lansia sesuai ketersediaan anggaran Dinsos Surabaya yaitu 11.000/orang sebanyak 20.000 jiwa penduduk.

Pelaksanaan pemberian permakanan ini, Dinas Sosial bekerjasama dengan Karang Werda di setiap Kelurahan, yang dibentuk berdasarkan SK Kepala Kelurahan, yang didasarkan pada nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama dengan penanggung jawab Karang werda. Tim Karang Werda yang akan bertanggung jawab terhadap pengelolaan anggaran pemberian makanan pada Lansia di Kelurahan masing-masing.

Pernyataan Informan Dinas Sosial

“ ... Program ini dijalankan oleh Walikota Surabaya berdasarkan SK Perwali sejak tahun 2012, merupakan program yang pertama kali di Indonesia untuk memberikan makanan pada Lansia. Bu Wali keinginannya membangun manusianya bukan hanya gedung-gedung atau jembatan tetapi bu Wali juga ingin membangun dari manusianya sendiri. Permakanan bagi Lansia miskin dan terlantar, yaitu sejumlah 20.000 orang, seharga 11.000 dengan mempertimbangkan kebutuhan gizi-kami punya ahli gizi, dan diberikan sekali dalam sehari berupa nasi kotak. Untuk pengirimannya, dinsos kerjasama dengan Karangweda yang ada di kelurahan. Karangweda yang ada di kelurahan itu sudah..”.

Dari segi pembiayaan program di Dinas Sosial Kota Surabaya sudah sangat mencukupi dan tidak ada kekurangan biaya untuk program. Program pemberian permakanan ini terus berlanjut sampai sasaran Lansia meninggal dunia atau sasaran sudah pindah ke luar kota Surabaya atau sudah mampu. Jika Lansia sudah tidak menjadi sasaran pemberian permakanan harus dibuat berita acara dan surat pernyataan dari sasaran Lansia. Program pemberian makanan yang dijalankan oleh Dinas Sosial Kota Surabaya, menjadi percontohan bagi Kabupaten dan Kota lain di Indonesia.

b. Kegiatan lomba untuk menambah aktifitas dan kreatifitas Lansia.

Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk lomba pada Lansia seperti lomba menyanyi, jalan sehat, gerak jalan dan asah trampil Lansia.

c. Kegiatan senam Lanjut Usia

Kegiatan senam rutin satu bulan sekali di setiap kecamatan, yang dilakukan di taman Lansia setiap hari sabtu dan minggu serta senam yang dilaksanakan di RSUD Bhakti Dharma Husada untuk lanjut usia di sekitar rumah sakit. Semua kegiatan tersebut tidak dipungut biaya.

d. Kegiatan bina keluarga lanjut usia

Merupakan pembinaan dan pelatihan kepada keluarga atau masyarakat yang di lingkungan keluarganya terdapat lanjut usia (khususnya lanjut usia yang perlu mendapatkan perhatian khusus).

e. Pelatihan atau bimbingan teknis (Bimtek) kewirausahaan bagi warga pra purna (menjelang pensiun) yang pesertanya merupakan lanjut usia.

f. Pembinaan usaha mikro kecil dan menengah untuk masyarakat lanjut usia produktif. Pembinaan yang dilakukan meliputi : pemasaran, fasilitasi pameran, display produk dan design produk.

g. UPTD Griya Werdha. UPTD Griya Werdha berfungsi sebagai sarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi lanjut usia miskin dan terlantar.

Hasil menunjukkan bahwa pemberian makanan pada Lansia dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Surabaya bekerjasama dengan Karang Werda. Pembentukan Karang Werda telah diatur pada Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 31 Tahun 2017. Karang Werda merupakan wadah kegiatan untuk peningkatan aktivitas Lansia sehingga mampu mengembangkan diri dalam fungsi sosial dan ekonominya. Pemerintah Kota Surabaya dan Dinas Sosial Kota Surabaya menjadikan Karang Werdha sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam mendistribusikan dan

mengkoordinasikan program bantuan serta sarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi lanjut usia dan miskin terlarat.

Berbagai program Lansia yang telah dijalankan oleh Dinas Sosial Kota Surabaya untuk meningkatkan kualitas kehidupan Lansia, agar tetap sehat dan sejahtera secara lahir maupun batin. Program jalan sehat, senam dan asah trampil Lansia, merupakan program untuk peningkatan kesehatan Lansia. Senam bermanfaat untuk memperlancar peredaran darah, kesehatan paru dan jantung, meningkatkan daya tahan dan kekuatan otot, mengurangi resiko terjadinya penyakit degeneratif seperti tekanan darah tinggi dan mengurangi kecemasan dan depresi. Hasil penelitian, menunjukkan senam Lansia sangat bermanfaat terhadap penurunan tekanan darah pada penderita hipertensi Lansia, baik tekanan darah sistol maupun diastol (Izhar, 2017), peningkatan keseimbangan tubuh Lansia (Manangkot, Sukawana, & Witarsa, 2016), meningkatkan fungsi kognitif Lansia (Putri, Nurrachmah, Gayatri, & Kes, 2018) dan memperkuat paru dan jantung (Pribadi, 2015).

Program Dinas Sosial Kota Surabaya lainnya adalah Bina Keluarga Lansia (BKL), merupakan kegiatan pembinaan untuk Lansia dan keluarga yang memiliki lanjut usia yang meliputi 1) Aspek fisik misalnya melakukan olahraga ringan seperti jalan kaki, senam, sesuai dengan kondisi fisik dan usia; 2) Aspek psikis misalnya cemas, takut dengan kelemahan fisik, sakit, kehilangan pergaulan, takut tersingkir secara sosial dari lingkungannya; 3) Aspek kesejahteraan spiritual yaitu kedekatan dengan Tuhan, berpikir positif dan bersyukur dengan hidup (Kania, 2019). Data dari Pengendalian Kependudukan BKKBN menunjukkan hingga saat ini diperkirakan di Kota Surabaya terdapat sekitar 6.837 Bina Keluarga Lansia (BKL) dengan 327.854 keluarga yang terlibat.

Menurut Nurul Khotimah, dkk (2012), setiap Lansia mengalami berkurangnya fungsi organ tubuh secara normal yang menyebabkan adanya peningkatan kerentanan

dan ketergantungan dengan orang lain (Khotimah, Gunardo, Ghufro, Sugiharti, & Aryekti, 2017). Oleh karena itu, secara individu maupun kolektif penduduk Lansia diharapkan mampu mengembangkan potensi agar dapat meningkatkan kemampuannya dalam berbagai kegiatan, baik sosial, ekonomi, maupun politis. Lansia perlu memiliki sumber pendapatan untuk mendukung kehidupan agar sejahtera. Pada tahun 2019, persentase lansia bekerja mencapai 49,39 persen, dengan kata lain, 1 dari 2 Lansia masih bekerja di usia tuanya. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk usia lanjut tetap produktif di masa tua (BPS RI, 2019). Untuk itu, program di Kota Surabaya telah diadakan pelatihan/bimbingan teknik (Bimtek) oleh Dinas Sosial yang diikuti lanjut usia, pra purna (menjelang pensiun), untuk membantu para lanjut usia menjadi wirausaha.

Program Dinas Sosial lainnya adalah menyediakan fasilitas UPTD Griya Werdha, merupakan panti jompo milik pemerintah yang disediakan gratis untuk Lansia dengan berbagai fasilitas. Program pelayanan kesehatan juga dilakukan pada Panti tersebut yaitu pemeriksaan kesehatan secara rutin.

Untuk meningkatkan kualitas hidup Lansia maka Lansia harus memiliki interaksi sosial yang baik sehingga Lansia tidak akan merasa kesepian dalam hidupnya. Hasil penelitian di UPTD Griya Werdha Kota Surabaya sebagian besar memiliki penyakit kronik yang diderita serta memiliki status hubungan sosial dan kualitas hidup yang buruk. Kesimpulan penelitian tersebut, bahwa interaksi sosial berhubungan dengan kualitas hidup Lansia, semakin buruk interaksi sosial Lansia maka semakin rendah pula kualitas hidupnya (Andesty & Syahrul, 2019). Hasil penelitian Ikawaty (2013) menunjukkan, ada pengaruh antara pengisian waktu luang terhadap kebahagiaan lanjut usia, sebesar 65,676 % dan faktor lainnya sebesar 34,324 % yaitu variabel kegiatan santai (4,567 %), kegiatan sosial (14,580 %), kegiatan kreativitas (0,037 %), kegiatan rohani (2,242

%), oleh karena itu diperlukan program yang melibatkan lanjut usia agar merasa diperhatikan, dihargai, berguna dan memberi kesempatan berperan dalam pembangunan (Ikawati, 2013).

Hasil penelitian Monika (2016), menunjukkan bahwa faktor-faktor yang berkontribusi pada Lansia untuk mendapatkan layanan sosial adalah jenis kelamin wanita, berusia 85 tahun atau lebih, penghasilan rendah dan menderita penyakit kronis (Burzynska, Bryla, Bryla, & Maniecka-Bryla, 2016). Penelitian Stefan (2019) menunjukkan bahwa ada hubungan antara faktor sosial ekonomi dengan rendahnya derajat kesehatan di usia tua yang meliputi faktor pendidikan, pekerjaan dan pendapatan rumah tangga (Sieber et al., 2019). Penelitian lainnya menunjukkan, kualitas hidup Lansia dipengaruhi oleh faktor klinis, sosiodemografi dan sosial ekonomi. Kualitas hidup Lansia yang baik ditunjukkan dengan rasa puas atas hidupnya, depresi yang lebih sedikit,

pendapatan yang cukup, secara subjektif merasa kesehatannya lebih baik, mampu beraktivitas fisik, tidak adanya gangguan fungsional dan mampu berpartisipasi dalam kegiatan sosial (Conde-Sala, Portellano-Ortiz, Calvó-Perxas, & Garre-Olmo, 2017). Program yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Surabaya sudah mengakomodir hal tersebut, dengan menyediakan untuk menjamin kesejahteraan sosial dan pelayanan kesehatan terutama bagi Lansia miskin dan terlantar.

3. Hambatan Program

Berdasarkan hasil wawancara, diperoleh informasi bahwa tidak ada hambatan yang berarti dalam pelaksanaan program pelayanan pemberian makanan bagi Lansia karena dukungan Walikota Kota Surabaya sangat tinggi. Hambatan yang ditemui diuraikan pada Tabel 1. dibawah ini.

Tabel 1.
Hambatan Program Pemberian Makanan Bagi Lansia di Dinas Sosial Kota Surabaya, Tahun 2019.

No.	Kendala	Keterangan
1.	Program permakanan	Pada awal program terjadi kesalahpahaman aparat hukum bahwa ada duplikasi program pemberian permakanan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial dengan pemberian makanan tambahan pada Posyandu Lansia yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan. Pada hakikatnya, kedua program tersebut merupakan hal yang berbeda karena sasaran Posyandu Lansia adalah seluruh Lansia dengan memberikan makanan tambahan berupa kue untuk setiap Lansia yang berkunjung di Posyandu Lansia pada saat jadwal Posyandu, sedangkan sasaran program permakanan hanya Lansia miskin dan terlantar dengan pemberian nasi kotak sekali setiap hari.
2.	Data Lansia miskin dan terlantar	Pada awal program terjadi ketidaktepatan sasaran karena menggunakan data Lansia miskin yang bersumber dari basis data terpadu, yang belum terverifikasi dengan baik. Sejak tahun 2019, sasaran Lansia miskin untuk program permakanan menggunakan data Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Data tersebut bersumber dari pendataan masyarakat miskin dan terlantar yang dilakukan oleh Kelurahan, yang telah diverifikasi oleh Dinas Sosial Kota Surabaya.
3.	SDM	Sumber daya manusia (SDM) yang bertugas dalam pemberian permakanan di Karang Werda, sangat bervariasi dalam hal kompetensi dan kepedulian terhadap Lansia. Kondisi tersebut mempengaruhi pelaksanaan program, tetapi secara umum SDM yang terpilih dianggap sukses untuk melaksanakan program pemberian makanan di Kota Surabaya.

Sumber: Data Primer Wawancara

Berdasarkan wawancara, diperoleh informasi bahwa Dinsos sudah melakukan pemetaan dan verifikasi sasaran masyarakat miskin dan terlantar dengan menggunakan data masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk mendapatkan pelayanan program permakanan tersebut. Setelah dilakukan proses verifikasi, kemudian data sasaran tersebut dikoordinasikan

ke Karang Werda, yang akan menyalurkan pemberian makanan kepada sasaran sesuai tanggung jawab di Kelurahan masing-masing.

Pernyataan Informan Dinas Sosial

"...Sasaran permakanan oleh Dinsos khusus yang miskin dan terlantar; kalau yang mampu ya tidak. Data orang miskin dimasukkan dalm data Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBT).

Jadi benar-benar miskin, pendapatannya dibawah upah minimum. Data MBT berasal dari usulan lurah, disertai surat keterangan miskin. Untuk mendapatkan permakanaan, data dimasukkan ke form MBR, dilaporkan ke Dinsos, kemudian Dinsos melakukan klarifikasi di lapangan...”

4. Peran Dinas Sosial Dalam Program Kesehatan

Dinas Sosial Kota Surabaya telah berperan dalam mendukung program kesehatan baik secara tidak langsung, melalui program pelayanan kesejahteraan sosial bagi Lansia, maupun secara langsung melalui kerjasama yang dilakukan dengan Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Posyandu Lansia, melalui program Kota Ramah Lansia yang dicanangkan oleh Kota Surabaya.

Pernyataan Informan Dinas Sosial

“...Bu Wali sudah menganggarkan katakanlah untuk ramah Lansia bagaimana dengan semua UPTD yang ada di Kota Surabaya ini sehingga sudah ada sinkronisasi. Dengan adanya pelaksanaan kegiatan kami yang ada di Dinsos ini, harapan pemerintah Kota Surabaya menjadikan Lansia semakin sehat, semakin kuat dan semakin mandiri sehingga mereka diterima di lingkungannya masing-masing ...”

Peran Dinas Sosial dalam program pelayanan kesehatan Posyandu Lansia yang dikoordinir oleh Dinas Kesehatan dan Puskesmas, dalam bentuk ikut serta dalam sosialisasi kepada Lansia tentang jadwal kegiatan pelaksanaan Posyandu Lansia.

Pernyataan Informan Dinas Kesehatan Kota Surabaya

“ ... Dinkes mengadakan kegiatan Posyandu, kita juga woro-woronya sering-sering melalui Dinsos, jadi kita selalu bersinergi apalagi kalau kota ramah Lansia. Kota Ramah Lansia itu kita kolaborasi dengan dinas-dinas lainnya juga...”

Dinas Sosial juga terlibat dalam program kesehatan melalui kegiatan asuhan mandiri Toga (tanaman obat keluarga), yang dilaksanakan

oleh Dinas Kesehatan dan Puskesmas Santun Lansia.

Pernyataan Informan

“... Dinkes selama ini sudah mengajak pada pada Lansia-Lansia di Kota Surabaya melalui puskesmas setempat, itu menanam Toga. Setelah menanam Toga bagaimana cara mengolah supaya menjadi ramuan yang menyehatkan bagi Lansia itu sendiri...”

Menurut Dinas Sosial Kota Surabaya, potensi pelayanan kesehatan tradisional (Yankestrad) yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan Puskesmas bagi Lansia sangat bagus, seperti yang disampaikan berikut :

“... Sangat perlu sekali dari pada obat-obat yang mengandung kimia, saya kira secara pribadi itu lebih bagus, apalagi dari tanamannya sendiri itu lebih bagus lagi. Setahu saya itu programnya Dinkes melalui puskesmas setempat mereka sudah memberi pelatihan-pelatihan untuk wilayahnya masing-masing...”

Peran Dinas Sosial lainnya dalam bidang pelayanan kesehatan dilaksanakan melalui program Kota Ramah Lansia yaitu Taman Lansia dan Taman Palliatif. Dalam kegiatan Taman Lansia, melibatkan seluruh UPTD terkait, seperti pernyataan informan berikut ini.

“...Oh ya satu lagi dipemerintahan Kota Surabaya ada namanya Taman Lansia itu, bu Wali menghendaki supaya difungsikan untuk senam Lansia dan pengobatan gratis, pada saat hari Sabtu dan Minggu. Melibatkan UPTD-UPTD, untuk pengerahannya dari Dinsos untuk pengerahan Lansianya, untuk pengobatannya Dinkes, untuk pengamanannya Litbanglinmas, pengobatan gratis pada Sabtu Minggu pagi, ada juga Taman Palliatif untuk Lansia, ada batu-batu khusus untuk pijat...”

Peran Dinas Sosial Kota Surabaya dalam bidang pelayanan kesehatan tercermin dalam Program Kota Ramah Lansia. Program tersebut telah didukung berbagai regulasi, mulai dari Perda, Perwali Kota Surabaya dan pembiayaannya serta seluruh UPTD dan

lintas sektor terkait sesuai tupoksinya masing-masing. Dalam bidang kesehatan, telah tersedia Taman Lansia dan Taman Palliatif. Sedangkan program Dinas Kesehatan Kota Surabaya adalah pemeriksaan kesehatan dan pengobatan gratis pada hari Sabtu dan Minggu di Posyandu Lansia. Kemitraan Dinas Sosial dengan Dinas Kesehatan Kota Surabaya pada kegiatan Posyandu Lansia dan pelayanan kesehatan tradisional khususnya dalam asuhan mandiri Toga.

Hasil kajian Rukmini, dkk (2019), menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan tradisional mempunyai potensi besar untuk dimanfaatkan sebagai salah satu model pelayanan kesehatan pada Lansia. Adapun potensi Yankestrad untuk Lansia yaitu 1) Minat Masyarakat tinggi, ditunjukkan dengan Data Riskesdas, proporsi rumah tangga yang pernah memanfaatkan Yankestrad dalam satu tahun mengalami peningkatan dari 30,1% pada tahun 2013 meningkat menjadi 31,4 % pada tahun 2018. Proporsi pemanfaatan Yankestrad pada penduduk Lansia di Indonesia cukup tinggi sebesar 37%; 2) Data BPS menunjukkan peningkatan jumlah Lansia di Indonesia pada tahun 2019 sebesar 9,7 jt jiwa, pada tahun 2025 diprediksi meningkat sebesar 12,54 juta jiwa (BPS RI, 2019); 3) Masalah penyakit degeneratif yang banyak diderita oleh Lansia, Yankestrad relatif aman dan efek samping ringan untuk pengobatan dan pemeliharaan dalam jangka panjang, selama dilakukan Yankestrad profesional; 4) Beban polifarmasi pada Lansia, sehingga metode Yankestrad dapat mengurangi beban polifarmasi; 5) Yankestrad memenuhi kriteria berlatar belakang budaya, sehingga akan lebih mudah diterima di kalangan Lansia; 6) Bersifat promotif dan preventif, yang berperan sebagai penunjang pengobatan konvensional sehingga pelayanan bisa dilakukan secara simultan (Rukmini et al., 2019).

Peran Dinas Sosial Kota Surabaya dengan Dinas Kesehatan dan lintas sektor lainnya, diwujudkan dan dilaksanakan dalam bingkai program Kota Ramah Lansia. Dalam program

tersebut, semua UPTD di Kota Surabaya melaksanakan kegiatan dan kemitraan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Kota Ramah Lansia harus memenuhi 4 syarat yaitu 1) Memiliki seperangkat peraturan yang mengatur tentang Lansia; 2) Memiliki pemimpin daerah yang berkomitmen dan berpedulian terhadap Lansia; 3) Memiliki metode dokumen yang ramah Lansia tetapi disesuaikan dengan keadaan daerahnya (WHO - World Health Organization, 2007); 4) Memiliki fasilitas yang ramah terhadap Lansia (Hermawati, 2015).

Hasil studi Kapasitas Kota Ramah Lanjut Usia 2013, yang dilakukan SurveyMETER & CAS UI (2013), Kota Surabaya meraih skor 46,3, lebih tinggi dibandingkan dengan angka nasional 42,9 dari kemungkinan skor 100 (SurveyMETER dan CAS UI, 2013). Prestasi tersebut menempatkan Kota Surabaya menjadi salah satu kota ramah lanjut usia. Namun demikian, pencapaian skor yang paling rendah adalah pada dimensi partisipasi sipil dan pekerjaan sebesar 13,8. Dimensi ini menunjukkan masih rendahnya dukungan pengambil kebijakan di sektor pemerintah dan swasta dalam menyediakan lapangan kerja pada Lansia. Untuk mengatasi kondisi tersebut Dinas Sosial Kota Surabaya melakukan kegiatan program berupa pembinaan usaha mikro kecil dan menengah meliputi pemasaran, fasilitas pameran, display produk dan design produk.

Penutup

Kesimpulan

Perangkat kebijakan dan regulasi di Dinas Sosial Kota Surabaya telah tersedia dan diimplementasikan dalam berbagai program kesejahteraan sosial Lansia yang sangat mendukung program pelayanan kesehatan yaitu pemberian permakanan, senam, bina keluarga lanjut usia, latihan atau bimbingan teknis kewirausahaan dan UPTD Griya Werdha. Dinas Sosial sangat berperan dalam mendukung pelayanan bidang kesehatan, baik dalam kegiatan kerjasama dengan Dinas

Kesehatan, Puskesmas, Posyandu Lansia dan kegiatan kemitraan lintas sektor dalam wadah Kota Ramah Lansia. Pelaksanaan program tidak mendapatkan hambatan yang berarti karena komitmen Walikota Surabaya sangat tinggi, sehingga Kota Surabaya mendapatkan predikat sebagai Kota Ramah Lansia.

Rekomendasi

Suatu program perlu adanya komitmen, keberpihakan dan kepedulian yang tinggi serta didukung dengan anggaran alokasi dana dari pemerintah daerah, khususnya Walikota Surabaya, merupakan salah satu kunci kesuksesan suatu kebijakan dan program bagi kesejahteraan Lansia. Diharapkan Kota Surabaya dapat menjadi contoh bagi Kabupaten dan Kota Lainnya dalam mengembangkan program pelayanan kesejahteraan sosial bagi Lansia

Ucapan Terimakasih

Kami ucapkan terima kasih kepada Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya dan jajarannya, khususnya Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Surabaya dan Kepala Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial Anak dan Lansia yang telah membantu, memfasilitasi pelaksanaan penelitian dan menyediakan dokumen terkait. Kami mengucapkan terimakasih kepada Kepala Puslitbang Humaniora dan Manajemen Kesehatan yang telah memberikan dukungan pembiayaan terlaksananya penelitian ini. Semoga tulisan ini bermanfaat dan menambah wawasan bagi pembacanya terkait dengan peran Dinas sosial Kota Surabaya dalam mendukung program kesehatan bagi Lansia.

Pustaka Acuan

- Amalia, Y., Ni'mal, B., & Mury, R. (2014). Perbedaan kualitas hidup lansia yang tinggal di komunitas dengan di pelayanan sosial lanjut usia. *Jurnal Pustaka Kesehatan*, 2(1), 87–94. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Andesty, D., & Syahrul, F. (2019). HUBUNGAN INTERAKSI SOSIAL DENGAN KUALITAS HIDUPLANSIADIUNITPELAYANANTERPADU

- (UPTD) GRIYA WERDHA KOTA SURABAYA TAHUN 2017. *The Indonesian Journal of Public Health*, 13(2), 171. <https://doi.org/10.20473/ijph.v13i2.2018.171-182>
- BPS RI. (2018). *Statistik Penduduk Lanjut Usia Indonesia 2018. Subdirektorat Statistik Pendidikan dan Kesejahteraan Sosial*. BPS. Jakarta. (M. S. Dwi Susilo, M. S. Ida Eridawaty Harahap, S.Si., & M. S. Raden Sinang, SST, Eds.). Jakarta: bdirektorat Statistik Pendidikan dan Kesejahteraan Sosial BPS.
- BPS RI. (2019). *Statistik Penduduk Usia Lanjut 2019*. (M. S. Dwi Susilo, M. S. Ida Eridawaty Harahap, S.Si., & M. S. Raden Sinang, S.ST., Eds.), *Badan Pusat Statistik*. Jakarta: Subdirektorat Statistik Pendidikan dan Kesejahteraan Sosial BPS.
- Burzynska, M., Bryla, M., Bryla, P., & Maniecka-Bryla, I. (2016). Factors determining the use of social support services among elderly people living in a city environment in Poland. *Health and Social Care in the Community*, 24(6), 758–768. <https://doi.org/10.1111/hsc.12259>
- Conde-Sala, J. L., Portellano-Ortiz, C., Calvó-Perxas, L., & Garre-Olmo, J. (2017). Quality of life in people aged 65+ in Europe: associated factors and models of social welfare—analysis of data from the SHARE project (Wave 5). *Quality of Life Research*, 26(4), 1059–1070. <https://doi.org/10.1007/s11136-016-1436-x>
- Hermawati, I. (2015). Kajian tentang Kota Ramah Lanjut Usia. *Kajian Tentang Kota Ramah Lanjut Usia*, (April), 1–10. Retrieved from http://eprints.uny.ac.id/20570/1/MAKALAH_KOTA_RAMAH_LANJUT_USIA.UNY.ISTIANA.pdf
- Ikawati. (2013). Pengaruh Pengisian Waktu Luang terhadap Kebahagiaan Lanjut Usia, 12(1), 27–44. <https://doi.org/10.31105/jpks.v12i1.1245>
- Izhar, M. D. (2017). Pengaruh Senam Lansia Terhadap Tekanan Darah Di Panti Sosial Tresna Werdha Budi Luhur Jambi. *Jiubj*, 17(1), 204–210. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v17i1.116>
- Kania, D. (2019). Kegiatan Bina Keluarga Lansia (BKL) Untuk Kesejahteraan Spiritual Lanjut Usia: Penelitian di Kampung KB RW 07 Kelurahan Cipadung Kulon Kecamatan Panyileukan Kota Bandung. *Diploma Thesis, UIN Sunan Gunung Djati, Bandung*. <https://doi.org/10.16309/j.cnki.issn.1007-1776.2003.03.004>
- Khotimah, N., Gunardo, G., Ghufro, A., Sugiharti, S., & Aryekti, K. (2017). LANJUT USIA (LANZIA) PEDULI MASA DEPAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA. *Geomedia: Majalah Ilmiah Dan Informasi Kegeografian*, 14(2). <https://doi.org/10.21831/gm.v14i2.13815>

- Kiik, S. M., Sahar, J., & Permatasari, H. (2018). Peningkatan Kualitas Hidup Lanjut Usia (Lansia) Di Kota Depok Dengan Latihan Keseimbangan. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 21(2), 109–116. <https://doi.org/10.7454/jki.v21i2.584>
- Manangkot, M., Sukawana, W., & Witarsa, M. (2016). PENGARUH SENAM LANSIA TERHADAP KESEIMBANGAN TUBUH PADA LANSIA DI LINGKUNGAN DAJAN BINGIN SADING. *COPING NERS (Community of Publishing in Nursing)*, 4(1).
- Pribadi, A. (2015). PELATIHAN AEROBIK UNTUK KEBUGARAN PARU JANTUNG BAGI LANSIA. *Jurnal Olahraga Prestasi*, 11(2), 116756. <https://doi.org/10.21831/jorpres.v11i2.5729>
- Putri, D. M. P., Nurrachmah, P. E., Gayatri, D., & Kes, S. M. (2018). Pengaruh Latihan Senam Otak Dan ART Therapy Terhadap Fungsi Kognitif Lansia Dengan Demensia Di PSTW Yogyakarta Unit Budi Luhur Dan Abiyoso. *INA- RXIV Papares*, Juli, 1–7. <https://doi.org/10.31227/osf.io/db3a9>
- Republik Indonesia. (1998). Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, 2, 1–77.
- Rukmini, Oktarina, Mariani, H., Kristiana, L., Paramita, A., Kusumawati, L., ... Prabaningrum, V. (2019). Kajian Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi di UPF Inovasi Teknologi Kesehatan. Laporan penelitian UPF Inovasi Teknologi Kesehatan, Puslitbang Humaniora dan Manajemen Kesehatan. Surabaya.
- Sieber, S., Cheval, B., Orsholits, D., Van Der Linden, B. W., Guessous, I., Gabriel, R., ... Cullati, S. (2019). Welfare regimes modify the association of disadvantaged adult-life socioeconomic circumstances with self-rated health in old age. *International Journal of Epidemiology*, 48(4), 1352–1366. <https://doi.org/10.1093/ije/dyy283>
- SurveyMETER dan CASUI. (2013). *Satu Langkah Menuju Impian Lanjut Usia 2030 Kota Surabaya*. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1080/00034989760581>
- Suwitri, S. (2008). Konsep Dasar Kebijakan Publik. *Badan Penerbit Universitas Dipenogoro Semarang*, 1(1), 1–51. Retrieved from https://dlwqtxts1xzle7.cloudfront.net/57623163/PDFkebijakan_publik.pdf?1540354548=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DKonsep_Dasar_Kebijakan_Publik.pdf&Expires=1597025682&Signature=XlpPtoyDiTdAuGbNRaVbiD8KMhx6naUWBvYCKXLQ26ro0Kwlm7DNvbMxHv
- Vibriyanti, D. (2018). Surabaya Menuju Kota Ramah Lansia: Peluang Dan Tantangan (Surabaya Toward Age-Friendly City: Opportunities and Challenges. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 13(2), 117–132.
- WHO - World Health Organization. (2007). Global Age-friendly Cities: A Guide, 1–76.

Strategi Masyarakat Miskin Dalam Menghadapi Kerawanan Pangan di Desa Trimurti, Kabupaten Bantul

Strategy of the Poor Villagers in Coping Food Insecurity in Trimurti Village, Bantul Regency

Haris Nur Ashar dan Janianton Damanik

Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Jl. Sosio Yustisia No. 2, Bulaksumur, Yogyakarta 55281

Telepon (0274) 563362. HP 085701302729. Email: harisharus77@gmail.com

Naskah diterima 15 Agustus 2020 direvisi 30 Maret 2021 disetujui 15 April 2021

Abstract

One of the goals of the SDGs is to end hunger, achieve food security, improve nutrition, and promote sustainable agriculture. However, until now this goal is far from ideal. The problem of food insecurity still occurs in both big cities and villages. One indicator is the food security subsystem which is not yet available. In this condition, the poor face two problems at once, namely food insecurity and family economic problems. This research focuses on the strategies applied by the poor in Trimurti Village in overcoming the existing food insecurity. The method used is qualitative so that a clear picture of the strategies of the poor in dealing with food insecurity can be obtained. The data was collected through in-depth interviews, observation, and documentation which were processed and tested for their validity using the triangulation method. The results showed that the strategy taken by the poor in dealing with food insecurity was to change their diet, change their work patterns, and go into debt, either foodstuffs or money.

Keywords: *survival strategy, food insecurity, family food security strategy, Trimurti Village.*

Abstrak

Salah satu tujuan dari SDGs adalah mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, meningkatkan gizi, dan mendorong pertanian yang berkelanjutan. Namun, hingga saat ini tujuan tersebut masih jauh dari ideal. Masalah kerawanan pangan masih terjadi baik di kota besar maupun di desa. Salah satu indikatornya adalah subsistem ketahanan pangan yang belum tersedia. Dalam kondisi seperti ini, masyarakat miskin menghadapi dua masalah sekaligus, yaitu rawan pangan dan masalah ekonomi keluarga. Penelitian ini menitikberatkan pada strategi yang diterapkan oleh masyarakat miskin di Desa Trimurti dalam mengatasi kerawanan pangan yang ada. Metode yang digunakan adalah kualitatif sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai strategi masyarakat miskin dalam menghadapi kerawanan pangan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi yang diolah dan diuji validitasnya dengan metode triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang diambil oleh masyarakat miskin dalam menghadapi kerawanan pangan adalah dengan mengubah pola makan, mengubah pola kerja, dan berhutang baik bahan makanan atau uang.

Kata kunci: *strategi bertahan hidup, kerawanan pangan, strategi ketahanan pangan keluarga, Desa Trimurti.*

Pendahuluan

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dirancang akan tercapai pada tahun 2030 dengan tujuh belas poin kesepakatan sebagai tujuan bersama masyarakat dunia. Salah satu di antaranya adalah mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan,

meningkatkan gizi, dan mendorong pertanian yang berkelanjutan (United Nations, 2015). Semua itu saling mempengaruhi satu sama lain di mana ketersediaan bahan pangan dari pertanian yang berkelanjutan menjadi aspek yang fundamental. Pertanian yang berkelanjutan akan menopang ketersediaan bahan pangan

untuk masyarakat dalam jangka waktu yang lama. Produksi bahan pangan yang berkelanjutan juga merupakan salah satu jaminan untuk menciptakan masyarakat yang kuat dari segi ketahanan pangan. Ketahanan pangan, yakni “akses semua orang setiap saat pada bahan pangan untuk hidup sehat” (Suharyanto, 2011: 186), merupakan konsep yang terdiri dari tiga subsistem yaitu ketersediaan pangan, akses pangan dan penyerapan pangan, serta status gizi yang baik sebagai keluaran dari ketiga subsistem yang ada (Hanani, 2012: 2).

Indonesia mendorong sinergitas pembangunan nasional SDGs melalui Perpres No. 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sekretariat Kabinet RI, 2017). Hal tersebut berarti, bahwa ketahanan pangan juga menjadi target dalam pembangunan nasional yang dalam pengertian makro menjadi bagian dari ketahanan nasional (Miyasto, 2014). Aktanya indeks ketahanan pangan Indonesia hanya meningkat sedikit dari peringkat 71 (2016) menjadi 69 (2017) dari 113 negara di dunia (Badan Ketahanan Pangan, Kementan, 2018). Hal tersebut disebabkan distribusi bahan pangan secara nasional yang tidak merata dan belum dapat diatasi hingga saat ini. Distribusi itu terkait, salah satu, dengan akses pada pangan dan penghidupan masyarakat (Hapsari dan Rudiarto, 2017: 133). Kondisi tersebut memungkinkan terjadinya kerawanan pangan dan gizi meski ketersediaan bahan pangan mencukupi.

Di tingkat provinsi juga terjadi permasalahan yang sama. Di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan kondisi ketersediaan pangan yang

cukup masih terdapat 16 desa rawan pangan dan gizi (Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan, DIY, 2016; Media Indonesia, 3 September 2016). Sumber utamanya adalah oleh kemiskinan. Masyarakat miskin memiliki daya beli yang terbatas sehingga jumlah dan mutu bahan pangan yang dikonsumsi juga rendah. Data menunjukkan, bahwa pada bulan Maret 2017 sumbangan komoditas makanan terhadap garis kemiskinan sebesar 71,52% (BPS DIY, 2017). Artinya, sebagian besar masyarakat di DIY mengalami kesulitan mendapatkan bahan pangan untuk kebutuhan pokok.

Keluaran dari ketahanan pangan adalah status gizi masyarakat. Pada tahun 2017 DIY memiliki prevalensi balita kurang gizi sebesar 8,26% dan mengalami penurunan menjadi 7,94% pada 2018. Hal tersebut mengindikasikan bahwa prevalensi balita kurang gizi di DIY belum tercapai secara maksimal. Walaupun mengalami tren menurun, tetapi permasalahan gizi buruk di DIY belum dapat diselesaikan. Prevalensi kasus bayi lahir rendah mencapai 4,86% pada 2017 dan mengalami peningkatan pada tahun berikutnya menjadi 5,52%. *Stunting* atau pertumbuhan yang terhambat juga menjadi indikator status gizi di masyarakat. Prevalensi bayi pendek di DIY pada 2017 sebesar 13,86% dan menurun pada 2018 menjadi 12,37%. Dari status gizi ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK) di DIY, dapat dilihat adanya kenaikan dari 10,70% pada 2017 menjadi 11,76% pada 2018 (Dinas Kesehatan DIY, 2018: 23). Kondisi tersebut mengindikasikan masih terdapat kasus status gizi kurang di DIY yang erat kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan pangan.

Tabel 1. Status Gizi Masyarakat DIY

Tahun	Prevalensi Balita Kurang Gizi (%)	Prevalensi Kasus Bayi Lahir Rendah (%)	Prevalensi <i>Stunting</i> (%)	Prevalensi Status Gizi Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (KEK) (%)
2017	8,26	4,86	13,86	10,70
2018	7,94	5,52	12,37	11,76

Sumber: Dinas Kesehatan DIY, 2018.

Tabel 2. Harga Bahan Pangan di DIY 2018

Bahan (Kg)	Beras	Gula Pasir	Minyak Goreng	Daging Ayam	Telur Ayam	Daging Sapi	Bawang Merah	Cabe Merah Keriting	Cabe Merah Besar	Cabe Rawit
Harga (Rp)	8.900	11.000	9.000	33.000	25.100	115.000	22.000	21.000	26.000	26.000

Sumber: Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan, 2018

Sebenarnya pasokan bahan pangan di provinsi ini dapat dikatakan aman karena masih ada surplus beras yang merupakan bahan makanan pokok makanan. Meskipun demikian, pasokan itu tidak dibarengi dengan penurunan harga yang signifikan dan patokan harga masih sangat sulit dijangkau oleh masyarakat miskin. Menurut database bahan pangan di DIY (2018), harga beras termurah sehari-hari adalah Rp 8.900/kg, gula pasir Rp 11.000/kg, minyak goreng Rp 9.000/liter, daging ayam Rp 33.000/kg, telur ayam Rp 25.100/kg, daging sapi Rp 115.000/kg, bawang merah Rp 22.000/kg, cabe merah keriting Rp 21.000/kg, cabe merah besar Rp 26.000/kg dan cabe rawit merah Rp 26.000/kg (Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan, 2018). Harga tersebut merupakan patokan harga untuk hari-hari biasa. Terdapat kemungkinan kenaikan harga bahan pangan pada hari-hari tertentu, seperti hari raya idul fitri, hari natal dan tahun baru.

Kabupaten Bantul tidak terhindar dari masalah yang sama. Faktor geografisnya sebagai daerah pesisir tidak menjamin ketahanan pangan, terutama produksi dan suplai beras. Selama 3 tahun terakhir prevalensi gizi buruk balita tampak fluktuatif yang menunjukkan permasalahan gizi buruk di daerah ini. Pada 2016 terdapat sebanyak 195 balita yang mengalami gizi buruk yang terdiri dari 96 orang laki-laki dan 99 perempuan. Prevalensi balita gizi buruk sesuai standar berat badan menurut umur sebesar 0,40%. Terdapat peningkatan prevalensi gizi buruk pada balita dari yang sebelumnya adalah 0,38% (Dinas Kesehatan Bantul, 2016: 20).

Salah satu desa rawan pangan di Kabupaten Bantul adalah Desa Trimurti, Kecamatan Srandakan (Badan Ketahanan Pangan dan

Penyuluhan, 2016). Desa tersebut berada di wilayah pesisir selatan dengan kondisi lahan produksi bahan pangan yang sempit. Dari 646 ha luas Desa Trimurti, hanya terdapat 35 ha lahan sawah dan 41 ha lahan bukan sawah. Keadaan tersebut hanya mampu menghasilkan 66 ha luas panen padi sawah, 4 ha luas panen kacang tanah, dan 9 ha luas panen kedelai tanpa dapat memproduksi sayuran (BPS Bantul, 2019: 61).

Kondisi ini menyimpan sejumlah pertanyaan yang menarik untuk dikaji, terutama yang terkait dengan strategi penghidupan masyarakat. Pertama, tentu tidak mudah mengatasi sumber daya penghidupan yang terbatas dan masyarakat dipaksa oleh keterbatasan itu untuk tetap bertahan hidup. Kedua, kajian tentang strategi bertahan hidup masih belum banyak menyoroti kondisi masyarakat yang mengalami rawan pangan dan gizi, padahal informasinya sangat perlu untuk merumuskan kebijakan yang lebih berbasis kebutuhan masyarakat.

Oleh karena itu, analisis dalam tulisan ini akan menjawab pertanyaan tentang bagaimana strategi dan upaya yang dilakukan masyarakat miskin untuk menghadapi kerawanan pangan. Dengan demikian, tulisan ini bertujuan untuk menggambarkan strategi yang dilakukan oleh masyarakat miskin dalam menghadapi kerawanan pangan dan gizi di Desa Trimurti. Strategi tersebut menjadi penting untuk ditelaah lebih kritis untuk memahami upaya masyarakat miskin untuk bertahan hidup dalam kondisi rawan pangan dan gizi. Selanjutnya, strategi tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan oleh aktor-aktor terkait dalam perumusan program untuk menyelesaikan permasalahan kerawanan pangan dan gizi di daerah perdesaan.

Agar fokus itu terjaga, maka analisis dalam paper ini dibatasi pada tiga konsep dasar, yakni: strategi bertahan hidup, kerawanan pangan, dan strategi pencapaian ketahanan pangan keluarga. Konsep strategi bertahan hidup menjadi landasan secara umum suatu masyarakat dalam bertahan hidup. Konsep kerawanan pangan digunakan sebagai gambaran masyarakat miskin dalam bertahan hidup menghadapi kondisi yang ada. Adapun, konsep strategi pencapaian ketahanan pangan keluarga digunakan untuk menjelaskan cara keluarga dalam mengelola kebutuhan pangan.

Kajian Teori

Strategi Bertahan Hidup

Strategi bertahan hidup adalah rangkaian tindakan yang dipilih secara sandar oleh individu dan rumah tangga yang miskin secara sosial ekonomi. Dengan kata lain, individu dapat berusaha untuk dapat menambah penghasilan alternatif guna memenuhi kebutuhan hidupnya (Snell dan Staring, dikutip Setia, 2005: 6). Selain itu, strategi bertahan hidup juga didefinisikan sebagai kemampuan seseorang dalam menerapkan seperangkat cara untuk mengatasi berbagai permasalahan yang melingkupi kehidupannya. Strategi penanganan masalah pada dasarnya merupakan kemampuan segenap anggota keluarga dalam mengelola aset yang dimilikinya (Suharto, 2009: 29). Untuk mengatasi goncangan dan tekanan ekonomi dapat dilakukan dengan berbagai strategi. Suharto menggolongkan strategi tersebut menjadi 3 kategori yaitu sebagai berikut.

1. Strategi aktif, yakni strategi yang dilakukan keluarga miskin dengan cara mengoptimalkan segala potensi keluarganya. Contohnya: melakukan aktivitas sendiri, memperpanjang jam kerja dan melakukan apapun demi menambah penghasilannya.
2. Strategi pasif, yakni strategi bertahan hidup dengan cara mengurangi pengeluaran keluarga. Contohnya: meminimalisir biaya untuk sandang, pangan, pendidikan, dan sebagainya.

3. Strategi jaringan, yakni strategi bertahan hidup yang dilakukan dengan cara menjalin relasi baik formal maupun dengan lingkungan sosial dan kelembagaan. Contohnya: meminjam uang kepada tetangga, berutang di warung atau toko, memanfaatkan program bantuan kemiskinan, meminjam uang ke rentenir atau bank dan sebagainya.

Menurut Ellis (2000), konsep mata pencaharian sangat penting dalam memahami strategi bertahan hidup karena merupakan bagian tidak terlepas dari pemenuhan kebutuhan. Konsep tersebut dikembangkan pertama kali di Inggris pada akhir dekade 1990-an dan didesain untuk kawasan yang sedang berkembang seperti Indonesia. Pendekatan nafkah berkelanjutan berusaha mencapai derajat pemenuhan kebutuhan sosial, ekonomi, dan ekologi secara adil dan seimbang. Suatu mata pencaharian meliputi pendapatan (baik bersifat tunai maupun barang), lembaga-lembaga sosial, relasi gender, hak-hak kepemilikan yang diperlukan guna mendukung dan menjamin kehidupan (Widodo, 2011: 12).

Strategi nafkah mengarah pada pembangunan sistem penghidupan yang berkelanjutan. Dengan demikian, strategi nafkah mencakup beberapa aspek antara lain; *pertama* adanya pilihan, *kedua* mengikuti pilihan yang berarti memberikan perhatian pada pilihan, *ketiga* pengeliminasian pilihan, *keempat* strategi sebagai respon terhadap tekanan yang ada, *kelima* terdapat sumber daya sebagai langkah awal, *keenam* strategi sebagai keluaran dari konflik dan proses yang terjadi di dalam rumah tangga (Crow, dikutip Kusuma, 2016: 24).

Crow menyatakan bahwa strategi nafkah meliputi aspek pilihan atas beberapa sumber nafkah yang ada di sekitar masyarakat (Widodo, 2011: 12). Banyaknya pilihan pekerjaan yang ada, memungkinkan seseorang atau rumah tangga melakukan strategi nafkah. Sebagai contoh dalam bidang pertanian masyarakat dapat melakukan intensifikasi atau diversifikasi dalam melaksanakan pekerjaannya. Selain itu strategi

nafkah juga dapat dilihat dari sisi ekonomi berupa pengeluaran sesedikit mungkin untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Corak lain yang terdapat dalam strategi nafkah adalah adanya relasi hubungan antara patron dengan klien yang dapat melembaga sebagai sebuah pilihan dalam mata pencaharian.

Selain itu, Carner (1984) menjelaskan bahwa terdapat beberapa strategi yang dapat dilakukan oleh rumah tangga miskin pedesaan dalam memperoleh pekerjaan, antara lain: (1) melakukan beraneka ragam pekerjaan meskipun dengan upah yang rendah, (2) memanfaatkan ikatan kekerabatan serta pertukaran timbal balik dalam pemberian rasa aman dan perlindungan, dan (3) melakukan migrasi ke daerah lain sebagai alternatif terakhir dalam mencari nafkah (Widodo, 2011: 12).

Hasil penelitian Slamet Widodo memperlihatkan bahwa terdapat strategi ekonomi dan strategi sosial yang dilakukan masyarakat miskin di Desa Kwanyar Barat dalam mencari nafkah. Strategi ekonomi berupa pola nafkah ganda, optimalisasi tenaga kerja rumah tangga, dan migrasi. Adapun, strategi sosial yang digunakan berupa pemanfaatan lembaga kesejahteraan lokal dan jejaring sosial seperti kekerabatan dan, pertetanggaan, dan perkawinan. Kedua strategi tersebut berjalan bersamaan dan menjadi pilihan dalam mencari pekerjaan.

Kerawanan Pangan

Konsep kerawanan pangan tidak dapat dipisahkan dengan pembahasan ketahanan pangan. Kerawanan pangan merupakan suatu kondisi ketidakcukupan pangan yang dialami daerah, masyarakat, atau rumah tangga, pada waktu tertentu untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat. Kerawanan pangan dapat terjadi secara berulang pada waktu-waktu tertentu (kronis) dan dapat pula terjadi akibat keadaan darurat seperti bencana alam ataupun bencana sosial (transien) (Dewan Ketahanan Pangan, 2006: 57). Adapun, ketahanan pangan

secara luas diartikan sebagai terjaminnya akses pangan bagi setiap individu untuk memenuhi kebutuhan pangannya agar dapat hidup sehat dan beraktivitas. Membahas kerawanan pangan pada dasarnya juga membahas hal-hal yang menyebabkan seseorang tidak tercukupi kebutuhan pangannya yang dipengaruhi oleh ketersediaan pangan, distribusi, dan akses terhadap pangan (Ariningsih dan Rachman, 2008: 240).

Kerawanan pangan menjadi salah satu bagian dalam permasalahan ketahanan pangan (Hanani, 2012). Ketahanan pangan memiliki lingkup kajian pada rumah tangga dan individu. Selain itu, ketahanan pangan juga mengkaji masalah pangan dengan manusia sebagai sasarannya. Terdapat strategi dalam penanganan masalah pangan yang dapat dilakukan masyarakat. Strategi tersebut dilakukan dengan meningkatkan ketiga subsistem dari ketahanan pangan (ketersediaan pangan, akses pangan, dan penyerapan pangan). Dalam usaha menghadapi masalah pangan, status gizi individu berupa penurunan angka kelaparan, gizi kurang, dan gizi buruk menjadi keluaran sehingga angka harapan hidup meningkat.

Kerawanan pangan terjadi karena subsistem ketahanan pangan tidak dapat dipenuhi. Suatu masyarakat belum dikatakan memiliki ketahanan pangan yang baik apabila salah satu subsistem dari ketahanan pangan tidak dipenuhi walaupun komoditas bahan pangan tersedia cukup. Oleh karena itu peningkatan ketersediaan pangan, akses pangan, dan penyerapan pangan menjadi strategi dalam mewujudkan ketahanan pangan.

Dalam subsistem yang ada, terdapat indikator yang dapat dijadikan sebagai strategi peningkatan ketahanan pangan masyarakat guna menghadapi kerawanan pangan. Strategi tersebut dilakukan dengan cara meningkatkan ketersediaan bahan pangan energi per kapita, ketersediaan protein per kapita, dan meningkatkan cadangan pangan. Ketersediaan pangan merupakan langkah awal dalam mengatasi masalah pangan (Hanani, 2012: 3).

Ketersediaan pangan pada keluarga miskin sangat terbatas. Hal tersebut memaksa mereka menyusun strategi tersendiri yang sesuai dengan situasi lingkungannya. Jumarianto (2001), misalnya, mengatakan ada sejumlah langkah alternatif yang biasa dilakukan. Yang pertama adalah dengan menanam sendiri bahan pangan khususnya bahan pangan untuk sumber energi dan sayur. Jenis bahan pangan sumber energi yang bervariasi membuat mereka memilih bahan pangan yang relatif terjangkau, seperti jagung dan ubi kayu.

Langkah kedua adalah melakukan cara pengolahan tertentu atas bahan baku pangan agar cadangan bahan pangan tersedia untuk jangka waktu yang lama. Caranya adalah mengawetkan atau mengonversi bentuk bahan pangan tersebut, misalnya ubi kayu yang dijemur atau dikeringkan dan beras dibuat tepung. Pengubahan bentuk bahan pangan diikuti oleh sistem penyimpanan yang pada rumah tangga miskin disebut dengan *grobogan*. *Grobogan* adalah sebuah kotak kayu yang dimiliki oleh rumah tangga untuk menyimpan hasil panen sebagai cadangan pangan akibat tidak adanya upaya kolektif masyarakat untuk membentuk sistem cadangan pangan, seperti lumbung desa.

Dalam pemenuhan protein per kapita sebagai indikator ketersediaan pangan, masyarakat miskin juga memiliki strategi. Mereka mempersiapkan diri menghadapi kerawanan pangan dengan beternak. Ayam, kambing, dan bebek merupakan jenis hewan ternak yang lazim dimiliki oleh masyarakat miskin walaupun jumlahnya tidak terlalu banyak dan bukan untuk produksi. Hewan ternak tersebut merupakan aset produktif masyarakat miskin untuk keadaan yang mendesak. Mereka dapat menjualnya sewaktu-waktu (Hanani, 2012). Selain itu, dalam memenuhi kebutuhan protein masyarakat miskin juga memanfaatkan kondisi alam, seperti memancing di sungai dan memetik sayuran di pekarangan rumah atau tetangga.

Harga bahan pangan yang mengalami fluktuasi menyebabkan masyarakat miskin

kesulitan dalam mengakses kebutuhan pangan. Kondisi tersebut mendorong masyarakat miskin melakukan strategi untuk menghadapinya. Masyarakat miskin akan menyisihkan sedikit uang yang dimiliki untuk menghadapi kenaikan harga pasar sewaktu-waktu. Pendapatan masyarakat miskin yang sedikit mengakibatkan kepala keluarga mengerahkan seluruh sumber daya keluarga yang ada sebagai tambahan pendapatan. Anggota keluarga yang ada dikerahkan untuk ikut serta dalam memenuhi kebutuhan pangan. Mereka menganekaragamkan sebanyak mungkin kegiatan untuk menambah pendapatan. Seorang isteri biasanya mencari penghasilan tambahan untuk keluarga dengan berjualan seperti jamu dan makanan, menenun, membatik, menganyam, dan menjadi buruh. Sedangkan anak-anak sering membantu ayahnya di sawah, menambang pasir, atau memelihara ternak (Jumarianto, 2001).

Informasi tentang kenaikan harga pangan dibutuhkan oleh berbagai lapisan masyarakat, tak terkecuali masyarakat miskin. Informasi tersebut digunakan sebagai referensi dalam proses pemenuhan kebutuhan pangan. Masyarakat miskin mendapatkan informasi tersebut melalui media elektronik seperti radio dan televisi. Selain mengakses informasi dari media elektronik, masyarakat miskin juga mengakses informasi harga bahan pangan dengan cara bertanya dengan kerabat atau tetangga. Upaya pemerolehan informasi harga bahan pangan dilakukan seefektif mungkin untuk meminimalisir pengeluaran sehingga uang yang dimilikinya dapat digunakan untuk kebutuhan pangan (Jumarianto, 2001).

Dalam kehidupan bermasyarakat, terdapat modal sosial yang dimiliki oleh masyarakat miskin sebagai alternatif dalam pemenuhan pangan. Modal sosial merupakan salah satu modal dasar yang dimiliki oleh masyarakat atau komunitas. Terdapat lima aspek modal sosial dalam masyarakat (Usman, 2018; Fitria, 2017), yakni: (1) kepercayaan yang di dalamnya terdapat unsur kejujuran, kedekatan, dan keterandalan; (2) jaringan, dengan membangun

hubungan yang baik; (3) norma, mengenai pentingnya tata tertib dan berlakunya hukuman bagi yang melanggar; (4) resiprositas atau hubungan timbal balik dengan bentuk saling membantu; dan (5) gotong royong, secara kolektif membantu anggota masyarakat yang terkena musibah atau sedang memiliki hajat. Jaringan sosial yang muncul merupakan bentuk adaptasi rumah tangga dari kebutuhan, tujuan, dan hasrat individu ataupun kelompok. Masyarakat miskin tak jarang meminjam uang atau berutang di toko untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Modal sosial tersebut termanifestasikan dalam budaya bertamu dan mengirim makanan.

Salah satu hal penting dalam mengakses kebutuhan pangan ialah transportasi, begitu pula bagi masyarakat miskin. Dalam mengakses kebutuhan pangan, masyarakat miskin menggunakan kendaraan yang mereka miliki. Untuk mengantisipasi pengeluaran yang berlebihan, masyarakat miskin biasanya lebih memilih membeli bahan pangan di toko atau warung terdekat.

Strategi Pemenuhan Kebutuhan Pangan Keluarga

Konsep ketahanan pangan keluarga meluas di dunia sejak dikembangkannya teori adaptasi pangan keluarga oleh Watts tahun 1983 yang kemudian disempurnakan oleh Maxwell dan Smith tahun 1992 (Hanani, 2012). Teori tersebut dikenal dengan sebutan *Food Coping Strategies*, yaitu respon atau cara keluarga dalam menghadapi permasalahan pangan. Teori tersebut menjelaskan cara sebuah keluarga beradaptasi untuk menangani permasalahan pangan yang terjadi. Cara-cara yang biasa dilakukan oleh sebuah keluarga ialah dengan mengubah pola makan. Perubahan pola makan tersebut di antaranya terjadi dalam frekuensi makan, kualitas makanan, kuantitas makanan, dan menu makan untuk menjaga kesinambungan bahan pangan (Jumarianto, 2001).

Pada umumnya masyarakat makan sehari tiga kali, tetapi untuk menyiasati kondisi rawan

pangan, masyarakat miskin makan sehari 2 kali atau bahkan 1 kali. Mereka meniadakan sarapan pagi dan diganti dengan minum kopi atau teh. Masyarakat miskin secara tidak langsung melakukan diversifikasi pangan rumah tangga. Diversifikasi bahan pangan rumah tangga merupakan proses pemilihan bahan pangan mulai dari aspek produksi, pengolahan, distribusi, hingga konsumsi pangan di tingkat rumah tangga. Hal tersebut terjadi pada semua jenis bahan pangan, mulai dari bahan pokok dan semua bahan pangan lainnya seperti lauk-pauk, sayuran, dan buah-buahan (Tampubolon, dikutip Suyastiri, 1998).

Diversifikasi yang dilakukan oleh masyarakat miskin tidak bertujuan untuk memenuhi kebutuhan gizi keluarga secara optimal melainkan sebagai bentuk adaptasi keluarga dalam menghadapi kerawanan pangan. Rumah tangga yang berpendapatan rendah mendiversifikasi bahan pangan dengan memanfaatkan bahan lokal sehingga status gizinya tidak terjamin. Penganekaragaman tersebut tercemin dari adanya jenis bahan pangan pengganti seperti beras yang diganti jagung atau ketela, daging diganti ikan asin atau tempe, dan sayur-sayuran yang didapatkan dari lingkungan sekitar.

Masyarakat miskin di daerah rawan pangan melakukan pengeluaran paling besar untuk konsumsi yaitu sebesar 67,10% atau sebesar Rp 476.033/bulan (Purwaningsih, dkk., 2010). Separuh lebih pendapatannya dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan pangannya. Jenis bahan yang dibeli juga menyesuaikan kemampuannya. Masyarakat miskin cenderung membeli beras dengan kualitas rendah. Apabila beras tidak dapat dibeli maka diganti dengan jagung atau ubi kayu yang didapatkan dari sekitar rumah.

Kuantitas makanan diubah dengan mengurangi porsi makanan anggota keluarga. Anggota keluarga yang sudah dewasa akan menyisihkan bagiannya untuk anak-anak. Selain itu, sistem pengambilan makanan tidak menggunakan sistem prasmanan melainkan dengan berkumpul dan sudah dibagi oleh isteri.

Pendistribusian makanan tersebut merupakan bentuk kontrol keluarga dalam memastikan kecukupan makanan untuk semua anggota keluarga.

Menu makan yang tersedia dapat dikatakan makanan sederhana dengan mengurangi jenis makannya. Kesederhanaan menu adalah hal yang wajar. Nasi dan sayur biasanya disajikan tanpa lauk. Jika mereka mendapat pendapatan yang lebih terkadang ditambah tempe atau tahu. Mereka jarang dapat menyajikan menu telur dan daging. Menu daging biasanya disajikan ketika hari raya. Mereka juga jarang mengonsumsi buah-buahan. Buah-buahan yang dimilikinya akan dijual untuk memenuhi kebutuhan yang lainnya. Susu diberikan hanya untuk bayi selama bayi belum dapat mengonsumsi minuman lain selain susu.

Ketiga kajian di atas dijadikan sebagai kerangka teori untuk menjelaskan strategi masyarakat miskin dalam menghadapi kerawanan pangan. Strategi bertahan hidup, konsep ketahanan pangan dan strategi pencapaian ketahanan pangan keluarga digunakan sebagai alat untuk menganalisis upaya-upaya peningkatan ketahanan pangan yang dilakukan oleh masyarakat miskin dalam menghadapi kondisi kerawanan pangan. Dengan demikian pertanyaan dalam rumusan masalah dapat dijawab dengan tepat.

Penggunaan Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, yakni penelitian yang menghasilkan data deskriptif dari orang dan perilaku yang diamati, berupa tulisan dan lisan (Moleong, 2014: 4). Metode penelitian tersebut digunakan karena mampu memberikan gambaran dan informasi mendalam mengenai strategi dan upaya masyarakat miskin di Desa Trimurti dalam menghadapi kerawanan pangan. Dalam menentukan informan, digunakan teknik *purposive sampling* dan *random sampling*. Teknik tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kapasitas informan dalam menyampaikan informasi yang dibutuhkan dan

proporsionalitas kondisi kemiskinan yang ada, di mana kemiskinan diinterpretasikan secara relatif berdasarkan kondisi masyarakat sekitar.

Dua belas informan dipilih secara acak dari data masyarakat miskin penerima bantuan pangan non tunai di Desa Trimurti yang disediakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bantul. Wawancara mendalam dengan informan dilakukan pada sore hari selama 1,5 hingga 2 jam. Observasi dan dokumentasi juga dilakukan untuk memperkuat dan melengkapi data yang tidak didapat dari wawancara mendalam. Observasi dilakukan dengan mengamati kondisi rumah, dapur, halaman, dan keadaan sekitar rumah yang berhubungan dengan strategi yang dilakukan dalam menghadapi kerawanan pangan seperti kepemilikan tanaman pangan, ternak, dan penggunaan bahan bakar di dapur. Data yang diperoleh ditafsirkan dan disajikan dengan pendekatan deskriptif berupa narasi transkrip wawancara mendalam, narasi foto, dan hasil observasi. Selanjutnya, dilakukan triangulasi pada data tersebut dengan membandingkan data hasil wawancara dengan observasi, dokumentasi dan data yang berkaitan, data informan satu dengan data informan lainnya, dan data observasi dengan perspektif informan.

Profil Desa Trimurti sebagai Desa Rawan Pangan

Luas wilayah Desa Trimurti adalah 6,46 km² atau 35,26% luas Kecamatan Srandakan dan berada pada titik koordinat -7.938775, 110.247325 (BPS Bantul, 2019: 4). Secara administrasi desa terdiri dari 19 perdukuan dan 135 rukun tetangga. Kondisi geografis Desa Trimurti secara langsung berpengaruh terhadap proses pemenuhan kebutuhan pangan. Bentang alam yang berada di daerah pesisir pantai selatan Yogyakarta menyebabkan kualitas tanah yang tidak terlalu subur berupa tanah endapan dan pasir. Keadaan tersebut diperburuk oleh luas lahan tanah yang digunakan untuk aktivitas produksi kebutuhan pangan yang sangat sedikit.

Dari 646 ha luas areal, hanya 35 ha lahan sawah dan 41 ha lahan bukan sawah. Dari segi infrastruktur, kuantitas infrastruktur penunjang proses produksi dapat dikatakan terbatas. Dari areal tersebut hanya 42 ha lahan yang dialiri irigasi setengah teknis, sehingga dapat dikatakan bahwa produksi bahan pangan (pertanian) sangat tergantung pada cuaca dan iklim. Angka curah hujan di Desa Trimurti rendah. Pada musim hujan, angka harian tertinggi terjadi pada Januari yakni selama 19 hari. Pada musim kemarau, tidak terjadi hujan sama sekali (BPS Bantul, 2019: 6).

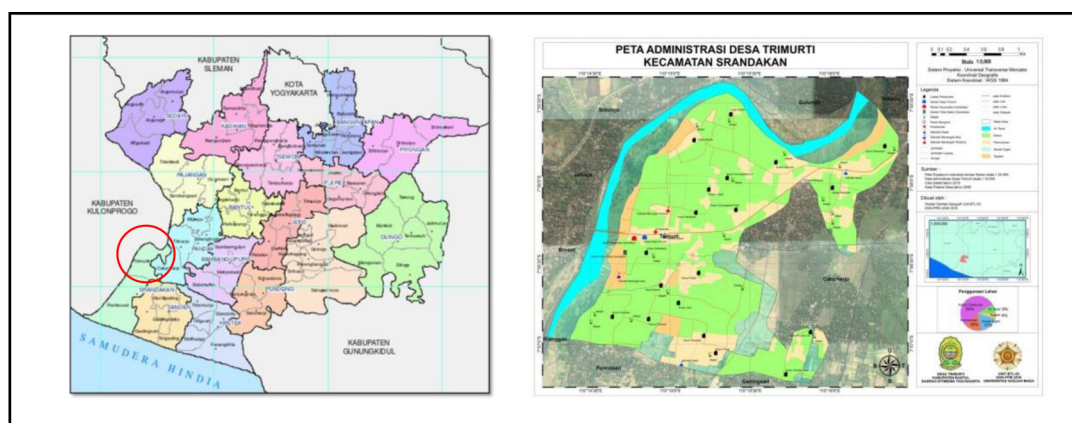
Faktor iklim itu berdampak pada produksi pertanian. Lahan yang mampu memproduksi hanya seluas 66 ha untuk padi sawah, 4 ha untuk kacang tanah, dan 9 ha untuk kedelai, dan tanpa produksi sayuran. Angka tersebut belum mampu memenuhi kebutuhan pangan Desa Trimurti. Selain itu produksi tersebut jauh lebih kecil dibandingkan dengan desa lain yang memiliki 642,8 ha luas lahan padi sawah, 34 ha luas lahan padi ladang, 75 ha luas lahan jagung, 219,6 ha luas lahan kacang tanah, dan 17 ha luas lahan kedelai (BPS Bantul, 2019: 63).

Dengan minimnya lahan pertanian, masyarakat Desa Trimurti memiliki jenis pekerjaan yang relatif bervariasi. Terdapat 415 jiwa angkatan kerja yang belum bekerja. Di sektor buruh atau pekerjaan dengan berkeahlian khusus terdapat 1.589 jiwa. Sebanyak 3.294 jiwa menggantungkan hidupnya di sektor pertanian, peternakan, dan perikanan, 1.804 jiwa menjadi

karyawan swasta, serta 460 jiwa memiliki pekerjaan lainnya (Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, 2019).

Dalam pemenuhan kebutuhan pangan, masyarakat Desa Trimurti didukung oleh pasokan bahan pangan dari luar desa. Hal tersebut dipermudah dengan adanya akses jalan yang memadai di Desa Trimurti. Desa Trimurti juga dilewati jalan lintas selatan Yogyakarta. Namun demikian, hal tersebut tidak menjadikan Desa Trimurti terbebas dari status rawan pangan karena hanya satu subsistem yang terpenuhi. Ancaman kerentanan pangan dapat terjadi sewaktu-waktu jika terjadi hal-hal seperti kekeringan panjang, terputusnya akses jalan, bencana alam, dan bencana sosial.

Dengan kondisi seperti yang telah dijabarkan di awal, masyarakat kelas atas secara otomatis dapat memenuhi kebutuhan pangannya dengan mengandalkan pasokan pangan dari luar desa dan didukung dengan keadaan perekonomian keluarga yang sejahtera. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana strategi yang dilakukan masyarakat miskin dalam menghadapi kerawanan pangan? Masyarakat miskin di Desa Trimurti harus menghadapi dua masalah secara bersamaan, yaitu masalah kerawanan pangan dan masalah perekonomian keluarga. Manajemen pemenuhan kebutuhan pangan keluarga menjadi kunci bagi keluarga dalam menghadapi permasalahan tersebut. Pola-pola strategi yang dipilih menarik untuk dibahas karena berkaitan dengan adaptasi oleh setiap keluarga yang unik.



Gambar 1. Peta Administrasi Desa Trimurti

Sumber: <https://trimurti-bantul.desa.id/first/artikel/72>

Kerawanan Pangan di Desa Trimurti

Kerawanan pangan yang terjadi bukan semata-mata disebabkan oleh kekurangan produksi pangan, melainkan oleh faktor kemiskinan (Wichelns, dikutip Atem dan Niko, 2020:100). Masyarakat Desa Trimurti yang sebagian besar bekerja sebagai penambang pasir, tidak dapat menjamin terpenuhinya kebutuhan pangan setiap hari. Kondisi tersebut semakin dipersulit dengan kondisi alam Desa Trimurti yang terletak di pesisir Pantai Selatan Yogyakarta yang menyebabkan kualitas tanah yang tidak subur. Lahan pesisir di sepanjang pantai selatan termasuk dalam kategori tanah regosol dengan ciri-ciri tanah bertekstur kasar, mudah diolah, gaya menahan air rendah, permeabilitas baik, makin tua teksturnya makin halus dan permeabilitas makin kurang baik (Darmawijaya, dikutip Ma'ruf, 2017: 1)

Hasil penelitian Sutikno tentang sifat fisik tanah pasir di pesisir Pantai Selatan Yogyakarta menunjukkan bahwa tanah di kawasan pesisir memiliki sifat marginal dengan nilai tambah yang rendah akibat sistem atmosfer yang dimiliki. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa lahan di wilayah tersebut kurang menguntungkan bagi kehidupan tanaman. Kandungan material udara yang banyak mengandung material pasir dan bahan kimia dari laut makin mempersulit kegiatan bercocok tanam terutama dalam skala yang besar (Ma'ruf, 2017).

Secara umum, kerawanan pangan diartikan sebagai kondisi suatu daerah, masyarakat, atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan. Kondisi kerawanan pangan dapat bersifat: (1) kronis, jika ditampakkan adanya gejala kurang makan secara terus menerus. Hal tersebut disebabkan ketidakmampuan memperoleh pangan baik dengan cara membeli maupun menghasilkan sendiri. Keterbatasan penguasaan sumber daya alam dan kemampuan sumber daya manusia menyebabkan kemampuan dan kekuatan fisik

kurang maksimal. Hal tersebut menyebabkan adanya kerentanan terhadap gangguan penyakit, dan pada gilirannya menyebabkan kondisi masyarakat semakin miskin; serta (2) kerawanan transien, yakni penurunan kemampuan rumah tangga untuk memperoleh pangan yang cukup. Hal tersebut disebabkan kondisi tidak terduga seperti ketidakstabilan harga, ketidakstabilan produksi, dan ketidakstabilan pasokan pangan sebagai akibat dari bencana alam, kerusakan, penyimpangan musim, dan konflik sosial (Haryana, 2009: 4).

Kerawanan pangan di Desa Trimurti tergolong dalam kondisi transien. Hal tersebut didasarkan pada ketidakstabilan produksi bahan pangan yang dipengaruhi kondisi geografis desa yang hanya memiliki lahan produksi sempit seperti yang telah dijelaskan dalam profil Desa Trimurti. Selain itu, ketidakstabilan harga juga menjadi indikator kerawanan pangan yang terjadi di Desa Trimurti. Kondisi tersebut sesuai dengan pernyataan yang disampaikan informan sebagai berikut.

"Lahan sawah di Desa Trimurti sangat sedikit, hanya ada di perbatasan dusun Sawahan."
(Srtmn, Dsn. Pedak, Trimurti)

"Harga-harga bahan pangan yang ada bisa ya lumayan mahal, saya belanjanya menyesuaikan uang ada, bisa beli setengahnya saja" (Spt, Dsn. Puron, Trimurti)

Rendahnya kecukupan dan kelayakan mutu pangan berkaitan erat dengan masalah ketersediaan pangan, daya beli dan akses kepada pangan, serta ketergantungan yang tinggi terhadap salah satu jenis pangan. Sama halnya dengan masyarakat pada umumnya, masyarakat Desa Trimurti bergantung pada beras sebagai makanan pokok. Pola konsumsi yang bertumpu dengan beras sebagai bahan pangan pokok menyebabkan ketergantungan masyarakat Desa Trimurti untuk beralih mengonsumsi pangan dari bukan beras. Selain itu, ketergantungan tersebut juga melemahkan inisiatif untuk melakukan diversifikasi produksi dan konsumsi pangan selain beras seperti jagung, sagu, ubi jalar, dan

bahan pangan lainnya yang diproduksi secara lokal. Makanan berbahan dasar selain beras tetap dikonsumsi oleh sebagian masyarakat Desa Trimurti. Akan tetapi, makanan tersebut bukan dijadikan sebagai makanan pokok melainkan sebagai makanan pendamping atau sekadar makanan ringan. Hal lain yang memengaruhi ketahanan masyarakat dalam menghadapi masalah kerawanan pangan adalah kemampuan menyediakan cadangan pangan untuk mengatasi musim paceklik. Saat ini, sebagian besar lumbung pangan milik masyarakat tidak berfungsi karena tidak dikelola dengan baik dan lemahnya dukungan dari pemerintah. Hanya orang-orang tertentu saja di Desa Trimurti yang mampu mencadangkan sumber pangannya. Pernyataan tersebut berdasarkan informasi yang diperoleh informan berikut ini.

“Tidak ada pencadangan bahan pangan kecuali dari alam dan hewan ternak rumahan. Terdapat cadangan makanan pada tingkat desa, namun milik perseorangan.” (Syd, Dsn. Bendo, Trimurti)

“Tidak melakukan pencadangan makanan seperti bahan pokok, tapi mencadangkan beberapa jenis bumbu dapur seperti (bawang, minyak, dan cabai).” (Ynt, Dsn. Bendo, Trimurti)

“Terdapat tempat penyimpanan beras, tetapi milik orang pribadi.” (Pn, Dsn. Pedak, Trimurti)

Lumbung pangan masih sering diasosiasikan untuk masyarakat pertanian. Hal tersebut menyebabkan tidak adanya lumbung pangan bersama di Desa Trimurti. Pencadangan pangan hanya dilakukan secara mandiri. Beberapa keluarga yang memiliki cadangan pangan di antaranya ialah warga yang memiliki penghasilan tinggi atau memiliki usaha seperti warung sembako. Selebihnya, bagi warga Desa Trimurti pencadangan pangan hanya dilakukan untuk ketersediaan bumbu dapur. Intensitas membeli beras lebih sering dilakukan daripada membeli bumbu dapur. Hal tersebut dilakukan karena harga bumbu dapur yang

relatif fluktuatif sehingga warga melakukan pencadangan saat harga cenderung normal atau turun. Akses informasi terhadap harga bumbu diperoleh dari media TV dan pedagang sayur keliling langganan. Untuk menjaga bumbu dapur seperti bawang dan cabai awet dilakukan proses pengasapan untuk menghilangkan kadar air sehingga memperlambat proses pembusukan.

Dengan karakteristik lahan pesisir yang tidak mudah dikelola menjadi lahan pertanian, menyebabkan kebutuhan bahan pangan didatangkan dari luar kawasan Desa Trimurti. Lahan yang tersedia di sekitar rumah yang dimanfaatkan untuk membantu ketersediaan pangan jumlahnya terbatas. Lahan tersebut biasanya dimanfaatkan untuk menanam beberapa jenis tanaman seperti jahe, kunyit, kencur, dan jenis tanaman lain yang dapat dimanfaatkan untuk mengolah makanan. Walaupun tidak secara signifikan membantu memenuhi kebutuhan pangan, tetapi dengan menanam tanaman bumbu dapur, warga dapat mengalokasikan uang belanja untuk keperluan lain. Adapun, bagi warga yang memiliki lahan cukup luas selain lahan tempat tinggal, mereka memilih memanfaatkannya untuk memelihara ternak seperti ayam, kambing, atau ditanami jenis pohon yang dapat diambil kayunya.

Penyerapan bahan pangan yang minim disebabkan karena harga pangan yang sulit dijangkau oleh masyarakat miskin. Hal tersebut diutarakan oleh beberapa informan sebagai berikut:

“Harga bahan makanan dibidang murah ya tidak juga, kalua ada uangnya ya bisa dibeli, kalua tidak ada uangnya sementara pakai bahan yang kita punya.” (Bry, Dsn. Lopati, Trimurti)

“Menurut saya harga bahan pangan itu sekarang apa-apa mahal, jadi saya belum tentu setiap hari bisa belanja.” (Ynt, Dsn. Bendo, Trimurti)

Berdasarkan aktivitas ekonomi dan pemenuhan kebutuhan pokok yang lemah,

Desa Trimurti dapat digolongkan sebagai desa dengan kerawanan pangan dan gizi. Kondisi tersebut diperkuat dengan beberapa desa lainnya di Bantul yang mengalami kerawanan pangan seperti, Desa Girirejo dan Desa Wukirsari. Pulung Hadi (2017) mengatakan penyebab kerawanan pangan yang terjadi di Bantul cukup beragam seperti, tidak seimbangnya rasio hasil produksi dengan jumlah penduduk, kondisi geografis, kemiskinan dan kesehatan. Desa Wukirari dialiri Sungai Opak. Hal tersebut sama seperti Desa Trimurti yang dilewati Sungai Progo. Namun, kedua desa tersebut menyandang status rawan pangan karena posisi lahan yang lebih tinggi dari pada sungai itu sendiri. Selain itu, kondisi perekonomian keluarga juga memengaruhi tingkat penyerapan bahan pangan yang tersedia.

Strategi Bertahan Hidup dengan Mengubah Pola Kerja

Masyarakat Desa Trimurti umumnya berasal dari ekonomi kelas menengah ke bawah. Hal tersebut berdasarkan jenis pekerjaan dari masyarakat Desa Trimurti. Jenis pekerjaan tersebut berupa buruh lepas dengan penghasilan per hari yang tidak menentu. Dalam kondisi tertentu, pekerjaan yang dilakukan terkadang tidak menghasilkan uang. Terutama bagi mereka yang bekerja sebagai penambang pasir seperti yang diungkapkan informan berikut ini.

“Suami saya mengompreg pasir setiap harinya, tetapi belum pasti apakah diangkut truk atau tidak karena di Srandakan sudah ada depo pasir besar. Terkadang ya diambil terkadang tidak, sedangkan saya sendiri seorang ibu rumah tangga.” (Tmn, Dsn. Bendo, Trimurti)

“Pekerjaan yang ditekuni keluarga saya semua bergantung pada alam sekitar, seperti menambang pasir dan mengumpulkan kelapa.” (Ynt, Dsn. Bendo, Trimurti)

“Bergantung pada pekerjaan apa saja yang ada, seringkali saya bekerja sebagai buruh bangunan atau menerima pekerjaan sampingan jika ada tetangga yang minta tolong.” (Pn, Ds. Pedak, Trimurti)

Kegiatan menambang pasir masih menjadi mata pencarian penting. Penambangan pasir adalah penambangan rakyat karena masyarakat lokal sendiri yang melakukan penambangan. Sayangnya, pembelian pasir sungai dari para penambang ini kurang signifikan untuk menopang kehidupan ekonomi dan sosial para penambang dan keluarganya. Volume penjualan masih terbatas dan fluktuatif. Hal ini tampak dari jumlah truk pengangkut yang keluar masuk lokasi pertambangan yang tidak banyak. Salah satu penyebabnya ialah kualitas pasir Desa Trimurti berada di bawah pasir Kali Gendol yang terletak di Lereng Gunung Merapi (Ermando, 2018).

Kebutuhan hidup yang meningkat dan beraneka ragam memberikan kesadaran untuk mencari peluang memperoleh penghasilan tambahan. Pekerjaan tambahan yang sering dilakukan warga adalah menjadi buruh bangunan, buruh pabrik (ketika ada permintaan tambahan pekerja untuk sementara), perkerjaan dari tetangga, hingga mengumpulkan barang bekas untuk dijual. Hal tersebut disampaikan oleh dua informan sebagai berikut.

“Mencari pendapatan sampingan seperti mengumpulkan rongsokan di sekitar rumah, menyimpan sampah dari sisa botol-botol kaca yang bisa dijual kalo ada tukang rongsok yang datang” (Srtmn, Dsn. Pedak, Trimurti)

“Saya menerima pekerjaan sampingan jika ada, seperti buruh bangunan dan buruh cuci baju.” (Asr, Dsn. Bendo, Trimurti)

Secara ekonomi dan sosial, seorang individu dari rumah tangga miskin akan melakukan serangkaian tindakan yang dipilih secara sadar guna bertahan hidup (Snell dan Staring, dikutip Setia, 2005: 6). Kemampuan seseorang dalam menerapkan seperangkat cara untuk mengatasi berbagai permasalahan yang melingkupi kehidupannya, pada dasarnya dilakukan dengan mengelola aset milik anggota keluarga. Selain upaya mencari pekerjaan

sampingan, mengerahkan anggota keluarga untuk ikut membantu bekerja dengan kapasitas masing-masing tetap dilakukan demi memenuhi kebutuhan keluarga. Selain istri, anak-anak ikut bekerja dengan cara masing-masing. Dalam situasi yang rentan, orang tua terpaksa menyuruh anak untuk melakukan aktivitas ekonomi ketika masih dalam masa pendidikan atau setelah tamat sekolah untuk membantu ekonomi rumah tangga. Dalah hal ini, kondisi subjektif anak sering tidak lagi dikecualikan.

Dua informan berikut ini menuturkan sebagai berikut:

"Anak saya yang berkebutuhan khusus, walaupun seperti itu dia dengan sendirinya ikut membantu ayahnya, pagi hari sudah bangun ikut ngumpulin kelapa yang dipetik ayahnya menggunakan arco." (Ynt, Dsn. Bendo, Trimurti).

"Setelah lulus SMK anak saya yang pertama langsung mencari pekerjaan, alhamdulillah sekarang bekerja di toko pinggir jalan, kadang ya kasih uang ke saya." (Tmn, Dsn. Bendo, Trimurti).

Harapan untuk segera terbebas dari pemenuhan biaya pendidikan anak bukan berarti membuat orang tua berharap pendidikan anaknya berhenti di tengah jalan atau hanya pada tingkat tertentu. Ada kalanya, masyarakat Desa Trimurti memiliki pengharapan agar pendidikan anak-anak mereka berdampak kepada peningkatan kesejahteraan keluarga. Harapan untuk masa depan anak yang lebih baik sering memunculkan berbagai alternatif tindakan untuk tetap bisa memenuhi kebutuhan pangan dan kebutuhan lain. Ketika penghasilan yang diperoleh hanya dapat memenuhi satu jenis kebutuhan, upaya yang dilakukan ialah berutang. Ada beberapa sebab rumah tangga perlu berutang, antara lain: 1) perubahan kondisi ekonomi, identitas sosial berkaitan dengan materialisme yang sudah menjadi hal yang umum dikalangan masyarakat yang membuat pembedaan pengetahuan dan preferensi, 3) kesederhanaan ekonomi dan demografi sebagai penjelas kesulitan keuangan

dengan *income* yang rendah, dan 4) tipologi yang menunjukkan bahwa utang dapat membeli kebahagiaan (Herispon, 2017). Salah satu penyebabnya adalah pengeluaran lebih besar dari pendapatan, sehingga ada upaya untuk memenuhi kekurangan pendapatan tersebut dengan pinjaman atau utang.

Sebelum mengambil keputusan berutang, ada berbagai upaya yang dilakukan. Upaya-upaya tersebut antara lain melakukan pengelolaan keuangan yang tepat sasaran, alokasi penghasilan dengan lebih cermat, hingga mengurangi kebutuhan yang tidak mendesak. Bagi sebagian besar masyarakat, utang bukan solusi yang mudah diputuskan untuk memperbaiki masalah keuangan. Berbagai pertimbangan dipikirkan dengan risiko yang menyertai. Sumber-sumber pembiayaan utang baik yang berasal dari lembaga keuangan bank maupun nonbank memiliki risiko masing-masing sehingga perlu dipertimbangkan dengan baik.

Harapan terakhir untuk tetap bertahan hidup bagi masyarakat miskin di Desa Trimurti adalah bantuan pemerintah dan nilai sosial. Hal tersebut disampaikan oleh beberapa informan dalam wawancara mendalam yang dilakukan. Menurutnya, bantuan dari pemerintah sangat membantu dalam pemenuhan kebutuhan pangan rumah tangga. Informan berikut ini menyampaikan sebagai berikut.

"Bantuan dari pemerintah sangat membantu mencukupi kebutuhan rumah, saya belanja seperti beras atau bawang kalau bantuan dari pemerintah sudah habis, biasanya setengah bulan sudah habis, lumayan bias lebih hemat." (Bry, Dsn. Lopati, Trimurti)

Masyarakat miskin secara terang-terangan merasa terbantu dengan adanya program bantuan dari pemerintah. Bantuan dari pemerintah meringankan beban masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan pangan walaupun belum dapat memenuhi secara utuh. Adapun harapan norma sosial ialah harapan bantuan yang datang dari lingkungan terdekat seperti tetangga atau

kerabat. Nilai saling membantu masih kuat dipegang masyarakat Desa Trimurti. Bentuk tolong menolong tersebut seperti memberi bahan pangan yang dimiliki, memberi pinjaman uang, dan memberi pinjaman bahan pangan. Hal tersebut terdapat dalam pernyataan berikut ini.

“Ya saya kalau ada daun pepaya, daun singkong, atau kacang panjang metik di kali, saya kasih tetangga sedikit. Bisanya tetangga juga ngasih saya sayur-sayuran juga.” (St, Dsn. Bendo, Trimurti)

“Ibu kalau sedang ingin makan sesuatu seperti telur atau daging, saya bilang ke kakak saya minta tolong untuk dibelikan, nanti diantar ke rumah” (Syd, Dsn. Bendo, Trimurti)

Strategi Pencapaian Ketahanan Pangan Keluarga di Desa Trimurti

1. Mengubah Pola Makan

Strategi pencapaian ketahanan pangan keluarga di Desa Trimurti dimulai dengan mengubah pola makan. Diawali dengan perencanaan pembelian dan pemilihan bahan pangan. Perencanaan tersebut mengacu pada jumlah penghasilan yang diperoleh. Dengan mayoritas penduduk berpenghasilan harian, maka intensitas belanja juga dilakukan harian. Pendapatan hari ini untuk besok dan pendapatan besok untuk lusa. Pengelolaan pendapatan dilakukan dengan sebijak mungkin dengan mengurangi pengeluaran pada kebutuhan pangan dan memanfaatkan sumber daya yang ada. Hal tersebut disampaikan oleh dua informan sebagai berikut.

“Pengalokasian kebutuhan pangan yang sedikit dan dialihkan untuk pendidikan anak, dengan harapan kedepannya dapat membantu keluarga.” (Tmn, Dsn. Bendo, Trimurti)

“Kebutuhan pangan dan pendidikan anak yang paling penting. Sejauh ini penghasilan masih bisa untuk memenuhi kedua kebutuhan tersebut. Kalo ada dimasa benar-benar kekurangan maka hal yang dilakukan mengurangi kebutuhan yang lain yang sekiranya masih bisa ditunda dan dipenuhi lain kali.” (St, Dsn. Bendo, Trimurti)

Pendapat di atas memberikan gambaran bahwa kebutuhan pangan anak lebih utama daripada orang tua. Orang tua rela mengurangi porsi makannya agar anak memperoleh makanan cukup dengan harapan menjadi tulang punggung keluarga di masa yang akan datang. Dengan keadaan demikian, masyarakat miskin di Desa Trimurti melakukan diversifikasi makanan. Pemilihan bahan pangan didasarkan pada harga lebih murah dan kualitas bahan pangan sedang. Hal tersebut diwujudkan dengan mengubah konsumsi protein dari daging-dagingan menjadi telur, tempe, atau tahu. Begitu juga dengan jenis sayur. Sayur-sayuran dengan harga yang lebih murah dipilih guna melakukan penghematan. Terlebih bahan pangan tersebut didapat dari lingkungan sekitar rumah. Tindakan tersebut dilakukan oleh beberapa informan sebagai berikut.

“Memilih jenis bahan pangan yang terjangkau dan memiliki nilai gizi.” (Syd, Dsn. Bendo, Trimurti)

“Memilih jenis bahan pangan yang terjangkau dan mudah didapatkan di alam. Memanfaatkan sisa penjualan sayur yang ada, kadang tanya sama tukang sayur mana yang harganya lagi murah itu yang dibeli.” (St, Dsn. Bendo, Trimurti)

“Menyisakan hasil tangkapan ikan. Kalo sudah punya ikan kan nggak perlu beli telur atau ayam.” (Spri, Dsn. Purno, Trimurti)

“Membeli bahan pangan yang murah dan layak. Mau doyan atau tidak suka anak harus mau makan.” (Sjl, Dsn. Lopati, Trimurti)

Akses belanja keluarga di Desa Trimurti diperoleh melalui pedagang sayur keliling dan pasar terdekat. Kegiatan belanja di pedagang sayur keliling dilakukan setiap hari, tetapi tidak dengan berbelanja di pasar. Belanja ke pasar dilakukan untuk memperoleh bahan pangan yang tidak diperoleh dari pedagang sayur keliling. Dengan penghasilan harian yang diperoleh, tidak semuanya dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan pangan.

Perubahan dalam pola makan juga dilakukan dengan mengurangi porsi makan, seperti intensitas makan, jenis makanan, dan banyaknya sekali makan. Mengurangi intensitas makan dilakukan dengan tidak makan pagi dan diganti dengan meminum kopi atau teh. Penyesuaian tersebut dilakukan oleh orang dewasa sebagai tindakan pengaturan dan pembagian makanan untuk anggota keluarga. Orang tua makan lebih sedikit atau tanpa menggunakan lauk tertentu.

Adapun, ibadah berpuasa selain mencari pahala juga sebagai siasat berhemat. Hal tersebut seperti yang disampaikan informan berikut.

“Menjalankan ibadah puasa Senin-Kamis untuk berhemat. Memilih bahan pangan yang murah dan masih cukup bagus. Mengganti menu sarapan keluarga dengan cemilan berat.”
(Smn, Dsn. Puluhan Kidul, Trimurti)

“Behemat dan memanfaatkan tanaman sekitar. Makan bersama-sama dengan anak dan diambikan (Pola pengambilan makanan). Anak terlebih dahulu dan orang tua sisanya (dalam hal pemenuhan pangan). Terkadang mengganti sarapan dengan teh dan cemilan saja.” (Ynt, Dsn. Bendo, Trimurti)

“Jenis makanan yang dibuat tahan lama seperti kering tempe, kering kentang, rempeyek dll. Variasi hanya diberikan pada lauk yang dipilih. Memanfaatkan pekarangan sekitar untuk ayam kecil-kecil dan tumbuhan yang dapat diolah. Membawakan anak bekal ke sekolah.” (Asr, Dsn. Bendo, Trimurti)

2. Berutang/Meminjam Bahan Pangan

Strategi berutang diambil dalam kondisi terdesak karena kebutuhan pangan harus segera dipenuhi. Dalam konteks pemenuhan kebutuhan pangan terjadi pada pemenuhan bahan pangan yang tidak tersedia alternatifnya di lingkungan sekitar rumah. Beberapa bahan pangan tersebut seperti, bumbu dapur, gula, dan minyak goreng. Dengan berutang kebutuhan pangan keluarga tetap terpenuhi. Bentuk dari berutang tersebut adalah dengan meminjam bahan pangan kepada tetangga atau kerabat, meminjam uang, dan mengambil bahan pangan di warung atau tukang sayur keliling.

Nilai saling percaya kepada sesama menjadi pegangan masyarakat Desa Trimurti dalam proses utang-piutang tersebut. Setiap individu yang memiliki urusan utang-piutang akan menjaga kepercayaan yang diberikan guna menjaga hubungan sosial dengan tetangga sekitar. Selain berutang, masyarakat miskin di Desa Trimurti juga mendapat bantuan secara cuma-cuma ketika mengalami kesulitan dari adanya modal sosial dari terjaganya.

Utang dilakukan oleh individu kepada individu maupun kelompok. Kelompok yang dimaksud adalah kelompok pengajian, RT dan arisan. Hal tersebut seperti disampaikan oleh informan berikut ini.

“Biasa utang beras dulu di warung, yang punya warung tidak apa-apa ... ngembaliinnya nunggu punya uang dulu, saling percaya aja”
(Tmn, Dsn. Bendo, Trimurti)

“Bapak pernah pinjam uang ke kelompok arisan RT, nanti nyicil ngelunasinnya” (Ynt, Dsn. Bendo, Trimurti)

Sampai sejauh ini, analisis di atas telah menunjukkan bahwa diketahui terdapat strategi dan upaya-upaya yang diambil masyarakat miskin di Desa Trimurti dalam menghadapi kerawanan pangan. Kerawanan pangan disiasati dengan mengubah pola kerja sehari-hari, mengubah pola makan, dan berutang. Upaya-upaya tersebut membuat masyarakat miskin di Desa Trimurti tetap dapat melangsungkan kehidupannya.

Hasil penelitian ini memiliki beberapa persamaan dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Persamaan tersebut antara lain dengan penelitian yang dilakukan oleh Atem dan Niko (2020) yang menjelaskan bahwa kerawanan pangan yang terjadi di daerah Entikong bukan semata-mata disebabkan permasalahan ketersediaan bahan pangan tetapi terdapat faktor rendahnya penyerapan bahan pangan karena kemiskinan. Selain itu, upaya berutang dan memanfaatkan modal sosial yang dimiliki individu dalam bertahan hidup juga muncul dalam penelitian Fitria (2017). Penelitian

tersebut menunjukkan bahwa masyarakat miskin dalam bertahan hidup memanfaatkan modal sosial dengan berlandaskan aspek kepercayaan, jaringan, norma, resiprositas, dan gotong royong.

Dalam penelitian ini merantau tidak menjadi upaya yang dilakukan. Masyarakat miskin Desa Trimurti memilih untuk tetap tinggal di desa dengan alasan seperti, tidak memiliki keahlian, tidak memiliki modal, dan merasa lebih terjamin hidup di desa sendiri daripada hidup di perantauan. Hal tersebut disampaikan oleh dua informan sebagai berikut,

“Bapak pernah merantau tapi sebentar saja dan balik, lebih baik di rumah saja, diperantauan tidak ada saudara. Jadi anak bekerja di sekitar sini saja.” (Tmn, Dsn. Bendo, Trimurti)

“Kalau merantau bayangan saya lebih susah, apalagi sudah punya anak, enak di desa walaupun seperti ini tapi lebih tenteram.” (Ynt, Dsn. Bendo, Trimurti)

Keadaan tersebut berbeda dengan penelitian Widodo (2011) yang menjelaskan salah satu strategi nafkah yang berkelanjutan adalah migrasi atau merantau.

Hasil penelitian ini terbatas karena hanya melihat strategi dalam menghadapi kerawanan pangan dari sudut pandang rumah tangga masyarakat miskin. Upaya-upaya yang dilakukan lembaga seperti, pemerintah desa, dinas terkait, dan lembaga swasta dapat menjadi topik penelitian yang menarik untuk ditelaah.

Pembahasan

Kajian mengenai strategi bertahan hidup ini hingga saat ini masih relevan dan cenderung tidak mengalami perubahan yang signifikan. Masyarakat miskin di Desa Trimurti dalam menghadapi kerawanan pangan dilakukan dengan melakukan beberapa strategi. Dalam strategi bertahan hidup, masyarakat miskin melakukan strategi aktif dengan mengoptimalkan anggota keluarga yang ada. Harapan kepala keluarga, pemenuhan kebutuhan pangan keluarga dapat dibantu oleh anak yang

telah menyelesaikan masa pendidikannya. Pemanfaatan rumah tangga juga melakukan strategi penghematan dalam pengeluaran untuk pemenuhan kebutuhan pangan keluarga. Dalam pemilihan kebutuhan pangan dilakukan dengan pertimbangan harga yang murah dan kualitas biasa. Masyarakat miskin di Desa Trimurti juga memanfaatkan modal jaringan yang dimilikinya. Pemanfaatan tersebut diambil apabila pilihan strategi diversifikasi tidak dapat dilakukan. Pemanfaatan tersebut dilakukan dengan meminjam baik uang atau barang bahan kebutuhan pangan keluarga.

Kerawanan pangan di Desa Trimurti tidak terlalu terlihat karena akses bahan pangan yang memadai. Namun hal tersebut tidak serta merta dapat menyelesaikan permasalahan kebutuhan pangan yang ada. Masalah pemenuhan kebutuhan pangan masih mengancam masyarakat miskin di Desa Trimurti karena masalah ketersediaan lahan dan pendapatan masyarakat miskin yang minim. Masyarakat miskin di Desa Trimurti juga merasakan manfaat dari adanya bantuan dari pemerintah.

Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga strategi yang dilakukan masyarakat miskin di Desa Trimurti, yakni:

1. Strategi Mengubah Pola Kerja.
Perubahan pola kerja dilakukan dengan memanfaatkan seluruh sumber daya yang ada di keluarga untuk memperoleh tambahan penghasilan guna memenuhi kebutuhan seperti, istri ikut bekerja, anak membantu ayah dalam bekerja, dan memanfaatkan sumber daya alam sekitar;
2. Strategi Mengubah Pola Makan.
Pola makan diubah dengan cara meminimalisir pengeluaran dengan penganggaran, pemilihan bahan pangan yang murah dan berkualitas sedang, mengurangi intensitas dan porsi makan,

serta memanfaatkan kondisi sekitar rumah seperti, daun-daunan dan hewan ternak;

3. Berutang atau meminjam.

Bentuk dari berutang adalah dengan mengambil bahan pangan di warung terlebih dahulu tanpa harus membayar tunai dan meminjam uang ke tetangga atau kerabat.

2. Rekomendasi

Berdasarkan analisis yang ada dalam penelitian ini, terdapat beberapa hal yang perlu disampaikan kepada beberapa pihak terkait dengan masalah program kerawanan pangan untuk tujuan peningkatan ketahanan pangan waraga Desa Trimurti, antara lain, sebagai berikut.

1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dan masyarakat dalam mendukung ketahanan pangan lokal;
2. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang diversifikasi konsumsi pangan;
3. Menyempurnakan sistem penyediaan, distribusi, dan harga pangan;
4. Meningkatkan pendapatan petani pangan dan sekaligus melindungi produk pangan dalam negeri dari impor;
5. Meningkatkan sistem kewaspadaan dini dalam rawan pangan dan gizi; serta
6. Menjamin kecukupan pangan masyarakat miskin dan kelompok rentan akibat goncangan ekonomi, sosial, dan bencana alam.

Pustaka Acuan

- Ariningsih, E dan Rachman, H. P. (2008). Strategi Peningkatan Ketahanan Pangan Rumah Tangga, *Analisis Kebijakan Pertanian*, 6(6), 239-255.
- Atem, A dan Niko, N. (2020). Persoalan Kerawanan Pangan pada Masyarakat Miskin Wilayah Perbatasan Entikong (Indonesia-Malaysia) Kalimantan Barat, *Jurnal Surya Masyarakat*, 2(1), 94-104.
- Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan. (2016). *Peta Rawan Pangan dan Gizi*, Yogyakarta.
- Biro Tata Pemerintah Setda DIY. (2019). *Jumlah Penduduk Kecamatan Srandakan Menurut Jenis Pekerjaan per Desa Semester II 2019*, Yogyakarta.
- BPS. (2019). *Kecamatan Srandakan Dalam Angka*, Bantul: BPS Kabupaten Bantul.
- BPS Provinsi DIY. (2017). *Profil Kemiskinan DIY Maret 2017*. Yogyakarta: Berita Resmi Statistik.
- Dewan Ketahanan Pangan. (2006). Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2006-2009, *Jurnal Gizi dan Pangan*, 1(1), 57-63.
- Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul. (2016). *Profil Kesehatan Kabupaten Bantul*, Bantul.
- Dinas Kesehatan Provinsi DIY. (2018). *Profil Kesehatan DIY*, Yogyakarta.
- Fitria, S. B. (2017). *Pemanfaatan Modal Sosial Sebagai Strategi Bertahan Hidup Masyarakat di Kampung Sri Rahayu, Kelurahan Karanklesem, Kabupaten Banyumas*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Hanani, N. (2012). Strategi Pencapaian Ketahanan Pangan Keluarga, *E-Journal Ekonomi Pertanian*, 1(1), 1-10.
- Hapsari, N. I dan Rudiarto, I. (2017). Faktor-faktor yang Memengaruhi Kerawanan dan Implikasi Kebijakannya di Kabupaten Rembang, *Jurnal Wilayah dan Lingkungan*, 5(2), 125-140.
- Haryana, A. (2009). *Konsep dan Implementasi Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan: Upaya Mendorong Terpenuhinya Hak Rakyat Atas Pangan*. Jakarta: Bappenas.
- Heripson. (2017). Utang Konsumtif Rumah Tangga dalam Prespektif Konvensional dan Syariah, *Maqdis Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 2(2), 142-152.
- Jumiantoro. (2001). *Perilaku Masyarakat di Lahan Kering dalam Pemenuhan Konsumsi Pangan Rumah Tangga*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Kementerian Pertanian. (2018). *Indeks Ketahanan Pangan*, Jakarta: Badan Ketahanan Pangan.
- Kusuma, I. (2016). *Strategi Nafkah pemulung dalam Mempertahankan Kelangsungan Hidup di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Njawi Kecamatan Pakal, Kota Surabaya*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Miyasto. (2014). Strategi Ketahanan Pangan Nasional guna Meningkatkan Kemandirian dan Daya Saing ekonomi dalam Rangka Ketahanan Nasional, *Jurnal Kajian Lemhannas*, 17, 17-34.
- Moleong, L. J. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Purwaningsih, Y, Slamet, H, Masyhuri & Jangkung, H.M. (2010). Pola Pengeluaran Pangan Rumah Tangga Menurut Tingkat Ketahanan Pangan di Provinsi Jawa Tengah, *Jurnal Pembangunan Ekonomi*, 11(2), 236-253.
- Setia, R. (2005). *Gali Tutup Lubang Itu Biasa: Strategi Buruh Menanggulangi Persoalan Dari Waktu ke Waktu*. Bandung: Yayasan Akatiga.
- Suharto, E. (2009). *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia*. Bandung: Alfabeta.

- Suharyanto, H. (2011). Ketahanan Pangan, *Jurnal Sosial Humaniora*, 4(2), 186-194.
- Suyastiri, N. M. (2008). *Diversifikasi Konsumsi Pangan Pokok Berbasis Potensi Lokal dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Rumah Tangga Perdesaan di Kecamatan Semin, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta*. Yogyakarta: Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta.
- Widodo, S. (2011). Strategi Nafkah Berkelanjutan Bagi Rumah Tangga Miskin di Daerah Pesisir, *Makara, Sosial Humaniora*, 15(1), 10-20.
- Widy, K. (2017). *Profil dan Strategi Bertahan Hidup Buruh Bangunan Ngetem di Dusun Kringinan, Desa Tirtomartini, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

Internet

- Ernando, (2020). *Pasir dari Kali Gendol, Tersohor Hingga Pantura*, <https://jogja.tribunnews.com/2018/04/02/pasir-dari-kali-gendol-tersohor-hingga-pantura>, diakses 18 Juni 2020.
- Kelurahan Trimurti, (2017), *Peta Desa*, <https://trimurti-bantul.desa.id/first/artikel/72>, diakses 16 April 2021.
- Ma'ruf, A. (2017). *Karakteristik Lahan Pesisir dan Pengelolaan untuk Pertanian*, <https://osf.io/preprints/inarxiv/pgfyv/download>, diakses 18 Juni 2020.
- Media Indonesia, (2016). *20 Desa di Yogyakarta Rawan Pangan*, <https://mediaindonesia.com/read/detail/64982-20-desa-di-yogyakarta-rawan-pangan>, diakses 30 Juli 2020.
- Pemerintah Provinsi DIY. (2016). *Database Harga Pangan DIY*, <http://bkpp.jogjaprov.go.id/harga/selengkapnya>, diakses 23 April 2019.
- Sekretariat Kabinet RI, (2017). *Inilah Perpres Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan SDGs*, <http://setkab.go.id/inilah-perpres-pelaksanaan-pencapaian-tujuan-pembangunan-berkelanjutan-sdgs/>, diakses 29 April 2019.
- Suryani, B. (2017). *Potensi Lahan Banyak, Tapi Mengapa Ada Desa Rawan Pangan?*, <https://www.solopos.com/potensi-lahan-banyak-tapi-mengapa-ada-desa-rawan-pangan-859269>, diakses 3 Agustus 2020.
- United Nation, (2015). *The 17 Goals*, <https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs>, diakses 7 April 2019.

Efek dari *Conditional Cash Transfer* pada Konsumsi dari *Temptation Goods*: Bukti dari Program Keluarga Harapan di Indonesia

The Effect of Conditional Cash Transfer on Temptation Goods Consumption: Evidence from Program Keluarga Harapan in Indonesia

Bonar Partungkoan Simanjuntak¹ dan Assoc. Prof. Yusuke Jinnai²

¹Departement of Economics, Faculty of Economics and Business, University of Indonesia, Kampus UI Depok 16424, Jawa Barat, Indonesia, bonarpsimanjuntak@gmail.com

²Graduate School of International Relations, Faculty of Professions, International University of Japan, 777 Kokusai-cho, Minami Uonuma City, Niigata, Japan 949-7248, yjinnai@iuj.ac.jp

Naskah diterima 10 Oktober 2020, direvisi 16 Februari 2021, disetujui 14 Maret 2021

Abstract

Conditional Cash Transfer (CCT) has become a well-known policy utilized by governments in many countries to serve as a safety net for low income people. However, several previous studies found that the increase of income from CCT has a negative side effect, which is the increase of the total consumption of temptation goods. This study aims to examine the effect of the application of Program Keluarga Harapan, a specific CCT program which was devised in Indonesia, to the consumption of several kind of temptation goods. The data about the total value of CCT received by the poor and the total consumption of temptation goods were obtained from IFLS, a panel survey which is representative at the country level. This study utilizes the fixed effect model and finally are able to find that an increase of about 100,000 Indonesia rupiah will decrease the consumption of tobacco by 10.9 percent. This study contributes to the literature by estimating the rupiah value of CCT.

Keywords: *Conditional Cash Transfer (CCT); temptation goods; Fixed Effect; Program Keluarga Harapan; Indonesia*

Abstrak

*Conditional Cash Transfer (CCT) telah menjadi kebijakan populer yang digunakan oleh pemerintah di berbagai negara untuk digunakan sebagai jaring pengaman bagi penduduk berpenghasilan rendah. Akan tetapi, beberapa artikel sebelumnya telah menemukan bahwa peningkatan pendapatan yang berasal dari CCT memiliki efek samping yang negatif, yaitu peningkatan total konsumsi dari *temptation goods*. Artikel ini memiliki tujuan untuk meneliti efek dari penerapan Program Keluarga Harapan, sebuah program kebijakan CCT yang dirancang secara khusus di Indonesia, terhadap konsumsi dari beberapa macam *temptation goods*. Data yang berisikan jumlah nilai CCT yang diperoleh oleh penduduk miskin dan jumlah konsumsi dari beberapa macam *temptation goods* diperoleh dari IFLS, sebuah data survey panel yang dapat mewakili level negara. Artikel ini menggunakan model *fixed effect* dan pada akhirnya artikel ini berhasil menemukan bahwa untuk sebuah peningkatan sekitar 100,000 rupiah akan mengurangi total konsumsi dari tembakau sebesar 10.9 persen. Artikel ini berkontribusi terhadap literatur yang ada dengan melakukan estimasi pengaruh setiap nilai rupiah dari kebijakan CCT.*

Kata Kunci: *Conditional Cash Transfer (CCT); temptation goods; Fixed Effect; Program Keluarga Harapan; Indonesia*

Introduction

Conditional Cash Transfer (CCT) has become a popular policy used by governments in many countries to serve as a safety net (Fiszbein 2009). CCT is a cash transfer from the government to poor households with

some conditions attached, usually in the form of future investment in human capital for the next generation, such as: the obligation to do medical check-ups for pregnant women and the requirement for children to obtain formal education in school. If the recipients of the CCT

are unable to meet the requirements, then the specific households will be deemed ineligible to accept the CCT from government.

CCT listed in many countries as an instrument to stop the poverty cycle. The extra fund transferred will lift their life standard above poverty line. In addition, the future investment in human capital, such as health, nutrition, and education would enable the next generation to elevate themselves from poverty.

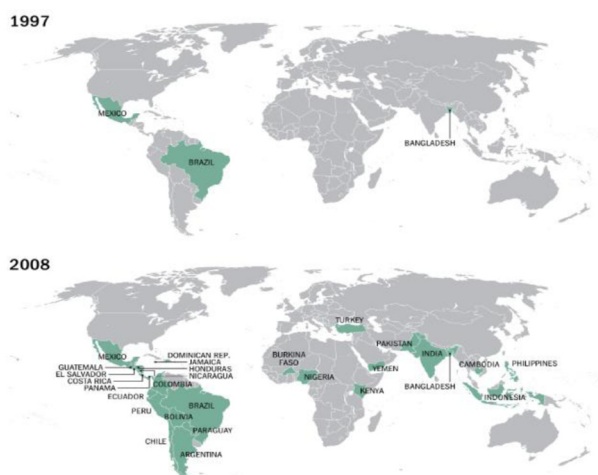


Figure 1.

The popularity of CCTs in the World throughout time, 1997 and 2008

Source : "Conditional Cash Transfers," by Fiszbein and Schady, *The World Bank*, pp. 667–671

Indonesia has launched its CCT program with the name *Program Keluarga Harapan* (PKH) in 2007 (Kementrian Sosial Republik Indonesia 2013). This program is continuously improved every year in terms of the amount of funds transferred and the number of households covered. This program is utilized to give financial aid to families who have pregnant mothers and school age children with the purpose of enabling pregnant mothers give birth to healthy babies and to give children a set of knowledge and skill from education attained.

Some said giving cash to families could cause them to spend it on other needs unrelated to the purpose of the CCT. For example, CCT is given to help households pay the cost of

education and medical check-up for expected women, but there is a possibility that the CCT received could be used to buy other essential needs that are not beneficial to children's education and pregnant mother's needs. This purchasing is categorized as "temptation goods" (Banerjee and Mullainathan as cited in White 2016). Thus, the aim of PKH which is to give positive benefits to future generations could be diminished or even negated by the consumption focuses on present satisfaction, ignoring the future benefits that could be achieved by spending PKH on more productive items.

Initially, temptation goods that is defined by Banerjee and Mullainathan (as cited in White 2016) only covered alcohol and tobacco. However, more recent studies have added other goods, such as soft drinks and Chinese food to the goods defined as temptation goods (Dasso and Fernandez as cited in White 2016). It is strengthen by survey in Hyderabad, India. This survey asked households the luggage would be removed from their expenditure to reduce the expenses. The result revealed that twenty eight percent of households listed at least one goods mentioned before and forty four percent of households put alcohol and tobacco at the top of the list (Banerjee and Duflo as cited in White 2016).

The hypotheses of this study is the rise of income from CCT will decrease the consumption of temptation goods. This result is supported by previous studies summarized by Evans and Popova (Evans 2014), that among forty four regression done in nineteen studies, eighty two percent of the results produce negative sign, meaning that this eighty two percent regression shows that the increase of income from CCT reduces the consumption of temptation goods.

Revealing the causal relationship between the introduction of the PKH and the consumption of temptation goods in households will show the effectiveness of the PKH. Quantitatively measuring the impact of the development of consumption in temptation goods from the

amount of PKH, this study gives the feedback to government about the effects arised from government policy. By measuring the impact policy, it need to be minimized the negative impact and resulting positive result from its application in the field.

Literature Review

Previous literature has described temptation goods as contentment in the present utilization but do not give any benefit to future interests (Banerjee and Mullainathan as cited in White 2016). In other words, it is a result of a condition where an individual who Another is impatient enough choose to ignore the long-term expenditure plan that actually beneficial for future and prefer to consume temptation goods. This literature classifies alcohol, tobacco, sweets and sugary foods, and soft drinks as temptation goods.

There are several different opinions about how the PKH affects of temptation goods expenditure. First opinion is about effect of income to the consumption of goods. If luge categorized as temptation goods is considered as normal goods, then the consumption will increase as the income increase due to receiving cash transfer from the government. In contrast, the opposite will happen if the temptation good is considered as an inferior good where the consumption of it will decrease if the income increase. For example, Decker and Schwartz (as cited in Evans 2014) reveal that alcohol is actually a normal good, while tobacco is considered as an inferior good based on the their study in the United States.

Secondly, another opinion stated that CCT is actually generate an increase in relative value of education and health investment in comparison to other type of goods (Fiszbein, et al. as cited in Evans 2014). These increased value of education and health will shift the preference of households to consume more education and health of temptation goods. Another study which was done in Brazil and Mexico propose

education as normal good which experiences the rise of expenditure as income growth (Estevan 2013). This also indicates that the raise of income may go to education instead of temptation goods.

Thirdly, other literatures also reveal that CCT policy often accompanied by intense public service advertisement. Government usually match the CCT policy with frequent social advertisement supported with high budget. As a result, there is a possibility that households' attitude is affected by the social advertisement. Ecuador's government, for instance, has bundled its CCT policy with a social advertisement which the urge of households to invest more in human capital for their future generations (Schady and Rosero as cited in Evans 2014). Team leader of CCT program in Nicaragua has an additional task to relentlessly inform the households which receive CCT to spend the cash on many things that are beneficial to their health and education (Adato and Roopnaraine as cited in Evans 2014 a).

Finally, the recipient of the CCT is usually women as shown in South America (Fiszbein, et al. as cited in Evans 2014 a). This condition happens because of the traditional belief that women will always allocate more fund and effort to their children compare to men. A study shows that giving the cash to the hand of women will increase children's health to a better state based on the data from Brazil (Thomas as cited in Evans 2014 a). another research in Macedonia reveals that arranging the CCT to women has considerably raise expenditure allocated for children and at the same time it also enlarged children's enrolment and performance in secondary school, with the prerequisite that the parents view of education attained by their children as a very important thing (Armand as cited in Evans 2014). Nevertheless, two other studies have found that giving CCT to either women or men proceed into un-worthy results for their children.

Table 1.
Evaluations of Several Conditional Cash Transfer Programs

Study	Program	Main findings	Issues covered
Behrmann and Hoddinot (2001)	Progresa (Mexico)	The distribution of nutritional supplements and other health care actions have alleviate the stunted problems and improve child growth.	Distribution of bargaining power and equality in a household.
Bourguignon and others (2002)	Bolsa Escola (Brazil)	Ex ante evaluation shows improvement in school attendance, with the poor become the most contributor, but generating no effect in the present level of poverty. In contrast, unconditional cash transfers yield no effect on child labor and school attendance.	Implementation, targeting, redistribution.
Cardoso and Souza (2003)	Bolsa Escola (Brazil)	No effect on child worker but positively affecting school attendance.	Targeting, equality, efficiency.
Schultz (2001)	Progresa (Mexico)	Positive effect on academic achievement. It affect household's wealth in Mexico's rural areas.	Implementation, equity-efficiency trade-off, equality.
Heriana Bangun, Matias Siagian, Humaizi Humaizi (2019)	Program Keluarga Harapan (Indonesia)	Effectively reaching the objective in general. Need more improvement in some aspects, such as: officers have subpar performance, program beneficiaries who absent from group meeting, damaged and lost program cards.	Targetting accuracy, implementation, objectives achieved, effectiveness of monitoring.

Source : multiple sources

Methods

This study uses data from Indonesian Family Live Surveys (IFLS), which is a panel survey is representative at the country level. It is conducted by RAND corporation, a non-profit and non-partisan research organization. This survey carried out to collect the data needed to examine behaviour and output. This survey is filled with various data in individual and household level in which some of them will be used in this study, such as: expenditure per capita of households, the education level of head of households, the age of head of the households, the share of adult member in households, and whether the households live below the poverty line (measured by comparing expenditure per capita of the household to poor consumption limit set by *Badan Pusat Statistik*).

The IFLS data set used in this study is the results of the IFLS wave 3 (conducted in 2000), wave 4 (conducted in 2007), and wave

5 (conducted in 2014). Figure 2 shows the coverage of the sample in the survey encompass about 30,000 respondent live in 13 provinces in Indonesia. This survey represents 83 percent of the population in Indonesia. Along with several characteristics of individual, the survey also contains characteristics of households. Every individual in IFLS has been identified as a member of a certain household.



Figure 2.
The Provinces Included in IFLS
Source : RAND Corporation

In this study, there are adjustments that have to be created to enable the regression smoothly. Some negative data that is illogical will be treated as missing value observations. Vehicle tax paid last year, for instance, is impossible to have negative value. However, it happened in one observation, so in order to treat it logically, the value changed into missing quantity. In other variables, the answer of “do not know what the answer is” is changed into missing value too. The number of provinces in Indonesia changed; West Java province is divided in 2000 into West Java province and Banten province. To keep the consistency in the panel of dataset from 2000 to 2014, the information in 2000 from the level of regencies is recalculated again into two provinces. Last but not the least, since the data in provinces located outside Java island is not equal compared to the Java island, then this study will use only provinces in Java island.

However, there are some statistical data which will be used for some regional characteristics in the regression which cannot be obtained from IFLS dataset. For example, this writing uses the share of poors and the total population in every province. In order to obtain the data in the respected year (2000, 2007, and 2014), official accumulation from *Badan Pusat Statistik* (BPS) is downloaded from its website. BPS has formally published statistical yearbook which can be downloaded freely. Publications from BPS, *Statistik Indonesia 2007* and *Statistik Indonesia 2014*, are used to fill the data needed to run the development for year 2007 and year 2014 respectively, while for completing the data of 2000, another publication of BPS, *Penduduk Indonesia Hasil Sensus Penduduk 2000 Seri RBL1.1*, is used.

Variables

The dependent variables in this study are determined by following previous literature in consideration with the data available in IFLS survey. Thus, the main output of this study are several temptation goods; alcohol, tobacco, and carbonated soft drink.

Since the aim of this study is to observe the effect of the introduction of PKH to the consumption pattern of temptation goods, so the independent variable in this study would be the amount of PKH which is received by the households. IFLS survey already has the data of the total amount of PKH. It is held last year before the survey was conducted.

This study utilize control variables based on the previous studies conducted by Bazzi, Sumarto, and Suryahadi (2015a) and White and Basu (White2016). Several control which will be used; head of household's degree level, head of household's sectoral job, and others. Table 2 shows some variables which are used in this study.

Table 2.
Variables and Descriptions

Variables	Description
Male	Whether the head of household is a male or not
Age	The age of head of household
HsSz	The floor size of the house in the square meter
OwnTV	Whether the household own television
OwnFreze	Whether household own freezer
Poor	whether household is categorized as poor HH
ExpeC	Total expenditure per capita
EducExpeC	Education expenditure per capita
FdExpeC	Food expenditure per capita
NFdExpeC	Non-food expenditure per capita
Elec	Whether the house has access to electricity
Urban	Whether the household is located in urban area or rural
MemHH19Mp	The proportion of male school age children in HH
MemHH19Fp	The proportion of female school age children in household
MemHHAMp	The proportion of male adult in household
MemHH	The total number of members of household
Households characteristics	yes

Source : RAND Corporation, calculation using Stata app

In this study, the characteristics of head of households and the households themselves are significantly affect the consumption of temptation goods. In general, the gender of the head of the households, would affect the consumption of temptation goods, since women are believed to consume less, (not consuming at all,) alcohol, soft drink, and tobacco than men. In addition, the characteristics of the region (province-based research) are also considered change of consumption. Factors such as culture and demography of the regions could control the amount of temptation goods consumed.

Summary Statistics

Table 3 describes the statistics summarized into variables. Overall, there are around 4378 - 4387 observations in this study. For the

consumption of the temptation goods, it can be seen that the standard deviation is larger than the mean. It is show that the data is spread wider. This study happened because most of the data for the consumption is filled with zero. The main interest, the total amount of PKH received by households in rupiah, is actually have a lot of zero value too. In addition, around eighty three percent of the head of households are male. The average age for heads of households is about forty nine years.

As it was stated before, this study uses many variables followed the combination of previous studies done by Bazzi, Sumarto, and Suryahadi (2015a) and White and Basu (2016). By combining their studies, it is expected that this study will produce a clear result.

Table 3.
Summary Statistics

Variables	Obs	Mean	Std. Dev.	Min.	Max.
yearly alcohol consumption per capita	26,246	156.0104	4474.416	0	300000
yearly soft drink consumption per capita	26,241	557.1545	4505.721	0	399999.2
yearly tobacco consumption per capita	26,143	5729.27	13302.48	0	500000
the amount of PKH received by households	20,466	17310.78	204075.5	0	9300000
Male	27,527	.8353253	.3708934	0	1
Age	27,258	49.09843	13.97666	12	120
HsSz	27,513	100.4229	410.9586	0	9999
OwnTV	26,288	.7764379	.4263868	0	1
OwnFreze	26,288	.465878	.4988438	0	1
Poor	27,527	.4770589	.4994825	0	1
ExpeC	26,123	15.32011	1.609728	0	22.38763
EducExpeC	26,123	562544.9	2261904	0	1.75e+08
FdExpeC	26,258	49313.03	85115.26	0	6839237
NFdExpeC	26,255	1.75e+07	9.06e+07	0	5.10e+09
Elec	26,290	.9569798	.2095466	0	1
Urban	27,527	.5268282	.4992888	0	1
MemHH19Mp	27,527	14.38715	15.38076	0	100
MemHH19Fp	27,527	14.04223	15.11081	0	100
MemHHAMp	27,527	32.83307	16.85111	0	100
MemHH	27,527	6.032804	2.819495	1	38

Source : RAND Corporation, calculation using Stata app

Empirical Strategy

The purpose of this study is to find the causal relations between the amount of PKH received by household and the amount of consumption

of alcohol, soft drink, and tobacco. To achieve the goal, the fixed effect model below is used:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 PKH_{it} + \beta_2 X'_{it} + \gamma_1 Year_t + \alpha_i + u_{it} \quad (Eq. 1)$$

Y_{it} : Consumption of temptation goods.
 PKH_{it} : The amount of PKH households received.
 X'_{it} : Control variables.
 $Year_t$: Year effects.
 α_i : Household fixed effects.
 u_{it} : Error terms.
 i : denote household.
 t : denote year.

Where Y_{it} (Outcome Variable) denotes the per capita consumption of temptation goods of households i at year t . PKH_{it} is the amount of PKH in Indonesia rupiah received by households. β is the coefficient of explanatory variables. X' is control variables which include head of households, households, and regions characteristics. u_{it} are error.

The household fixed effect α_i is a factor that consists of characteristics of households which cannot be observed: habit of alcohol drink, smoking, and soft drink consumption. With the assumption that these unobservable characteristics are constant throughout time, this study utilizes fixed effect model to solve these endogeneity problem.

Results and Discussion

Results

Table 4 shows the results of this research. The results of the fixed effect model regression show that there is an effect from the introduction of PKH policy to the consumption of temptation goods. These regression results show that for 100,000 Indonesia rupiah, which is equivalent to approximately 6 US dollar according to selling price of exchange rate of Bank Indonesia at 24 March 2020 (BI 2020), transferred to the households there are 0.0 percent decrease in alcohol consumption, 1.1 percent decrease in soft drink consumption, and 10.9 percent decrease in tobacco consumption.

However, with the exception of the estimate from one of outcome variables, the consumption of tobacco, which has one percent significance level, the other two approximation of soda drinks and tobacco consumption are insignificant. The detail investigation to the value of the consumption of temptation goods reveal that the number of non zero observation of tobacco is larger than the number of non zero observation of alcohol and soft drink.

Table 4.
Results

Variables	Logarithmic of alcohol consumption	Logarithmic of soft drink consumption	Logarithmic of tobacco consumption
The amount of PKH received by households	0 (0.00000002)	-0.00000011 (0.00000028)	-0.00000109*** (0.00000006)
Male	0.02068372*** (0.00130705)	-0.18815052 (0.08806964)	2.06820515*** (0.15702776)
Age	-0.00163824 (0.00071886)	-0.01020124** (0.00117164)	-0.01554921 (0.00786548)
Logarithmic of the size of the floor of the house	-0.01035272 (0.00588079)	0.06766232 (0.11361007)	0.07368717 (0.04762656)
Whether households own a TV	0.00333167 (0.00248719)	0.04956944 (0.06838555)	-0.09033288 (0.11334702)
Whether households own a freze	-0.00011785 (0.00856495)	0.20300575 (0.08206239)	-0.19857241 (0.19764238)
Whether household is categorized in poor household	-0.00823559 (0.03018259)	-0.22271443 (0.27184225)	0.17076442 (0.2331289)

Logarithmic per capita of household total expenditure	0.04238884 (0.02482848)	0.09216878 (0.25418888)	-0.60244089* (0.19610999)
Logarithmic per capita of household education expenditure	-0.00193434* (0.00060659)	0.01293431 (0.00987969)	0.00359515 (0.0269652)
Logarithmic per capita of household food expenditure	0.00575658 (0.00706732)	0.58059027** (0.10850805)	1.04430572*** (0.0651086)
Logarithmic per capita of household non-food expenditure	-0.03145692 (0.01302557)	0.17977851 (0.11787119)	0.53584918* (0.1703069)
Whether the household has access to electricity	-0.07688778** (0.01739753)	0.00103234 (0.11552531)	0.26326793 (0.10836323)
Whether the household located in urban	-0.00705437 (0.00762895)	-0.02708649 (0.15410397)	-0.25691871 (0.1379412)
The percentage of household male members who are in school age	-0.00019363 (0.00048378)	0.00244171 (0.00255998)	0.00303189 (0.00244628)
The percentage of household adult male members	0.00084332 (0.00087268)	0.00483389 (0.00173131)	0.02543795 (0.01143301)
The total number of household member	0.00152099 (0.00054372)	0.07546534*** (0.00682057)	0.14078746 (0.04963192)
Constant	-0.171 (0.424)	-11.54*** (2.879)	-8.832** (3.959)
Number of year	3	3	3
Fixed Effects	Household	Household	Household
R-squared	0.01208185	0.15235049	0.11256779
Observations	4,387	4,386	4,378

Robust standard errors in parentheses *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
Source : RAND Corporation, calculation using Stata app

Discussion

In this study, the three wave IFLS surveys in three different years was used to investigate the relations between the amount of CCT transferred and the consumption of alcohol, soft drink, and tobacco. The dataset was taken in 2000 when PKH had not started, and in year 2007 and 2014 when PKH were run. By using this approach, this study tried to measure the effect of policy by taking the data prior to CCT applied.

The results of the regression clearly depict that for every growth of the amount of PKH transferred, there is an alteration of temptation goods consumed. It is contrast with some of previous literature; Decker and Schwartz (as cited in Evans 2014) stated that alcohol is a

normal, where it will experience an increase in consumption when households enjoy the rises of income.

Banerjee and Duflo (2007) explained that the poor have low self-control to resist in consuming the temptation goods. This is supported further by lack of access to reliable saving. The poors are unable to develop the habit to save money. However, in this study it seems there are other factors which cause the poor to reduce their temptation goods' consumption when they receive PKH.

Direct counter to Banerjee and Duflo (2007) is a study from Estevan (2013). Estevan stated that there is a possibility that poors see education as an important and is needed to consume in lifting their life from poverty state. It is justify

that when the poor receive an additional income they will pour it out to education so their children can increase their life in the future.

In addition, Estevan found that education is a normal growth as the income rise. It is evidenced by the findings of the effect of CCT to the educational expenditure in Brazil and Mexico. The study revealed the introduction of CCT policy in both countries increased the expenditure on education.

Secondly, Fiszbein, et al. (cited in Evans 2014) stated that there are several factors which change the relative value of education and health higher than the quantity of temptation goods. This will offset the education and health position to be higher than the temptation goods.

Since, there are two estimations show insignificant results, it might be the result of insufficient non zero observations data, it may caused by the fault in implementing the policy. This task become the government job to check why PKH policy is effective in reducing the consumption of tobacco but unfortunately the policy is not significant enough to reduce the consumption of alcohol and soft drinks. Thus, the government must devise a new approach to the households receive PKH to increase their relative value toward education and health. It hoped the income growth from CCT will expand to future investments instead of going to the consumption of temptation goods.

Conclusion

Since all of the parameters of temptation goods show the negative sign, it means that the introduction of PKH to the society create negative effect. It means the PKH policy bundled by social advertisements intensively have able to increase the value of education and health significantly.

It is contrast with the opinion stated the temptation goods are normal. It is experiences an increase in expenditure. This result means that the temptation goods cannot be considered as an average things by viewing the beneficiaries

recipients in Indonesia. The program of government to promotes future investments has been able to overshadow the needs to increase the consumption of temptation goods.

Recommendation

According to the news about official recruitment for team leader of PKH, the jobs of a team leader are mainly to take care of the administration about households who receive PKH (Tirto.id 2020). It is an important task that needed to ensure the recipients of PKH is recorded as it will enable them to receive benefit of PKH. However, the suggested extra job to guide the households to manage their financial and additional income allocation into the right expense post as equal as important to their main tasks. By taking place to the research of Adato and Roopnaraine (as cited in Evans and Popova 2014), these additional works would maximizing the usage of PKH transferred into the accumulation of human capital to their future generations.

Acknowledgements

First of all, I would like to express my sincere gratitude to my supervisor, Prof. Yusuke Jinnai. Without his continuous guidance and support from the selection of the topic to the completion of this thesis, this study would hardly have been completed. In addition, I would like to extend my deepest gratitude to my examiner, Prof. Norio Usui, for his critical suggestions to improve my thesis.

Furthermore, I would like to express my thanks to the Indonesian government for giving me generous financial support so I can pursue my education in Japan. I would like to extend my sincere gratitude to the Japanese government, University of Indonesia, my colleagues, and my family for their helping hand throughout one year of study in Japan so I can successfully complete my master degree in International University of Japan.

Last but not the least, I wholeheartedly feel grateful for my friends in Japan for their support and encouragement throughout my stay in Japan so I can experience many attractive cultures of Japan and fulfil my childhood dream. It is my blessing to have them all in my life to experience a life in International University of Japan filled with many wonderful memories. My deepest gratitude.

References

- Bangun, Heriana, Matias Siagian, and Humaizi Humaizi (2019). *The Effectiveness of the Ministry of Social Family's Hope Program (Program Keluarga Harapan) in Increasing the Welfare of the District of Medan Johor*. Int. J. Multicult. Multireligious Underst. 6.4, p. 125.
- Bank Indonesia (2020). *Foreign Exchange Transaction Rates - Bank Sentral Republik Indonesia*, <https://www.bi.go.id/en/moneter/informasi-kurs/transaksi-bi/Default.aspx>, viewed 25 March 2020.
- Banerjee, Abhijit, and Esther Duflo (2007). *The Economic Lives of the Poor*. Journal of Economic Perspectives 21 (1), pp. 141–167.
- Bazzi, Samuel, Sudarno Sumarto, and Asep Suryahadi (2015). *It's all in the Timing: Cash Transfers and Consumption Smoothing in a Developing Country*. J. Econ. Behav. Organ. 119, pp. 267–288.
- Das, Jishnu, Quy Toan Do, and Berk Özler (2005). *Reassessing conditional cash transfer programs*. World Bank Res. Obs. 20.1, pp. 57–80.
- Estevan, Fernanda (2013). *The Impact of Conditional Cash Transfers on Public Education Expenditures: A Political Economy Approach*. Eur. J. Polit. Econ. 32, pp. 268–284.
- Evans, David K. and Anna Popova (2014). *Cash Transfers and Temptation Goods: a Review of Global Evidence*. World Bank Policy Res. Work. Pap. May.6886, pp. 1–3.
- Fiszbein, Ariel and Norbert R. Schady (2009). *Conditional Cash Transfers*. Vol. 85. The World Bank, pp. 667–671.
- Kementrian Sosial Republik Indonesia(2013). *Program Keluarga Harapan(PKH)*, <https://pkh.kemsos.go.id/?pg=tentangpkh-1>, viewed 28 February 2020.
- RAND Corporation. *Map of 13 IFLS Provinces in Indonesia*, <https://www.rand.org/well-being/social-and-behavioral-policy/data/FLS/IFLS.html> , viewed 21 march 2020.
- Rawlings, Laura B. and Gloria M. Rubio (2005). *Evaluating the impact of conditional cash transfer programs*. World Bank Res. Obs. 20.1, pp. 29–55.
- Tirto.id (2020). *Daftar Tugas Pendamping Sosial PKH Kemensos 2019*, <https://tirto.id/daftar-tugas-pendamping-sosial-pkh-kemensos-2019-emQ3>, viewed 25 March 2020.
- White, Justin S. and Sanjay Basu (2016). *Does the Benefits Schedule of Cash Assistance Programs Affect the Purchase of Temptation Goods? Evidence From Peru*. J. Health Econ. 46, pp. 70–89.
- Zimmerman, Carle C. (1932). *Ernst Engel's Law of Expenditures for Food*. Q. J. Econ. 47.1, pp. 78–101.

**Pemberdayaan Sosial dalam Penanggulangan Kemiskinan
Studi Peran Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Rumbai Jaya,
Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau**

***Social Empowerment in Poverty Alleviation Study on the Institutional Role of
Village-Owned Enterprises in Rumbai Jaya Village,
Indragiri Hilir Regency, Riau Province***

Muammar Alkadafi¹ dan Rusdi²

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Jl. H.R. Soebrantas No. 155
KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru, Telp.0761-7046522. Email; muamar@uin-suska-ac.id ; HP. 082288613283
Naskah diterima. 16 Oktober 2020, direvisi 25 November 2020, disetujui 14 Maret 2021

Abstract

The Indragiri Hilir Regency Government has designated a business entity owned by the village of Lancang Kuning, Rumbai Jaya village as a successful village-owned enterprise, seen from the perspective of income and institutional assets. Village-owned enterprises Lancang Kuning has not played a role in empowering the poor. The research objective was to determine the form of Bumdes activities in empowering the poor, knowing the institutional contribution of Bumdes in community empowerment activities. This study used a qualitative method with a descriptive approach, data collection was carried out by means of observation, in-depth interviews and documentation, The determination of informants was carried out purposively, and the data were analyzed by data reduction, data display / presentation, and drawing conclusions. The result of the research shows that Lancang Kuning village-owned enterprises, Rumbai Jaya village, has been functioning and contributing to increasing community household businesses, creating jobs, increasing village people's income and village income. This study recommends that the village government and the management of village-owned enterprises are expected to optimize the management of village assets that have not been managed, the central and local governments need to conduct training in human resource development (HR) to Bumdes managers on an ongoing basis and the community related to social entrepreneurship. .

Keywords: *empowerment; social; institutional; Village Owned Enterprises; poor community.*

Abstrak

Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir menetapkan badan usaha milik Desa Lancang Kuning Desa Rumbai Jaya sebagai badan usaha milik desa (Bumdes) yang berhasil, dilihat dari sisi pendapatan dan aset kelembagaan. Badan usaha milik Desa Lancang Kuning belum berperan melakukan pemberdayaan masyarakat miskin. Tujuan penelitian ialah untuk mengetahui bentuk kegiatan dan kontribusi kelembagaan Bumdes dalam pemberdayaan masyarakat miskin. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi, penentuan informan dilakukan secara *purposive*, data dianalisis dengan reduksi data, *display*/penyajian data, dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian, badan usaha milik Desa Lancang Kuning Desa Rumbai Jaya telah berfungsi dan memberikan kontribusi meningkatkan usaha-usaha rumah tangga masyarakat, membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa. Penelitian ini merekomendasikan, pemerintahan desa dan pengelola badan usaha milik desa diharapkan dapat mengoptimalkan pengelolaan aset-aset desa yang belum terkelola, pemerintah pusat dan daerah perlu melakukan pelatihan pengembangan sumber daya manusia (SDM) kepada pengelola Bumdes secara terus menerus dan masyarakat terkait dengan kewirausahaan sosial.

Kata Kunci: *pemberdayaan; sosial; kelembagaan; Badan Usaha Milik Desa; masyarakat miskin.*

Pendahuluan

Kemiskinan dan pengangguran merupakan permasalahan yang menjadi fokus untuk

diselesaikan oleh pemerintah sesuai amanat konstitusi (UUD 1945). Sudah banyak kebijakan formal dan kebijakan program pembangunan

dan pemberdayaan sosial-ekonomi yang dilaksanakan, tetapi belum berimplikasi secara signifikan terhadap pengurangan angka penduduk miskin di Indonesia. Pada tahun 2018 jumlah penduduk miskin di Indonesia berjumlah 25,95 juta (9,82%). Jumlah tersebut tersebar pada wilayah di perkotaan berjumlah 7,02 persen sementara di perdesaan mencapai 13,20 persen. Sedangkan pada tahun 2019 jumlah penduduk miskin di Indonesia (9,22%), di wilayah perkotaan 6,56 persen, dan di wilayah perdesaan 12,60 persen. (BPS, 2018 dan 2019). Dari data tersebut, artinya disparitas tingkat kemiskinan antara wilayah perkotaan dan perdesaan masing sangat tinggi, dan menunjukkan masalah kemiskinan membelit rakyat di perdesaan.

Pengentasan kemiskinan merupakan hal yang harus dilakukan. Permasalahan yang sebenarnya bukan terletak pada dilakukan atau tidaknya pengentasan kemiskinan itu, namun bagaimana mengentaskan kemiskinan dengan cara yang tepat sehingga memberi hasil yang efisien dan efektif. Dalam hal ini, diperlukan format yang tepat bagi pengentasan kemiskinan di Indonesia (Salisusiana, 2000: p.96).

Cita-cita pemerintah dengan menerapkan berbagai kebijakan pembangunan, baik itu pembangunan dengan pendekatan pertumbuhan ataupun pembangunan dengan pendekatan pemberdayaan (*empowerment*), semuanya sebagai upaya untuk mengentaskan kemiskinan. Berbagai program pemerintah lintas kementerian, pemerintah daerah, yang dilaksanakan selama ini ialah bertujuan untuk mengentaskan atau mengurangi angka kemiskinan. Teori pembangunan sosial merupakan sumber gagasan (pijakan awal) dari konsep pemberdayaan, bermaksud membangun keberdayaan, yaitu membangun manusia dalam mengatasi permasalahan hidupnya.

Birdsall, (2014: p.1) memandang pembangunan ekonomi dan pembangunan sosial sebagai dua hal yang terpadu. Pembangunan sosial adalah pembangunan ekonomi untuk merubah keadaan ekonomi yang lebih dari

suatu masyarakat. Tujuan mendasar dari pembangunan ekonomi bukanlah pertumbuhan ekonomi, melainkan kemajuan kesejahteraan manusia, yaitu apa yang sering disebut pembangunan manusia atau pembangunan sosial. Jadi, tujuan pembangunan sesungguhnya hanya satu yaitu kesejahteraan manusia dan pembangunan sosial adalah pembangunan manusia itu sendiri.

Gaventa dan Valderama, (2001: p.3) menyebut berbagai macam kendala yang selama ini dihadapi oleh masyarakat pedesaan dalam melaksanakan pembangunan antara lain: 1) keterbatasan kemampuan untuk mengolah dan memanfaatkan potensi sumber daya sosial yang tersedia; 2) keterisolasian dan keterbatasan sarana dan prasarana; 3) lemahnya kemampuan kelembagaan terhadap peluang-peluang bisnis yang ada jasa dan perdagangan; 4) terbatasnya akses masyarakat kepada sumber-sumber kemajuan ekonomi meliputi: akses permodalan, akses teknologi produksi, akses manajemen usaha, pengetahuan dan keterampilan SDM yang ada, akses informasi pasar dan keberlanjutan usaha-usaha produksi.

Lebih lanjut, Gaventa dan Valderama, (2001: p.2) mengatakan bahwa keberhasilan pembangunan diukur dari seberapa besar masyarakat mampu mendayagunakan sumber-sumber lokal yang mereka miliki yang secara kategoris terdiri dari: modal manusia (*human resources*), modal alam (*natural resources*), modal finansial (*financial resources*), modal fisik (*phisichal resources*) dan modal sosial (*social captal resources*). Pemanfaatan sumber-sumber daya lokal pada kelembagaan Bumdes diharapkan mampu memberikan solusi problem masyarakat pedesaan selama ini. Secara konseptual bahwa proses dan mekanisme kerja badan usaha milik desa (Bumdes) secara kelembagaan merupakan pilar pembangunan sosial ekonomi masyarakat melalui kegiatan pemberdayaan. Pada perspektif pembangunan, Bumdes berperan dalam menggali potensi-potensi lokal untuk menggerakkan dan menumbuhkan ekonomi masyarakat.

Proses pemberdayaan masyarakat desa, pelembagaan Bumdes dalam desain kebijakan formal tentang desa secara tegas disebutkan didalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan, pelaku pemberdayaan pada tingkat desa ialah Pemerintah Desa, BPD, Forum Musyawarah Desa, LMD, Kelembagaan Bumdes, Badan Kerja sama Antardesa, Forum Kerja sama Antardesa, dan Kelompok Kegiatan Masyarakat Lain.

Badan Usaha Milik Desa semakin mendapat tempat dan perhatian penting dari pemerintah sebagai suatu kelembagaan desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan komersial (*commercial institution*). Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 pasal 89 ayat b menyebut bahwa hasil usaha Bumdes ialah untuk pembangunan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Pemberdayaan sosial - ekonomi masyarakat melalui kelembagaan Bumdes, dimaksudkan “sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antardesa”. Tujuan utama pendirian Bumdes ialah: untuk meningkatkan ekonomi masyarakat desa; mengelola aset-aset desa yang tidak terkelola secara optimal; membantu masyarakat untuk membuka lapangan usaha, menjalin usaha kerja sama antardesa dengan pihak ketiga (perusahaan), dan lembaga ekonomi lainnya; menciptakan lapangan kerja warga desa untuk meningkatkan pendapatan keluarga dan untuk menambah pendapatan asli desa (Pades) melalui kontribusi hasil usaha Bumdes. (Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 2013)

Jumlah kelembagaan Bumdes sejak diperkenalkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia pada tahun 2004, hingga saat ini berdasarkan data dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia mengatakan

jumlah Badan Usaha Milik Desa berjumlah 18.446 yang tersebar di 33 Provinsi, di pulau Jawa (6.095), Sumatera (8.635), Kalimantan (992), Sulawesi (1.915), Maluku dan Papua (235), serta (574) di Bali dan Nusa Tenggara (Kementerian Desa, 2020). Hasil ekspos pemerintah pusat ataupun daerah bahwa kelembagaan Bumdes telah banyak berhasil menjalankan beberapa potensi desa yang dimiliki, pertanyaannya apakah Bumdes telah berfungsi dalam upaya penanggulangan kemiskinan masyarakat desa. Hasil penelitian Sidik, Nasution, & Herawati, (2019: p.104), tentang pemberdayaan masyarakat desa menggunakan badan usaha milik desa: Desa Pongkok dan kritik terhadap prestasi “terbaik nasional”. Kesimpulan penelitian menyebutkan. Pertama, pemerintah desa pongkok berhasil melakukan transformasi pemberdayaan masyarakat desa dari berbasis komunitas menjadi Bumdes dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya milik bersama (desa wisata alam: pemandiaan sumber mata air umbul Pongkok) dengan cara melakukan kesepakatan pembagian hasil pendapatan sehingga menghasilkan pendapatan mencapai puluhan milyar dari hasil usaha Bumdes. Kedua, dibalik keberhasilan mendapatkan puluhan milyar dari usaha Bumdes, peneliti mengkritik bahwa pemberdayaan masyarakat yang dilakukan Bumdes Tirta Mandiri Desa Pongkok baik secara langsung maupun tidak langsung ternyata tidak mengutamakan warga miskin, namun justru kepada mereka yang sebenarnya mampu secara finansial dan sosial.

Kabupaten Indragiri Hilir adalah salah satu desa yang mendapat penghargaan sebagai Badan Usaha Milik Desa terbaik se-Kabupaten Indragiri Hilir dari Pemerintah Daerah ialah Bumdes Lancang Kuning Desa Rumbai Jaya Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir. Secara demografi Desa Rumbai Jaya, memiliki penduduk 4.800 jiwa dengan jumlah kepala keluarga 1.255 KK. Mayoritas penduduknya bekerja pada sektor pertanian (kelapa lokal, sawit, karet, pinang), selebihnya bekerja pada sektor peternakan dan perdagangan. Bumdes

Lancang Kuning Desa Rumbai Jaya berdiri pada tahun 2016, saat ini telah mengelola unit usaha (simpan pinjam dan unit usaha peternakan/penggemukan sapi). Berdasarkan dokumen laporan program pengelola Bumdes Lancang Kuning telah memiliki aset kelembagaan sebesar Rp. 3.869.000.000,- dengan modal awal Rp. 500.000.000,- .

Bumdes, di Desa Rumbai Jaya Kabupaten Indragiri Hilir, telah beroperasi melakukan kegiatan selama 10 (sepuluh) tahun. Pendirian kelembagaan Bumdes bertujuan untuk melakukan pemberdayaan sosial dalam upaya penanggulangan kemiskinan masyarakat desa sehingga diharapkan terjadi perubahan kehidupan masyarakat secara sosial dan ekonomi melalui kegiatan pemberdayaan yang dilakukan. Perumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini, ialah; 1) apa saja kegiatan pemberdayaan sosial yang dilakukan oleh kelembagaan Bumdes Lancang Kuning dalam penanggulangan kemiskinan di Desa Rumbai Jaya? 2) bagaimana kontribusi kelembagaan Bumdes untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Pades) dalam kegiatan pemberdayaan yang dilakukan?

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas maka tujuan penelitian ini ialah: 1) untuk mengetahui bentuk kegiatan Bumdes dalam pemberdayaan masyarakat miskin; 2) untuk mengetahui kontribusi kelembagaan Bumdes dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Penggunaan Metode Penelitian

Kegiatan eksplorasi yang dilakukan, tim peneliti menggunakan paradigma penelitian kualitatif (*post positivisme*), dilihat dari tujuannya termasuk jenis penelitian deskriptif. Sugiyono (2013: p.227). Eksplorasi data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (*indepth interview*) dengan para narasumber dengan menggunakan teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling* dalam memilih dan menentukan informan/subjek penelitian. Wawancara telah dilakukan dengan para informan, antara lain; Kepala

Desa, Sekretaris, BPD, Direktur Bumdes, Staf Tata Usaha, Bendahara, Staf Analis Kredit, kepala unit SP, Pendamping Desa (Fasilitator Bumdes), kelompok tani, tokoh masyarakat dan warga pemanfaat dana Bumdes. Data sekunder (dokumen) yang diperoleh dan digunakan, antara lain; jurnal publikasi, buku-buku tentang desa dan Bumdes, peraturan perundang-undangan (UU Nomor 6/2014 tentang Desa, Permendesa PDTT Nomor 4 tahun 2015 tentang Bumdes, Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 6/2018 tentang Bumdes, Peraturan Desa Rumbai Jaya Nomor 1/2016 tentang Bumdes Lancang Kuning, ketentuan AD/ART Bumdes Lancang Kuning, Laporan Musyawarah Desa Pertanggungjawaban Tahunan Bumdes 2019. Observasi (pra-penelitian), tim peneliti menginap (*live in*) di Desa Rumbai Jaya selama 2 (dua) hari di rumah Direktur Bumdes Lancang Kuning. Kemudian, penelitian ini dilakukan secara mendalam selama bulan September – November tahun 2019. Setelah data primer dan sekunder selesai dikumpulkan, tim peneliti melakukan analisis data dengan menggunakan model interaktif. Data yang terkumpul dianalisis dengan pendekatan analisis data kualitatif model (Miles, 1994) melalui tiga tahapan, yaitu; data *reduction*, data *display*, dan *conclusion/verification*. Adapun proses reduksi data (*data reduction*) dalam penelitian ini ialah pertama, mengumpulkan catatan-catatan lapangan semua yang berhubungan dengan kegiatan Bumdes Lancang Kuning Desa Rumbai Jaya. Kedua, peneliti memilih data-data Bumdes yang berhubungan dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan, seperti usaha-usaha masyarakat yang dibina Bumdes dan bentuk-bentuk pembinaan.

Pemberdayaan Sosial dalam Penanggulangan Kemiskinan

1. Peningkatan dan Pergerakan Usaha Ekonomi Masyarakat melalui Bumdes
Kontribusi Badan Usaha Milik Desa dalam upaya peningkatan usaha ekonomi masyarakat

di Desa Rumbai Jaya ialah penyaluran dana ke masyarakat dalam bentuk pinjaman dana untuk memulai usaha atau mengembangkan usaha yang telah berjalan. Penduduk Desa Rumbai Jaya yang telah memanfaatkan dana pada unit simpan pinjam Badan Usaha Milik Desa berjumlah 666 orang pemanfaat. Adapun total alokasi dana yang telah disalurkan oleh unit simpan pinjam Bumdes Lancang Kuning sebesar Rp. 7.022.000.000,- (*tujuh milyar dua puluh dua juta rupiah*)

Tabel 1.
Jenis Usaha Masyarakat dalam Binaan Bumdes

No	Jenis Usaha	Orang	Jumlah (Rp)
1	Perdagangan	82	777.500.000
2	Pertanian dan Perkebunan	520	5.643.500.000
3	Perikanan	4	16.000.000
4	Jasa	7	28.500.000
5	Industri Kecil Rumah Tangga	53	556.500.000
Total		666	7.022.000.000

Sumber: Laporan Program Bumdes, 2018.

Dari data Tabel 1 dan keterangan para informan (narasumber) dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa keberadaan-faktual Bumdes telah mampu memberikan kontribusi bagi peningkatan dan pergerakan usaha ekonomi masyarakat sesuai dengan potensi ekonomi di Desa Rumbai Jaya.

2. Bumdes Membuka Lapangan Kerja

Eksistensi kelembagaan Badan Usaha Milik Desa dalam kontribusinya untuk membuka lapangan kerja. Keterangan wawancara dengan para informan (narasumber) terkait kontribusi Bumdes dalam membuka atau memperluas lapangan kerja di Desa Rumbai Jaya ialah kelembagaan Bumdes, secara umum telah melakukan pembinaan kepada warga desa, dalam bentuk pinjaman dana lunak untuk membantu warga desa memulai usaha dan pengembangan usahanya yang sudah ada. Jumlah warga Desa Rumbai Jaya dari tahun 2010-2019 yang telah memanfaatkan dana Bumdes

untuk membuat dan mengembangkan usahanya, berjumlah 666 warga.

Selanjutnya, usaha-usaha masyarakat yang didanai oleh Bumdes telah merekrut tenaga kerja atau mempekerjakan warga desa tersaji sebagai berikut.

Tabel 2.
Usaha Binaan Bumdes dan Rata-Rata Jumlah Tenaga Kerja

No	Jenis Usaha	Jumlah Tenaga Kerja
1	Perdagangan	3 orang setiap pedagang
2	Perkebunan	1 orang setiap pemilik
3	Peternakan	1 orang setiap pemilik ternak
4	Industri Rumah Tangga (Pembuat tahu dan tempe)	2 orang setiap pemilik usaha
5	Industri Rumah Tangga (Pembuat gula merah)	1 Orang setiap pemilik usaha

Sumber: Hasil Observasi, Diolah Peneliti

Keberadaan Bumdes ialah untuk melakukan pemberdayaan masyarakat desa. Data pada Tabel 2, merupakan bentuk dari kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh badan usaha milik Desa Lancang Kuning terhadap masyarakat Desa Rumbai Jaya, yang bekerja pada sektor perdagangan, perkebunan, peternakan, industri rumahan (pembuatan tahun, tempe dan pembuatan gula merah). Usaha-usaha masyarakat tersebut mendapatkan binaan dari Bumdes, mengalami perkembangan dan mampu menyerap tenaga kerja dari penduduk setempat, yang selama ini tidak mempunyai pekerjaan. Khusus usaha industri rumahan (pembuatan gula merah), menurut data yang diperoleh ada 30 (tiga puluh) kepala keluarga yang dibina oleh Bumdes, untuk memproduksi produk turunan kelapa lokal, yakni pembuatan gula merah dari rendemin nira. Usaha pembuatan gula merah ini, sebagai industri rumahan melibatkan keluarga (istri, bahkan anaknya) untuk bekerja. Ini artinya, usaha industri (pembuatan gula merah) di Desa Rumbai Jaya menciptakan lapangan kerja karena selama ini kaum ibu-ibu

(istri kepala keluarga), rata-rata hanya sebagai ibu rumah tangga.

Adapun proses tahapan produksi pembuatan gula merah yang banyak menciptakan lapangan kerja bagi warga desa, dan merupakan salah satu hasil binaan Bumdes Lancang Kuning Desa Rumbai Jaya ialah sebagai berikut. 1) pelaku industri yaitu kepala keluarga (suami) atau anak laki-laki melakukan pemotongan pucuk mayang kelapa dan memasang jerigen (penampung air nira), yang dilakukan pada waktu pagi hari, sekitar pukul 06.00 - 08.00 dan sore hari 15.00 – 18.00; 2) air nira yang ditampung, dikumpulkan pada waktu pagi hari, sekitar pukul 06.00-08.00 WIB. Selanjutnya dibawa ke penampungan atau tempat pengolahan; 3) ditempat pengolahan, dilakukan penyaringan (pembersihan) sampah dan hewan-hewan kecil yang masuk ke dalam air nira. Setelah air nira dibersihkan, selanjutnya dimasukkan ke dalam kuali besar yang dapat menampung lebih dari 20 liter air nira untuk dimasak (rebus) selama 4-5 jam. Air nira yang sudah masak ditandai dengan mengentalnya nira dan berubah warna menjadi merah. Setelah air nira mengental dan berubah warna menjadi merah maka siap untuk dicetak dengan berbagai ukuran. Pencetakan dibuat dari batang bambu atau dengan bahan lainnya. Pencetakan dibiarkan selama 5-10 menit, apabila sudah mengeras, maka gula merah tersebut siap untuk dilepaskan dari cetakan, setelah gula merah tersebut dingin, kemudian dikemas; 4) gula merah dalam bentuk kemasan, dijual oleh pelaku di rumah masing-masing, kemudian juga dijual dan dipasarkan oleh Bumdes Lancang Kuning di luar desa.

Dari keterangan informan (narasumber), dan observasi lapangan penelitian, dapat disimpulkan bahwa eksistensi kelembagaan Bumdes Lancang Kuning dalam kontribusinya membuka lapangan pekerjaan bagi warga desa, dapat dikatakan Bumdes secara umum telah berkontribusi memberikan peluang-peluang pekerjaan bagi warga desa, melalui pengembangan usaha yang dijalankan oleh warga desa.

3. Bumdes Meningkatkan Pendapatan Masyarakat

Untuk melihat eksistensi kelembagaan Badan Usaha Milik Desa Lancang Kuning Desa Rumbai Jaya, dapat dilihat dari kontribusinya pada peningkatan pendapatan masyarakat.

Dari keterangan pengelola Bumdes (sulistyani) menyebutkan “peningkatan pendapatan masyarakat yang memanfaatkan dana Bumdes sulit kami pastikan. Namun, dari hasil analisa kredit yang kami lakukan kemampuan pengembalian dan pemanfaatan dapat kami sebutkan rata-rata pendapatan masyarakat yang memanfaatkan dana Bumdes”. Keterangan para informan (narasumber) pemanfaat dana Bumdes Lancang Kuning menyebutkan pendapatan keluarganya meningkat. Sebagai contoh keluarga bapak (Senen Waluyo dan Rudi Rahayu), yang bekerja pada sektor usaha industri rumahan (pembuatan gula merah) yang memanfaatkan dana Bumdes. Keterangan kedua kepala keluarga tersebut, menyebutkan pada awal usaha pembuatan gula merahnya, rata-rata berpendapatan 100.000 – 150.000 per hari, karena masih terbatas lahan yang dikelola. Melalui pembinaan yang dilakukan Bumdes, dalam bentuk pinjaman dana untuk pembelian lahan perkebunan, saat ini rata-rata pendapatan dari usaha gula merah bapak (Senen Waluyo dan Rudi Rahayu) per hari mencapai Rp. 300.000,- 350.000.

Tabel 3.
Rata-Rata Pendapatan Masyarakat Pemanfaat
Dana Bumdes

No	Jumlah Pinjaman	Rata-Rata Pendapatan Perbulan
1	2.000.000-4.000.000	1.500.000,-
2	5.000.000-10.000.000	3.000.000,-
3	15.000.000-20.000.000	5.000.000,-
4	20.000.000-25.000.000	6.000.000,-

Sumber : Wawancara dengan Pengelola Bumdes Lancang Kuning

Dari keterangan informan (narasumber) penelitian dapat disimpulkan bahwa eksistensi

kelembagaan Bumdes Lancang Kuning secara umum telah berhasil melakukan perubahan sosial ekonomi, dalam hal peningkatan pendapatan masyarakat yang melakukan usaha, baik di bidang perdagangan, perkebunan, maupun industri kecil yang didanai dari kelembagaan Bumdes.

Kesimpulan sementara yang dapat ditarik ialah, Bumdes Lancang Kuning telah berhasil menggerakkan sebagian kecil potensi ekonomi desa, melalui pelayanan distribusi permodalan kepada pengembangan usaha-usaha masyarakat. Data penelitian juga diperkuat dari hasil penelitian survey yang dilakukan (Afiza, 2018) yang menyebutkan bahwa terjadi peningkatan hasil usaha setelah mendapat pinjaman dari dana Bumdes, sebanyak 76,20 persen masyarakat menyatakan usahanya meningkat, dan 57 persen masyarakat menjawab aset rumah tangga setelah mendapat pinjaman Bumdes menjadi bertambah. Lebih lanjut (Afiza, 2018), menyebutkan bahwa masyarakat/pemanafaat dana Bumdes merasa puas sebanyak 76,20 persen dengan hasil usaha yang dijalankannya setelah mendapat dana pinjaman. Bumdes telah berhasil dalam membantu meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Rumbai Jaya melalui pemberian pinjaman dana kepada masyarakat yang menjalankan berbagai bidang usaha seperti perkebunan kelapa sawit, perdagangan (pedagang gorengan dan pedagang pengumpul sawit), industri kecil (pembuatan

gula merah) dan jasa (sopir pengangkut sawit) sehingga dapat menambah aset rumah tangga selama menggunakan dana Bumdes. Ini berarti, Bumdes Lancang Kuning telah berperan dalam pembangunan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Desa Rumbai Jaya Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir.

Kontribusi Kelembagaan Bumdes Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Pades) dalam Kegiatan Pemberdayaan

Tujuan utama dari pendirian kelembagaan Badan Usaha Milik Desa ialah kelembagaan Bumdes diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan asli (Pades). Pada umumnya sumber keuangan penyelenggaraan pemerintah desa di Indonesia, baik sebelum berlakunya Undang-undang no 6 tahun 2014, maupun pasca berlakunya. Sumber keuangan desa dalam melakukan pengelolaan desa, masih bertumpu pada alokasi dana transfer dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Stimulan fiskal dana transfer desa belum berhasil mendorong kemandirian desa dalam menciptakan pendapatan asli desa, yang diharapkan menjadi sumber utama pendapatan desa, melalui kerja inovasi dan kreativitas pemerintah desa, mengelola kekayaan dan potensi desa. Pendapatan asli desa belum mampu diwujudkan secara nyata oleh pemerintah desa melalui kewenangan yang diberikan tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4.
Pendapatan Desa dalam APBDes Rumbai Jaya

No	Pendapatan Desa	Sumber	Jumlah (Rp)
1	Alokasi Dana Desa	APBD Kab Inhil	703.239.000
2	Dana Desa	APBN	809.089.000
3	Dana Bagi Hasil Retribusi	APBD Kab Inhil	4.083.000
4	Dana Bagi Hasil Pajak	APBD Kab Inhil	13.397.800
5	Pendapatan Asli Desa	BUMDesa	16.436.000
6	Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah	-	3.732.310
Total APBDes			1.549.977.110

Sumber: Data olahan dari laporan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Rumbai Jaya 2019

Dari data Tabel 4 menunjukkan bahwa salah satu sumber pendapatan Desa Rumbai Jaya yang termuat dalam dokumen anggaran pendapata belanja desa Rumbai Jaya ialah pendapatan asli desa (Pades) yang bersumber dari kontribusi sisa hasil usaha badan usaha milik desa (Bumdes) tahun 2019.

Untuk mengetahui pembagian secara detail jumlah keseluruhan laba usaha masing-masing kegiatan unit usaha Bumdes, terhadap kontribusinya pada pendapatan asli desa (Pades) tersaji pada tabel berikut.

Tabel 5.
Pembagian Sisa Hasil Usaha Bumdes

No	Laba Usaha	Jumlah	Kontribusi ke Desa
1	Laba BUMDesa	2.486.000	12.373.204
2	Laba Unit Usaha Simpan Pinjam (SP)	122.886.000	3.862.275
3	Laba Unit Usaha Penggemukan Sapi	25.748.500	
Total Sisa Hasil Usaha		151.480.540	16.435.479

Sumber: Laporan MDPT Bumdes Lancang Kuning, Diolah Peneliti

Dari data Tabel 4 dan 5 serta keterangan para informan (narasumber) dapat disimpulkan bahwa eksistensi kelembagaan Badan Usaha Milik Desa Lancang Kuning telah berkontribusi bagi pendapatan asli desa dari 2 (dua) unit usaha yang dijalankan oleh Bumdes. Kontribusi Bumdes terhadap pendapatan asli desa diprediksi akan terus meningkat, dimana pada tahun 2019 diprediksikan oleh pengelola Bumdes target laba Bumdes sebesar Rp. 174.400.000. Hal ini bermakna bahwa intervensi program pemerintah (*government driven*) dalam memberikan stimulasi dana transfer ke Desa Rumbai Jaya dan peran pemerintah desa melalui dukungannya secara politik (*political will*) melakukan penyertaan modal APBDes ke kelembagaan Bumdes, serta kemampuan pengelola Bumdes untuk melakukan manajemen usaha bisnis Bumdes, adanya partisipasi masyarakat, akan terbangun

eksistensi Bumdes semakin kuat dalam kontribusinya bagi percepatan pembangunan desa Rumbai Jaya kedepan.

Penutup

Kesimpulan: Dari uraian data hasil dan pembahasan penelitian pada setiap aspek yang dikaji maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Eksistensi Badan Usaha Milik Desa Lancang Kuning dalam pembangunan dan pemberdayaan desa telah berkontribusi pada pergerakan ekonomi masyarakat desa tersebut menyejahterakan sebagian masyarakat desa. Dari pembahasan hasil penelitian, berdasarkan indikator tujuan pendirian Badan Uaha Milik Desa Lancang Kuning yang paling berkontribusi ialah Bumdes dapat merintis dan meningkatkan sebagian usaha-usaha masyarakat, membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan sebagian masyarakat desa dan memberikan kontribusi pada pendapatan asli desa (Pades) yang terus meningkat pada setiap tahunnya.

Rekomendasi: Adapun yang peneliti rekomendasikan dari hasil kajian penelitian ini ialah: Pemerintahan Desa diharapkan dapat mengoptimalkan pengelolaan aset desa, dengan cara menyerahkan pengelolaannya melalui unit-unit usaha bisnis Badan Usaha Milik Desa, agar Bumdes dapat lebih maksimal memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli desa (Pades).

Badan usaha milik desa diharapkan untuk dapat membangun jaringan sosial melalui kerja sama dan hubungan kemitraan dengan badan usaha milik desa yang di Kabupaten Indragiri Hilir, dan kepada perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar Desa Rumbai Jaya. Bumdes agar dapat melakukan pemasaran produk-produk industri rumah tangga dan produk usaha kecil menengah masyarakat kejangkauan pasar yang lebih luas.

Pendamping desa (fasilitator), agar dapat memaksimalkan perannya dalam memfasilitasi pengelola Bumdes untuk membangun

kerjasama, penggalan potensi ekonomi desa, mendorong, menggerakkan, memotivasi masyarakat untuk mengembangkan usahanya, memfasilitasi kendala-kendala masyarakat dan menghubungkannya ke dinas lintas sektoral sesuai dengan spirit program Desa Maju Inhil Jaya Plus Kabuten Indragiri Hilir.

Perlu dilakukan pelatihan pengembangan sumber daya manusia (SDM) kepada pengelola Bumdes secara terus menerus dan masyarakat terkait dengan kewirausahaan sosial (*social enterpreneurship*), pengembangan manajemen model bisnis Bumdes, studi kelayakan bisnis, penyusunan rencana bisnis (*business plan*), manajemen usaha (produksi, pemasaran, keuangan, dan SDM)

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) UIN Suska Riau yang memberikan kepercayaan kepada peneliti untuk melakukan penelitian, dan memberikan bantuan dana pembiayaan dalam kegiatan penelitian ini.

Pustaka Acuan

- Afiza, Y. dan Gunawan S. (2018). Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Lancang Kuning Dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat Pengguna Dana Bumdes Desa. *Jurnal Selodang Mayang* Vol 4 No 1 April 2018. Tembilahan: BAPPEDA Kabupaten Indragiri Hilir.
- Birdsall, N. (2014). WPs IZ3 *Social Development is Economic Development*. Policy Research Department The World Bank
- Gaventa Jhon dan Valderama C. 2001. Mewujudkan Partisipasi : 21 Teknik Partisipasi Masyarakat Untuk Abad 21. Terjemahan oleh Edlina Edin. Jakarta : *The British Council*.
- Indragiri Hilir Dalam Angka, (2017). Tembilahan: Badan Pusat Statistik Kabupaten Indragiri Hilir.
- Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (2020). *Http://Kemendes.Go.Id*. tercatat sebanyak 61 persen desa telah memiliki bumdes, diakses 4 Juni 2020.
- Mulyono. (2018). *Laporan Pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Desa*. Rumbai Jaya: Forum Musyawarah Desa Rumbai Jaya.

- Miles, M. A. (1994). Miles and Huberman (1994)-Chapter 4.pdf. In *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*.
- Putra, A. S. (2015). Badan Usaha Milik Desa Spirit Usaha Kolektif Desa. Jakarta: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Ramadana, C. Ribawawanto, H. Suwondo. (2013). Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*. Vol. 1 No. 6 2013. Malang: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
- Salisusiana & Yulia, (2000). Pembangunan Sosial Teori dan Implikasi Kebijakan. Jakarta: Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi Sekretariat Jenderal DPR RI.
- Sidik, F., Nasution, F. G. A., & Herawati, H. (2019). Pemberdayaan Masyarakat Desa Menggunakan Badan Usaha Milik Desa: Desa Ponggok dan Kritik Terhadap Prestasi “Terbaik Nasional.” *Jurnal Pemikiran Sosiologi*. Volume 5 No. 2, Agustus 2018. Yogyakarta: Departemen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhirman. 2003. “Partisipasi dalam Proses Pembuatan Kebijakan” disampaikan pada Seminar yang diselenggarakan oleh USAID Jakarta 12 Agustus 2003.
- Yin, R. K. (2012). *Studi Kasus: Desain dan Metode*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Peraturan Perundang-Undangan

- Republik Indonesia. (2013) Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Jakarta : Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi.
- Republik Indonesia. (2013) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi RI Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi.
- Kabupaten Indragiri Hilir. (2017) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, : Tembilahan Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Literasi Wisata Lamalera dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Lembata, Nusa Tenggara Timur

Tourism Literacy of Lamalera in an Effort to Improve Community Welfare in Lembata, East Nusa Tenggara

Marselus Robot¹, Lasarus Jehamat², dan Yohanes Fiser Keon³

¹Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP Undana, Jalan Adisucipto, Penfui Kupang, ²Jurusan Sosiologi Fisip Undana, Jalan Adisucipto, Penfui Kupang, ³Jurusan Ilmu Politik Fisip Undana, Jalan Adisucipto, Penfui Kupang NTT

Email: lasarus.jehamat@staf.undana.ac.id; HP. 082237870890

Naskah diterima 6 November 2020 direvisi 2 Maret 2021 disetujui 30 Maret 2021

Abstract

Tourism literacy is motivated by the fact that tourism has only prioritized physical aspects. In fact, tourism is not only related to beautiful scenery. Tourism is related to the element of tourism depth. Therefore, culture-based tourism is important to research. As an international tourist destination, Lamalera is still considered mysterious. In fact, the traditional whaling process does not only illustrate the socio-spiritual relationship of society with the sea but also has a role and function of welfare. To achieve this goal, the tourism literacy of Lamalera writes the important points of the tourism aspect. This study was conducted in Lamalera using qualitative research methods. The data were collected using observation and interview techniques. The results showed that tourism literacy in improving welfare is very urgent. The people of Lamalera want people outside Lamalera to know and understand that Lamalera has tourism potential, cultural strength, and local virtues in the whaling process. In this connection, aspects of attractions, accessibility, amenities and accommodation are being built there. Cooperation of all parties is needed so that the community maintains tourism based on local wisdom.

Keywords: *Lamalera, whales, welfare, tourism*

Abstrak

Literasi wisata dilatarbelakangi oleh sebuah kenyataan bahwa pariwisata selama ini hanya mengedepankan aspek fisik lahiriah semata. Padahal, pariwisata tidak hanya berhubungan dengan pemandangan indah. Pariwisata berkaitan dengan unsur kedalaman wisata. Oleh karena itu, wisata berbasis budaya penting untuk diteliti. Sebagai sebuah destinasi wisata internasional, Lamalera masih dianggap misterius. Proses penangkapan ikan paus secara tradisional ternyata tidak hanya menggambarkan relasi sosial-spiritual masyarakat dengan laut tetapi juga memiliki peran dan fungsi kesejahteraan. Untuk mencapai tujuan itu, literasi wisata Lamalera menulis pokok-pokok penting aspek pariwisata. Kajian ini dilakukan di Lamalera menggunakan metode penelitian kualitatif. Data diambil menggunakan teknik observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan literasi wisata dalam peningkatan kesejahteraan sangat urgen. Masyarakat Lamalera menginginkan masyarakat di luar Lamalera mengetahui dan memahami bahwa Lamalera memiliki potensi wisata, kekuatan budaya, dan keutamaan lokal dalam melakukan proses penangkapan ikan paus. Berkaitan dengan itu, aspek-aspek atraksi, aksesibilitas, amenitas, dan akomodasi sedang dibangun di sana. Kerja sama semua pihak dibutuhkan agar masyarakat tetap mempertahankan wisata berbasis kearifan lokal tersebut.

Kata kunci: *Lamalera, paus, kesejahteraan, pariwisata*

Pendahuluan

Pemerintah Nusa Tenggara Timur, terutama di bawah kepemimpinan Gubernur Viktor Bungutulu Laiskodat dan Wakil Gubernur Yosef Naisoi meletakkan sektor pariwisata sebagai *leading sector* (sektor utama) dalam

usaha kebangkitan ekonomi masyarakat Nusa Tenggara Timur. Disebutkan, pilihan prioritas terhadap sektor pariwisata dipandang sebagai perspektif radikal (Dinas Pariwisata Propinsi NTT, 2017). Artinya, melampaui tradisi pemikiran pembangunan yang selama ini

berbasis pada sektor pertanian (Piriou, 2019). Pemikiran pemerintah merujuk pada kondisi geografis. Jika sektor pertanian menjadi landasan pembangunan ekonomi NTT akan mubazir, karena daerah ini mengalami kemarau mencapai 9 bulan per tahun. Padahal, merujuk (Kapioru, 2019) dan (Ratten et al., 2019) Nusa Tenggara Timur mempunyai pesona objek wisata yang sangat kaya mempunyai atraksi unik, dan budaya eksotik.

Bagi Gubernur Laiskodat, sektor kepariwisataan merupakan kekayaan tersembunyi. Bila aset ini digarap serius dan terkoneksi dengan sektor-sektor lainnya, maka akan mempercepat pembangunan ekonomi di NTT. Satu hal yang menarik dari gagasan pembangunan sektor pariwisata dari Gubernur Laiskodat ialah membangun pariwisata yang terkoneksi dengan sektor lain. Pariwisata NTT dapat mendorong peningkatan ekonomi masyarakat seperti dilakukan oleh pemerintah daerah lain di berbagai tempat (Widianto & Keban, 2020). Menurut Ohe (2020) dan Dexeus (2018) sektor pariwisata menjadi paling moderat dalam pembangunan ekonomi masyarakat daripada sektor pertanian. Dikatakan sektor moderat karena sektor ini lebih langsung, cepat, dan menyerap tenaga kerja dibandingkan sektor pertanian yang kian stagnan (Sharma, 2019).

Pembangunan pariwisata dapat meningkatkan kondisi kesejahteraan masyarakat. Sebagai sebuah lembaga, pranata pariwisata dapat dijadikan andalan dalam peningkatan kesejahteraan (Kuntjorowati, 2019).

Dewasa ini, Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu daerah destinasi wisatawan favorit dalam lalu lintas wisatawan domestik dan internasional saat ini. Keajaiban alam, keeksotikan kebudayaan dan keunikan atraksi-atraksi tradisional masyarakat Nusa Tenggara Timur menjadi magnet yang menyedot wisatawan di seluruh pelosok dunia. Menyebut beberapa contoh, Sumba terkenal dengan Pasola (atraksi berperang berkuda) dan kepercayaan Merapu yang menjadi sumber

peradaban orang Sumba. Manggarai, terkenal dengan Labuan Bajo dengan keindahan alam Pulau Padar, Varanus Komodo yang masuk dalam tujuh keajaiban dunia, atraksi *Caci* yang menampilkan estetika, etika, dan herois. Bajawa terkenal dengan pertunjukan tinju tradisional-*Etu*. Ende terkenal dengan danau tiga warna (Kelimutu). Lembata terkenal dengan tradisi penangkapan ikan paus (Kurniasari & Reswati, 2011). Rote terkenal dengan pantai Nembrala, alat musik Sasando yang mendunia. Timor terkenal dengan tenun ikat (Tandilino & Meko, 2020). Dinparekraf NTT (2017) menyebutkan masih banyak objek wisata yang belum sepenuhnya digarap di NTT.

Potensi luar biasa itu mendorong pemerintah untuk melakukan akselerasi pembangunan infrastruktur, pembangunan sumberdaya manusia sebagai pelaku industri ini, dan konservasi dan penataan objek wisata agar masuk pada etalase level internasional (Sugiarto & Mahagangga, 2020). Sebagai contoh, rencana penutupan sementara kawasan komodo adalah bentuk kesungguhan pemerintah Laiskodat untuk memelihara dan menata kembali objek wisata yang mendunia itu agar mempunyai nilai tinggi dan terpelihara.

Selain literasi di banyak bidang pembangunan seperti literasi keuangan (Laksono et al., 2019), salah satu program yang dipandang penting dan paling langsung berhubungan dengan destinasi wisata ialah literasi yakni menulis atau menarasikan keunikan, atau mitos di balik suatu objek destinasi wisata, dilengkapi dengan informasi berkaitan akses, sarana, dan prasarana akses menuju lokasi destinasi. Literasi destinasi wisata berarti pula memindahkan objek wisata dari mata ke pikiran. Dengan demikian objek wisata tidak sekadar kenikmatan mata (*visual effect*), tetapi masuk dalam memori kognitif (pengetahuan) wisatawan (Kurniati, 2018); (Liu & Schänzel, 2019).

Literasi destinasi wisata menjadikan objek wisata tidak hanya dikenang, tetapi diketahui. Jika objek wisata yang mengandalakan efek

visual (keindahan) maka hanya meninggalkan kesan. Sedangkan, objek wisata yang dipromosi dan dibanding melalui literasi menghasilkan pesan (pengetahuan) tentang destinasi wisata. Karena itu, kesan dan pesan yang didapat wisatawan hasil kombinasi antara keindahan melalui mata dan keindahan melalui pikiran (literasi) (Liu & Schänzel, 2019). Seperti pelangi yang demikian indah hanya meninggalkan kesan (keindahan), tetapi tidak mengandung pesan selama orang tidak mengetahui susunan ion matahari yang membentuk warna-warni pelangi. Dasion (2019) mengatakan literasi wisata dianggap mampu meningkatkan kondisi ekonomi masyarakat Lamalera. Atas dasar itu, pembangunan pariwisata dijadikan elemen penting peningkatan kesejahteraan masyarakat (Shintasari, dkk., 2020).

Diskusi mengenai pariwisata di Indonesia tentu harus dihubungkan dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Hal tersebut disebabkan karena pariwisata dianggap mampu menunjang peningkatan kesejahteraan masyarakat di tengah situasi kemiskinan. Di sana, tujuan kesejahteraan sosial ialah memenuhi kebutuhan sosial masyarakat. Usaha kesejahteraan sosial dibutuhkan terutama karena banyak lembaga lain, seperti pasar, gagal memenuhi kebutuhan dasar baik individu maupun masyarakat (Zastrow, 2017).

Mandeknya praksis kesejahteraan sosial di banyak negara disebabkan karena perencanaan kesejahteraan selama ini sering dilakukan dari atas (*top-down*). Ebbinghaus & Naumann (2017) mengatakan perencanaan kesejahteraan yang baik selalu atau dimulai dari bawah. Semua kebutuhan masyarakat bukan merupakan bentukan lembaga dari luar tetapi berdasarkan kebutuhan nyata di masyarakat. Satu dekade terakhir upaya pembangunan mulai dari dasar sudah mulai dilakukan.

Setiap wilayah memiliki keunikan fisik, sosial, budaya, dan politik. Kerangka kesejahteraan sosial hendaknya dibuat menurut keunikan setiap wilayah dan kelompok

masyarakat. Pembangunan kesejahteraan sosial yang sukses dapat tercapai jika pembuat dan perancang kebijakan mendasari kebijakan pada keunikan lokal. Model pembangunan seperti itulah yang disebut sebagai pembangunan berbasis warga (Kruks-Wisner, 2018).

Berkaitan dengan diskusi di atas, pembangunan pariwisata didorong untuk mengandalkan kekuatan masyarakat sendiri. Artinya, setiap program pembangunan pariwisata dilakukan menurut corak dan model keunikan masing-masing masyarakat. Dengan demikian, kehadiran banyak lembaga dari luar NTT untuk membantu merancang dan merencanakan program pembangunan pariwisata dalam rangka kesejahteraan sosial dituntut memerhatikan keunikan itu.

Pada bagian lain, London & London (2018) menyebutkan, kemiskinan dan ketidakadilan di Asia disebabkan karena kegagalan banyak aspek di dalamnya. London dan London menggambarkan agak spesifik terkait dengan berbagai macam program pembangunan. Menurut London & London, Asia dikenal sebagai salah satu wilayah yang sangat kaya. Kelemahan dalam bidang pemasaran apa pun menyebabkan kekayaan itu tidak bisa diubah menjadi modal untuk menggerakkan perekonomian masyarakat. Implikasinya, kesejahteraan sosial sulit dicapai di wilayah ini.

Menurut Gao (2018) partisipasi masyarakat dibutuhkan untuk membangun kesejahteraan sosial di wilayah Asia. Disebutkan, wilayah ini memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi di dunia. Padahal, Asia merupakan salah satu wilayah di dunia yang memiliki potensi alam dan manusia. Di wilayah ini pun, banyak kebiasaan yang tumbuh di masyarakat dalam berbagai macam bentuk lembaga sosial. Yang masih kurang ialah memadukan berbagai macam keutamaan tersebut untuk menyelesaikan berbagai macam persoalan di masyarakat.

Berdasarkan pada latar belakang dan kajian literatur terkait maka penelitian mengenai

literasi wisata dalam kaitannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat penting untuk dilakukan.

Penggunaan Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kawasan wisata Lamalera. Pilihan lokasi Lamalera berdasarkan alasan faktual daya tarik wisata Lamalera berbasis budaya masyarakat lokal.

Penulisan literasi destinasi wisata merujuk pada kondisi faktual objek wisata tersebut. Oleh karena itu, diperlukan langkah sistematis dan cermat dalam cara mendapatkan data dan informasi sehingga penulisan literasi destinasi wisata menarik dan dapat mempengaruhi wisatawan. Pengumpulan dan informasi yang berkaitan dengan destinasi wisata dibagi atas tiga:

Observasi. Observasi dilakukan oleh tim penulis di daerah destinasi wisata. Observasi ini bertujuan untuk mengamati secara detail dan seksama keunikan atau kekhasan objek wisata dan lingkungannya, termasuk mengamati aktivitas masyarakat penyangga objek wisata tersebut.

Wawancara. Wawancara dilakukan terhadap informan yang dipilih secara purposif atau berdasarkan pertimbangan tim penulis untuk mendapatkan informasi yang akurat dan komprehensif tentang objek wisata tersebut. Karena itu informan dikenai syarat: (1) Ia sangat memahami seluk-beluk destinasi wisata, (2) memahami mitos atau legenda terjadinya tempat atau objek wisata tersebut, dan (3) hal-hal lain yang dibutuhkan tim penulis.

Memotret. Pemotretan dilakukan bertujuan memperlihatkan keunikan dan keindahan yang menjadi magnet objek wisata tersebut. Terutama, keunikan yang membedakan dengan objek wisata lainnya.

Instrumen. Ada dua cara mengumpulkan data yakni observasi dan wawancara. Sehubungan itu, diperlukan dua instrumen untuk mengumpulkan informasi yang disusun dan bentuk pedoman observasi dan pedoman wawancara.

Pedoman Observasi dan Pemotretan.

Tim penulis literasi destinasi wisata melakukan observasi tempat atau objek wisata:

- 1) keunikan objek atau tempat,
- 2) lingkungan objek atau lokasi destinasi,
- 3) keadaan tipografis, gunung, lembah, dataran tinggi,
- 4) Sarana dan prasarana di lingkungan destinasi,
- 5) lingkungan komunitas atau masyarakat di sekitar destinasi, dan
- 6) memotret semua yang diobservasi.

Hasil dan Pembahasan

Lamalera merupakan sebuah wilayah yang terletak di ujung selatan Kabupaten Lembata. Secara administratif, wilayah Lamalera terbagi menjadi dua desa yakni Desa Lamalera A dan Desa Lamalera B untuk mempermudah urusan pemerintahan. Kendati demikian, baik Desa Lamalera A maupun Desa Lamalera B merupakan satu kesatuan yang diikat oleh keturunan, tradisi adat serta nilai-nilai sosial dan religi yang sama (Dasion, 2019); (Tandilino & Meko, 2020).

Lamalera terkenal dengan tradisi penangkapan Ikan Paus atau *Kote Kelema* dalam bahasa setempat. Wilayah yang dihuni oleh penduduk dengan karakter budaya dan religi yang sangat kental ini memberi nuansa eksotik bagi setiap pengunjung yang datang. Hamparan rumah penduduk yang membentang sepanjang pantai dan lereng bukit dan menghadap ke laut seolah menegaskan eksistensi laut sebagai “sang pemberi kehidupan” bagi masyarakat Lamalera. Konon, ketika masyarakat Lamalera melaut untuk menangkap ikan, pintu rumah penduduk tetap terbuka sebagai simbol masuknya rejeki yang bersumber dari lautan yang membentang di hadapannya. Tujur sapa dan keramahan masyarakatnya menjadi magnet bagi para pengunjung untuk berlama-lama tanpa rasa bosan. Suasana keakraban dan budaya gotong royong yang menjadi ciri khas masyarakat Lamalera dapat menggugah nurani para

pengunjung. Pendek kata, Lamalera merupakan “surga kecil” yang menyuguhkan inti kehidupan melalui pesona alam, sosial kemasyarakatan, tradisi budaya, religi, dan atraksinya dalam paket wisata yang komplit dan dapat dimaknai sebagai sebuah ziarah batin yang kontemplatif. Mengalaminya secara langsung merupakan sebuah kesempatan yang mungkin tidak akan pernah terulang lagi.

Atraksi

Lazimnya, penangkapan ikan, termasuk ikan paus, dilakukan menggunakan alat-alat seperti pukat dan jala. Nelayan menggunakan kapal bermesin motor. Orang yang terlibat dalam proses penangkapan ikan pun jumlahnya tidak tentu. Semuanya sangat tergantung pada kecanggihan kapal dan kelengkapan alat tangkap. Proses penangkapan pun tidak melalui proses yang panjang dan membutuhkan waktu yang lama. Selain itu, penentuan waktu untuk melaut ditentukan oleh kondisi cuaca. Di luar kondisi cuaca, tidak ada faktor lain yang menentukan saat nelayan turun melaut (Dasion, 2019).

Fakta normal seperti dijelaskan di atas tidak berlaku pada nelayan di Lamalera Lembata. Bagi nelayan Lamalera, ikan paus (*kote kelema*), laut, dan ‘rumah besar’ di darat berhubungan erat satu sama lain. Tiga hal itu membentuk semacam lingkaran kosmologis. Lingkaran itu membentuk watak manusia Lamalera secara pribadi dan sosial. Lingkaran itu pula memperkuat dan mempertahankan struktur sosial dan tata kehidupan manusia secara keseluruhan. Masyarakat Lamalera menempatkan laut sebagai tempat (*locus*) kehidupan. Bagi mereka, laut adalah ibu; ibu yang memberikan kehidupan bagi seluruh manusia Lamalera.

Masyarakat Lamalera meyakini bahwa setiap yang ada di dalam laut adalah pemberian ibu untuk kehidupan masyarakat. Keberadaan ikan paus tidak saja dianggap sebagai hewan laut tetapi merupakan kado terindah untuk

hidup dan kehidupan manusia Lamalera. Ikan paus tidak hanya dianggap sebagai kekayaan lautan tetapi berkah dari nenek moyang kepada anak dan cucu-cucunya.

Setiap berkat yang diberikan oleh sang pemberi berkat (ibu) harus pula disyukuri dan dinikmati oleh semua keturunannya melalui ritual penangkapan ikan paus. Keberadaan ikan paus juga dihubungkan dengan tanah dan tempat tinggal nelayan di darat. Maka, keberadaan rumah besar menjadi sangat penting. Semua kegiatan terkait dengan penangkapan ikan paus selalu berawal dari rumah besar.

Menurut salah seorang informan, laut merupakan cermin. Semua perilaku nelayan Lamalera akan diadili di hadapan ibu (laut)-pemilik berkat. Oleh karena itu, nelayan yang melaut tidak diperkenankan membuat keributan di rumah tangganya atau di masyarakat. Nelayan yang sebelumnya berkonflik dengan istri atau anak atau tentagga sedapat mungkin mengakui perbuatannya itu di depan teman-teman.

“Masyarakat di sini percaya bahwa segala perbuatan kami akan diadili di laut. Baik buruknya perilaku manusia akan diketahui saat berada di laut. Laut menjadi cermin untuk berkaca seperti apa sebenarnya menjalani hidup yang baik...”

(Wawancara Bersama Bpk. Gaspar, 16 Juni 2019)



Gambar 1.

Gugusan rumah penduduk yang menempel pada dinding tebing dan bibir pantai memberi nuansa eksotis

Nelayan yang pergi melaut dengan disertai beban konflik sebelumnya di rumah tangga, dijawab dengan banyak gejala. Beberapa di antaranya ialah ketiadaan hasil tangkapan,

ketidaktepatan *lama fa* saat menombak ikan, sampai taruhan nyawa (Tandilino & Meko, 2020).

Dalam praktiknya, ungkapan rasa syukur masyarakat Lamalera kepada pemberi kado (laut) diwujudkan dalam bentuk ritual adat penangkapan ikan paus. Ritual penangkapan ikan paus terdiri dari empat bagian. Pertama, *Tobu nama Fatta* (duduk bersama untuk membicarakan semua hal terkait dengan penangkapan ikan paus). Kedua, ritual di lereng gunung Labalekang. Ketiga, ritual *Iyegerek* (ritual pemanggilan roh ikan paus di pinggir pantai). Keempat, misa *lefa* tanggal 1 Mei. Keempat ritual adat itu dilakukan setiap tahun pada pembukaan musim melaut (musim lefa) (1 Mei). Musim melaut masyarakat Lamalera ditetapkan tanggal 1 Mei sampai 31 Oktober setiap tahun. Pada periode ini, semua aktivitas masyarakat berpusat di laut. Terdapat pemahaman yang keliru dan berkembang di masyarakat umum selama ini. Banyak orang menganggap bahwa masyarakat Lamalera hanya menangkap ikan paus pada bulan-bulan tersebut. Faktanya, penangkapan ikan paus dilakukan setiap saat ketika ikan paus lewat. Keempat ritual adat itu dilakukan oleh tiga suku utama yang dianggap sebagai tuan tanah Lamalera. Tiga suku itu ialah suku *lamawujon/langofujo*, suku *tuwaona*, dan suku *tapa ona*.

Selain tiga suku itu, ada beberapa suku lain yang mendiami dan menetap di Lamalera. Masyarakat membaginya menjadi dua yakni yang datang dari Timur dan yang datang dari Barat. Suku yang berasal dari Timur ialah suku lefo hajo, lamanudek, dan tana krowa. Yang berasal dari Barat ialah suku ema Ona/Lamanifa, Lamakera, Eba Ona/Ebang). Suku-suku yang lain ini datang kemudian setelah Lewo Lamalera sudah terbentuk.

Proses adat berawal dari ritual *Tobu nama Fatta* (duduk bersama untuk membicarakan semua hal terkait dengan penangkapan ikan paus). Setelah ritual *tobu nama fatta*, tetua adat suku lama wujon berangkat ke batu paus

yang terletak di lereng gunung Lamalekang. Konon mitos yang berkembang di Lamalera menyebutkan jika ikan paus merupakan hewan darat sejenis kerbau (*sora*) yang berubah wujud karena dilihat orang.

Setelah ritual adat di batu paus sudah dilakukan maka suku *Lama wujun* meminta suku *Lamamanu* untuk memberitahukan ke suku-suku lain di kampung Lamalera bahwa upacara penangkapan ikan paus segera dilakukan. Penyampaian itu dilanjutkan dengan ritual *iye gerek*. *Iye gerek* ialah upacara pemanggilan roh ikan paus. Semua ritual di darat sebelum penangkapan diakhiri dengan misa kudus yang disebut misa lefa setiap tanggal 1 Mei setiap tahun (Kurniasari & Reswati, 2011).

Beberapa wisatawan diminta pandangannya terkait dengan keramahan masyarakat menyebutkan satu hal yang sama. Wisatawan merasa tertarik dan kagum terhadap tradisi penangkapan ikan paus di Lamalera. Keberanian dan keperkasaan para nelayan dengan cara tradisional dan manual dapat menangkap ikan paus. Menangkap ikan dengan tombak (*tempuling*) sambil berdiri di atas buritan perahu merupakan sesuatu yang dianggap konyol dan tidak masuk akal. Bagi mereka hal tersebut sungguh sangat luar biasa dan susah untuk dipahami dengan akal sehat. Salah seorang wisatawan domestik yang diwawancarai memberikan kesan serupa.

"Ternyata bukan hanya ikan paus saja yang menjadi daya Tarik, tetapi juga bagaimana para nelayan ini menampilkan atraksi yang luar biasa pada saat melaut dengan keberanian dan keperkasaan yang sangat alami. Ditambah lagi dengan pemandangan alam yang sangat eksotis. Sungguh merupakan sebuah perpaduan yang sempurna..." (Wawancara dengan salah seorang wisatawan domestik, 15 Juni 2019)

Selain menyimpan kesan keberanian tentang cara penangkapan ikan paus oleh para nelayan wisatawan juga merasa kagum dengan suasana eksotisme Desa Lamalera. Wisatawan kagum dengan suasana pantai pada saat hendak melaut dan sekembali melaut, gugusan rumah pledang

dan penduduk yang masih sangat tradisional dan ramah.

Hal lain yang menarik perhatian ialah pembagian kerja nelayan pada saat melaut dan menangkap ikan paus dan pembagian hasil setelah melaut. Kerja utama di atas perahu dibagi kepada tiga elemen penting yakni *lama fa* (juru tombak), *matros* (juru dayung), dan *lamauri* (juru mudi). Kerja dilakukan secara bersama dan saling berhubungan. Kerja sama terlihat pada saat penangkapan ikan paus. Pada saat itu, semua elemen berada di bawah komando *lama fa* (juru tombak).

Proses dan mekanisme pembagian hasil tangkapan sudah dikapling menurut kerja, strata sosial masyarakat, besaran kontribusi setiap anggota (pemilik saham). Semua masyarakat mendapat bagian sekalipun yang bersangkutan tidak berada di tempat pada saat pembagian dilakukan. Hal lain yang juga menarik adalah proses pembagian ikan yang mengutamakan janda dan yatim piatu. Setiap orang asing yang dianggap sebagai teman atau kenalan yang kebetulan ada pada saat pembagian ikan pasti mendapat bagian dari ikan yang dibagi tersebut, sebagaimana disampaikan oleh salah seorang warga kampung.

"Bagi kami tamu adalah berkat. Siapapun yang datang dengan maksud baik adalah keluarga dan sahabat bagi kami. Karena itu jika pada saat pembagian ikan paus ada tamu yang datang maka kami berkewajiban untuk membagi hasil tangkapan (ikan paus) kepada tamu tersebut..." (Wawancara dengan salah seorang Narasumber, 16 Juni 2019).

Menariknya, khusus untuk *lama fa*, jatah yang diperuntukkan baginya (*nofor*) tidak boleh dimakan karena akan berdampak buruk (pemali). Jatahnya biasanya diberikan kepada paman. Sesuatu yang sulit diterima akal sehat manusia rasional.

Lamalera tidak hanya dikenal dari tradisi penangkapan ikan paus saja tetapi juga dilingkupi oleh beberapa destinasi wisata menarik lainnya seperti mata air panas, sarang burung wallet, makam Raja Mayeli, situs piring Lamalera

dan situs Rumah Kakang. Mata air panas terdapat di Desa Tobo Kecamatan Wulandoni. Pesonanya dapat dinikmati sebelum memasuki desa Lamalera B apabila melewati jalur tengah dengan waktu tempuh sekitar 20 menit dari desa Lamalera B. Sarang burung wallet yang terletak di bibir pantai desa Tapobali dengan waktu tempuh sekitar 20 menit dari desa Lamalera B. Makam Raja Mayeli yang terdapat di desa Lebala dengan waktu tempuh sekitar 45 menit dari desa Lamalera B. Situs piring Lamalera dan situs Rumah Kakang yang terdapat di desa Lamalera A yang merupakan desa tetangga.



Gambar 2, 3, 4.

Searah jarum jam: Makam Raja Mayeli; Situs Piring Matahari; Mata Air Panas

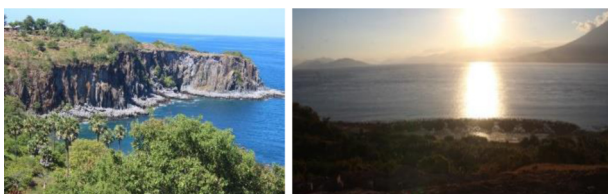
Aksesibilitas

Perjalanan ke Lamalera sesungguhnya tidak sulit. Akses masuk terbuka dalam empat poros yakni Wulandoni, Lebatukan, dan Ata Dei di poros tengah dan Nagawutun di poros selatan. Lamalera berjarak 42 kilometer dari pusat ibu kota Kabupaten Lembata, Lewoleba. Terdapat beberapa moda transportasi yang dapat dipakai pengunjung yakni kendaraan roda empat dan roda dua. Jika menggunakan kendaraan umum roda empat, perjalanan akan ditempuh dalam waktu 4 jam, kendaraan pribadi dapat ditempuh dalam waktu 3 jam, dan menggunakan bis kayu dalam waktu 4-5 jam. Jika menggunakan bis, kita harus mengeluarkan uang Rp35.000,00 rupiah per orang. Pengunjung juga bisa menggunakan travel dengan biaya sekitar 1,5 juta atau 3 juta pergi pulang.

Perjalanan ke Lamalera dapat disebut sebagai petualangan mengunjungi banyak sekali tempat wisata. Di poros tengah, wisatawan akan melewati wisata air panas Boto. Perjalanan melalui poros selatan lebih banyak lagi. Di sana, wisatawan akan disugahi tempat dan panorama alam pantai dan alam yang menakjubkan. Wisatawan dapat memanjakan mata dengan pemandangan pasir putih atau bebatuan yang berjejer di sepanjang pantai selatan. Di selatan terdapat pula sarang burung wallet di Desa Tapobali. Perjalanan ke Lamalera merupakan contoh paduan wisata alam, budaya, religi, dan olahraga. Jalan yang bergelombang dan banyak lubang harus dianggap sebagai proses keutuhan proses berwisata ke Lamalera. Jalan yang berkelok dengan medan yang cukup sulit membuat perjalanan semakin menarik. Sebab, wisatawan sungguh merasakan asyik dan nikmatnya berwisata.

Wisatawan masih bisa berkomunikasi melalui telpon genggam. Sinyal telpon sudah sampai ke lokasi wisata Lamalera. Internet memang masih sulit diakses meski di beberapa titik sudah dapat mengakses internet dengan mudah.

Bertemu dengan masyarakat Lamalera sama dengan berjumpa dengan kebahagiaan. Sebab, keramahan warga segera terasa jika wisatawan sampai ke sana. Tegur sapa warga akan dirasakan wisata sesaat sampai atau saat bertemu di jalan atau di pinggir pantai. Penduduk lamalera tidak membedakan tamu yang datang. Semua orang yang datang dianggap sebagai tamu yang harus dilayani dengan segala keramahan.



Gambar 5, 6.

Pemandangan yang dapat dinikmati sepanjang perjalanan dari dan ke Lamalera

Amenitas

Menurut (Innerhofer et al., 2020) dan (Bagio & Bagio, 2020) faktor amenities berkaitan dengan fasilitas yang memperlancar pelaksanaan fungsi dan kemudahan berwisata. Dua bagian utama dalam amenities yakni fasilitas sosial dan fasilitas umum. Secara sosial, masyarakat Desa Lamalera A dan B memiliki fasilitas sosial bersama seperti sekolah, Puskesmas Pembantu (Pustu), dan tempat ibadah. Di sana terdapat 5 (lima) unit penginapan (homestay). Setiap penginapan memiliki rerata 3-7 kamar tidur.

Harga kamar per malam sekitar Rp 100.000,00- Rp 150.000,00. Harga penginapan sangat tergantung pada pemilik penginapan. Restaurant maupun Rumah makan tidak tersedia. Makanan disediakan oleh homestay atau pemilik rumah dengan takaran bervariasi tergantung menu yang disediakan.

Sarana air bersih di Desa Lamalera B cukup sulit. Masyarakat mengusahakan sendiri air bersih dengan sistem swadaya dan diambil dari *Belebao*. Berkaitan dengan penerangan, listrik PLN hanya bisa malam hari (12 jam). Lamalera dikenal sebagai kampung sunyi. Kesunyian bukan karena ketiadaan listrik. Kesunyian, terutama pada saat musim melaut, karena adat melarang masyarakat untuk melakukan keributan termasuk membunyikan alat musik. Yang biasa terdengar di sana ialah pecahan ombak atau suara kendaraan bermotor yang kebetulan lewat.

Di Lamalera belum terdapat tempat khusus untuk penjualan souvenir. Selama ini, souvenir disimpan di rumah penduduk. Dalam beberapa kasus, masyarakat baru akan membuat souvenir jika dipesan oleh wisatawan. Seperti lokasi atau tempat penjualan souvenir, Lamalera tidak memiliki tempat parkir khusus. Kendaraan yang memuat wisatawan hanya berjejer di pinggir jalan desa. Kondisi jalan desa di Lamalera sudah sangat baik. Sebab, jalan utama di sana sudah diaspal. Selain di aspal, di beberapa titik, jalan-jalan telah dilakukan pengerasan.



Gambar 7.

Salah satu dari dua homestay yang terdapat di Lamalera.

Akomodasi

Akomodasi berkaitan dengan banyak hal termasuk penginapan, fasilitas ibadah, dan berbagai fasilitas terkait (Ward-Perkins et al., 2020). Memilih berwisata ke Lamalera adalah memilih untuk hidup dan mengenal masyarakat. Sebab, lima unit penginapan yang ada merupakan bagian dari rumah warga dan sesuatu hal yang tidak dapat dipisahkan dengan pemilik penginapan. Ada beberapa konsekuensi dari kondisi ini. Pertama, makanan disediakan sendiri pemilik penginapan. Dengan demikian, restoran, warung kopi, dan rumah makan tidak terdapat di sana. Kedua, wisatawan harus melepas ego pribadi akan pemertahanan privasi individu. Wisatawan harus rela melepaskan sisi individualitas dan menjadi manusia kolektif. Ketiga, berkaitan dengan hal pertama dan kedua, harga penginapan ditentukan sendiri oleh pemilik penginapan. Disebutkan, harga penginapan berkisar Rp 100.000,00 hingga Rp 150.000,00. Konteks ini agak berbeda dengan model tempat wisata lain yang menempatkan privasi wisatawan sebagai sesuatu yang harus dihargai di tempat wisata. Salah seorang pemilik *homestay* membenarkan kondisi tersebut.

“Jika homestay penuh, wisatawan biasanya menginap di rumah warga. Bahkan wisatawan mancanegara seringkali lebih memilih menginap di rumah warga daripada menginap di homestay karena dengan begitu mereka bisa mengetahui keseharian masyarakat di sini...” (Wawancara Bersama salah seorang Narasumber, 14 Juni 2019)

Data menunjukkan puncak kunjungan wisatawan sekitar bulan April-Juli. Mulai bulan Oktober terjadi penurunan jumlah wisatawan (asing dan domestik) ke sana. Wisatawan asing paling banyak berasal dari negara Italia, Jerman, dan Amerika. Kedatangan wisatawan asing ke Lamalera tidak saja ingin melihat tradisi penangkapan ikan paus. Mereka datang karena Lamalera telah menjadi *brand* dan sangat terkenal di negaranya. Khusus untuk wisatawan mancanegara, jumlahnya tidak tentu. Ada yang datang dan menetap selama berbulan-bulan bahkan tahun.

Seperti wisatawan mancanegara, jumlah kunjungan wisatawan domestik juga tidak tentu. Tidak ada waktu khusus bagi wisatawan domestik berkunjung ke Lamalera. Puncak kunjungan biasanya terjadi pada bulan Juni-Juli. Selama ini, wisatawan domestik berada dari Lewoleba, Kupang, Sulawesi, dan Jawa.

Faktanya, banyak wisatawan domestik yang merasa penasaran dan ingin melihat cara penangkapan kote kelema. Itulah alasan mereka datang di musim melaut di antara bulan Mei-Oktober. Dengan demikian, wisatawan domestik datang karena didorong oleh rasa ingin tahu akan tradisi penangkapan ikan paus dan ingin merasakan suasana dan kondisi desa Lamalera A dan B. Tradisi dan model penangkapan ikan paus yang menjadi ciri utama nelayan Lamalera, hal utama lain yang bisa dijadikan aset wisata ialah ekstisme kampung Lamalera. Setiap yang pernah bepergian ke Lamalera pasti sepakat jika kampung ini sungguh unik. Secara umum, rumah-rumah masyarakat di kampung Lamalera sebagian besar berdiri di lereng yang terjal. Rumah dan kampung sudah ditata sedemikian rupa sehingga terlihat asri dan indah. Hanya masyarakat Lamalera sendiri yang bisa berpikir dan melakukan pengembangan kampung ke depannya sesuai tata norma sosial dan adat Lamalera.

Di pinggir pantai berjejer bebatuan. Hanya sebagian kecil saja pantai di Lamalera yang berbentuk hamparan pasir. Di pinggir pantai

berjejer rapi rumah *peledang* (perahu), tempat disimpan perahu nelayan. *Peledang-peledang* tidak boleh dibiarkan bergeletak bebas di pantai. Setiap pagi dan sore, masyarakat Lamalera B secara bersama mendorong dan menarik peledang untuk masuk kembali ke dalam rumahnya. Jika wisatawan ingin melihat model dan corak asli gotong royong, Lamalera adalah tempat yang tepat untuk itu. Di sana, tua-muda besar kecil ramai-ramai menarik dan mendorong peledang masuk ke rumah peledang. Masyarakat Lamalera menggunakan bahasa Lamaholot dan bahasa Indonesia.



Gambar 8.

Kebersamaan masyarakat Lamalera ketika selesai melaut.

Pariwisata budaya berada dalam skema utama pembangunan pariwisata nasional Indonesia. Dalam kerangka yang sama Provinsi Nusa Tenggara Timur menempatkan pariwisata sebagai sektor unggulan. Oleh karena itu, keunikan Lamalera dalam menangkap ikan paus laik diinformasikan ke publik. Pembangunan pariwisata tentu dimaksudkan agar kesejahteraan masyarakat dapat terwujud.

Sebagaimana dijelaskan di bagian awal tulisan ini, penangkapan paus di Lamalera menyatu dengan budaya dan tradisi lokal. Pilihan model dan cara penangkapan paus seperti itu tentu dilandasi oleh sebuah nilai utama, yakni laut adalah hidup dan kehidupan; bahwa laut merupakan sumber kesejahteraan masyarakat. Implikasinya, semua kekayaan alam di dalam laut digunakan untuk kesejahteraan masyarakat.

Dihubungkan dengan pariwisata, realitas penangkapan paus berbasis budaya lokal tentu menjadi keunikan Lamalera. Keunikan seperti itu menjadi sia-sia jika tidak dikelola dengan baik. Perencanaan pembangunan berbasis masyarakat lokal mendapatkan kepenuhannya di sini. Berkaitan dengan pembangunan pariwisata untuk kesejahteraan, ada fenomena menarik di sana. Masyarakat menolak penggunaan alat berteknologi modern dalam penangkapan. Masyarakat tidak ingin budaya penangkapan paus menggunakan tombak diganti dengan penangkapan berbasis teknologi. Literasi wisata perlu didiskusikan berkaitan dengan destinasi pariwisata secara khusus dan pariwisata secara umum.

Fakta literasi mengenai atraksi, aksesibilitas, amenitas, dan akomodasi wisata Lamalera tentu memiliki beberapa tujuan. Selain meningkatkan kunjungan wisatawan, program ini bertujuan untuk menggali dan menemukan mekanisme perumusan kebijakan kesejahteraan sosial berbasis warga seperti disampaikan (Kruks-Wisner, 2018) di atas. Atraksi, aksesibilitas, amenitas, dan akomodasi merupakan alat yang dapat dipakai oleh pengambil kebijakan dalam merumuskan kebijakan berbasis masyarakat tentang cara pengelolaan wisata Lamalera.

Pembangunan kesejahteraan di Asia selama ini sering mengabaikan keunikan lokal (Ebbinghaus & Naumann, 2017). Penangkapan paus di Lamalera oleh sebagian orang dianggap tidak efektif karena tidak dapat mendatangkan hasil yang maksimal. Logika demikian ternyata dibantah keras oleh masyarakat Lamalera. Filosofi penangkapan paus tidak hanya berlandaskan materialitas manusia tetapi keberlanjutan alam sehingga penangkapan paus harus berbasis kebutuhan dan bukan keinginan. Wawancara dengan salah seorang tokoh adat setempat mempertegas hal tersebut.

“Sejak dahulu kami percaya bahwa penggunaan bahan modern dalam penangkapan ikan paus akan mendatangkan bencana. Hal itu sudah terbukti. Makanya kami tetap bertahan dengan cara dan peralatan tradisional kami. Lagipula kami tidak

mengejar jumlah atau banyaknya tangkapan. Jika memang tidak mendapat apa apa ya artinya mungkin belum saatnya. Masih ada lain kesempatan..”
(Wawancara dengan salah seorang Narasumber, 16 Juni 2019)

Lembaga lain yang masuk ke Lamalera hanya perlu mendorong perencanaan pembangunan yang mendukung model pembangunan yang telah diturunkan dari nenek moyang. Pengembangan Badan Usaha Milik Desa atau akselerasi pemanfaatan kulit ikan paus perlu disebutkan di sini. Dua bidang itu merupakan aspek yang masih kurang diperhatikan oleh masyarakat. Dua jenis program tersebut dapat menjadi penopang atraksi, aksesibilitas, amenitas, dan akomodasi wisata Lamalera.

Ekstensifikasi pemanfaatan kulit ikan paus tidak saja menarik wisatawan dari aspek atraksi, tetapi juga sekaligus memperkuat amenitas Lamalera sebagai salah satu ikon pariwisata NTT. Di sisi yang lain, pembukaan akses dan perbaikan akomodasi oleh lembaga lain seperti negara, berdampak pada peningkatan usaha ekonomi rumah tangga masyarakat Lamalera. Dengan demikian, usaha kesejahteraan sosial di pusat-pusat wisata menjadi urgen dilakukan oleh tidak saja oleh masyarakat tetapi dengan lembaga lain yang datang dari luar.

Penutup

Kesimpulan: Lamalera (Lembata, Flores) telah mendunia melalui tradisi penangkapan ikan paus yang atraktif, heroik, dan kulturistik. Meski demikian, Lamalera menyajikan eksotika yang mengagumkan seperti tata kampung di punggung perbukitan batu yang seakan menyapa laut dan mentari pagi. Penelitian literasi wisata Lamalera dilakukan agar eksotisme Lamalera tidak saja dikenal tetapi terutama berguna bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat Lamalera. Secara empiris diketahui bahwa masyarakat memiliki kesadaran untuk mengelola pariwisata berbasis adat. Hal ini terbukti dengan ditolaknya penggunaan kapal modern untuk penangkapan paus di Lamalera.

Wisata budaya Lamalera terbukti berdampak tidak saja peningkatan kunjungan wisatawan tetapi juga peningkatan kondisi sosial ekonomi rakyat.

Rekomendasi: Atraksi penangkapan paus dan eksotika kampung memberikan kesan yang tidak terlupakan. Lamalera seakan hadir untuk memukau. Di sana roh dan roti keindahan menyatuh dalam sabda budaya. Atraksi, aksesibilitas, amenitas, dan akomodasi dilihat masih minim. Dibutuhkan peran serta pemerintah lokal dalam membangun pariwisata. Hal lainnya, Lamalera merupakan salah satu tujuan wisata berbasis budaya. Kearifan lokal masyarakat Lamalera tidak bisa digantikan oleh berbagai macam peralatan penangkapan ikan modern. Kearifan ini sejatinya tetap dipertahankan dalam kerangka pariwisata berbasis adat. Di aspek lain, inisiasi munculnya organisasi berbasis masyarakat lokal diperlukan agar literasi wisata Lamalera dapat menunjukkan kekhasan lokal Lamalera.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kepada masyarakat Lamalera yang sudah memberikan banyak informasi tentang tradisi penangkapan ikan paus. Kepada Dinas Pariwisata NTT yang sudah memberikan ruang bagi peneliti untuk melakukan penelitian ini.

Pustaka Acuan

- Dasion, A. R. (2019). *Jurn. Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 6(1), 1–17.
- Dexeus, C. R. (2018). The deepening effects of the digital revolution. In *The Future of Tourism: Innovation and Sustainability*. https://doi.org/10.1007/978-3-319-89941-1_3
- Dinparekraf NTT. (2017). *Database Kepariwisataan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017*.
- Ebbinghaus, B., & Naumann, E. (2017). Welfare state reforms seen from below: Comparing public attitudes and organized interests in Britain and Germany. In *Welfare State Reforms Seen from Below: Comparing Public Attitudes and Organized Interests in Britain and Germany*. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-63652-8>

- Gao, Q. (2018). Welfare, work, and poverty: Social assistance in China. In *Welfare, Work, and Poverty: Social Assistance in China*. <https://doi.org/10.1093/oso/9780190218133.001.0001>
- Innerhofer, E., Erschbamer, G., & Pechlaner, H. (2020). Overtourism: The challenge of managing the limits. In *Overtourism: tourism management and solutions*.
- Kapioru, C. (2019). *Jurnal inovasi kebijakan*. IV(2018), 27–43.
- Kruks-Wisner, G. (2018). Claiming the State, Active Citizenship and Social Welfare in Rural India. In *Neoliberal Australia and US Imperialism in East Asia*. https://doi.org/10.1057/9781137272782_8
- Kuntjorowati, E. (2019). Pranata Sosial Bagi Penumbuhan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat. *Jurnal PKS*, 18(2), 179–194.
- Kurniasari, N., & Reswati, E. (2011). Kearifan Lokal Masyarakat Lamalera: Sebuah Ekspresi Hubungan Manusia Dengan Laut. *Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan*, 6(2), 29. <https://doi.org/10.15578/marina.v6i2.5810>
- Kurniati, G. (2018). *Kearifan Lingkungan Pada Masyarakat Lamalera Dalam Novel Suara Samudra Catatan Dari Lamalera Karya Maria Matildis Banda*. 2. BAPALA. Jurnal Sastra Universitas Negeri Surabaya. Vol 5, No 2 (2018).
- Laksono, B. A., Supriyono, S., & Wahyuni, S. (2019). Tinjauan Literasi Finansial dan Digital pada Tingkat Ketahanan Keluarga Pekerja Migran Indonesia. *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 18(2), 123–134.
- Liu, C., & Schänzel, H. (2019). *Tourism Education and Asia*. <http://link.springer.com/10.1007/978-981-13-2613-4>
- London, J. D., & London, J. D. (2018). Afterword: Welfare and Inequality in Marketizing East Asia. In *Welfare and Inequality in Marketizing East Asia*. https://doi.org/10.1057/978-1-137-54106-2_10
- Ohe, Y. (2020). Community-based Rural Tourism and Entrepreneurship. In *Community-based Rural Tourism and Entrepreneurship*. <https://doi.org/10.1007/978-981-15-0383-2>
- Piriou, J. (2019). The Tourist Region. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53, Issue 9). ISTE Ltd and John Wiley & Sons, Inc.
- Ratten, V., Braga, V., Álvarez-García, J., & De La Cruz del Rio-Rama, M. (2019). Tourism innovation: Technology, sustainability and creativity. In *Tourism Innovation: Technology, Sustainability and Creativity*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780429022814>
- Sharma, A. (2019). *Sustainable Tourism Development: Futuristic Approaches*. Apple Academic Press, Inc.
- Shintasari, R. dkk. (2020). *Koperasi Wanita dan Keluarga : Sebuah Perspektif Komparatif Kesejahteraan*. Jurnal PKS Volume 19 Nomor 2 Agustus 2020; 137-147
- Sugiarto, A., & Mahagangga, I. G. A. O. (2020). Kendala Pengembangan Pariwisata di Destinasi Pariwisata Labuan Bajo Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Destinasi Pariwisata*, 8(1), 18. <https://doi.org/10.24843/jdepar.2020.v08.i01.p03>
- Tandilino, S. B., & Meko, P. M. (2020). Penerapan Community Based Tourism Di Desa Wisata Lamalera B Dalam Mendukung Pariwisata Estate Di Nusa Tenggara Timur. *TOURISM: Jurnal Travel, Hospitality, Culture, Destination, and MICE*, 3(1), 14–25.
- Ward-Perkins, D., Beckmann, C., And, & Ellis, J. (2020). Tourism routes and trails: theory and practice. In *Tourism routes and trails: theory and practice*. CABI. <https://doi.org/10.1079/9781786394767.0000>
- Widianto, H. W., & Keban, Y. T. (2020). Gentrifikasi: Dampak Sosial-Ekonomi Pembangunan Hotel di Malioboro Kota Yogyakarta. *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial*. <http://ejournal.kemensos.go.id/index.php/jpks/article/view/1937>
- Zastrow, C. (2017). *Introduction to Social Work and Social Welfare: Empowering People*. Cengage Learning.

Mengatasi Hambatan Tanpa Suara: Studi Eksploratif terhadap *Adversity Intelligence* pada Individu Tuli

Coping the Obstacles in Silence: The Explorative Study of Adversity Intelligence of Deaf People

Riestyane¹, Retno Hanggarani Ninin², Ahmad Gimmy Prathama Siswadi³

^{1,2,3}Program Studi Magister Psikologi Profesi, Fakultas Psikologi, Universitas Padjadjaran

Jl. Raya Bandung Sumedang No.KM 21, Hegarmanah, Kec. Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363

Email : riestyane18001@mail.unpad.ac.id ; Telp./HP : (022) 7794126 / +6281392868518

Naskah diterima 9 November 2020, direvisi 18 Desember 2020 , disetujui 25 Januari 2021

Abstract

Deaf people's difficulties, related to the ability to speak and capture audio information normally, raises several obstacles such as emotional instability and the way to communicate with hearing people. Some of them found it difficult, but some others have a good ability to overcome these obstacles, which is called adversity intelligence. This study aims to explore the ability of the deaf people to overcome the obstacles that arise due to the deaf condition, and also to find out what factors that may support and detain the Deaf people in carrying out their daily activities. This exploratory qualitative research involved respondents aged 18-40 years that are deaf since were born, using interview instruments and recorded documentation. The results of the descriptive analysis show that the main obstacle of Deaf people is not the physical problem itself, but rather to the economic factors and poor communication with others. Respondents responded this condition through efforts to find solutions (seeking job, communicating to others with the help of intermediaries or third persons) to increase the acceptance and resilience themselves. In addition to good adversity intelligence abilities, support system from the closest ones and the role of the government in facilitating the Deaf people's needs can be supporting factors that provide opportunities and positive impacts, while the limited access and difficulty understanding the lips of the hearing people are some of the inhibiting factors for the Deaf people. Further research is recommended to involve respondents with more variety of backgrounds, and also to communicate using sign language by researchers themselves.

Key words : adversity intelligence; Deaf; obstacles; exploratory.

Abstrak

Kesulitan individu Tuli terkait kemampuan berbicara dan menangkap informasi audio secara normal menimbulkan beberapa hambatan, seperti ketidakstabilan emosi, serta cara berkomunikasi dengan individu dengar (normal). Beberapa di antaranya mengalami kesulitan, namun beberapa lainnya memiliki kemampuan yang baik dalam mengatasi hambatan tersebut, dimana kemampuan ini disebut *adversity intelligence*. Penelitian ini bertujuan untuk menelusuri kemampuan individu Tuli dalam mengatasi hambatan yang muncul karena kondisi tuli tersebut, serta untuk mengetahui faktor apa saja yang dapat mendukung dan menghambat individu Tuli dalam menjalani kegiatan sehari-hari. Penelitian kualitatif eksploratif ini melibatkan responden berusia 18-40 tahun yang mengalami kondisi tuli sejak lahir, dengan menggunakan instrumen wawancara serta dokumentasi rekaman. Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa penghambat utama yang dialami individu Tuli bukanlah kondisi tuli secara fisik, melainkan faktor perekonomian serta komunikasi yang kurang lancar dengan orang lain. Responden menyikapi kondisi ini melalui upaya pencarian solusi (mencari pekerjaan, berkomunikasi dengan bantuan perantara atau orang ketiga) untuk meningkatkan penerimaan dan ketahanan diri sendiri. Selain kemampuan *adversity intelligence* yang baik, *support system* dapat menjadi pendukung berupa peluang dan dampak positif bagi individu Tuli, yaitu dari orang terdekat dan juga pemerintah yang turut berperan memfasilitasi kebutuhan individu Tuli di lingkungan masyarakat. Sementara itu, keterbatasan akses dan kesulitan memahami gerak bibir individu dengar merupakan beberapa faktor penghambat bagi individu Tuli. Penelitian lebih lanjut direkomendasikan dapat melibatkan responden dengan latar belakang yang lebih variatif, serta melakukan komunikasi dengan menggunakan bahasa isyarat oleh peneliti langsung.

Kata kunci : adversity intelligence; Tuli; hambatan; eksploratif.

Pendahuluan

Disabilitas rungu merupakan salah satu ragam penyandang disabilitas yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, tepatnya tertulis dengan istilah penyandang disabilitas sensorik (Kemenhum RI, 2016). Data dari Kementerian Sosial per Oktober 2019 menunjukkan bahwa tercatat 7,03 persen penduduk Indonesia merupakan penyandang disabilitas rungu (Kemenkes RI, 2019). Referensi yang sama menjelaskan definisi WHO terhadap disabilitas rungu, atau kehilangan pendengaran, yaitu gangguan pendengaran dimana seseorang tidak dapat mendengar sebagian atau keseluruhan suara pada salah satu atau kedua telinga. Individu penyandang disabilitas rungu lebih menyukai istilah Tuli (*Deaf*) daripada tunarungu. Bagi masyarakat awam, istilah Tuli itu terkesan sebagai diksi yang kurang sopan, tidak pantas untuk disebutkan apalagi mengatakannya kepada orang yang bersangkutan secara langsung. Namun demikian, kondisi ini lebih diterima oleh mereka sendiri karena tunarungu secara bahasa berarti tidak memiliki (tuna) pendengaran (rungu). Tuli telah dipandang sebagai sebuah budaya bagi para individu Tuli. Penulisan Tuli dengan huruf kapital (T) serta sapaan Tuli tersebut merupakan bentuk dari penunjukan identitas orang Tuli sebagai sebuah kelompok masyarakat yang mempunyai identitas; memiliki bahasa dan budaya tersendiri. Sedangkan tunarungu dianggap sebagai sebuah keharusan untuk mengoptimalkan kemampuan pendengarannya dengan berbagai cara agar menyerupai orang-orang yang dapat mendengar (PSIBK, 2019).

Hilangnya kemampuan menangkap informasi audio secara normal (total ataupun sebagian) merupakan suatu tantangan bagi individu Tuli dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Beberapa penelitian menunjukkan adanya risiko terhadap permasalahan psikologis

pada individu Tuli, seperti masalah persepsi, kognisi dan fungsi interpersonal (Leigh & Andrews, 2016). Berdasarkan kondisi di atas, komunikasi dilakukan dengan menggunakan bahasa isyarat (*sign language*) karena tidak semua kalangan menguasai bahasa tersebut. Berada di lingkungan yang tidak semuanya “melek” dengan bahasa isyarat, merupakan suatu tantangan eksternal bagi individu Tuli. Hal ini pun menyebabkan munculnya *emotional immaturity* (ketidakdewasaan secara emosional), yang digambarkan dengan sikap mudah tersinggung, impulsif, kurang empati, serta dependen (Meadow, 2019). Berbagai aspek pada diri individu Tuli pun berdampak negatif akibat kondisi ketidakstabilan emosi tersebut. Banyak individu Tuli dewasa mengalami tekanan dalam berkomunikasi, cenderung menjadi egosentris, menjalani relasi yang bermasalah dengan orang lain, serta muncul tendensi untuk bertindak (*act out*) (Leigh & Andrews, 2016).

Hal yang juga sering ditemui adalah bentuk pemisahan dan penarikan diri dari lingkungan, merasa kesepian, serta muncul kemarahan karena merasa tidak nyaman dengan kondisi lingkungannya (Kersting, 1997). Individu Tuli sering dianggap sebagai minoritas yang tidak terlihat karena kondisi mereka (tuli) tidak mudah diamati atau dipahami (Crowe 2018), terutama dalam menjalin komunikasi di dalam suatu kelompok. Situasi ini juga dikenal dengan istilah *the dinner table syndrome* (Listman & Kurz 2020). Sementara itu, terkait kemarahan, salah satu penyebabnya juga dapat berasal dari hambatan komunikasi individu Tuli yang terbatas dengan lingkungannya, dimana tidak semua kebutuhannya dapat terpenuhi atau tersampaikan dengan baik. Kondisi emosional yang negatif tersebut jika tidak dikendalikan menjadi emosi positif akan dapat menimbulkan dampak-dampak negatif lainnya, misalnya terhadap interaksi sosial yang tidak kooperatif dan adaptif, serta dalam hal pengembangan diri. Dampak terhadap pengembangan diri tersebut

dibuktikan oleh Vernon dan Andrews (dikutip dari Leigh & Andrews, 2016) dalam studinya bahwa konsep diri individu Tuli lebih negatif dibandingkan data populasi pada umumnya, begitu juga dengan hasil riset Bat-Chava (dikutip dari Leigh & Andrews, 2016) terkait *self-esteem* individu Tuli, yang ditemukan lebih rendah dibandingkan individu dengar.

Data awal penelitian kali ini telah dilakukan sebelumnya melalui kuesioner terbuka terhadap 12 orang dewasa Tuli (rentang usia 18-40 tahun), yang terdiri dari pelajar/mahasiswa dan wirausaha. Ketika ditanyakan mengenai hal apa yang paling menghambat dirinya, 67,77 persen jawaban dikategorisasikan pada “cara berkomunikasi dengan orang lain”, seperti tidak dapat mendengar, sulit memahami perkataan orang lain karena terlalu cepat (gerak bibirnya), serta kosa kata yang sulit. 16,67 persen jawaban dikategorisasikan pada “masalah hubungan dengan orang lain” dan sisanya tidak mengalami hambatan apapun atau dapat melakukan suatu hal yang positif. Temuan awal ini cukup mendukung kondisi-kondisi individu Tuli, yang telah dijabarkan pada paragraf-paragraf sebelumnya.

Pemaparan kondisi di atas menunjukkan bahwa individu Tuli memiliki hambatan yang akan sering dihadapinya dalam melakukan kegiatan apapun secara normal, yang lebih berat dibandingkan dengan individu dengar (normal), terutama dalam hal komunikasi dan relasi dengan orang lain. Individu yang dapat menghadapi dan mengatasi kesulitan, tantangan atau hambatan bagi dirinya, memiliki kemampuan yang dikenal dengan istilah *adversity intelligence* (Daloos, 2015). Setiap individu Tuli memiliki cara yang berbeda-beda untuk mencapai tujuan yang diinginkan, termasuk dalam mengatasi hambatannya dalam berinteraksi dengan orang lain. *Adversity intelligence* tersebut, sebagaimana dipaparkan oleh Stoltz, memiliki empat dimensi yang membangunnya menjadi satu kesatuan, yaitu: (1) *Reach*, menentukan bagaimana seseorang

memandang suatu masalah; (2) *Control*, kemampuan untuk mengendalikan respon seseorang terhadap apapun yang mungkin terjadi; (3) *Origin* dan *Ownership*, berkaitan dengan sejauh mana seseorang mengatasi situasi dan membawanya pada dirinya sendiri, termasuk akuntabilitas terhadap situasi yang dihadapinya; dan (4) *Endurance*, berkaitan dengan seberapa lama seseorang akan bertahan menghadapi kesulitan hingga hal tersebut berakhir (Daloos, 2015).

Sebuah studi fenomenologi yang dilakukan oleh Listman dan Kurz (2020) merupakan salah satu penelitian yang juga berfokus pada kondisi individu Tuli dalam menghadapi tantangannya. Penelitian tersebut memaparkan pengalaman para individu Tuli dan faktor lain yang memperkuat ketahanan mereka. Terdapat tiga tema utama yang diperoleh dari hasil temuan, yaitu hambatan dalam hal pembelajaran insidental dan ‘sindrom meja makan’, pentingnya keterlibatan keluarga, serta peran komunitas Tuli sebagai keluarga kedua. Melalui penelitian kali ini, diharapkan dapat diperoleh hasil temuan seperti riset versi individu Tuli dewasa di Indonesia. Sejauh ini, riset-riset terhadap individu Tuli lebih banyak merujuk pada kelompok anak-anak dan remaja, sedangkan kelompok dewasa belum cukup mendapatkan perhatian. Tidak hanya di Indonesia, penelitian di luar negeri terhadap individu Tuli anak-anak dan remaja juga lebih banyak ditemukan daripada individu dewasa (Leigh & Andrews 2016), padahal banyak hal kompleks yang dihadapi para individu dewasa dan dapat menjadi temuan atau bahasan lebih lanjut bagi para peneliti. Permasalahan yang akan ditemui tentunya berkaitan dengan perkembangan individu tersebut, seperti tantangan mencari pekerjaan, menjalin hubungan dengan lawan jenis, serta bersosialisasi dengan masyarakat sekitar.

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk menelusuri lebih jauh bagaimana individu Tuli dewasa menyelesaikan konflik ataupun perihal

lain yang dihadapi melalui kemampuan *adversity intelligence*-nya. Selain itu, penting juga untuk diketahui lebih lanjut faktor apa saja, selain kemampuan *adversity intelligence* tersebut, yang dapat mendukung serta menghambat individu Tuli dalam kehidupan sehari-harinya, baik dari dalam diri maupun luar diri individu Tuli.

Penggunaan Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini adalah metode eksploratif. Responden merupakan individu Tuli sejak lahir dengan kategori usia dewasa (18-40 tahun). Pengambilan data dilakukan dengan menggunakan dua metode, yaitu wawancara lisan dan wawancara teks (komunikasi via *Whatsapp*). yaitu:

1. Wawancara Lisan

Wawancara dilakukan melalui pertanyaan lisan yang disampaikan kepada subjek, yang ditangkap subjek dengan cara membaca gerak bibir dari pewawancara. Terdapat variasi dari cara subjek menjawab, ada yang menjawab secara lisan dan ada yang menggunakan bahasa isyarat. Peneliti dibantu oleh perantara untuk menerjemahkan bahasa isyarat yang diekspresikan oleh subjek.

Objek wawancara berfokus pada empat fokus kajian penelitian, yaitu: cara responden memandang suatu masalah (*reach*), pengendalian respon terhadap hal yang mungkin terjadi (*control*), cara responden mengatasi situasi dengan pembawaan tertentu dan hasil yang diperoleh dari kesulitan yang dihadapi (*origin* dan *ownership*), serta ketahanan menghadapi kesulitan hingga berakhir (*endurance*). Responden diwawancarai mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penelitian melalui pertanyaan-pertanyaan yang bersifat *open-ended*.

Faktor yang paling menantang adalah kondisi responden yang tidak dapat mendengar dan berbicara, sementara peneliti belum memahami bahasa isyarat. Oleh karena itu, proses wawancara dibantu oleh perantara, yang terdiri dari kerabat responden dan petugas kelurahan setempat, dan direkam secara audio untuk mempermudah proses pengolahan data.

2. Wawancara Tertulis

Selain orang ketiga sebagai perantara, wawancara juga dilakukan melalui perantara media sosial, karena kerabat salah satu responden tidak memahami bahasa isyarat dan responden yang bersangkutan juga kurang menguasai gerak bibir orang lain.

Objek wawancara tertulis ini serupa dengan objek wawancara lisan. Dokumentasi berupa percakapan tertulis antara peneliti dan responden R dilakukan dengan menggunakan aplikasi *Whatsapp*. Dokumen, baik berupa rekaman publik maupun privat, dapat menjadi salah satu sumber informasi yang bernilai dalam penelitian kualitatif (Creswell 2012).

Data wawancara lisan dalam bentuk audio dikonversi dalam bentuk verbatim. Data wawancara tertulis dipindahkan dalam bentuk format Ms.Word. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan kodifikasi dari keempat dimensi *adversity intelligence*, dengan alat bantu berupa fasilitas-fasilitas yang terdapat di dalam aplikasi Ms.Word.

Hasil dan Pembahasan

Penelitian kualitatif ini melibatkan empat orang responden yang memenuhi kriteria sesuai dengan rancangan metode penelitian (usia dewasa dan mengalami tuli sejak lahir). Tabel 1 menunjukkan identitas singkat dari responden (nama diinisialkan), sedangkan Tabel 2 menyajikan identitas singkat perantara dalam penelitian ini (relasi dengan responden).

Tabel 1.
Data Demografi Responden

	1	2	3	4
Inisial	S	D	H	R
JK*	P	L	P	P
Usia	32 th	37 th	34 th	18 th
Riwayat Tuli	Tuli sejak lahir	Tuli sejak lahir	Tuli sejak lahir	Tuli sejak lahir
Status	Menikah	Menikah	Menikah	Belum menikah
Anak	1 (satu) orang laki-laki usia 3 tahun	1 (satu) orang perempuan usia 9 tahun (A)	1 (satu) orang perempuan usia 9 tahun (A)	-

*Jenis Kelamin : P=Perempuan; L=Laki-laki

Tabel 2.
Identitas Perantara Responden

	Inisial	JK	Relasi dengan responden
1.	M	Perempuan	adik ipar dari S
2.	U	Perempuan	kakak dari D, kakak ipar dari H
3.	A	Perempuan	anak dari D dan H
4.	N	Perempuan	pihak kelurahan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka diperoleh hasil yang dikaitkan dengan dimensi-dimensi *adversity intelligence* pada individu Tuli. Permasalahan yang paling mengganggu atau menghambat individu Tuli adalah: (1) komunikasi yang tidak begitu lancar dengan individu dengar (normal) di lingkungan sekitar responden; dan (2) faktor perekonomian yang tergolong menengah ke bawah, dengan mata pencaharian yang sulit diperoleh. Berikut adalah beberapa penggalan kalimat responden yang menjelaskan permasalahan yang mengganggu atau menghambat responden saat ini.

- S : (M) "soalnya mah sampai sekarang aja kalo dia (K, anak S) nangis aja ga kedengeran. Kan kamarnya deketan ya sama abdi, abdi didieu S didieu. "
 (M) "Susah denger sih, susah denger sama ngomong. (S memeragakan bahasa isyarat) Ga ada uang, ceunah."
 (M) "iya (K) sama mamahnya terus. Ga mau sama orang lain teh."

- D&H : (U) "Keluhannya mah itu we, kerjaan susah gitu teh. (D) Sekarang lagi ga kerja."
 R : "Ada masalah (di sekolah). Dahulu guru marah besar saya sulit belajar. Guru tidak ajarkan sama saya.... Dahulu kelas SMP juga SMA saya kesulitan belajar matematika banyak karena guru marah besar dan pukul."

Penyebab munculnya hambatan-hambatan tersebut, dari sudut pandang responden, pada dasarnya berasal dari kondisi fisik yang tidak dapat mendengar sejak lahir. Seperti yang diketahui, kondisi tuli sejak lahir secara tidak langsung juga mengalami kebisuan, sehingga bahasa isyarat digunakan sebagai komunikasi sehari-hari. Realita, tidak semua masyarakat familiar dengan cara komunikasi tersebut sehingga cukup menghambat responden dalam menyampaikan maksud yang ingin diutarakan kepada orang lain. Selain itu, terkait permasalahan ekonomi, tidak hanya responden yang bersangkutan, namun anggota keluarga

lain pun juga bekerja dengan penghasilan yang tidak tergolong banyak.

- S : “Ga bisa dengar dari lahir”
 (M) “Suaminya mah cuma antar jemput sekolah, gaji mah da cuma berapa.”
 D&H : “(U) (Tuli dan bisu) dari lahir”
 R : “Ya, (merasa terhambat dengan kondisi Tuli-bisu)”
 “Ya (tidak paham yang guru ajarkan)”

Dimensi *adversity intelligence: reach*

Dimensi *reach* dalam *adversity intelligence* mengukur tentang bagaimana seseorang memandang suatu masalah (positif atau negatif). Pada data penelitian terangkum beberapa poin yang menggambarkan dimensi ini secara positif. Responden S misalnya, ketika mengenal suaminya sebelum menikah, keduanya berkomunikasi melalui media sosial. Setelah cukup lama berkenalan dekat, baik S maupun suami menerima kondisi satu sama lain. Keduanya tidak memandang kekurangan sebagai sebuah masalah, melainkan meniatkan pernikahan sebagai ibadah. Begitu juga halnya dengan responden R, dimana di usia remajanya masih sering mengalami *mood* R yang naik-turun, namun mampu memandang hambatan atau masalahnya dalam proses belajar mengajar secara positif, yang juga didukung oleh guru dan teman-teman yang bersedia mengajarkan R. Dari kondisi S dan R ini dapat dilihat bahwa dukungan dari *support system* terdekat dapat membantu dalam memandang suatu permasalahan secara positif.

- S : (M) “Dasar jodoh mah ya, ditelfon. Kesini atuh kalo mau ketemu mah, ceunah, kata kakaknya teh. Akhirnya dianter lah naik motor. Pas udah ketemu disana, eh, dia ga bisa ngomong, ceunah. Jadi kasihan, ah ibadah wae mah nah. (udah mantep berarti aa nya ya) Iya katanya kakaknya juga, tapi teh, ceunah, resiko tinggi, mau ga?”

- R : “Tapi guru matematika yang laki-laki baik, mengajari R”

Sementara itu, responden D memandang suatu masalah (dalam hal ini: pekerjaan) dengan respon yang terlihat negatif. Sebagai kepala keluarga, D pun merasa memiliki tanggung jawab untuk menafkahi keluarga, tetapi dengan keterbatasan yang dimilikinya hal tersebut sulit untuk didapatkan. Bahkan D pun terkadang berdebat dengan anaknya, A, ketika terdapat hal yang terkadang membuat D emosional, terutama dalam hal keuangan (jajan anak, dan sebagainya). Berbeda dengan isterinya, H, yang mampu menyikapi keadaan keluarganya dengan pandangan yang positif. Walaupun berada di rumah yang dapat dikatakan tergolong kecil, serta kebutuhan sehari-hari yang terbatas, H merasa tidak ada masalah, selama masih dapat memenuhi kebutuhan pangan setiap harinya.

- D : “kerjaan susah gitu teh”
 (A) “Marahnya teh suka gitu, suka berantem. (mama sama ayah?) sama A.”
 H : “Ada. Bisa (makan dan minum sehari-hari)” (selama ada yang dimakan dan diminum sehari-hari, dapat menjalani keseharian dengan baik)

Dimensi *adversity intelligence: control*

Dimensi *adversity intelligence* berikutnya adalah *control*, merupakan kemampuan individu dalam mengendalikan respon seseorang terhadap sesuatu yang mungkin terjadi. Hasil penelitian menunjukkan beberapa respon ketika menghadapi situasi yang menghambat atau mengganggu. Reaksi responden yang lebih dominan adalah respon emosional seperti marah dan sedih. S, D dan H, yang memiliki kesamaan status pernikahan (sudah menikah dan memiliki anak), pada beberapa situasi merasa kesal atau lelah menghadapi orang lain, terutama orang yang dekat dengannya. Anak S, K (individu dengar atau normal), sangat melekat dengan S dan tidak ingin bermain atau dititipkan kepada orang lain, bahkan kepada M, adik ipar S yang

tinggal serumah. Sementara itu, S tidak dapat mendengar anaknya ketika menangis atau memanggilnya, walaupun dari jarak yang dekat. S pun harus selalu berada di samping anaknya dan sering merasa kesulitan ketika harus ke kamar mandi dan dapur. Begitu juga dengan D, yang terkadang merasa kesal pada beberapa situasi kepada anaknya, walaupun menurut A ayahnya sangat jarang marah. Sementara H, isteri D, menunjukkan reaksi emosional sedih ketika merasa lelah menghadapi situasi yang berat. Berbeda dengan ketiga responden lainnya, R, yang masih tergolong dewasa awal dan belum berkeluarga, hingga saat ini cukup mampu mengendalikan dirinya terhadap situasi yang dihadapi.

- S : (M) *"iya (anak S) sama mamahnya terus. Ga mau sama orang lain teh."*
 (M) *"(S) marah mah. Marahnya teh lebih-lebih nyak ini mah euy. Ya paling kalo misalkan nangis, kayak gini apalagi bulan puasa, capek, (anak S) ga mau dititipin ke orang teh, jadinya marah. Marahnya 'wuawuwua' ah pokoknya gitu lah teh, sarap"*
"abis marah teh yaudah diem. Ga yang kepikiran terus sama dia,"
- D : (U) *"ah ga apa-apa, tidur yah paling yah? Ga ada kerjaan mah bobok ya. (D) pucing. Ada gawe mah enak"*
 (A) *"suka itu, suka digitu (pipi dicolek). (kalau D sedang marah ke anak)"*
"Marahnya teh suka gitu, suka berantem. (mama sama ayah?) sama A."
- H : (ayah sama ibu ngerasa sedih ga? Karena apa?) (D) *"Ga. H kalau sedih nangis. (H) engga, engga (terkesan malu)."*
- R : *"Saya hanya kesabaran.. tidak marah dan emosi. Saya harapan kesabaran juga tenanglah."*

Dimensi *adversity intelligence*: *origin* and *ownership*

Origin dan *ownership* adalah dimensi berikutnya. *Origin* menunjukkan sejauh mana seseorang mengatasi situasi dan membawanya

pada dirinya sendiri. Performa individu berkisar antara seorang yang bertanggung jawab, atau cenderung menyalahkan diri sendiri untuk situasi yang buruk. *Ownership* berkaitan dengan akuntabilitas; seperti memiliki hasil dari kesulitan. Mereka dengan AI yang lebih tinggi mengambil tanggung jawab atas hasil dari situasi yang merugikan, sementara mereka dengan AI yang lebih rendah mudah menyerah dan menyalahkan orang lain. Secara keseluruhan dapat dilihat pada pemaparan di bawah ini bahwa semua responden memiliki performa yang cukup baik dalam mengatasi situasi yang tidak biasa ini. S, D dan H tetap berusaha mencari pekerjaan dengan keterbatasannya sebagai individu Tuli. S bahkan pernah mengendarai motor ketika bekerja di *laundry* dengan mengandalkan spion jika terdapat kendaraan lain di belakangnya. D dan H juga berusaha mencari pekerjaan untuk keberlangsungan hidup keluarganya. Berdasarkan keterangan lebih lanjut dari N, H pernah mengikuti pembekalan masak-memasak di kantor kelurahan. D pun sebelumnya bekerja, salah satunya di salah satu pabrik sepatu kulit. Saat ini D ingin kembali bekerja dan sudah melamar untuk pekerjaannya setelah lebaran (wawancara dengan responden dilakukan pada bulan Ramadhan). Selain *origin* yang baik, sisi *ownership* S, D dan H juga cukup tinggi. Situasi yang tidak normal sebagaimana orang pada umumnya tidak menjadikan dirinya menyerah, melainkan terus berusaha sebagai bentuk tanggung jawab atas perannya di dalam keluarga. Sementara itu, untuk permasalahan komunikasi dengan orang lain, mereka meminta bantuan orang terdekatnya untuk memerantari, seperti M, adik ipar S, dan A, anak D dan H.

Responden R yang belum berkeluarga dan baru saja lulus dari pendidikan SMA-nya, memiliki sisi *origin* yang cukup baik juga. R tidak menunjukkan rasa menyesal ataupun menyalahkan diri sendiri atas kondisinya saat ini. R justru bersyukur atas kebaikan teman-temannya yang bersedia membantu dalam memahami pelajaran, walaupun masih terdapat

guru yang marah ketika R tidak paham dengan pelajaran di kelas. R juga merasa mendapatkan dukungan secara emosional dari pacarnya, T. T merupakan individu dengar (normal), namun mampu berbahasa isyarat dengan R. Ketika berkomunikasi dengan orang lain yang tidak dapat berbahasa isyarat, R menggunakan pesan (*chat*) aplikasi *Whatsapp*, atau menuliskan perkataannya di *gadget* dan memperlihatkannya kepada lawan bicara, seperti yang R lakukan ketika pertama kali bertemu peneliti. Namun demikian, dimensi *ownership* seorang R belum begitu terlihat. Hal ini dimungkinkan karena peran dalam keluarga sebagai anak belum begitu memberatkan. Status R yang juga belum bekerja pada saat itu menjadikan R belum menemukan kewajiban yang harus dipertanggungjawabkannya. Namun, sebagai seorang pelajar, R memiliki emosi yang tergolong positif dan dapat menyelesaikan studinya walaupun harus melalui situasi yang tidak biasa, baik dari kondisi dirinya maupun respon yang kurang mendukung dari beberapa guru.

- S : (M) *"paling nanyain, 'naon', ceunah. Kadang kan suaminya aja juga ga paham. Dia mah ga malu, gitu. Biasanya kan kalau yang kekurangan gini mah suka malu nyak, ini mah engga, suka kepo (terhadap situasi di sekitarnya)."*
"Sebelum nikah kerja (di laundry), antar-jemput laundry pakai motor. Kalau liat kendaraan lain yaudah weh dari spion aja. Klakson ga kedengeran atuh kan."
- D&H : *"belajar bahasa isyarat ikut-ikutan weh (mengikuti A, anaknya), jadi kalo ada apa-apa the A weh dikedepankeun."*
(kalau ayah sama mama ada perlu tapi A belum pulang, gimana?) (A) "pas pulangnye baru bantuin."
(sekarang ayah atau mama sudah coba cari-cari kerja lagi?) (A) "sudah dilamar, tapi kerjanya pas abis lebaran."

- R : *"Saya harapan kesabaran juga tenanglah"*
"Teman-teman ingin ajarkan saya paham buat masa depan ... Teman-teman sebaik ingin ajarkan sama saya paham, tapi beda guru tidak ajarkan lalu marah."
(sekarang bagaimana perasaan R kepada guru itu?) "ga ada masalah, sudah baik dan senyum."
"Ga (masalah di rumah). Orang-orang di rumah paham dengan yang R katakan."
"Ya (pacar R tidak apa-apa dengan kondisi R). Saya bisa bahasa isyarat juga."

Dimensi *adversity intelligence: endurance*

Endurance merupakan dimensi *adversity intelligence* yang mengukur seberapa lama seseorang akan bertahan menghadapi kesulitannya hingga berakhir. Pilihan individu pada dimensi ini berkisar antara optimisme terhadap harapan atau memandang situasi tersebut sebagai kegagalan. Data yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan *endurance* yang cukup tinggi pada para responden. Kondisi sebagai individu Tuli diketahui membutuhkan usaha yang lebih besar untuk berkomunikasi dengan individu dengar (normal). Namun, usaha mereka sangat gigih untuk memperoleh pekerjaan. D dan H diketahui pernah mengalami masa patah semangat, namun kemudian bangkit kembali (kembali ke rumah, mengikuti kursus memasak dan mencari pekerjaan). Begitu juga dengan R yang pernah mengikuti kursus. Sedangkan S, dengan kondisinya yang masih mengasuh anak balita, tampak masih menfokuskan aktivitasnya dengan merawat anak dan keluarga.

- D : (N) *“Kebetulan waktu A di TK, katanya pengen pindah ke kota SK (inisial) biar deket sama orang tua D dan H. Tapi ini mudah-mudahan ke depannya ada bantuan lagi (dari pemerintah), kalau kakaknya disini (U) kan masih tetap bisa bantu. Trus usahanya disini (kalau pindah ke kota SK) bolak-balik, yaudalah (ga jadi pindah). Ya namanya manusia kan ada stress nya. Yang suka curhat itu tantenya A (U).”*
- H : *“Ga sih (jualan makanan)”, (U) “malu ceunah”. (A) “Susah (jualnya).”*
 (N) *“pernah waktu itu dijualin hasil pelatihan, jus (tata boga) nya. Jadi memang kalo ini kan memang harus dibantu sama keluarga, takutnya ada orang yang beli, ini ga ngerti, kan jadi crash.”*
- R : *“Kursus di daerah C (inisial), tapi sudah tidak karena masalah (dengan peserta kursus lain).”*

Sebagai tindak lanjut dari proses individu dalam menghadapi masalah dan hambatan yang telah dilewatinya maka hal selanjutnya yang menjadi sorotan merupakan perencanaan, sebagai persiapan dalam menghadapi hari-hari selanjutnya, serta meminimalisir timbulnya masalah yang sama. S, D dan H memiliki keinginan untuk terus berusaha mencari pekerjaan yang tepat. Sedangkan R belum memutuskan rencana lebih lanjut untuk aktivitas keseharian selanjutnya.

- S : *“ingin bekerja, seperti dulu (laundry antar-jemput), tapi setelah K (anak S) besar”*
- D&H : *“(A) pengen kerja sendal. Mamah sama.”*
- R : *“Ga punya rencana, iya mah (menurut orang tua), sehari-harinya ingin di rumah saja.”*

Individu Tuli, layaknya manusia pada umumnya, memiliki hambatan-hambatan yang tidak diinginkan dalam kehidupan sehari-hari, namun harus dihadapi dan diatasi. Sumber hambatan yang dialami individu dapat berasal

dari dalam maupun luar diri. Namun, para responden penelitian kali ini sama-sama menetapkan kondisi Tuli menjadi penyebab munculnya hambatan tersebut. Dari data penelitian kali ini, telah diidentifikasi bahwa permasalahan dari luar diri yang ditemukan adalah komunikasi yang tidak begitu lancar dengan individu dengar (normal) di lingkungan sekitar responden, serta faktor perekonomian tergolong menengah ke bawah, dengan mata pencaharian yang sulit diperoleh. Banyak temuan yang menunjukkan adanya hubungan antara keberadaan Tuli dan hasil yang kurang optimal dalam banyak hal, termasuk kesempatan kerja (Listman & Kurz, 2020). Sumber lain yang menelaah lebih jauh terkait pendapatan dan pekerjaan menunjukkan keadaan yang merugikan untuk individu Tuli, begitu juga dalam permasalahan komunikasi (Fellinger, Holzinger, dan Pollard, 2012). Risiko yang dialami individu Tuli ditentukan oleh faktor lingkungan yang memiliki keterbatasan akses untuk memperoleh dan berbagi informasi, sehingga hal tersebut membebani mereka (Listman & Kurz, 2020).

Setiap individu memiliki berbagai macam bentuk pengendalian diri dalam merespon suatu kondisi. Paparan hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa S, D dan H pernah memberikan suatu respon emosi yang negatif terhadap hal yang mengganggu dirinya. Bagi individu Tuli, pengendalian emosi seringkali sulit dikendalikan. Ashman dan Elkins (dikutip dari Ramadhanu & Suryaningrum, 2016) juga menjelaskan bahwa emosi yang tidak stabil sering ditemukan pada individu Tuli, dimana keterbatasan dalam komunikasi verbal menyulitkan mereka dalam menyampaikan apa yang dirasakannya. Keterbatasan komunikasi audio menjadikan bentuk respon emosi mereka kurang terkontrol dibandingkan orang lain yang non-Tuli. Berbeda dengan responden lainnya, R memaparkan bentuk pengendaliannya yang tidak negatif, dalam hal ini dimungkinkan karena adanya dukungan dari teman-temannya yang

membantu R untuk fokus dalam memahami pelajaran.

Sebuah situasi yang tidak menguntungkan atau membuat seseorang tidak nyaman (bahkan mengganggu), perlu untuk ditangani sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dari sumber hambatan yang ditemukan pada responden, yaitu kondisi Tuli, setiap individu berusaha untuk mencari cara agar masalah tersebut teratasi. S berusaha mengatasi permasalahannya dengan usaha sendiri, seperti bertanya kepada orang lain tentang hal yang kurang dipahami, serta mencari nafkah dengan usaha sendiri, seperti S yang mengendarai motor sendiri walaupun Tuli. Begitu juga dengan R yang berusaha mencari cara mandiri untuk menjalin komunikasi dengan orang lain melalui aplikasi *chat* atau tulisan di *gadget*. Tindakan R ini serupa dengan hasil penelitian Fischer dan McWhirter melalui alat ukur adaptasi *Deaf Identity Development Scale* (DIDS), dimana individu Tuli lebih sering berinteraksi dengan rekan-rekannya di tempat kerja melalui internet atau media perantara lain (Leigh & Andrews, 2016). Sementara itu, berbeda halnya dengan D dan H, yang mencari solusi dengan melibatkan orang ketiga. D dan H mengandalkan A, anak mereka, untuk menjadi perantara dalam berkomunikasi dengan orang lain, dan terkadang juga meminta bantuan orang tua atau saudara jika mengalami kesulitan dalam hal finansial, setelah mencoba berupaya secara mandiri. R pun terkadang juga membutuhkan bantuan dari teman-temannya terkait mata pelajaran yang tidak dipahaminya, begitu juga dengan S dalam melakukan aktivitas di rumah yang tidak dapat dilakukan sendirian.

Bentuk pencapaian individu sedikit-banyak tidak lepas dari penilaian masing-masing, apapun identitasnya dan bagaimana hambatan yang dihadapinya. Ketika individu sedang merasa emosional (misalnya putus asa), penilaian terhadap pencapaiannya dapat menurun drastis, sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh Chaniago dan Ariana, dimana terdapat

hubungan antara *acceptance of disability* dengan *self-esteem* pada individu Tuli dewasa awal. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa hambatan individu Tuli dalam komunikasi berpotensi menyebabkan perasaan frustrasi dan kekurangan yang dapat menekan *self-esteem* individu, demikian pula sebaliknya, penerimaan diri terhadap keterbatasan yang dimiliki dapat mendukung penilaian pencapaian yang positif (Chaniago & Ariana, 2018). Mayoritas para responden menunjukkan penerimaan yang positif terhadap kondisi Tuli yang dialami, sehingga setiap hasil pencapaiannya dinilai positif (bersyukur), sebagaimana yang dirasakan S ketika memutuskan untuk menikah, D dan H yang sudah merasa cukup jika kebutuhan pangan keluarganya terpenuhi, serta R yang bersyukur atas bantuan teman-temannya.

Tingkat ketahanan seseorang sangat bergantung pada sejauh mana individu tersebut dapat bertahan dengan situasi yang mengganggunya. Jika merujuk pada hasil penelitian, D merupakan responden yang memiliki usaha yang lebih besar dibandingkan responden lain. Peran gender diperkirakan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat *endurance* D. Selain itu, tanggung jawab terhadap keberlangsungan hidup keluarga juga dapat menjadi salah satu pendorong D, sehingga sebagai kepala keluarga akan terus berusaha untuk mencari cara pemecahan masalah yang dihadapi. Keberadaan keluarga merupakan salah satu faktor penguat bagi individu Tuli dalam meningkatkan ketahanan (Listman & Kurz, 2020). Ketika orang terdekat mendukung kegiatan yang dilakukan (pendidikan, pekerjaan dan sebagainya), semangat mereka pun semakin tinggi untuk bertahan dan mengalahkan situasi yang menghambat tersebut.

Secara keseluruhan dapat dilihat bahwa selain kemampuan masing-masing individu dalam menghadapi hambatannya, peran dan dukungan *support system* juga cukup penting bagi individu Tuli. Selain penelitian Listman & Kurz, sebuah penelitian lain juga

membuktikan hal yang serupa. Hasil studi tersebut menunjukkan bahwa dukungan keluarga merupakan lingkungan sosial terdekat dan penting sebagai sumber dukungan bagi ODDs (Orang Dengan Disabilitas sensorik), termasuk memperkuat keberfungsian sosial ODDs (Saputri, Raharjo, dan Apsari, 2019). Selain membantu interaksi individu Tuli dengan individu lain di lingkungannya, juga menumbuhkan rasa nyaman pada dirinya karena memiliki orang lain yang hadir mendukung usahanya untuk bertahan dan berusaha menjadi individu sosial yang lebih baik. Seperti suami S, misalnya, menerima kondisi S sebagai individu Tuli, dimana hal ini dapat mengurangi atau menghilangkan persepsi negatif S sebagai individu Tuli. Begitu juga dengan adik ipar S, saudara dan anak D&H, termasuk pacar dan teman-teman R, yang membantu meringankan kesulitan dalam berkomunikasi, menjalani aktivitas sehari-hari, serta meningkatkan semangat hidup yang lebih baik. Sussman dan Brauer menegaskan bahwa pada akhirnya, individu Tuli dewasa merasa nyaman dengan kondisi tulinya, serta terus berusaha untuk menumbuhkan semangat positif untuk hidup (Leigh & Andrews, 2016).

Salah satu pendukung lainnya bagi individu Tuli, selain orang terdekat, yaitu peran pemerintah yang telah memberikan berbagai peluang dan fasilitas untuk kesejahteraan penyandang disabilitas, dalam berbagai bidang. Beberapa di antaranya seperti kemudahan sarana-prasarana di bidang kesehatan (Kemenkes RI, 2019) dan fasilitas kesehatan berupa pelayanan dan alat bantu (Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Sosial RI, 2018), pendidikan inklusi yang diharapkan dapat menjadi bekal untuk sosialisasi individu Tuli yang lebih baik di lingkungan, peluang kerja sebagai pegawai yang telah disediakan pemerintah sesuai ketentuan Undang-Undang Penyandang Disabilitas (Widodo, 2020), serta bantuan berupa modal usaha bagi yang berminat untuk menginisiasi Usaha Ekonomi Produktif

(UEP) (Kemensos RI, 2019). Kemudahan-kemudahan yang telah diberikan pemerintah dapat menjadi salah satu potensi bagi individu Tuli untuk mendukung kemampuan *adversity intelligence*-nya dan menemukan solusi dari hambatan yang dihadapi, menuju kesejahteraan hidup yang lebih baik.

Penutup

Keterbatasan studi: Hasil penelitian ini perlu diposisikan sebagai pembuktian bahwa “ada” sejumlah fakta terkait *adversity intelligence* pada individu Tuli yang menjadi responden dalam penelitian ini. Ketersediaan calon subjek yang bersedia menjadi responden menjadi penentu bahwa riset ini berada pada capaian hasil yang saat ini disajikan dalam makalah. Fakta objektifnya layak untuk disajikan guna keperluan praktis, layanan profesional, ataupun pengembangan ilmu, dengan kesadaran akan kemungkinan bahwa terdapat fakta lain yang mungkin ada pada subjek serupa, di luar fakta yang dihasilkan melalui riset ini.

Kesimpulan: Kondisi Tuli memang menjadi salah satu hal yang menjadi penyebab awal munculnya hambatan-hambatan yang dialami individu Tuli (responden), hambatan utama tersebut lebih cenderung pada kondisi kehidupan saat ini, yaitu komunikasi yang tidak begitu lancar dengan individu dengar (normal) dan mata pencaharian yang sulit diperoleh. Hambatan tersebut dapat dilalui dan diatasi dengan *adversity intelligence* yang cukup baik walaupun belum mencapai titik sempurna, terutama yang berkaitan dengan pengendalian emosi diri.

Support system dari keluarga dan orang-orang terdekat serta peran pemerintah dalam memfasilitasi kebutuhan individu Tuli di lingkungan masyarakat, dapat menjadi faktor pendukung dari luar diri individu Tuli dalam menghadapi dan mengatasi hambatannya dengan semangat yang positif. Sementara itu, faktor penghambat dapat berupa (1) keterbatasan akses komunikasi dan pekerjaan bagi individu

Tuli (eksternal), serta (2) kesulitan memahami gerak bibir individu dengar yang tidak mampu berbahasa isyarat (internal). Salah satu saran yang dapat diberikan terkait kondisi responden penelitian ini adalah memperluas jaringan sosial, misalnya komunitas Tuli di kota setempat. Melalui hubungan yang terjalin dengan orang lain sesama Tuli, diharapkan dapat diperoleh informasi dan dukungan yang lebih banyak untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, mempelajari cara yang lebih efektif dalam berkomunikasi dengan individu dengar, serta berbagai masukan lainnya terhadap masalah serupa yang dialami sebagai individu Tuli.

Rekomendasi: Hal yang perlu dijadikan bahan evaluasi dari penelitian ini, terutama untuk menjadi perhatian lebih lanjut bagi peneliti yang akan menguji topik terkait, adalah variasi latar belakang responden. Riset lebih lanjut dapat mengumpulkan data dari responden dengan data demografi yang berbeda, misalnya domisili, etnis, hingga tingkat perekonomian, serta kondisi responden (tuli total versus sebagian (*hard of hearing*), dan menggunakan bahasa isyarat versus *cochlear implants*). Hal ini diharapkan dapat memperoleh data yang lebih kaya dan informatif. Selain itu, individu Tuli akan sangat merasa diapresiasi jika dianggap setara (dengan orang normal), dan pengumpulan data akan lebih mudah dilakukan apabila peneliti dan observer memahami bahasa isyarat.

Ucapan Terima Kasih

Peneliti mengucapkan terima kasih atas izin dan arahan yang diberikan oleh pihak kelurahan setempat sehingga penelitian ini dapat terlaksana hingga menghasilkan temuan sedemikian rupa. Selain itu, ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Ibu Dr. Fitri Ariyanti, M.Psi., Psikolog atas dukungan serta saran yang sangat membantu dalam penyelesaian artikel ilmiah ini.

Pustaka Acuan

- Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Sosial RI. 2018. "Kemensos Hadirkan Beragam Layanan dan Program bagi Penyandang Disabilitas." *Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI*. Diambil 16 Desember 2020 (<https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2018/12/kemensos-hadirkan-beragam-layanan-dan-program-bagi-penyandang-disabilitas>).
- Chaniago, Yulia, dan Atika Dian Ariana. 2018. "Hubungan antara Acceptance of Disability dengan Self Esteem pada Individu Dewasa Awal dengan Tuna Rungu." *Jurnal Psikologi Klinis dan Kesehatan Mental* 7:21–31.
- Creswell, John W. 2012. *Educational Research : Planning, Conducting and Evaluating Quantitative and Qualitative Research*. Fourth. Boston: Pearson Education Inc.
- Crowe, Teresa V. 2018. "Factors Associated with Well-Being in a Sample of Deaf Adults." *Journal of Developmental and Physical Disabilities* 31(3). doi: 10.1007/s10882-018-9639-4.
- Daloos, Monica Joy O. 2015. "Emotional Intelligence And Adversity Quotient Of Selected Helping Professionals." Far Eastern University, Manila.
- Fellinger, Johannes, Daniel Holzinger, dan Robert Pollard. 2012. "Mental health of deaf people." *The Lancet*.
- Kemhumkam RI. 2016. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas*. Jakarta, Republik Indonesia.
- Kemenkes RI, Pusdatin. 2019. *InfoDATIN : Disabilitas Rungu*. Jakarta, Republik Indonesia.
- Kemensos RI. 2019. "Kelompok Usaha Bersama (KUBE)." *Kementerian Sosial RI*. Diambil 16 Desember 2020 (<https://www.kemsos.go.id/ar/kube>).
- Kersting, S. A. 1997. "Balancing Between Deaf and Hearing Worlds: Reflections of Mainstreamed College Students on Relationships and Social Interaction." *Journal of Deaf Studies and Deaf Education* 2(4):252–63. doi: 10.1093/oxfordjournals.deafed.a014330.
- Leigh, Irene W., dan Jean F. Andrews. 2017. *Deaf people and society: Psychological, sociological, and educational perspectives, second edition*. 2nd ed. New York: Routledge.
- Listman, Jason D., dan Kim B. Kurz. 2020. "Lived experience: Deaf professionals' stories of resilience and risks." *Journal of Deaf Studies and Deaf Education*. doi: 10.1093/deafed/enz045.
- Meadow, Kathryn P. 2019. "Personality and social development of Deaf Persons." *JADARA* 9(3).
- PSIBK. 2019. "Tuli, tunarungu, atau tuli?" *Pusat Studi Individu Berkebutuhan Khusus Universitas Sanata*

- Dharma. Diambil 2 November 2020 (<http://www.usd.ac.id/pusat/psibk/2018/04/20/tunarungu/>).
- Ramadhanu, Mardha, dan Cahyaning Suryaningrum. 2016. "Adversity quotient ditinjau dari orientasi locus of control pada individu difabel." *Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan* 5(2):209–20.
- Saputri, Anisza Eva, Santoso Tri Raharjo, dan Nurliana Cipta Apsari. 2019. "Dukungan Sosial Keluarga Bagi Orang Dengan Disabilitas Sensorik." *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat* 6(1):62. doi: 10.24198/jppm.v6i1.22783.
- Widodo, Bambang. 2020. "Upaya Memenuhi Hak Penyandang Disabilitas." *Kementerian Hukum dan HAM RI*. Diambil 16 Desember 2020 (<http://ham.go.id/2020/03/06/upaya-memenuhi-hak-penyandang-disabilitas/>).

Penanganan Dampak Sosial dan Ekonomi Akibat Pandemi Covid 19 melalui Pendekatan Kewirausahaan Sosial

Studi: Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah (UKM)

Handling Social and Economic Impact of Pandemic Covid 19 Through Social Entrepreneurship Approach

Study: Empowerment of Small and Medium enterprise (SME)

Aryan Torrido

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Jalan Marsda Adisucipto, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281.

Email:aryanridho@gmail.com. Hp:081904049274.

Naskah diterima 8 Desember 2020 direvisi 14 Desember 2020 disetujui 14 Maret 2021

Abstract

The Covid 19 pandemic that occurred in 2020 created a different economic crisis, the impact of the problems that were raised was more complex because it occurred in all countries at one time resolving the causes and impacts. This article seeks to provide an overview of the social and economic impacts of the Covid 19 pandemic and provide alternative coping strategies with a social entrepreneurship approach. The research method used is a literature review, conducting studies on writings related to the purpose of writing articles. As a result, the Covid 19 pandemic had a negative impact on worsening the economic condition of the State of Indonesia and increasing new poverty, but on the other hand there is a positive impact, namely the increase in the social piety of the Indonesian people and there are several businesses that made huge profits during the Covid 19 pandemic. So it is necessary to consider a coping strategy model that is can collaborate market, state, and altrism which is offered in this article a coping model based on social entrepreneurship. This model recommends that large state-owned, private companies and all Indonesian Ministries play a role as social enterprises in maintaining the sustainability of their social programs.

Keywords: impact; pandemic covid-19; social entrepreneurship

Abstrak

Pandemi Covid 19 yang terjadi pada Tahun 2020 menciptakan krisis ekonomi berbeda pada semua negara, dan berdampak pada semua kategori usaha. Artikel ini berusaha memberikan gambaran mengenai dampak sosial dan ekonomi pandemi Covid-19 dan memberikan alternatif strategi penanggulangan dengan pendekatan kewirausahaan sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah *literature review*, dengan melakukan kajian terhadap tulisan-tulisan mengenai dampak pandemi dan kewirausahaan sosial, terdapat delapan artikel yang dianalisis. Hasilnya, pandemi Covid-19 memberikan dampak negatif memperburuk kondisi ekonomi Negara Indonesia dan meningkatkan kemiskinan baru, namun di sisi lain terdapat dampak positif yakni meningkatnya kesalehan sosial masyarakat Indonesia serta terdapat beberapa bisnis yang meraup keuntungan besar selama pandemi Covid-19. Perlu mempertimbangkan model strategi penanggulangan yang dapat mengkolaborasi pasar, negara, dan altrisme atau kesalehan sosial yang ditawarkan dalam artikel ini sebuah model penanggulangan berbasis kewirausahaan sosial. Model ini merekomendasikan perusahaan besar milik negara, swasta, dan semua Kementerian Indonesia berperan sebagai *social enterprise* dalam menjaga keberlanjutan program sosialnya.

Kata kunci: dampak; pandemi covid-19; kewirausahaan sosial

Pendahuluan

Dalam beberapa bulan terakhir ini tema pandemi virus Corona merupakan sesuatu yang hangat bahkan sexy untuk dibicarakan. Dari kerumunan (*crowd*) di angkringan sampai

media ilmiah gencar membicarakan Corona. Alur pembicaraannya banyak yang melakukan analisa menggunakan prespektif yang bukan merupakan bidangnya berdasarkan sedikit info yang didapat. Apabila analisisnya benar

tidak akan menimbulkan kesalahpahaman pengertian, tetapi akan berbeda kalau salah, bisa menyesatkan. Contoh kejadian yang penulis alami sendiri, sekitar dua bulan yang lalu di salah satu anjungan tunai mandiri (ATM) wilayah Yogyakarta, terdapat tukang parkir yang rajin mengingatkan kepada setiap pengunjung bahwasanya virus Corona itu adanya di Jakarta, sementara untuk daerah Yogyakarta terbilang masih aman, padahal Provinsi DIY sampai dengan akhir Oktober Tahun 2020 masih mengalami peningkatan pada jumlah orang dengan status positif Corona. Bentuk tindakan tukang parkir tersebut bisa dimaknai sebagai representasi perasaan takut seandainya banyak orang tidak mau keluar rumah. Dampaknya akan tidak ada lagi kendaraan yang parkir dan jika hal itu terjadi, dapat mempengaruhi pendapatan.

Berkurangnya mobilitas gerak manusia pada situasi pandemi Corona dipengaruhi perasaan takut tertular, perasaan ini yang sekarang banyak dirasakan semua manusia di dunia. Virus Covid-19 yang pertama kali muncul di Kota Wuhan Negara Cina pada Bulan Desember Tahun 2019, bergerak sangat cepat ke berbagai negara, sehingga merupakan suatu pandemi. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) makna pandemi tidak ada hubungannya dengan tingkat keparahan penyakit, jumlah korban atau infeksi, lebih bermakna pada penyebaran virus yang menyebar secara cepat dan melanda seluruh negara-negara yang ada di dunia (Sitorus & Hidayat, 2020). Perasaan takut ini yang mendorong banyak orang baik melalui kesadaran sendiri atau dipaksa dengan kebijakan pemerintah untuk melakukan *stay at home* dan *physical distancing* (jaga jarak) agar tidak tertular selain memakai masker dan cuci tangan. Fenomena ini membawa kehidupan manusia kedalam normalitas baru (*the new normal*) yang meliputi cara bekerja, cara belajar hingga cara bersosialisasi. Normalitas baru ini menciptakan *snowball effect* dan efek yang paling nyata adalah ekonomi. Kondisi

ini mengakibatkan setiap individu mengalami penurunan produktivitas dalam kegiatan ekonominya, baik dalam lingkup produksi maupun konsumsi.

Adanya penurunan produktivitas tentunya mempengaruhi tingkat kesejahteraan sosial walaupun sebenarnya kondisi ekonomi Indonesia semenjak Tahun 2015 sudah mengalami penurunan, namun semakin terpuruk pada situasi pandemi Corona. Sebagaimana yang disampaikan Rizal Ramli dalam salah satu forum ilmiahnya;

“Kondisi ekonomi Negara Indonesia sejatinya sudah sangat jelek sebelum terjadinya pandemi COVID-19”. Menurutnya memang pandemi tersebut berkontribusi memperparah krisis ekonomi yang terjadi, ibarat orang yang sudah jalan sempoyongan kemudian ditinju”.

Banyak ilmuwan sosial dan ekonomi nasional ataupun dunia memiliki pendapat sama mengenai krisis ekonomi akibat pandemi berbeda dengan krisis Tahun 1998 dan Tahun 2007, dampak pandemi meliputi semua pelaku-pelaku usaha sementara dua krisis sebelumnya tidak berdampak pada para pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM), bahkan UKM masih bisa menjadi katup penyelamat perekonomian Indonesia, pendapat ini juga tegas disampaikan oleh Sri Mulyani Menteri Keuangan Negara Indonesia.

Kenapa hal itu bisa terjadi? Bagaimana solusinya? berangkat dari pertanyaan inilah tujuan artikel disusun agar dapat memberikan tambahan informasi atau kajian mengenai strategi penanganan dampak pandemi, fokus kajian lebih menitikberatkan pendekatan “kewirausahaan sosial sebagai solusi dampak sosial dan ekonomi pandemi Covid-19”. Konstruksi pemikiran solusi berbasis pendekatan konsep kewirausahaan sosial, diharapkan dapat memberikan manfaat pada pemahaman mengenai konsep kewirausahaan sosial sebagai sebuah strategi penanganan masalah sosial berbasis pemberdayaan ekonomi, sekaligus pemikiran solusi didalamnya bisa digunakan sebagai

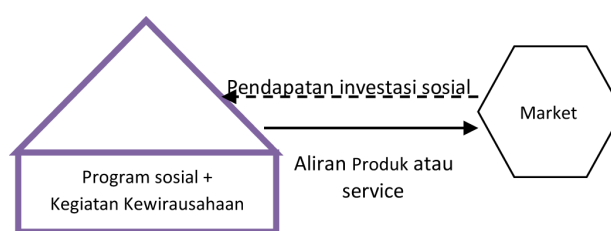
referensi para pelaku usaha dan pemerintah dalam pertimbangan kebijakan penanggulangan dampak ekonomi Covid-19.

Sebelum sampai pembahasan, terlebih dahulu memahami konsep *new normal* dan kewirausahaan sosial agar memperoleh gambaran pendahuluan. Istilah *new normal* sudah ada dari dulu, digunakan untuk menjelaskan fenomena perubahan di dunia akibat adanya krisis ekonomi. Menurut Roger McNamee (LaBarre, 2003), *new normal* selalu akan terjadi di sepanjang kehidupan manusia. Sehingga manusia harus secara sabar belajar dan terus beradaptasi untuk mengembangkan respon yang tepat dalam menghadapi tuntutan perubahan yang terjadi. Bahkan, McNamee menambahkan, pengertian “normal” dari *new normal* berkaitan dengan skala waktu, berkaitan upaya manusia dalam mengembangkan perilaku yang sesuai untuk membuat kehidupan menjadi lebih baik dalam jangka panjang.

Sementara konsep kewirausahaan sosial sebagai pendekatan yang dipakai dalam konstruksi solusi diambil dari pemikiran Nicholls and Cho (Nicholls & Cho, 2006), “merupakan sebuah konsep dalam kegiatan kewirausahaan yang bertujuan untuk memaksimalkan profit serta menyelesaikan masalah sosial dan atau lingkungan”. Berangkat dari definisi tersebut, menurut penulis konsep kewirausahaan sosial dapat dikondisikan kedalam dua hal: (1) jika dikaitkan dengan prespektif pelaku usaha, maka mengarahkan penggunaan logika “kapitalis baik”, berpikir mendapatkan keuntungan (*profit oriented*) dan investasi sosial sekaligus. Sedangkan yang ke (2) berkaitan dengan pemerintah, berpikir untuk menciptakan sinergitas antara usaha besar milik pemerintah atau swasta dengan usaha kecil dan pengkondisian kegiatan ekonomi milik setiap kementerian untuk investasi sosial berbasis pemberdayaan ekonomi komunitas.

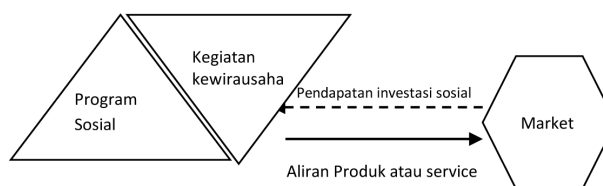
Implementasi pola pelaksanaannya dikembangkan oleh Alter, S.K. (Alter, 2006) kedalam rumusan tiga model kewirausahaan

sosial, keterkaitannya pada keberlanjutan usaha pemberdaya mempengaruhi keberlangsungan investasi sosial pada komunitas sasarannya; (1) Model integrated, merupakan pola kewirausahaan sosial dimana kegiatan ekonomi yang dilakukan pelaku (pemberdaya) dan komunitas sasaran sama, bisa diterjemahkan dengan komunitas sasaran bekerja dalam kegiatan usaha yang dimiliki pihak atau kelompok pemberdaya, secara sederhana dapat dilihat dalam Gambar 1.



Gambar 1.
Model Integratif (Modifikasi)
Sumber: Alter, S,K (2007)

Model no (2) adalah bersinggungan, yakni kegiatan ekonomi pemberdaya dengan komunitas sasaran saling melengkapi atau berhubungan, sebagai contoh kegiatan ekonomi yang dilakukan bank sampah milik Aziz di Kabupaten Bantul, komunitas sasaran sebagai *supplier* sampah yang akan dibeli dan diolah oleh bank sampah menjadi kerajinan daur ulang, lihat Gambar 2.

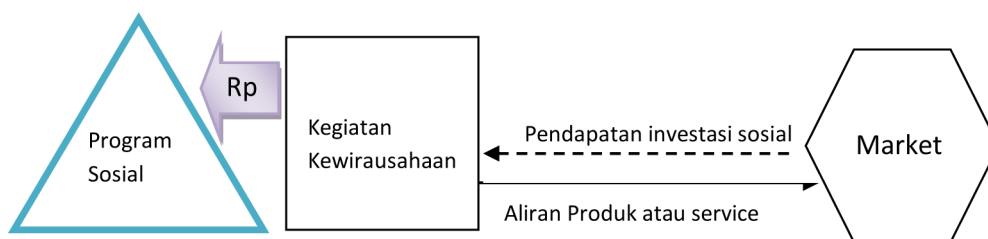


Gambar 2.
Model Bersinggungan (Modifikasi)
Sumber: Alter, S,K (2006)

Terakhir adalah (3) Model terpisah, antara kegiatan ekonomi pemberdaya dan komunitas sasaran terpisah, atau tidak saling melengkapi bahkan tidak terdapat hubungan sama sekali. Model ini banyak diterapkan dalam program

CSR oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia (Darmawi, 2019), seperti yang dilakukan salah satu BUMN, yaitu TWC (Taman Wisata Candi) di Yogyakarta yang melakukan pemberdayaan ekonomi olahan makanan singkong pada komunitas sasaran para Ibu rumah tangga di

Dusun Cepit Desa Bokoharjo Prambanan. Pilihan terhadap olahan singkong dikarenakan banyaknya tanaman bahan baku di sekitar wilayah sasaran. Lebih lanjut bentuk sederhana alur pada model terpisah bisa dilihat di Gambar tiga yang ada di bawah ini.



Gambar 3.
Model Terpisah (Modifikasi)
Sumber: Alter. S,K (2007)

Penggunaan Metode Penelitian

Dalam mengungkap tujuan penelitian dan penyesuaian terhadap situasi pandemi corona yang mengurangi studi lapangan maka pendekatan dilakukan dengan kajian literatur (*literature review*), merupakan suatu pendekatan penelitian yang tidak menggunakan data primer dan fokus pada kajian data sekunder. Artikel ini fokus pada data sekunder meliputi tulisan-tulisan yang diterbitkan antara Tahun 2015-2020 yang berhubungan dengan tujuan penulisan artikel. Strategi analisis: mengumpulkan berbagai tulisan yang diperoleh dari koran, forum kegiatan ilmiah, dan/atau media internet terkait dampak pandemi terhadap kegiatan ekonomi dan aneka solusinya di Indonesia. Berbagai tulisan yang diperoleh dianalisis sebagai bangunan pemahaman penulis mengenai ruang lingkup permasalahan dan dampak ekonomi dari pandemi yang nantinya sebagai pijakan untuk merumuskan model solusi berbasis prespektif konsep kewirausahaan sosial (*Social Entrepreneurship*).

Berdasarkan penelusuran artikel mengenai dampak Pandemi Covid 19 yang sudah dilakukan melalui *google scholar*, *google*, dan *research gate* menemukan 8 artikel mengenai dampak sosial dan ekonomi akibat adanya pandemi Covid-19. Sedangkan analisis artikel-artikel

mengenai pemberdayaan masyarakat berbasis kewirausahaan sosial dilakukan pada lima hasil penelitian selain teori mengenai kewirausahaan sosial, yang digunakan untuk merumuskan model strategi penanganan dampak Pandemi Covid-19 di Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

Uraian-uraian hasil dan pembahasan pada artikel ini akan disajikan dalam tiga bagian, analisa penyebab turunnya produktivitas selama pandemi corona, dampak sosial ekonomi, dan alternatif solusi berbasis kewirausahaan sosial.

Penyebab Turunnya Produktivitas Selama Pandemi Corona

Normalitas baru (*New Norms*) yang didengungkan serta diimplementasikan ke dalam aturan oleh beberapa pemerintah daerah dalam menjalani masa pandemi Covid-19, tidak semua pemerintah daerah memberlakukannya dalam bentuk aturan disertai *punishment*. Provinsi Yogyakarta termasuk wilayah yang menghindari normalitas baru berbasis aturan, lebih pada sosialisasi nilai-nilai baru selama pandemi. Dalam banyak kesempatan Gubernur DIY kerap kali mengatakan menghindari *lock down* atau pembatasan keluar rumah walaupun status daerahnya adalah darurat. Logika yang

dipakai jika berbasis aturan akan mengakibatkan tertutupnya banyak kran sumber pendapatan masyarakat, sama dengan pemikiran pemerintah pusat terlihat dikeluarkannya aturan presiden sekitar Bulan Juni Tahun 2020 mengenai keputusan kebijakan *lock down* oleh daerah terlebih dahulu harus mendapatkan izin atau restu pemerintahan pusat, dan langkah maju mundur pemerintah pusat dalam melaksanakan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Langkah kongkrit pemerintah dalam mengurangi jumlah penderita Covid-19 yang sudah diterapkan dan berkelanjutan, meliputi kebijakan *work from home* (WFH) terutama di lembaga-lembaga pendidikan pada semua tingkat dan pemberlakuan protokol Covid-19 di tempat-tempat keramaian atau aktivitas yang mengundang kerumunan massa.

Walaupun tidak menyentuh semua lini kehidupan, namun pembatasan ruang gerak masyarakat Indonesia tetap terjadi. Apabila berpijak prinsip dasar pasar adalah bertemunya penjual dan pembeli maka adanya pembatasan gerak berpengaruh pada keberlangsungan aktivitas pasar yang didalamnya melibatkan banyak orang dengan peran ekonomi berbeda. Hal tersebut berpengaruh pada tingkat kesejahteraan sosial. Pada krisis ekonomi pandemi corona, perhatiannya tidak hanya pada penanganan saja, namun penyebab krisis menjadi pusat perhatian sekaligus dan terjadi di semua negara sehingga permasalahannya kompleks. Penyebab krisis merupakan persebaran virus corona dengan sangat cepat tanpa diketahui obat ataupun vaksinnya. Penyebab turunnya produktivitas masyarakat diakibatkan dua hal; sifat persebaran virus corona dan pengkondisian karakter lingkungan ekonomi global dalam beberapa tahun terakhir yang mengedepankan pelepasan batas antarnegara.

Dimulai sifat persebaran virus yang mengakibatkan kondisi mobilitas orang terbatas, hal ini terjadi dikarenakan persebaran virus corona melalui bersentuhan anggota badan, benda, dan nafas atau batuk. Terlepas

dari aturan preventif yang diberlakukan longgar oleh pemerintah, menurut hasil survei yang dilakukan Lembaga Kantar, hampir 80 persen masyarakat Indonesia menghabiskan waktu di rumah selama masa karantina atau permulaan darurat sekitar awal Bulan April-Juni Tahun 2020, kemudian jumlah persentasenya turun menjadi kisaran 40% semenjak diberlakukannya *new normal*. Menariknya, *trend* ini tidak hanya terjadi di kota besar yang rata-rata termasuk zona merah, namun juga diikuti oleh kota-kota kecil yang kategori wilayahnya kuning atau hijau. Meskipun di kalangan masyarakat terutama kalangan bawah masih terjadi perdebatan perihal indikator-indikator dalam kategorisasi zona merah dengan kuning dan perlakuan penanganan baku pembeda oleh pemerintah pada setiap zona. Walaupun belum terjadi persamaan persepsi kategorisasi zona secara menyeluruh antar kalangan masyarakat, tetap membuat aktivitas usaha-usaha yang menuntut pergerakan manusia berkurang atau bahkan terhenti, seperti usaha transportasi, hotel, mall, *sport center*, industri pariwisata, infrastruktur, dan pasar modern ataupun tradisional.

Terbatasnya mobilitas gerak sudah mengganggu produktivitas usaha karena berkurangnya aktivitas transaksi pada berbagai bidang usaha, semakin bertambah akibat kecenderungan pola ekonomi global dalam menciptakan ketergantungan ekonomi antarnegara sebagai upaya integrasi ekonomi (globalisasi ekonomi) melalui intensifikasi pergerakan barang, jasa, teknologi, dan modal lintas batas. Seperti Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang dimulai Tahun 2015, tujuannya untuk menciptakan integrasi ekonomi antarnegara ASEAN dan diluarnya, sebelumnya sudah ada, yakni Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE) yang memiliki tujuan integrasi ekonomi juga. Sehingga kalau dilihat dari kronologisnya, menggunakan perspektif integrasi ekonomi (globalisasi ekonomi) maka mewabahnya virus di Cina yang mengkondisikan adanya karantina total mengakibatkan terhentinya aktivitas

berbagai usaha. Situasi tersebut sangat cepat berpengaruh terhadap negara-negara yang menjadi mitra dagang Cina termasuk Indonesia, terutama penyuplai bahan baku. Oleh karena, dalam 10 Tahun terakhir Negara Cina merupakan negara eksportir terbesar di dunia. Dengan demikian, memburuknya perdagangan di Cina akan sangat mempengaruhi kondisi ekonomi di Indonesia dan negara-negara lain. Salah satu contoh perusahaan eksportir kayu lapis dari Yogyakarta, semenjak Bulan Desember Tahun 2019 ini tidak produksi lagi karena terhentinya permintaan dari Negara Cina terkait status *lockdown* yang dijalkannya. Pada Bulan Agustus Tahun 2020 mulai beroperasi lagi, akan tetapi terjadi pengurangan volume pengiriman produk.

Kedua faktor penyebab di atas mendorong manusia berperilaku hidup sehat dan banyak melakukan aktivitas konsumsi berkaitan dengan diri, rumah (domestik), dan sekitarnya. Selain karena desakan situasi kondisi ekonomi dan kesehatan dorongan perubahan perilaku konsumsi merupakan representasi strategi coping (Kemampuan mengelola stress) yang banyak dilakukan orang pada masa menjalani pandemi corona ketika terkondisikan berada

pada lingkungan sosial terbatas dengan penuh ketidakpastian dalam waktu lama. Sehingga perubahan perilaku hidup sehat dan konsumsi domestik, menggeser dari menginginkan produk berdasarkan keinginan (*want*) untuk memenuhi aktualisasi diri merupakan ciri manusia modern (Schultz, 2011), ke produk yang sifatnya kebutuhan (*needs*) fisiologis dan rasa aman jiwa raga. Bahkan, kecenderungannya masyarakat mulai mendukung gerakan *degrowth*, yang memandang konsumsi penduduk dalam berbagai sektor sudah lebih besar dari yang bisa disediakan oleh bumi. Selain mempertimbangkan untuk menjadi vegetarian, kesalehan sosial masyarakat semakin meningkat terlihat dari banyaknya aktivitas perbaikan lingkungan dapat dilakukan dengan berbagai cara di antaranya dengan mendaur ulang, memperbaiki, mendekorasi ulang, mendonasikan barang-barang atau makanan yang masih layak kepada orang-orang yang lebih membutuhkan. Adanya aneka musibah selalu diiringi dengan kebangkitan dan atau peningkatan solidaritas sosial, sudah merupakan sifat alamiah manusia.

Hasil uraian analisis pada bagian ini merupakan pengembangan dari kajian artikel-artikel, terlihat pada Tabel di bawah ini;

Tabel 1.
Matrik Sintesis Mengenai Penyebab Turunnya Produktivitas Masyarakat Akibat Pandemi Covid-19

No	Sumber dan Tahun	Penyebab Turunnya Produktivitas Selama Pandemi Covid 19
1.	(Suryahadi et al., 2020), (Yamali & Putri, 2020)	Sosialisasi mobilitas gerak yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia secara langsung mempengaruhi keseharian masyarakat pada semua aspek, walaupun masih banyak terdapat penyimpangan-penyimpangan.
2	(Hadiwardoyo, 2020), (Nasution et al., 2020), (Sitorus & Hidayat, 2020), (Yunus & Rezki, 2020),	Perubahan perilaku belanja masyarakat dan melakukan aktivitas mempengaruhi produktivitas menyeluruh

Sumber: Dokumentasi peneliti

Dampak Ekonomi dan Sosial Pandemi Covid-19

Kedua faktor penyebab di atas saling berkaitan, yang berdampak pada berkurangnya atau berhentinya aktivitas ekonomi beberapa usaha. Keadaan ini menciptakan banyaknya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan

berkurangnya sirkulasi kegiatan produksi dan konsumsi dikalangan pelaku usaha dan masyarakat. Buktinya dapat kita lihat pada awal Bulan April-Juli Tahun 2020 banyak hotel, mal, tempat wisata, dan aneka usaha lainnya yang tutup, di Provinsi Yogyakarta dampak tutupnya hotel mengakibatkan beberapa di antaranya

dijual dikarenakan pemilik tidak bisa membayar tanggungan hutang usaha. Bahkan dapat dikatakan sepanjang kita hidup, situasi tutupnya aneka usaha dalam waktu tiga atau empat bulan tingkat nasional atau global merupakan kejadian pertama kalinya. Kondisi ekonomi ini mendorong terciptanya krisis yang disebabkan berkurangnya pendapatan domestik negara (GDP), dampaknya pertumbuhan ekonomi akan turun dan kalau tidak bisa ditanggulangi akan meningkatkan inflasi (proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus). Dalam konteks sosial, krisis ekonomi tersebut akan mengakibatkan keresahan sosial dan potensi kerawanan sosial, munculnya permasalahan sosial bisa merupakan embrio terciptanya krisis politik.

Sementara Suryahadi, dkk (2020) dalam studinya memprediksikan tingkat kemiskinan rata-rata Indonesia akan meningkat di akhir tahun 2020 menyebabkan sekitar 8 juta penduduk akan mengalami kemiskinan baru akibat pandemi Covid 19. Data estimasi ini didapatkan berdasarkan (1) data Susenas bulan Maret dan September 2019; (2) melihat pola lonjakan peningkatan kemiskinan Tahun 2006 dan 2007 yang ada dikarenakan naiknya harga minyak dunia; dan (3) berdasarkan pertumbuhan ekonomi, jika penurunnya 1% mengakibatkan penambahan sekitar 1,4% persentase tingkat kemiskinan masyarakat. Kementerian Ketenagakerjaan merilis data tenaga kerja untuk Bulan Mei Tahun 2020: 1,7 juta tenaga kerja formal dirumahkan, 749,4 ribu mengalami PHK, dan 100 ribu pekerja migran dipulangkan (Sugiri, 2020). Melihat waktu rilis data tersebut, dipastikan jumlahnya semakin bertambah mengingat sampai dengan pertengahan Bulan Oktober Tahun 2020 pandemi Covid-19 belum usai. Oleh karena itu, lembaga serikat pekerja Indonesia pada banyak kesempatan yang ditayangkan di media televisi ataupun koran meminta pemerintah agar bisa mengambil langkah tegas mengenai nasib tenaga kerja Indonesia.

Pemutusan hubungan kerja yang memunculkan pengangguran baru merupakan permasalahan sosial tersendiri, jika tidak segera dikelola dengan baik akan meningkatkan permasalahan lainnya. Dampak berkurangnya atau hilangnya pendapatan bisa memicu tindakan-tindakan penyimpangan sosial sebagai upayapemenuhankebutuhanapabila terbatasnya solusi, menurunnya pendapatan tentunya berpengaruh langsung pada aspek kesehatan dan pendidikan. Pada bidang kesehatan bukan hanya berkaitan dengan berkurangnya kemampuan pemanfaatan jaminan kesehatan saja, akan tetapi berpengaruh juga dalam mengkondisikan makanan sehat untuk diri sendiri dan keluarga. Sama dengan bidang pendidikan, dampaknya pada berkurangnya perhatian terhadap bidang pendidikan karena berkurangnya kemampuan finansial, terlihat dari menurunnya jumlah penerimaan mahasiswa baru Tahun 2020 dan terjadi peningkatan mahasiswa yang mengambil cuti semester. Menurut lembaga Oxfam (OXFAM, 2020), situasi pandemi Covid 19 semakin memperlebar ketimpangan ekonomi dan sosial di semua negara dunia, Negara Indonesia pada tingkat ASEAN peringkat ke-4 dengan peringkat global 93. Peringkat global turun jika dibandingkan Tahun 2018, saat itu peringkat Indonesia masih pada kisaran angka 90 dan masih masuk dalam kategori lebar ketimpangan sosial dan ekonominya.

Adanya ketimpangan (*inequality*) menunjukkan konsentrasi kue ekonomi kebanyakan dinikmati kelompok atas, berbagai studi menunjukkan ketimpangan merupakan katalis dari kecemburuan sosial masyarakat yang dapat memunculkan konflik sosial, dan kegaduhan politik. Bahkan bisa juga peningkatan kesejahteraan masyarakat yang tidak merata mengubah persepsi masyarakat mengenai apa itu kemiskinan. Kemiskinan tidak lagi dipandang sebagai kekurangan sandang, pangan, dan papan, tetapi kemiskinan bersifat relatif terhadap kepemilikan orang lain. Ketika sekelompok orang merasa mengalami

ketidakadilan maka akan melakukan proses pembandingan (*reference group*) dengan kelompok yang lebih dari diri mereka. Perubahan persepsi kemiskinan, peningkatan ketimpangan, meningkatnya angka pengangguran bisa menjadi pemicu kegaduhan sosial di media sosial atau elektronik dan perilaku-perilaku intoleransi. Akhirnya,

dapat mengurangi persatuan dan lambat laun mendorong terciptanya krisis di bidang politik tanah air Indonesia yang kita cintai.

Analisis di atas dihasilkan dari proses kajian hasil penelitian mengenai dampak Covid-19 terhadap kehidupan sosial dan ekonomi Indonesia, matrik sintesis dapat dilihat di bawah ini.

Tabel 2.

Matrik Sintesis Mengenai Dampak Sosial dan Ekonomi Pandemi Covid-19 di Indonesia

No	Sumber dan Tahun	Dampak Sosial dan Ekonomi Pandemi Covid 19 di Indonesia
1.	(Suryahadi et al., 2020)	Pandemi Covid-19 akan menciptakan kemiskinan baru di Indonesia sebanyak 8 juta
2.	(OXFAM, 2020)	Pandemi Covid-19 akan memperlebar ketimpangan sosial, termasuk di Indonesia
3.	(Yamali & Putri, 2020)	Sebagaimana akibat dari adanya penurunan pendapatan, krisis ekonomi akibat Covid-19 yang bersifat menyeluruh kalau tidak diantisipasi dapat meningkatkan perilaku penyimpangan sosial masif.
4.	(Hadiwardoyo, 2020), (Nasution et al., 2020), (Sitorus & Hidayat, 2020), (Yunus & Rezki, 2020)	Peningkatan kejenuhan akibat terlalu banyak berada di rumah merupakan embrio penyimpangan perilaku dan depresi, sehingga secara langsung mempengaruhi tingkat produktivitas.

Sumber: Dokumentasi peneliti

Penanganan Dampak Pandemi Covid-19 melalui Kewirausahaan Sosial

Perumusan model penanganan dampak Pandemi Covid-19 dalam artikel ini berpijak pada pentingnya saling memperhatikan antarsesama, seperti yang terlihat dalam tabel intisari hasil

penelitian mengenai pemberdayaan berbasis kewirausahaan sosial, yang merupakan konsep pemberdayaan berbasis kegiatan ekonomi. Secara ringkas hasil proses *literatur review* dapat dilihat pada tabel bawah ini.

Tabel 3.

Matrik Sintesis Mengenai Pemberdayaan Berbasis Kewirausahaan Sosial

No	Sumber dan Tahun	Pemberdayaan Komunitas Berbasis Kewirausahaan sosial
1.	(Darmawi, 2019)	Kepedulian perusahaan yang tertuang dalam pelaksanaan program CSR dalam bentuk memberikan akses pendidikan dan pekerjaan bagi masyarakat sekitarnya merupakan langkah efektif dalam menyelesaikan masalah sosial, dan ini dibutuhkan dukungan kebijakan dari pemerintah
2.	(Torrido, 2016)	Terciptanya penguatan program kepedulian sosial lebih cepat terwujud melalui kebijakan pemerintah
3.	(Torrido, 2016), (Hakim & Wibisono, 2017)	Pemanfaatan modal sosial yang dikondisikan kedalam aturan di organisasi lokal bisa diarahkan untuk mewujudkan kesalehan sosial

Sumber: Dokumentasi peneliti

Sudah 5 Tahun terakhir pemerintah menjalankan kebijakan investasi ori dan sukuk, sebagai bentuk penanaman dana yang dijamin oleh pemerintah dengan bunga tinggi

di bank-bank milik negara. Selama pandemi presentase bunga kedua bentuk investasi itu naik diiringi diturunkannya suku bunga untuk tabungan dan deposito. Bentuk kedua kebijakan

tersebut sangat menarik serta menguntungkan komunitas kelas menengah dan atas yang memiliki dana simpanan berlebih. Situasi pandemi berpengaruh pada dunia usaha secara menyeluruh yang membuat para pelaku usaha melakukan tindakan *wait and see*, beralih bidang usaha, atau menanamkan modal usahanya kedalam surat berharga. Kebijakan tersebut merupakan bentuk upaya pemerintah untuk mendapatkan dana (*fresh money*) pembangunan dengan meminjam uang ke masyarakat dan sudah dilakukan oleh pemerintah, salah satunya menggunakan pendekatan surat berharga ori dan sukuk. Bentuk kebijakan ekonomi ini menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia tidak stabil, mengurangi uang negara. Sedikit memberikan pemahaman mengenai alasan pemerintah tidak memberlakukan *lockdown* dan selalu mempertimbangkan pendekatan ekonomi dalam mencegah meluasnya pandemi corona di Indonesia.

Kerentanan ekonomi nasional diselesaikan dengan pendekatan ekonomi menjadi tepat apalagi melihat fenomena yang terjadi pada dua krisis ekonomi sebelumnya. Peningkatan pengangguran baru diiringi bertambahnya pelaku usaha kecil menengah (UKM), disebabkan tipologi UKM tidak membutuhkan modal besar dan teknologi tinggi sehingga mengakibatkan kemudahan untuk mengelutinya. Kebalikan dengan usaha besar yang membutuhkan modal dan teknologi tinggi sehingga tidak semua orang bisa mengikuti. Artinya, dipikiran kebanyakan masyarakat pengkondisian kegiatan kewirausahaan merupakan solusi mandiri. Fenomena ini sangat relevan terjadi lagi pada masa pandemi; melihat usaha bahan pangan, kuliner, *home decor*, *landscape*, agro bisnis, kesehatan, dan *fun* pada era pandemi mengalami peningkatan penghasilan dengan penggunaan internet yang semakin melebar. Seperti yang disampaikan Narsih (57 Th) pemilik usaha penjualan tanaman anggrek di Sleman yang sudah menggeluti usahanya selama empat tahun: ‘Sampai Bulan

September Tahun 2020 penjualan tanaman anggrek mengalami peningkatan 250%, sedangkan penjualan pot sebagai sampingan mengalami peningkatan sebesar 400% dari biasanya sebelum pandemi” (Wawancara dengan Narsih pemilik usaha agrobisnis di Yogyakarta, 2020). Sehingga di era pandemi terjadi penambahan pelaku-pelaku usaha pada bidang yang mengalami peningkatan keuntungan, berasal dari pengangguran baru dan para pelaku usaha yang mengalihkan kegiatan ekonomi pada sesuatu yang lebih menguntungkan dari sebelumnya.

Oleh karena itu, bisa dirumuskan tiga fakta situasi dalam pandemi, yakni (1) kemungkinan terjadinya penambahan UKM pada bidang usaha tertentu; (2) dilema kondisi ekonomi dan kesehatan yang mempengaruhi pemerintah dalam menjalankan program penanganan pandemi; dan 3) adanya peningkatan altruisme di kalangan masyarakat Indonesia, altruisme merupakan sifat memperhatikan kesejahteraan orang lain, dan ini bisa dikembangkan karena Indonesia memiliki modal sosial dan solidaritas sosial tinggi, dalam indek memberi dunia kita berada rangking pertama di antara negara-negara lain. Terbukti dengan banyaknya aktivitas penggalangan dana untuk Covid-19 ini, dari pengadaan APD sampai ke pembagian sembako walaupun kegiatannya tidak berkelanjutan. Berpijak tiga fakta tersebut maka penanganan dampak sosial ekonomi pandemi Covid-19 dengan memperhatikan tiga hal, yakni: pasar, negara, dan sifat altruisme masyarakat. Ketiga hal ini memiliki peran yang paling utama bagi kehidupan masyarakat selama masa pandemi. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah strategi berbasis kegiatan ekonomi yang bisa mengkolaborasi ketiganya, dengan pengkondisian infrastruktur digital sebagai alat pencapaian tujuan, dan penerapan normalitas baru (*new-norms*) akan berkonsekuensi pada efisiensi dalam kegiatan ekonomi.

Pendekatan kegiatan kewirausahaan dipilih karena tujuan dari model strategi

penanggulangan dampak adalah menghidupkan pasar (baca: kegiatan kewirausahaan) dan menyelesaikan masalah sosial. Dengan menghadirkan negara sebagai komunitas pemilik hak istimewa yang tidak dimiliki lainnya, yakni pembuat kebijakan serta memiliki kemampuan dalam menaik turunkan pajak, sehingga pendekatan negara digunakan agar percepatan terlaksananya tujuan kegiatan. Pendekatan konsep kewirausahaan sosial merupakan sebuah alternatif solusi penyelesaian masalah sosial bersinergi dengan pasar (lihat Gambar 4). Implementasinya meliputi kebijakan ekonomi berbasis kewirausahaan sosial; dan membuat program-program kegiatan ekonomi melalui institusi-institusi pemerintah dan BUMN daerah atau pusat berbasis kewirausahaan sosial; membuat kegiatan ekonomi yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan (*profit oriented*) dan sekaligus memberdayakan komunitas sasaran agar bisa membantu mereka dalam menyelesaikan permasalahan sosialnya. Permasalahan sosial yang dimaksud dalam artikel ini yang mengalami peningkatan selama pandemi corona secara mendasar, yakni bertambahnya angka kemiskinan masyarakat Indonesia, dikarenakan berkurangnya atau terhentinya sumber pendapatan masyarakatnya. Sehingga model strategi ini ditujukan untuk mengikat misi sosial dengan kegiatan ekonomi agar berkelanjutan (*sustainable*).



Gambar 4.

Model Strategi Penanggulangan Dampak Pandemi
Berbasis Kewirausahaan Sosial
Sumber: Hasil Analisis, 2020

Model strategi penanggulangan ini meliputi dua kebijakan berbasis kewirausahaan sosial: *Pertama*, kebijakan ekonomi berbasis kewirausahaan sosial. Seperti diketahui bersama, pemerintah beberapa kali mengeluarkan kebijakan ekonomi untuk menangani dampak pandemi, seperti : (1) dana stimulus *charity* uang sebesar 200 ribu; (2) penangguhan angsuran KUR UMKM dan *driver ojek online*; (3) pemberian insentif pajak yang terdiri dari Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21, PPh pasal 22 impor, PPh pasal 25 dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN); (4) program pra-kerja (mendapatkan insentif per 4 bulan 600 ribu dan pelatihan); dan (5) pemberian dana usaha buat UKM sebesar 2,4 juta (BPUM). Syarat perolehannya bersifat administratif, seharusnya penerima manfaat dari pelaku usaha kecil, menengah, atau besar yang memperoleh dukungan dana atau fasilitas besar dari pemerintah daerah/pusat bersama para UKM. Mereka yang bidang usahanya memperoleh penambahan profit pandemi Covid-19 dikenakan ketentuan memiliki misi menyelesaikan permasalahan kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi (CED) di lingkungannya. Besaran porsi keterlibatan dalam penyelesaian masalah sosial disesuaikan dengan level usaha.

Keterlibatan dalam penyelesaian masalah sosial tidak boleh bersifat *charity*, tapi pemberdayaan. Untuk usaha kecil dan menengah bisa menggunakan pendekatan model kewirausahaan sosial integratif dan bersinergian, pelaku usaha memperkerjakan tetangga atau saudaranya tanpa mempertimbangkan ada atau tidaknya pengalaman target atau klien. Memperkerjakan disini merupakan kegiatan pemberdayaan yang bersifat *learning by doing*. Tentunya, peran klien disesuaikan kebiasaannya untuk meminimalisir resiko kerugian usaha karena dalam pendekatan kewirausahaan sosial memiliki tujuan *profit oriented* juga. Sedangkan penerapan model kewirausahaan sosial bersinergian lebih khusus, pada situasi lingkungan usaha melemah

maka ada dua cara adaptif yang bisa diterapkan, yakni (1) memilih target sasaran yang memiliki kegiatan ekonomi sebagai *supplier* bahan baku atau penunjang yang terpuruk untuk kemudian diajak sebagai penyalur input produksi *social enterprise* (perusahaan yang menjalankan usahanya dengan pendekatan kewirausahaan sosial); dan (2) jika keberlangsungan usaha kuat bisa melakukan pengkondisian *supplier* baru pada komunitas sasarnya. Berbeda dengan pelaku usaha besar, walaupun tidak memperoleh bantuan tunai langsung, namun mendapatkan fasilitas keringanan pajak, pengaturannya merujuk peraturan *corporate social responsibility* (CSR) yang sudah ada, penerapannya bisa memilih menggunakan salah satu atau beberapa dari ketiga model kewirausahaan sosial yang ada, meskipun di era pandemi pelaku usaha besar memiliki kemampuan modal tinggi sehingga mudah melakukan inovasi usaha yang disesuaikan tuntutan-tuntutan lingkungan ekonomi.

Kedua, pembuatan program ekonomi oleh institusi pemerintah dan BUMN. Institusi-institusi pemerintah daerah dan pusat adalah lembaga pelayanan masyarakat, dalam penyusunan anggarannya selalu terdapat porsi untuk misi sosial, pembuatan program ekonomi dalam model strategi mengkondisikan institusi pemerintah atau lembaga pemberdayaan memperoleh dan memiliki target pendapatan berupa keuntungan usaha (logika ekonomi), walaupun nantinya dapat diperuntukkan untuk reinvestasi sosial. Adanya *share profit* sangat penting sebagai target dan penumbuhkembangan motivasi kewirausahaan komunitas sasaran, selain untuk penambahan dana investasi sosial. Penerapan model kewirausahaan sosial pada program ekonomi yang dijalankan institusi pemerintah yang paling tepat adalah integratif. Teknik pendekatannya dengan memberikan komunitas sasaran wewenang untuk mengelola sepenuhnya jalannya usaha setelah dilakukan kegiatan pemberdayaan, di bawah pengawasan pemerintah sebagai pemilik usaha. Terpenting

pengkondisian produk dan usaha pemberdayaan dihasilkan dengan pendekatan *bottom up*, dan berbasis lokalitas agar pelaksanaan dan capaian kegiatan lebih efisien dan efektif, dalam pelaksanaan proses jangan mengabaikan pengkondisian kerja sama antaranggota dalam komunitas. Besaran komunitas sasaran disesuaikan anggaran yang dimiliki institusi pemerintah karena antar institusi pastilah keberpemilikan kemampuan finansial berbeda.

Lembaga-lembaga BUMN lebih *flexible* dalam penerapan model kewirausahaan sosial, sebagai perusahaan negara tentunya kemampuan finansialnya lebih besar dari institusi pemerintah yang bergerak dalam pelayanan sehingga bisa bebas dalam menentukan penerapan model kewirausahaan sosialnya sama dengan usaha besar. Lembaga-Lembaga BUMN dan usaha besar selama ini sudah banyak yang memiliki komunitas dampingan meskipun besaran dana yang digelontorkan masih dibawah ketentuan aturan CSR yang ada (Torrido, 2016). Terlepas dari itu, terpenting adalah penggunaan logika ekonomi dalam menjalankan kegiatan pendampingan komunitas dampingan belum dilakukan, kebanyakan lembaga pemberdayaan lebih sekedar pembentukan kelompok kemudian memberikan dukungan dana, tenaga, dan waktu saja.

Kedepan, lembaga-lembaga BUMN, usaha besar, atau institusi-institusi pelayanan pemerintah, dalam menerapkan kegiatan pemberdayaan sebagai bentuk dukungan penyelesaian masalah sosial. Pendekatan yang digunakan dengan kegiatan kewirausahaan, logika ekonomi, dan diimbangi penumbuhkembangan tradisi membeli produk lokal atau produk UKM Indonesia, baik dalam memenuhi maupun menunjang kebutuhan kantor dan pelayanannya. Dalam konteks ekonomi, penyelesaian masalah sosial berupa penguatan kapasitas dan pendayaan ekonomi, “membeli produk hasil pemberdayaan” merupakan salah satu bentuk pendayaan ekonomi komunitas sasaran pemberdayaan. Selama ini, kebanyakan

kegiatan pemberdayaan yang dilakukan lembaga pemerintah ataupun swasta hanya bersifat pembelaan (pelatihan dan pemberian modal), tidak diimbangi kepedulian terhadap keberlangsungannya. Terbukti, dengan masih rendahnya atau tidak adanya ritus membeli produk-produk UKM oleh pemerintah dan swasta.

Membeli produk pemberdayaan, merupakan bentuk kepedulian dan penjaga keberlangsungan usaha, jika tidak diupayakan akan memunculkan *distrust* masyarakat terhadap pemerintah atau pekerja sosial. Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis dan masih berlangsung di komunitas para pelaku usaha kecil menengah sentra kerajinan batik kayu di Dusun Kreet Sendangsari Kabupaten Bantul, salah satu kesimpulannya adalah kepercayaan pelaku usaha kerajinan batik kayu terhadap program-program pemerintah dan swasta kecenderungannya menurun. Hal itu, terlihat dari motivasi mereka mengikuti kegiatan-kegiatan pemberdayaan baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta lebih mengutamakan pertimbangan perolehan materi (uang atau peralatan) secara langsung. Hasil penelitian ini bisa dijadikan rambu 'hati-hati' bagi kegiatan pemberdayaan, agar bisa lebih memperhatikan keberlangsungan *trust* masyarakat dalam pelaksanaannya. Keberadaan *norm of trust* dapat mendorong terciptanya hubungan kerja sama mutualistik antarpemberdaya dengan masyarakat (Hakim & Wibisono, 2017).

Output usulan model yang berbasis kebijakan ini: (1) mengkondisikan para pelaku UKM sebagai target pemberdayaan, namun didorong untuk menjadi *social enterprise* bagi pelaku UKM lainnya dengan pendekatan kemitraan dan atau masyarakat sekitarnya disesuaikan kapasitas usahanya; (2) Menjadikan lembaga-lembaga pelayanan milik pemerintah nonusaha sebagai *social enterprise*; (3) Pendekatan investasi sosial berbasis CED dan tradisi beli produk UKM dalam memenuhi kebutuhan usaha dan atau kantor merupakan pendekatan

yang digunakan lembaga-lembaga pelayanan pemerintah, BUMN, dan usaha besar dalam menjalankan fungsi sebagai *social enterprise*.

Pengawasan pelaksanaan model strategi penanggulangan ini di Indonesia dapat diterapkan. Selain pendamping yang dimiliki Kementerian Koperasi dan UKM serta Kementerian Perindustrian dan Perdagangan, terdapat Lembaga Pusat Pelayanan Usaha Terpadu (PLUT) di setiap daerah didalamnya terdapat *coach* UKM dari kalangan praktisi yang sudah memiliki sertifikat, belum lagi Pekerja Sosial yang dimiliki Kementerian Sosial dan PKH yang ada pada setiap kecamatan. Kesemuanya merupakan sumber daya yang bisa dikondisikan untuk menjadi pengawas, sebelumnya tentunya harus ada pemberdayaan pengawas untuk menyamakan persepsi dan penambahan pengetahuan mengenai kegiatan ekonomi.

Penutup

Kesimpulan: Penciptaan serta pengembangan pasar dan menyelesaikan permasalahan sosial dalam satu kegiatan pemberdayaan bisa didekatkan dengan pendekatan konsep kewirausahaan sosial. Keduanya saling berhubungan sehingga berkembangnya pasar yang berhasil diciptakan mengakibatkan berlanjutnya program sosialnya (reinvestasi sosial). Oleh karena itu, penciptaan pasar tidak hanya sebatas pengkondisian sistem produksi usaha yang dijalankan komunitas sasaran. Namun, melebar sampai lembaga pemberdaya memposisikan dirinya sebagai *owner* atau pemilik usaha yang memiliki target keuntungan usaha kegiatan pemberdayaan.

Apabila hal tersebut dapat dijalankan, keuntungannya adalah (1) keberlanjutan penyelesaian masalah sosial bisa mengarah pada terciptanya kemandirian komunitas sasaran sinergi dengan penumbuhan ekonomi individu, keluarga, dan wilayah (*geographical economic*); (2) mengembangkan keberpemilikan motivasi kewirausahaan komunitas sasaran;

(3) lembaga pemberdayaan (pemerintah dan swasta) memiliki penghasilan tambahan (*fundraising*), yang nantinya bisa diperuntukkan untuk pengembangan misi sosial tertentu atau pembangunan komunitas sasaran lainnya. Model strategi peanggungan dampak sosial ekonomi pandemi corona mengkondisikan lembaga pemberdayaan, baik lembaga pemerintah atau swasta sebagai *social enterprise*.

Rekomendasi: Perusahaan-perusahaan milik negara dan swasta diharapkan dalam melakukan kegiatan pengembangan komunitas menggunakan perspektif *socioentrepreneur* sehingga kegiatan pengembangan pada suatu komunitas sasaran dimaknai sebagai investasi sosial agar terdapat upaya lebih dalam menjaga keberlanjutannya karena diliputi pengharapan memperoleh *return* yang menguntungkan.

Pemerintahan Indonesiamelalui kementerian yang ada agar bisa mengembangkan model strategi penanggungan dampak sosial berbasis kewirausahaan sosial sebagai pola penanganan masalah sosial. Mendorong para UKM penerima bantuan dan lembaga dibawah kementerian agar dapat berperan sebagai *sociopreneur*.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kepada keluarga atas dukungannya, Prodi Ilmu Kesejahteraan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta atas kesempatan mengabdisebagai pengajar sehingga penulis bisa tetap berupaya mengasah pengetahuan. Terakhir, terima kasih kepada Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Yogyakarta atas kesempatan publikasi yang diberikan penulis sehingga dapat konsisten menyalurkan pemikiran penulis.

Pustaka Acuan

- Alter, S. K. (2006). Social enterprise models and their mission and money relationships. *Social Entrepreneurship: New Models of Sustainable Social Change*, 205–232.
- Darmawi, A. (2019). *The Role of Government , Human Resources and Strategic Role of Training For Life Skill Empowerment*. 366(Icisp 2018), 1–4.

- Hadiwardoyo, W.-45088-1-P. pd. (2020). Kerugian Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19 [National Economic Losses Due to the Covid-19 Pandemic]. *Baskara Journal of Business and Entrepreneurship*, 2(2), 83–92. <https://doi.org/10.24853/baskara.2.2.83-92>
- Hakim, F. N., & Wibisono, G. (2017). Modal Sosial Petani Tembakau untuk Peningkatan Kesejahteraan Sosial. *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 16(4), 369–380.
- LaBarre, P. (2003). The new normal. *Fast Company*, 70, 74.
- Nasution, D. A. D., Erlina, E., & Muda, I. (2020). Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Perekonomian Indonesia. *Jurnal Benefita*, 5(2), 212. <https://doi.org/10.22216/jbe.v5i2.5313>
- Nicholls, A., & Cho, A. H. (2006). Social entrepreneurship: The structuration of a field. *Social Entrepreneurship: New Models of Sustainable Social Change*, 34(4), 99–118.
- OXFAM. (2020). *The Commitment to Reducing Inequality Index 2020: Fighting Inequality in the time of COVID-19*. www.inequalityindex.org
- Sitorus, S. H., & Hidayat, R. (2020). Berdaya di Era Pandemi: Peran Corporate Social Responsibility dalam Penanggungan COVID-19. *Journal of Social Development Studies*, 1(2), 37–48. <https://doi.org/10.22146/jsds.473>
- Sugiri, D. (2020). Menyelamatkan usaha mikro, kecil dan menengah dari dampak pandemi Covid-19. *Fokus Bisnis: Media Pengkajian Manajemen Dan Akuntansi*, 19(1), 76–86.
- Suryahadi, A., Izzati, R. Al, & Suryadarma, D. (2020). The Impact of COVID-19 Outbreak on Poverty: An Estimation for Indonesia | The SMERU Research Institute. *Poverty & Inequality Indonesia*, April. <https://smeru.or.id/en/content/impact-covid-19-outbreak-poverty-estimation-indonesia>
- Torrido, A. (2016). Peran Lembaga Keuangan Penyedia Dana Mikro Dalam Menyediakan Kesempatan Kerja. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 9(1), 131–143.
- Yamali, F. R., & Putri, R. N. (2020). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Ekonomi Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(2), 384–388. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i2.179>
- Yunus, N. R., & Rezki, A. (2020). Kebijakan Pemberlakuan Lock Down Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 7(3). <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i3.15083>

Implementasi Pola Asuh Orang Tua pada Remaja Pelaku *Klitih* di D.I. Yogyakarta

Parent Patterns of Klitih Teenager in Yogyakarta

Ahmad Riyadi¹, Hadi Suyono², dan Elli Nur Hayati³

Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, Jl. Kapas No. 9 Yogyakarta, 085292312783, kangamartimes@gmail.com

Naskah diterima 8 Februari 2021 direvisi 22 April 2021 disetujui 29 April 2021

Abstract

This study aims to determine the parenting styles of adolescents who perpetrated “klitih”. This study uses a qualitative method with a phenomenological approach. The data collection technique used was in-depth interviews, and all interviews were recorded under the participant’s consent. A semi structure interview guide was employed. The number of subjects who participated in this study were 8 subjects who were parents of the “klitih” perpetrators. Results of this study were analyzed using content analysis approach, and it was found that the parenting style were permissive indulgence and neglect. While the factors that influence that parenting style were low educational and socio-economic level, obtained through content analysis interpretation. The results showed that there were parenting styles for adolescent, permissive parenting; and 3) democratic parenting. There are four factors that influence parenting styles for adolescent adolescents, namely: 1) parental education; 2) environment; 3) economy; and 4) personality. This requires intense communication between the parents and the school, in this case counseling guidance teachers, community leaders, religious leaders, youth in the prevention of klitih behavior; and transformation parenting patterns from permissive to democratic.

Keywords: *teenager, child of the klitih, parenting styles*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola asuh orang tua pada remaja pelaku *klitih* dan faktor pendorong/penyebab pola asuh orang tua pada remaja pelaku *klitih*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur dan observasi tidak langsung. Subjek penelitian adalah delapan orang tua para remaja pelaku *klitih*. Analisis data mengacu pada model Miles dan Huberman, dimana data dikumpulkan, direduksi, ditampilkan, dan ditarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, pola asuh orang tua terhadap remaja pelaku *klitih* adalah pola asuh permisif, yang mana orang tua membiarkan, memanjakan, dan tidak mengawasi keseharian anak di rumah maupun sekolah, sehingga tidak mengetahui perkembangan mereka. Kedua, faktor pendorong/penyebab remaja melakukan *klitih* adalah pendidikan orang tua, lingkungan, ekonomi, dan kepribadian. Ini memerlukan komunikasi intens antara orang tua para remaja pelaku *klitih* dengan pihak sekolah, dalam hal ini guru bimbingan konseling, tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda setempat dalam pencegahan perilaku *klitih*, serta transformasi pola asuh dari permisif menjadi pola asuh demokratis.

Kata Kunci : *remaja, pelaku klitih, pola asuh orang tua*

Pendahuluan

Pola asuh merupakan cara yang dilakukan orang tua dalam mendorong anak mencapai tujuan yang diinginkan. Pola asuh berasal dari kata asuh (*to rear*) yang mempunyai makna menjaga, merawat dan mendidik anak yang masih kecil (Hastari, 2015). Ini memberi gambaran tentang sikap dan perilaku orang tua dan anak dalam berinteraksi, berkomunikasi

selama mengadakan kegiatan pengasuhan dengan memberi perhatian, peraturan, disiplin, hadiah, dan hukuman, serta tanggapan terhadap keinginan anaknya (Bahri, 2014), sehingga nilai moral sebagai dasar berperilaku dan yang diupayakan kepada anak-anak (Shochib, 2015) dapat terbentuk sedini mungkin.

Penerapan pola asuh yang tepat diharapkan membentuk anak menjadi pribadi yang baik,

penyemangat dalam belajar, dan juga prestasi belajar menjadi meningkat seiring pertumbuhan dan perkembangan yang dialami (Lestari, 2009). Konsep ini dapat digunakan orang tua sebagai salah satu metode disiplin terhadap anak (Hurlock, 2012). Dengan demikian, orang tua terlibat dalam pembentukan pribadi anak.

Pembentukan pola asuh orang tua dalam keluarga sebagai lingkungan seorang anak pertama kali perlu dilakukan secara intens, sehingga anak dapat merasakan dampak positif dari pola asuh yang diterapkan orang tua. Dengan kata lain, pola asuh orang tua akan mempengaruhi perilaku anak (Berkowitz (2003), sehingga perkembangan motorik kasar dan halus, perkembangan bahasa dan kemampuan sosial anak (Budiarnawan et al., 2014) menjadi lebih baik. Karenanya, keadaan kehidupan keluarga bagi seorang anak dapat dirasakan melalui sikap dari orang yang sangat dekat dan berarti baginya, dalam hal ini orang tua.

Pola asuh orang tua berdasar Baumrind. D (1996); Tridhonanto & Agency (2014) terdiri dari tiga jenis, yaitu (1) pola asuh otoriter, (2) pola asuh permisif, dan (3) pola asuh demokratis. Ketiga jenis pola asuh tersebut memiliki peran yang berbeda-beda serta aspeknya masing-masing. Aspek pola asuh orang tua menurut Damon & Leaner (2006) terdiri dari *warmth* (kehangatan), *control* (pengaturan), dan *communication* (komunikasi). Ketiga aspek pola asuh tersebut berkorelasi dalam tumbuh kembang anak, dalam hal ini perkembangan para remaja pelaku *klitih*, yang meliputi keadaan fisik, emosional sosial, dan intelektual. Karenanya dalam perkembangan masa remaja, para remaja pelaku *klitih* menjadi poin penting yang harus diperhatikan orang tua.

Masa remaja dimulai sekitar usia 12 tahun dan berakhir pada usia 18 hingga 21 tahun. Remaja merupakan perkembangan yang merupakan masa transisi atau peralihan dari anak-anak menuju dewasa (King, 2012). Pada masa transisi, remaja banyak mengalami

perubahan fisik, kognitif, kepribadian, dan sosial (Gunarsa, 2006). Perubahan yang paling khas pada remaja adalah pubertas. Pubertas merupakan sebuah proses kematangan fisik yang berlangsung cepat, melibatkan perubahan hormonal dan tubuh (Santrock, 2012). Setiap anak yang memasuki usia remaja akan cenderung *conform* dan mengikuti sikap atau perilaku kelompoknya. Remaja bersama kelompoknya, remaja akan merasa menemukan "identitas" dan berharap tidak mengalami penolakan dengan konformitasnya tersebut. Konformitas adalah perubahan perilaku atau kepercayaan seseorang sebagai akibat dari tekanan kelompok (Myers, 2012).

Pada masa remaja, kedekatan dengan *peer-groupnya* sangat tinggi karena selain ikatan *peer-group* menggantikan ikatan keluarga, teman juga merupakan sumber afeksi, simpati, dan pengertian, saling berbagi pengalaman dan sebagai tempat remaja untuk mencapai otonomi dan independensi. Oleh sebab itu, tidak heran apabila remaja mempunyai kecenderungan untuk mengadopsi informasi yang diterima oleh teman-temannya, tanpa memiliki dasar informasi yang signifikan dari sumber yang dapat dipercaya (Sutisna, 2016). Hal ini diduga sebagai salah satu bentuk tindak kekerasan yang kerap kali dilakukan remaja masa kini.

Kasus kenakalan remaja di Indonesia berdasar data Badan Pusat Statistik (2017) meningkat setiap tahun. Hal ini merupakan perilaku kriminal atau anti sosial yang menurut Regoli et al., (2008) dilakukan oleh individu dengan usia kurang dari 18 tahun, yang bila ditinjau dari perilaku dikelompokkan dalam dua tipe, yaitu tipe status *offenses* dan tipe *delinquent offenses*. Status *offenses*, yaitu perilaku yang dianggap tidak tepat bagi anak-anak dan remaja, seperti merokok, minum alkohol, pergi dari rumah, atau tidak masuk sekolah. *Delinquent offenses* yaitu perilaku yang melanggar sistem hukum, seperti mencuri, menganiaya, menggunakan senjata tajam, atau perilaku vandal.

Yogyakarta sebagai kota pelajar ternyata tidak terlepas dari kasus kenakalan remaja oleh pelajar yang sudah mengarah perilaku agresif dan menyebabkan korban jiwa. Diantarnya kasus seorang siswa SMKN 1 Seyegan yang tewas pada Oktober 2014 karena dikeroyok belasan pelajar (Kresna, 2014). Kemudian seorang pelajar SMA Bantul disekap dan dianiaya karena tato Hello Kitty pada Februari 2015 (Kusuma, 2015), dan pelbagai kasus lain yang sudah menjadi fenomena hingga sekarang. Fenomena kenakalan remaja yang mendapat perhatian masyarakat di D.I. Yogyakarta adalah *Klitih*.

Klitih merupakan salah satu bentuk anarkisme remaja yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan menggunakan benda-benda tajam seperti pedang, samurai, parang, gir, pisau, dan lain sebagainya (Nasaruddin, 2016). Istilah ini banyak digunakan masyarakat di D.I. Yogyakarta untuk menggambarkan sekelompok remaja yang kelayapan atau bepergian tanpa tujuan yang jelas dengan membawa kendaraan dan senjata tajam untuk melukai orang lain (Ichan, 2016; Koeswara, 1998). Motif perilaku *klitih* bermacam-macam. Ada yang bertujuan untuk menunjukkan eksistensi di lingkungan geng namun ada pula yang balas dendam karena permusuhan antar geng/kelompok sekolah. Aksi tersebut diduga berdampak negatif terhadap citra remaja di mata masyarakat karena menyebabkan korbannya terluka bahkan meninggal dunia.

Aksi tindakan kekerasan dalam 5 tahun terakhir di D.I. Yogyakarta mengalami peningkatan. Aksi remaja menggunakan senjata tajam dan lain sebagainya terjadi pada malam hari yang dilakukan oleh sebagian besar pelaku yang berstatus sebagai pelajar dan putus sekolah.

Data Polda D.I. Yogyakarta tahun 2018 menyebutkan, geng pelaku *klitih* paling banyak ada di Kota Yogyakarta yaitu 35 geng. Selanjutnya, di Kabupaten Bantul sebanyak 16 geng, di Kabupaten Sleman sebanyak 15

geng, di Kabupaten Kulon Progo sebanyak 4 geng, dan di Kabupaten Gunungkidul sebanyak 1 geng. Di Kabupaten Sleman, aksi *klitih* telah terjadi sebanyak 17 kasus selama bulan Januari-Agustus 2017. Pelaku *klitih* merupakan remaja berusia 14-19 tahun dan sebagian besar berstatus pelajar.

Peristiwa aksi *klitih* yang melibatkan remaja tentu tidak lepas dari pola pengasuhan orang tua dan juga kemajuan teknologi yang semakin pesat. Perkembangan teknologi komunikasi membuat hubungan personal antara orang tua dengan anaknya mengalami penurunan, terlebih bagi orang tua yang sibuk bekerja dan tinggal di luar kota jauh dari putra-putrinya. Lestari (2009) mengatakan pembentukan kematangan emosi tidak lepas dari peran pola asuh orang tua, karena orang tua adalah yang pertama memiliki peran dalam mengatur dan mendidik seorang remaja untuk memperoleh kematangan yang baik. Akan tetapi orang tua *modern* lebih sering berkomunikasi dengan putra-putrinya dengan menggunakan teknologi komunikasi seperti telepon, *whatsaap*, media sosial, media internet, *video call*, dan teknologi telekomunikasi lainnya.

Hasil wawancara peneliti dengan seorang ayah pelaku *klitih*, inisial WJ, 56 tahun, Warga Kabupaten Sleman. memang ada kesalahan pola asuh orang tua sehingga membuat putranya berperilaku agresif dan melakukan tindak kekerasan dengan menggunakan senjata tajam atau *klitih*. Dalam kehidupan sehari-hari, WJ mengaku jarang mengontrol pergaulan putranya terutama siapa saja teman-teman putranya di luar tempat tinggalnya dengan alasan sibuk bekerja sebagai buruh serabutan. Bahkan, WJ sering membiarkan putranya ketika melakukan kegiatan minum-minuman keras bersama teman-temannya di luar rumah dengan alasan wajar karena usia remaja dan tidak ingin menyakiti perasaan putranya dan teman-temannya. Selain itu, WJ mengaku jarang memberikan nasehat kepada putranya ketika sering membolos sekolah atau tidak berangkat ke sekolah hingga

akhirnya dikeluarkan dari sekolah. Pergaulan putranya semakin tidak dapat dikontrol pasca putranya minta dibelikan sepeda motor namun dengan alasan tidak memiliki uang WJ tidak dapat membelikan sepeda motor sehingga membuat putranya tidak mau pulang ke rumah sampai seminggu lebih. Berdasar hasil wawancara, dapat di asumsikan bahwa ada kaitan antara pola asuh yang diterapkan dengan perilaku *klitih* di Yogyakarta.

Berdasarkan deskripsi di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola asuh orang tua pada remaja perilaku *klitih* dan faktor apa saja pendorong/penyebab pola asuh orang tua pada remaja perilaku *klitih*. Manfaat penelitian ini adalah meningkatkan wawasan ilmu psikologi khususnya psikologi perkembangan. Selain itu, memperluas wawasan terkait psikologi perkembangan remaja, serta memberi gambaran kepada orang tua tentang pola asuh yang tepat bagi anak sebagai upaya preventif dan paduan bagi peneliti selanjutnya dalam mengembangkan penelitian terkait kenakalan remaja, khususnya perilaku *klitih* di D.I. Yogyakarta.

Penggunaan Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis fenomenologi. Pendekatan ini digunakan untuk mengeksplorasi fenomena spesifik (Creswell, 2016; Willig, 2008) terhadap pola asuh orang tua pada remaja pelaku *klitih* dan faktor pendorong/penyebabnya di D.I. Yogyakarta. Informasi tentang fenomena tersebut digali dari pelbagai informasi, yakni orang tua pada tiga Kabupaten yang tersebar di D.I. Yogyakarta.

Sumber data (subyek penelitian) dalam penelitian ini adalah lima (8) orang tua remaja pelaku *klitih*. Subyek penelitian terdiri 3 pasangan (ayah dan ibu) dari 3 remaja pelaku *klitih* dan 2 ibu (*single parent*) dari 2 remaja pelaku *klitih* yang tinggal di Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul, D.I. Yogyakarta. Informan dipilih secara *purposive*,

yaitu remaja paling banyak melakukan *klitih* berdasar informasi dari Kantor Kepolisian dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) D.I. Yogyakarta yang menangani pelaku tindak *klitih*.

Pengumpulan data menggunakan panduan wawancara mendalam semi terstruktur dan observasi tidak langsung. Wawancara mendalam semi terstruktur digunakan untuk menggali lebih mendalam pola asuh orang tua pada remaja *klitih* dan faktor pendorong/penyebabnya. Wawancara mendalam semi terstruktur dilakukan terhadap informan terpilih dan observasi tidak langsung dengan menggunakan *checklist*. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif yang mengacu pada model (Miles & Huberman, 1994), yakni mengumpulkan data, mereduksi, menyajikan data, dan menarik kesimpulan dengan menginterpretasikan pola asuh orang tua dan faktor pendorong/penyebabnya.

Hasil dan Pembahasan

Karakteristik Remaja Pelaku *Klitih*

Remaja pelaku *klitih* di D.I. Yogyakarta berdasar data Polisi Daerah D.I. Yogyakarta tahun 2018 berjumlah 71 orang. Paling banyak terdapat di Kota Yogyakarta. Diikuti Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Gunungkidul. Distribusi jumlah geng pelaku *klitih* di D.I. Yogyakarta tersaji dalam tabel 1.

Tabel 1.
Data Geng Pelaku *Klitih* di DIY

Kota/Kabupaten	Jumlah
Kota Yogyakarta	35
Kabupaten Sleman	15
Kabupaten Bantul	16
Kabupaten Kulon Progo	4
Kabupaten Gunungkidul	1
Total	71

Sumber: Polda DIY

Pelaku *klitih* merupakan remaja yang berada pada usia antara 10 sampai 21. Pada masa ini,

remaja mengalami masa transisi, dalam hal perubahan fisik, kognitif, kepribadian, dan sosial. perubahan tersebut bertaut dengan masa pubertas remaja pelaku *klitih*, yang berlangsung sangat cepat akibat perubahan hormon tubuh.

Remaja pelaku tindak kekerasan berdasar data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan bahwa dalam empat tahun terakhir, pelajar yang terlibat dalam perkelahian tercatat sebanyak 126 kasus (tahun 2013), tahun 2014 sebanyak 46 kasus, tahun 2015 sebanyak 126 kasus, dan tahun 2016 sebanyak 41 kasus. Sementara, pelajar yang terlibat dalam tindakan kekerasan di sekolah berupa *bullying* pada tahun 2013 tercatat sebanyak 63 kasus, tahun 2014 sebanyak 67 kasus, tahun 2015 sebanyak 93 kasus, dan tahun 2016 sebanyak 93 kasus.

Permasalahan remaja ke arah kenakalan, merupakan bentuk kegagalan remaja untuk mengembangkan kontrol diri dalam berperilaku (Muhawaroh, 2015). Ini sesuai dengan teori Santrock (2012), dimana kenakalan

remaja digambarkan sebagai kegagalan mengembangkan kontrol diri, dalam hal tindak kekerasan. Tindak kekerasan yang dilakukan remaja menurut

Merujuk pada kasus-kasus tersebut, remaja di D.I. Yogyakarta melakukan tindak kekerasan, dalam hal ini *klitih*, dimana remaja adalah aktor utama. Akibatnya, remaja menjadi pribadi sulit mengontrol keberadaan diri dalam menghadapi masa transisi, dimana pembentukan kematangan emosi menurut Lestari (2009) tidak lepas dari peran pola asuh orang tua. Ini tentu tidak terlepas dari pola asuh orang tua yang belum maksimal dalam mengatur dan mendidik remaja pelaku *klitih* untuk memperoleh kematangan yang baik.

Pola Asuh Orang Tua Remaja Pelaku *Klitih*

Orang tua sebagai aktor utama dalam menggali informasi terkait tujuan penelitian ini tersaji pada tabel 2.

Tabel 2.
Distribusi Informan

Kode Subjek/ Orang Tua	Usia	Pendidikan	Pekerjaan	Jumlah Anak	Sumber Pelaku <i>Klitih</i> Diketahui Dari
S (Suami P)	49	SMA	Sopir	3	LBH Sembada
P (Isteri S)	34	S1	Guru	3	LBH Sembada
R (Janda)	39	SMA	Admin Klinik	4	LBH Sembada
T (Janda)	39	SD	Juru Masak Warung Makan	1	Polresta Yogyakarta
N (Suami K)	53	SMA	Satpam	3	Polresta Yogyakarta
K (Isteri N)	49	SMP	Buruh Laundry	3	Polresta Yogyakarta
M (Suami E)	49	SMP	Tukang bangunan	2	LBH Sembada
E (Isteri K)	45	SMP	Buruh rumah tangga	2	LBH Sembada

Sumber: Data olahan 2021

Berdasar hasil wawancara dengan informan, ditemukan bahwa pola asuh yang dilakukan orang tua terhadap remaja pelaku *klitih* termaktub tipe pola asuh permisif. Ini ditandai dengan kasih sayang dan keterlibatan emosi antara orang tua dan anak. Informan dengan inisial S dan P menyatakan bahwa "...ya kalau di rumah cuma tiduran, kadang ada inisiatif nyuci piring setelah dipaksa ikut mencuci

piring. Dia kalau mau makan apa yang dipingin kadang masak sendiri, masih manja, kadang tidur sama mamakne. Karena anak bontot, jadi manja. Kadang mak e bikinin ini, mak e dulang gitu haha...."

Lebih lanjut dijelaskan bahwa "kalau dia mau keluar pas mau maghrib gitu, ya saya bilang: dek kowe keno metu tapi bar maghrib, sholat dhisik, tapi dia gak menghiraukan". Ini

menjadikan anak menjadi manja karena orang tua mengikuti kemauan anaknya. Terbukti dari pernyataan informan P bahwa “klambine kabeh sek kotor ya aku sek nyuci. yang nyetrika dan naruh di lemarine. Sama sekali nggak mau nyuci baju, kaos, celananya sendiri termasuk naruh dilemarinya yo nggak mau. Dia nggak malu, jare wong bok’ne dewe sek nyuci kok malu”, “Lha yang kecil ini dia nggak mau nyuci piring blas, kalau mau makan kok nggak ada piring ya sudah nggak jadi makan. Saya mau marah, percuma marah, buat apa marah”. Temuan tersebut ini sejalan dengan observasi peneliti, yang mana anak enggan bersalaman dengan peneliti ketika sang ibu memintanya untuk bersalaman saat peneliti sedang melakukan wawancara (P, observasi. Sleman, 12 Januari 2020 pukul 10.15 WIB).

Sementara pola asuh yang serupa juga dijelaskan informan R, yang berstatus sebagai janda. Diakui bahwa “....Iya wong saya juga jarang ketemu. Dulu ketika saya pulang kerja, dia belum pulang sekolah. Ketika saya pulangnyane malem, dia kadang wis main. Jarang kalau nonton TV, Pokoknya kalau di rumah di itu nge-game. Temen-temennya juga bilang kalau anak kan sekarang nge-game terus Bu”. Hal serupa juga dinyatakan informan T bahwa “Saya sibuk di warung, masak, jaga warung, dan lain sebagainya.” (T, seorang ibu, single parent). “Saat SD dulu sampai kelas 5, seragam dan buku ya saya yang menyiapkan. Tapi setelah saya anggap besar ya saya lepas sendiri, buku pelajarannya, seragamnya, sepatunya dan lain sebagainya” (R, seorang ibu, single parent).

Kedua orang tua di atas sangat memanjakan anak mereka dalam kehidupan sehari-hari. Terlihat dari sering mencuci pakaian sang anak. Ini merupakan tindakan keliru yang seharusnya tidak dilakukan orang tua terhadap anak yang sudah memasuki usia remaja. Orang tua seharusnya tegas dalam memberi arahan terhadap anaknya. Ini bertaut dengan pola asuh orang tua sebagai elemen penting menurut Prasetya (2011) pola asuh menjadi fondasi

dasar dalam membentuk karakter anak yang memasuki usia remaja.

Informan N dan K mengaku hal yang berbeda. Dalam keseharian, tidak ada waktu khusus untuk saling berbicara dan bertukar pikiran. Karena kedua aktor memiliki kesibukan masing-masing. Baik orang tua maupun anak sama-sama sibuk dengan dunianya. “Kalau keseharian dengan anak sih biasa-biasa saja mas. Terus terang memang saya jarang bareng, ketemu dengan anak-anak apalagi yang sudah remaja itu. Mereka sering main ke luar rumah bareng teman-temannya. Kalau untuk makan anak-anak yang ngurus ya ibunya. Saya hanya ngasih uang belanja, yang masak dan belanja ya ibunya. Urusan menu makan ya ibunya, saya terima apa adanya saja. Ya kadang anak-anak ada permintaan, kalau pas lagi pegang uang ya dibelikan sesuai maunya anak-anak. Termasuk untuk piring dan alat dapur yang kotor, yang nyuci ya ibunya. Anak jaman sekarang mana ada mas yang mau nyuci piring setelah makan” (N, sebagai sumai, ayah). Kondisi ini menggambarkan bahwa hubungan orang tua dan anak tidak saling bertemu.

Sementara informan K sebagai Istri informan N menyatakan bahwa “Karena saya sering pulang sore maka kami sekeluarga jarang ngobrol. Paling saya sering ngobrolnya sama anak perempuan karena kebetulan tidurnya sama saya. Yang pertama tidur di kamar sendiri, kadang sama adiknya. Tapi, yang SMP ini sering tidur di ruang tamu karena memang dia belum punya kamar sendiri. Malah dia sering tidur di rumah temanya”. Ini merupakan gambaran keseharian orang tua dan anak ketika berada di rumah, dimana anaknya yang terlibat *klitih* jarang tidur di rumah karena keterbatasan ruang tidur. Terkait pemenuhan kebutuhan sehari-hari dijelaskan bahwa “Kalau mengenai makan sih semua saya serahkan kepada anak. Kalau anak mau makan ya makan kalau nggak makan ya saya diam saja. Nanti kalau lapar lak makan sendiri. “Kami memang jarang makan bersama, kalau pun makan bersama itu

ketika kami ada hajatan dan itu jarang sekali. Anak yang pertama dan yang kedua sering di luar rumah, mereka sering main keluar sama teman-temannya. Nggak tahu main kemana saja. Ketika saya pulang ke rumah kok mereka tidak ada, baru saya telepon. kalau siang saya jarang telepon mereka, gimana mau telepon pekerjaan di laundry numpuk nggak sempat mikirin mereka”. Berdasar hasil observasi ditemui pada hari Minggu atau hari lain yang libur kerja di proyek. Saat peneliti datang tidak sesuai hari janji, subjek M tidak ada di rumah. Rumah tertutup rapat tidak ada aktifitas orang. (M, observasi, Bantul. 15 Januari 2020 pukul 14.20)

Sedangkan informan E sebagai seorang isteri/ibu menyatakan bahwa “Karena setiap hari saya juga harus bekerja jadi otomatis waktu bareng anak-anak berkurang, biasane iso kumpul keluarga ya malem. Pakaian semuanya yang nyuci ya saya, pakaian bapaknya, punya saya, ya punya anak-anak semua yang nyuci ya saya termasuk dalem-daleman kui mas”. Informan juga mengaku tidak menasihati anak karena susah diatur dan diarahkan.

Peran orang tua memberi asuhan kepada anak-anaknya yang memasuki usia remaja sangat penting agar tidak terjerumus ke hal yang tidak diinginkan. Orang tua harus menjadi role model bagi anak-anaknya. Karena jika orang terlalu otoriter maka anak juga akan meniru (Anisah, 2011). Pola pengasuhan yang diterapkan orang tua cenderung sama, baik bersifat memanjakan maupun yang membiarkan/mengabaikan.

Secara umum, orang tua banyak membiarkan dan memanjakan anak serta tidak mengawasi aktifitas keseharian anaknya, baik itu ketika berada di lingkungan rumah dan di lingkungan sekolah, serta tidak mengenal dengan siapa saja dan di mana anak-anaknya bergaul ketika berada di luar rumah dan di luar sekolah sehingga para orang tua tidak mengetahui bagaimana perilaku anak-anaknya. Akibatnya anak-anak

mengalami kesulitan dalam mengendalikan diri sendiri atau mudah emosi, tidak terampil dalam pergaulan dengan teman dan sekitarnya, tidak dapat mengatur diri sendiri, cenderung bermasalah dengan teman atau orang lain, egois, serta pendendam.

Selain itu, anak mencari aktualisasi diri di luar dari lingkungan keluarga, orang tua cenderung membiarkan serta membebaskan segala hal aktivitas yang dilakukan lebih leluasa mendapatkan stimulus pergaulan dari luar yang tidak terkontrol oleh orang tuanya, sehingga berdampak pada pendidikan anak. Orang tua kewalahan dengan tingkah laku anak-anaknya yang memasuki usia remaja. Tidak heran apabila anak-anak sering bertindak berlebihan dan merugikan orang lain bahkan anak dikeluarkan dari sekolah akibat tindakannya. Dengan demikian, pola asuh orang tua yang diterapkan bagi remaja pelaku *klitih* di Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul merupakan pola asuh tipe permisif.

Rosalina & Handayani (2018) menjelaskan bahwa, dalam pola asuh permisif orang tua memberi kebebasan sepenuhnya kepada anak untuk mengambil keputusan sendiri dalam melakukan pelbagai hal. Akibatnya komunikasi antar orang tua dan anak hampir tidak ada. Tipe orang tua dengan pola asuh seperti ini menurut Djamarah (2014) cenderung membebaskan anak untuk memilih dan melakukan pelbagai tindakan atas kemauannya dan tidak dikontrol orang tua. Kasih sayang dan keterlibatan emosi antara orang tua dan anak tidak tampak dalam kehidupan keseharian antara orang tua dan remaja pelaku *klitih*. Ini menunjukkan bahwa pola asuh orang tua berdampak negatif terhadap kenakalan remaja berupa tindakan perilaku *klitih*. Karena itu, peran penting orang tua menurut Adawiyah (2017), harus dilakukan agar remaja, tidak terjerumus ke hal-hal yang tidak diinginkan, dalam hal ini tindakan *klitih*, yang dapat merugikan dirinya dan orang lain.

Faktor Pendorong/Penyebab Remaja menjadi Pelaku *Klitih*

Berdasar hasil penelitian, terdapat tiga faktor pendorong/penyebab pola pengasuhan orang tua terhadap anaknya yang menjadi pelaku *klitih*, yaitu:

1. Lemah dalam mendidik tanggungjawab

Pengalaman orang tua dalam mendidik anak mempengaruhi persiapan mereka menjalankan pengasuhan. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menjadi lebih siap dalam menjalankan peran pengasuhan antara lain: terlibat aktif mengajarkan pendidikan tanggungjawab, mengamati segala sesuatu dengan berorientasi pada masalah, berupaya menyediakan waktu dan menilai perkembangan fungsi keluarga dan kepercayaan. Berdasar wawancara, orang tua menyatakan bahwa: "...kalau pas sekolah kamu jangan ke sini, kalau udah pulang sekolah gak apa-apa kamu main di sini (S, seorang suami/ayah). Ojo kok nyapu, kamar turu wae gak gelem kok, opo maneh nyapu, ngepel. Karena sering nggk mau ketika disuruh ya akhire males akon aneh...." (P, seorang isteri/ibu).

Sementara orang tua yang lain juga menjelaskan bahwa "Dulu pas kelas tiga dijanjikan sama bapaknya, katanya kalau naik kelas bisa peringkat lima besar mau dibelikan PS (play station), akhirnya dia belajar terus dan akhirnya bisa masuk lima besar. Tapi janjinya gak ditepati sama bapaknya. Anaknya jadi males-malesan, sekolahnya jadi.... awalnya di situ. Pasca itu kan pergaulannya sama temen-temennya itu. Anak kalau dikerasin semakin keras. Jadi mending kita semua yang leren yang ngalah. Karena anaknya gitu, kalau dia tersinggung...marah. Misal dia gak melakukan terus kita menuduh gitu dia marah" (R, seorang ibu *single parent*). Lebih lanjut dijelaskan informan T bahwa: "Karena sekarang apa-apa bisa sendiri, ya sejak SD kelas 5 semua saya minta ambil dan menyiapkan sendiri. Mulai seragam, buku pelajaran, dan lain sebagainya. Kalau pagi-pagi jam 06.00 kok belum bangun ya saya lihat ke kamar, saya bangunkan agar segera

mandi dan ke sekolah..." (T, seorang ibu *single parent*). Informan N dan K juga menjelaskan hal yang sama, bahwa: "Saya dan isteri tidak pernah menuntut apa-apa dari anak-anak. Yang penting rajin sekolah, jangan pernah bolos. Kalau ada PR ya dikerjakan. Anak sekarang kalau terlalu dikekang sekolahnya malah bisa nakal mas. Saya biarkan saja, nanti dia akan berpikir sendiri, toh itu semua nanti untuk masa depannya sendiri" (N, seorang suami/ayah). Sementara informan E menyatakan bahwa "...nek pas anakku tak kon sinau, anakku ngeyel pol. Disuruh belajar malah ngamuk, malah dolanan game, nek di marahi terus lungo nomahe kancane, ora muleh-muleh, pernah, 3 dino ora muleh, ora sekolah, terus tak goleki. Tak pikir yo tetap sekolah, mangkat seko omahe kancane, eh ternyata ora" (M, seorang suami/ayah).

Merujuk pada temuan di atas, dapat dijelaskan bahwa pendidikan tanggungjawab dan pengalaman orang tua dalam perawatan anak-anak mempengaruhi persiapan mereka menjalankan pengasuhan. Ini terlihat dari informan yang tidak mengajarkan pendidikan tanggung jawab kehidupan sehari-hari, dimana orang tua memanjakan anak dengan mencuci pakaiannya, membersihkan kamar tidur, dan membersihkan rumah. Godfrey (2010) menjelaskan bahwa pendidikan merupakan salah satu pengaruh lingkungan atas individu untuk menghasilkan perubahan-perubahan yang tetap atau permanen di dalam kebiasaan tingkah laku, pikiran dan sikap. Orang tua yang sudah mempunyai pengalaman sebelumnya dalam mengasuh anak akan lebih siap menjalankan peran asuh, selain itu orang tua akan lebih mampu mengamati tanda-tanda pertumbuhan dan perkembangan yang normal (Supartini, 2004).

2. Lingkungan dan teman sebaya

Lingkungan mempengaruhi perkembangan remaja, baik secara fisiologi maupun psikologis. Lingkungan yang baik akan menjadikan anak yang baik, sementara itu lingkungan yang

buruk akan menjadikan anak bertingkah laku yang buruk. Berdasar wawancara ditemukan bahwa “....Tapi aku yo gak iso nesu mas, nek nesu anakku iso lungo adoh maneh. Dadi yo tak nengke wae.....” (S, seorang suami/ayah). “....iya minum-minum keras di rumah, saya marahi betul itu. Tapi masih saya beri kelonggaran, karena lingkungan saya dan kakak-kakaknya dulu juga gitu di rumah itu....” “Saya pagi sampai siang ngajar di SMP, bapaknya jadi sopir di Terus terang saya tidak tahu kenapa anak saya bisa seperti itu..” (P, seorang isteri/ibu)

Hal serupa juga dijelaskan informan R bahwa: “.... Gak ada temen anak kampung sini malahan, temennya ya anak-anak geng itu. Ya dia tu pulang pergi pulang pergi gitu lo. Dan temannya itu gak sebaya dia, pasti lebih besar daripada dia...” (R, seorang ibu *single parent*). Sementara itu, informan T menyatakan, “Yang namanya anak ya tak biarkan saja. Mau dimarahi percuma, kadang malah balek marah. Tapi, kadang-kadang dia juga bantu-bantu di warung, nyuci piring dan lain sebagainya...Kalau dia mau ada acara terus kebetulan pakaiannya kotor, ya dia minta saya untuk nyuci. Sebagai ibu berulang kali ngajari nyuci dewe, tapi ya itu nggak mau...tapi ya itu nggak mau, malah kalau disuruh marah dan keluar rumah tidak pulang berhari-hari nginap di rumah temannya” (T, seorang ibu *single parent*).

Informan N, menyatakan “Anak sekarang kalau terlalu dikekang sekolahnya malah bisa nakal mas. Saya biarkan saja, nanti dia akan berpikir sendiri, toh itu semua nanti untuk masa depannya sendiri” (N, seorang suami/ayah). Sedangkan informan M dan E menjelaskan bahwa “... terus terang saya jarang ketemu dengan anak, apalagi ngobrol. Saya berangkat dari rumah jam 06.30an dan sampai rumah jam 17.00. Kalau hari Minggu kerja bangunan memang libur, cuma saya cari uang tambahan dengan ngojek online. Kadang, selesai kerja di bangunan saya tidak langsung pulang, saya langsung ngojek, ya lumayan dapat uangnya

bisa nambah-nambah. Makanya jarang ketemu anak-anak, kalau ktemu ngobrol ya sebelum sekolah atau pas saya pulang kerja anak-anak sudah di rumah belum pada tidur” (M, seorang suami/ayah).

Kondisi di atas menunjukkan bahwa lingkungan dan teman sebaya turut mempengaruhi perkembangan remaja, baik secara fisiologi maupun psikologis. Edward (2006) menjelaskan bahwa lingkungan turut mempengaruhi perkembangan remaja, maka tidak mustahil jika lingkungan yang baik akan menjadikan anak yang baik, sedangkan lingkungan yang buruk menjadikan anak bertingkah laku yang buruk, seperti yang dijelaskan informan bahwa anak mereka tumbuh di lingkungan yang kurang baik dan teman sebaya yang membawa mereka melakukan tindakan yang melanggar norma yang ada.

3. Kondisi ekonomi keluarga

Secara tidak langsung, kondisi ekonomi berpengaruh terhadap pengasuhan orang tua kepada anaknya. Hal ini terkait dengan dukungan yang bersifat material untuk kelangsungan hidup keluarga, baik untuk pendidikan dan kebutuhan sehari-hari. Kondisi ekonomi subjek dalam penelitian ini, semuanya mengharuskan mereka untuk bekerja penuh waktu, baik dalam mengelola warung ataupun di luar rumah, yang menyebabkan sangat kurangnya waktu mereka untuk berinteraksi secara intens dengan anak-anaknya.

Hasil wawancara dengan informan pasangan suami isteri S dan P, diperoleh pernyataan bahwa: “...saya kerja jadi sopir diSetiap hari saya sibuk stan by nyopir. Jadi waktu bersama keluarga kurang.....” (S, seorang suami/ayah). “....Dadi lek ditukokke ora dadi kekarepan, lek diwehi duwit dewe-dewe ngko mesti beda karo sing tak karepke. Tak kongkon tuku klambi sering duwite orang ditukokne klambi, malam entek gawe tuku werno-weno, tuku bensin, ban e bocor wis macem-macem alasane. Tapi ketika saya yang belikan emoh

gah wis dadi mereka ke mengambil kesempatan lek diwehi terus dienggo liyane, sering banget kayak gitu. Nek wis ngono, yo tak nengke wae, piye maneh. Arep nesu, paling besok begitu lagi....” (S, soerang suami/ayah).

Sementara informan P sebagai isteri/ibu menyatakan bahwa “...Setiap hari, dia selalu dapat uang jajan mas. Ya minimal Rp 10 ribu, belum termasuk uang bensinya....” (P, seorang isteri/ibu). “...Namanya juga anak ya, biar dia gelem sekolah ya sama bapaknya dibelikan sepeda motor. Sepeda motor yo kudu sesuai selerane, jaluke anyar Vario puteh....” (P, seorang isteri/ibu). Sedangkan informan R menjelaskan bahwa “...Iya wong saya juga jarang ketemu...ketika saya pulang kerja, dia belum pulang sekolah. Ketika saya pulangny malem, dia kadang wis main..” (R, seorang ibu *single parent*). Sementara informan T menyatakan bahwa “.....Kalau untuk jajan anak ya setiap hari ada mas, rata-rata ya kasih setiap hari minimal Rp. 5.000. Ya sebenarnya uang segitu tidak cukup, wong anak jaman sekarang, senengnya nongkrong. Tapi mau bagaimana lagi, mau kasih banyak uang dari mana. Tapi, saya sodara saya ngasih uang agak banyak ya anak saya kasih uang jajan lebih buat beli makan atau nongkrong di luar sama temen-temennya.” (T, seorang ibu *single parent*).

Informan N dan K memberi informasi bahwa “Kebetulan saya bekerja sebagai pegawai swasta. Jadi satpam hotel di Jogja. Masuk kerjanya tidak tentu karena model shif. Kadang masuk pagi, kadang masuk sore, kadang masuk tengah malam karena di kantor dibagi menjadi shif. Kalau masuk pagi, setelah jaga saya ngojek mas, untuk tambah-tambah. Kalau masuk malam, siangya setelah tidur saya juga ngojek. Kalau nggak kerja sampingan ya nanti kebutuhan keluarga tidak cukup apalagi anak saya tiga, dan sudah ada dua yang masuk remaja.” (N, seorang suami/ayah). Informan menyatakan bahwa “...setiap hari bekerja. Kerja di rumah orang, rumah tangga, ya mulai masak, nyuci, bersih-bersih rumah juaraganku...

Karena setiap hari saya juga harus bekerja dadi otomatis waktu bareng anak-anak berkurang, biasane iso kumpul keluarga ya malem...” (E, seorang isteri/ibu).

Faktor ekonomi memberi dampak terhadap pola asuh orang tua. Hal ini terkait dengan dukungan yang bersifat material untuk kelangsungan hidup keluarga, baik untuk pendidikan dan kebutuhan sehari-hari. Temuan yang menarik bahwa sebagian besar subjek memiliki tingkat ekonomi menengah ke atas. Segala kebutuhan dan keinginan anak-anaknya cenderung di penuhi, namun kontrol terhadap apa yang dipenuhi kepada anak sangat rendah.

Pelbagai faktor pendorong/penyebab remaja menjadi pelaku *Klitih* berkorelasi dengan cara orang tua mendidik anak. Prasetya (2011) menjelaskan pola asuh merupakan tata cara orang tua dalam mendidik anaknya dan membesarkan anaknya yang dipengaruhi oleh banyak faktor. Peran orang tua dalam mengasuh dan mendidik anak mempengaruhi perilaku anak, namun demikian tidak semua orang tua memiliki pola asuh yang sama dalam mendidik anak, tidak semua orang tua memiliki kesamaan dalam mengambil sikap dan keputusan, hal tersebut dikarenakan setiap individu memiliki karakteristik yang berbeda-beda terutama dalam mengasuh anaknya yang memasuki usia remaja.

Penutup

Kesimpulan: Kajian penelitian ini menemukan bahwa pertama, secara umum informan menerapkan pola pengasuhan permisif. Para orang tua para remaja pelaku *klitih* membiarkan dan memanjakan anaknya dan tidak mengawasi aktivitas keseharian anaknya, baik itu ketika berada di lingkungan rumah maupun di lingkungan sekolah, serta tidak mengenal dengan siapa saja dan di mana anak-anaknya bergaul ketika berada di luar rumah dan di luar sekolah sehingga para orang tua tidak mengetahui bagaimana perkembangan perilaku anaknya. Pengasuhan mengabaikan

dapat dilihat dari minimnya perhatian orang tua dalam mengawasi pergaulan anak di luar rumah dan dalam memilih teman-temannya di luar rumah. Kedua, dalam pengasuhan orang tua terhadap anak ditemukan tiga faktor pendorong/penyebab seorang anak melakukan tindakan *klitih*, yakni pendidikan, lingkungan, teman sebaya, dan ekonomi. Kesemua faktor ini berdampak terhadap pola asuh orang tua terhadap para remaja pelaku *klitih*.

Rekomendasi: Berdasar hasil temuan penelitian direkomendasikan, perlunya komunikasi intens antara orang tua remaja pelaku *klitih* dengan pihak sekolah, dalam hal ini guru bimbingan konseling. Selain itu, komunikasi intens harus dilakukan dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda dalam pencegahan perilaku *klitih* remaja secara komprehensif agar faktor pendorong/penghambat dapat teratasi.

Salah satu masukkan bagi orang tua pelaku *klitih* di D. I. Yogyakarta dapat mengubah pola asuh permisif menjadi pola asuh demokratis. Karena pada pola asuh demokratis, anak dipastikan dapat mengikuti aturan dari orang tua, memperoleh kesempatan untuk berpendapat, diawasi, dan dihormati. Pola asuh demokratis dinilai lebih baik karena orang tua dapat menerapkan suatu perlakuan dalam membentuk kepribadian anak dalam melewati masa remaja transisi.

Ucapan Terima Kasih

Puji syukur pertama kami ucapkan Kepada Allah Tuhan Yang Esa karena Berkat Rahmat dan Hidayah-Nya maka penelitian ini dapat selesai dilaksanakan. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Rektor Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta beserta jajarannya, pembimbing, Polresta Yogyakarta dan Polsek Umbulharjo Kota Yogyakarta, isteri dan keluarga dan seluruh pihak yang terlibat.

Pustaka Acuan

Adawiyah, R. (2017). Pola asuh orang tua dan implikasinya terhadap pendidikan anak (studi pada masyarakat dayak

- di Kecamatan Halong Kabupaten Balangan). *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 7(1), 33–48. <https://doi.org/10.23916/08413011>
- Anisah, B. (2011). *Teori Belajar Orang Dewasa*. PT Remaja Rosdakarya.
- Badan Pusat Statistik. (2017). *STATISTIK KRIMINAL 2017*. Badan Pusat Statistik, Indonesia.
- Bahri, S. (2014). *Pola asuh orang tua dan komunikasi dalam keluarga*. Rineka Cipta.
- Baumrind, D. (1996). Effect of authoritative parental control on child behavior. *Child Development*, 37(4), 887–907.
- Berkowitz, A. (2003). *Applications of social norms theory to other health and social justice issues. Chapter 16 in H. W. Perkins (Ed.). The social norms approach to preventing school and college age substance abuse: A handbook for educators, counselors, clinicians*. San Francisco: Jossey-Bass.
- Budiarnawan, Kt Antari, & N.N.M Rati, N. . (2014). Hubungan antara konsep diri dan pola asuh orang tua terhadap hasil belajar IPA siswa kelas V SD di Desa Selat. *Jurnal Mimbar PGSD Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan PGSD*, 2(1).
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Pustaka Pelajar.
- Damon, D., & Leaner, R.. (2006). *Handbook fo child psychology. Sixth edition*. Hohn Wiley & Son.
- Djamarah. (2014). *Psikologi Belajar*. Rineka Cipta.
- Edward. (2006). *Total quality management in education*. IRCiSoD.
- Godfrey, J. (2010). *Accounting Theory (7th ed.)*. McGraw Hill.
- Gunarsa, S. D. (2006). *Psikologi Remaja*. BPK, Gunung Mulia.
- Hastari, C. (2015). *Kematangan emosi*. Lindu Pustaka.
- Hurlock. (2012). *Perkembangan anak jilid 2*. Erlangga.
- Ichan. (2016). *Nilai-nilai Budaya Bangsa Indonesia*. Rineka Cipta.
- King, L. A. (2012). *Psikologi Umum*. Salemba Humanika.
- Koeswara. (1998). *Agresi manusia*. Rosda Offset.
- Lestari. (2009). *Hubungan pola asuh orang tua dengan prestasi belajar anak*. Kencana.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis*. Sage Publications Ltd.
- Myers, D. . (2012). *Psikologi sosial*. Salemba Humanika.
- Nasaruddin, E. H. (2016). *Kriminologi*. Pustaka Setia.
- Prasetya, G. T. (2011). *Pola pengasuhan ideal*. Elex Media Computindo.
- Regoli, R., Hewitt, J., & Delisi, M. (2008). *Delinquency in society: Youth crime in the 21st century (7th ed)*. McGraw-Hill, Inc.
- Rosalina, A. F., & Handayani, A. (2018). Perilaku Seksual Remaja ditinjau dari Religiulitas dan Pola Asuh. *Penguatan Keluarga Di Zaman Now*, 15–26.
- Santrock, J.. (2012). *Life-span development (perkembangan masa hidup edisi 13 Jilid 1, Penerjemah: Widyasinta,B)*. Erlangga.
- Shochib, M. (2015). *Pola asuh orang tua dalam membantu anak mengembangkan disiplin diri*. Rineka Cipta.
- Supartini. (2004). *Buku ajar konsep dasar keperawatan anak*. WHO.\

Sutisna, I. (2016). Pengaruh pola asuh orang tua terhadap perilaku agresi anak. *Jurnal Pendidikan Nonformal*, 1(2).

Tridhonanto, A., & Agency, B. (2014). *Mengembangkan pola asuh demokratis*. Gramedia.

Willig, C. (2008). *Introducing qualitative research in psychology*. McGraw Hill.

Ucapan Terimakasih

Dalam Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial (JPKS) Volume 20 Nomor 1 April 2021, review dan proses cetak artikel melibatkan empat mitra bestari, dewan redaktur mengucapkan terimakasih kepada mitra bestari yang namanya tersebut di bawah ini:

1. Prof. Dr. Ir. Husein Avicenna Akil, M.Sc. (Science, Technology and Innovation Policy, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia)
2. Prof. Dr. Phil Janianton Damanik, M.Si. (Pembangunan Sosial, Universitas Gadjah Mada)
3. Prof. Dr. Bambang Shergi Laksmono (Kesejahteraan Sosial, Universitas Indonesia)
4. Prof. Dr. Bagong Suyanto (Sosiologi, Universitas Airlangga)
5. Prof. Dr. Achmad Nurmandi (Kebijakan Publik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta)
6. Drs. Latiful Khuluq, MA, BSW, Ph.D. (Kesejahteraan Sosial, UIN Sunan Kalijaga)
7. Dr. Harmona Daulay, S.Sos, M.Si. (Sosiologi, Universitas Sumatera Utara)
8. Dwi Harsono, S.Sos., MPA, MA, Ph.D. (Evaluasi Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta)

Semoga kerjasama dengan mitra bestari tersebut dapat mengontrol kualitas sajian tulisan di JPKS, lebih membawa manfaat bagi pembaca, masyarakat yang memiliki kepedulian dalam permasalahan sosial pada umumnya dan masalah kesejahteraan sosial pada khususnya.

Dewan Redaktur JPKS